



Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Nomor 4 Tahun 2025
tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2029



Masmirah
Masyarakat Lombok Tengah yang
Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera
dan Harmonis

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2025



Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Nomor 4 Tahun 2025
tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2029



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan bagian dari kebijakan prioritas yang strategis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kehidupan masyarakat daerah yang adil, makmur dan sejahtera serta selaras dengan arah yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa perjalanan pembangunan daerah yang dinamis diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang bersinergi, holistik dan terintegrasi guna memastikan keberlangsungan dan kesinambungan Pembangunan daerah dalam jangka menengah sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi kepala daerah serta penyesuaiannya terhadap perubahan dan dinamika kebijakan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta berkesinambungan dan selaras dengan pembangunan nasional diperlukan pengaturan suatu perencanaan pembangunan untuk jangka menengah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 83 tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Lombok Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lombok Tengah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RPJMD
Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan:
 - a. RKPD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika yang terbagi dalam pengelompokan bab sebagai berikut:
 - a. bab pertama berisi uraian pendahuluan;
 - b. bab kedua berisi uraian gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab ketiga berisi materi mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab keempat berisi materi mengenai program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. bab kelima berisi uraian penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
 - c. hasil RPJMD
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN ALAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pada tahun terakhir masa jabatannya, Bupati menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN ALAIN-LAIN

Pasal 7

Sebelum RPJMD ditetapkan:

1. Penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD periode sebelumnya.
2. RKPD yang telah disusun dan dilaksanakan tetap berlaku sampai berakhirnya periode pelaksanaan RKPD tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 10 Oktober 2025
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
Pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: 31/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

II. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terjadi perubahan mendasar” adalah terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Nomor 4 Tahun 2025

tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 telah selesai disusun.

Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program strategis Kepala Daerah yang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan nasional serta keselarasan dengan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai dokumen induk perencanaan lima tahunan, RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mengarahkan gerak langkah pembangunan menuju masa depan yang lebih baik.

Melalui visi “MASMIRAH” (**M**asyarakat Lombok Tengah yang **M**andiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan **H**armonis), kita berkomitmen membangun Lombok Tengah sebagai “Permata” berharga yang diwujudkan melalui lima misi utama:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai fondasi Generasi Emas yang sehat dan cerdas;
2. Transformasi Pelayanan Publik yang profesional, inklusif, dan berbasis teknologi;
3. Penguatan Ekonomi Daerah yang inklusif melalui transformasi ekonomi hijau, biru, dan kreatif yang berkelanjutan;
4. Pemerataan Infrastruktur untuk menciptakan konektivitas dan keseimbangan antarwilayah; serta
5. Penguatan Nilai Akhlakul Karimah dan budaya luhur sebagai jati diri masyarakat yang harmonis.

Keberhasilan pencapaian visi MASMIRAH ini sangat bergantung pada sinergitas, kerja keras, dan semangat gotong-royong kita bersama. Dokumen ini bukanlah sekadar tumpukan kertas, melainkan sebuah kontrak sosial dan komitmen kita untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh warga Lombok Tengah tanpa terkecuali.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan pemikiran dan tenaganya dalam penyusunan RPJMD ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridai ikhtiar kita dalam membangun Kabupaten Lombok Tengah tercinta menuju kemajuan yang berkelanjutan dan mendunia.

Lombok Tengah, 15 Oktober 2025

Bupati Lombok Tengah

H. Lalu Pathul Bahri



halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum	I-2
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.3.1.	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD (Rantek RPJMD)	I-7
1.3.2.	Integrasi Visi-Misi Politik dan Penetapan RPJMD	I-8
1.3.3.	Penerjemahan RPJMD ke Dokumen Operasional Tahunan	I-8
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-9
1.4.1.	Maksud	I-9
1.4.2.	Tujuan	I-9
1.5.	Sistematika Penulisan	I-10

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1.	Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2.	Potensi Sumber Daya Alam	II-5
2.1.1.3.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-17
2.1.1.4.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-19
2.1.1.5.	Lingkungan Hidup Berkualitas	II-23
2.1.1.6.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-25
2.1.1.7.	Demografi	II-26
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-29
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-29
2.1.2.2.	Kesehatan Untuk Semua	II-35
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-39
2.1.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-43
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-44
2.1.2.6.	Keluarga berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	II-45
2.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-48
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-48
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-49
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-53
2.1.3.4.	Transformasi Digital	II-54
2.1.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-55
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-57
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-60
2.1.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-60
2.1.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II-64
2.1.4.3.	Ketangguhan Berdiplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-65

2.2.	Gambaran Keuangan Daerah.....	II-66
2.2.1.	Realisasi APBD Tahun 2020-2024.....	II-67
2.2.2.	Neraca Daerah.....	II-68
2.2.2.1.	Analisis Likuiditas dan Solvabilitas Neraca Daerah.....	II-69
2.2.3.	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030.....	II-71
2.2.3.1.	Pendapatan Daerah.....	II-71
2.2.3.2.	Belanja Daerah	II-73
2.2.3.3.	Pembiayaan Daerah	II-74
2.3.	Permasalahan dan Isu Strategis	II-76
2.3.1.	Potensi Daerah	II-76
2.3.2.	Permasalahan Teridentifikasi.....	II-77
2.3.3.	Isu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah	II-78
2.3.4.	Pengaruh Kontekstual Global, Nasional, dan Regional	II-78
2.3.5.	Harmonisasi Isu KLHS dan Isu Strategis Daerah	II-81
BAB 3 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
3.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.1.1.	Visi	III-1
3.1.2.	Misi	III-2
3.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-5
3.3.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2025-2029	III-14
3.3.1.	Strategi	III-14
3.3.2.	Arah Kebijakan	III-15
3.3.3.	Pentahapan Pembangunan	III-24
3.3.4.	Lokus Pembangunan.....	III-26
3.3.5.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-32
3.3.5.1.	Prioritas Pembangunan Daerah	III-32
3.3.5.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-34
BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
4.1.	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-82
4.2.1.	Indikator Kinerja Utama.....	IV-82
4.2.2.	Indikator Kinerja Daerah	IV-82
4.2.3.	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP)	IV-111
BAB 5 PENUTUP		
5.1.	Pedoman Transisi.....	V-1
5.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	V-2
5.3.	Penutup.....	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Iklim Bulanan di Kabupaten Lombok Tengah, 2024	II-1
Tabel 2.2	Data Wilayah Administratif Kabupaten Lombok Tengah per Kecamatan.....	II-2
Tabel 2.3	Ringkasan Peluang Strategis Sektor Peternakan.....	II-7
Tabel 2.4	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Lombok Tengah.....	II-17
Tabel 2.5	Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kabupaten Lombok Tengah	II-18
Tabel 2.6	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Lombok Tengah	II-18
Tabel 2.7	Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024 ..	II-20
Tabel 2.8	Indikator Kunci Penyediaan Irigasi Kabupaten Lombok Tengah	II-21
Tabel 2.9	Rekapitulasi Timbulan Sampah Kabupaten Lombok Tengah, 2022-2024	II-24
Tabel 2.10	Distribusi Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kecamatan, 2024 ...	II-26
Tabel 2.11	Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	II-27
Tabel 2.12	Data Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah	II-28
Tabel 2.13	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-30
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-30
Tabel 2.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-34
Tabel 2.16	Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)	II-34
Tabel 2.17	Nilai Indikator Penyusun IZN BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah (2024)	II-34
Tabel 2.18	Tren dan Kinerja dari Setiap Indikator Penanganan Penyakit Menular.....	II-37
Tabel 2.19	Rincian Target, Realisasi, dan Analisis Tren Keterpenuhan SPA RSUD Kabupaten Lombok Tengah (2021-2024).....	II-38
Tabel 2.20	Tren Agregat Cakupan Keterpenuhan SPA Puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024).....	II-38
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-40
Tabel 2.22	Persentase Anak Tidak Bersekolah Lagi (Usia 7-24 Tahun) di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-40
Tabel 2.23	Tabel Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Lombok Tengah.....	II-41
Tabel 2.24	Indikator Urusan Pendidikan Asesmen Nasional Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024	II-41
Tabel 2.25	Data Cakupan dan Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah (2022-2024)	II-43
Tabel 2.26	Indeks Kesejahteraan Sosial Nasional, Nusa Tenggara Barat, dan Lombok Tengah, 2020-2024	II-44
Tabel 2.27	Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Lombok Tengah	II-45
Tabel 2.28	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Menengah dan Tinggi di Kabupaten Lombok Tengah (2024)	II-48

Tabel 2.29	Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Umur	II-48
Tabel 2.30	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-49
Tabel 2.31	Distribusi Ekonomi pada PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lombok Tengah (persen), Tahun 2020 – 2024	II-49
Tabel 2.32	PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Lombok Tengah (Harga Berlaku, Miliar Rupiah, 2020-2024)	II-50
Tabel 2.33	Rasio Kewirausahaan Daerah (RKD) Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)	II-51
Tabel 2.34	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (2020-2024)	II-51
Tabel 2.35	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Lombok Tengah (2021-2024)	II-52
Tabel 2.36	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)	II-52
Tabel 2.37	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Lombok Tengah per Pilar dan Sub-Pilar (2022-2024)	II-54
Tabel 2.38	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2020-2024 (miliar rupiah).....	II-55
Tabel 2.39	Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah, 2022-2023	II-56
Tabel 2.40	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2020-2024)	II-58
Tabel 2.41	Perkembangan Status Desa di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023).....	II-59
Tabel 2.42	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (2020-2024)	II-59
Tabel 2.43	Data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah 2020-2024.....	II-61
Tabel 2.44	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	II-62
Tabel 2.45	Konsolidasi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Berdasarkan Jenis	II-64
Tabel 2.46	Angka Kriminalitas (Crime Rate) di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023)	II-65
Tabel 2.47	Skor Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lombok Tengah (2022-2024)	II-66
Tabel 2.48	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.49	Neraca Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024.....	II-68
Tabel 2.50	Analisis Neraca Keuangan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024).....	II-70
Tabel 2.51	Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026-2030.....	II-75
Tabel 2.52	Pemetaan Isu Strategis Daerah Kabupaten Lombok Tengah	II-82
Tabel 3.1	Visi Pada RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2	Keterkaitan Antar Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.3	Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Misi RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-10
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ..	III-14
Tabel 3.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029	III-15
Tabel 3.6	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029..	III-24
Tabel 3.7	Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Zona	III-28
Tabel 3.8	Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sektor Utama	III-28

Tabel 3.9	Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Tengah dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III-31
Tabel 3.10	Keterkaitan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029 dengan Isu Strategis	III-33
Tabel 3.11	Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi NTB dengan Prioritas Kabupaten Lombok Tengah.....	III-34
Tabel 3.12	Integrasi Program Unggulan Kepala Daerah dengan Program Nomenklatur dan Prioritas Pembangunan Daerah	III-35
Tabel 3.13	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029	III-38
Tabel 3.14	Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.....	III-47
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030	IV-1
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2030	IV-82
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029	IV-83
Tabel 4.4	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJMN, RPJMD Provinsi NTB Dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029	IV-111

halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Lainnya	I-6
Gambar 1.2	Input-Output Dokumen Teknokratik RPJMD	I-7
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Lombok Tengah	II-3
Gambar 2.2	Pertamina Mandalika International Circuit	II-9
Gambar 2.3	Pantai Kuta Mandalika	II-9
Gambar 2.4	Bukit Merese	II-10
Gambar 2.5	Pantai Semeti	II-10
Gambar 2.6	Pantai Bile Sayak, Tunak	II-10
Gambar 2.7	Air Terjun Benang Stokel	II-11
Gambar 2.8	Taman Pemandian Aiqa Bukaq.....	II-11
Gambar 2.9	Air Terjun Gunung Janggut.....	II-11
Gambar 2.10	Air Terjun Benang Kelambu	II-12
Gambar 2.11	Kolam Honeymoon, Tanak Beaq.....	II-12
Gambar 2.12	Desa Wisata Hijau, Desa Bilebante	II-12
Gambar 2.13	Masjid Kuno Rembitan	II-13
Gambar 2.14	Gendang Beleq	II-13
Gambar 2.15	Begawe Jelo Nyesek, Sukarara	II-13
Gambar 2.16	Peresean	II-14
Gambar 2.17	Festival Bau Nyale	II-14
Gambar 2.18	Paragliding, Sky Lancing	II-14
Gambar 2.19	Arena Pacuan Kuda Sasake.....	II-15
Gambar 2.20	Sirkuit Motocross Lantan 459.....	II-15
Gambar 2.21	Car Free Night Praya	II-16
Gambar 2.22	Gerabah di Desa Penujak, Lombok Tengah.....	II-16
Gambar 2.23	Kerajinan Perak Desa Ungga	II-16
Gambar 2.24	Kain Tenun Sukarara	II-16
Gambar 2.25	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, 2020-2024	II-19
Gambar 2.26	Tren Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, 2020-2024	II-20
Gambar 2.27	Tren Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak.....	II-21
Gambar 2.28	Tren Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024.....	II-22
Gambar 2.29	Tren Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-22
Gambar 2.30	Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penyusunnya di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024.....	II-23
Gambar 2.31	Tren Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024	II-24

Gambar 2.32	Tren Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-25
Gambar 2.33	Tren Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-25
Gambar 2.34	Piramida Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	II-27
Gambar 2.35	Tren Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)	II-28
Gambar 2.36	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah Tahun (2020-2024)	II-29
Gambar 2.37	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB (%), 2020-2024.....	II-31
Gambar 2.38	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB (%), 2020-2024.....	II-31
Gambar 2.39	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (%), 2020-2025	II-32
Gambar 2.40	Tren PDRB per Kapita (dalam juta rupiah) Kabupaten Lombok Tengah (ADHB) 2020-2024.....	II-32
Gambar 2.41	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB (%), 2020-2024.....	II-33
Gambar 2.42	Rasio Gini Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-33
Gambar 2.43	Tren Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dan Nasional.....	II-35
Gambar 2.44	Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024.....	II-35
Gambar 2.45	Kasus Kematian Ibu Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-36
Gambar 2.46	Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-36
Gambar 2.47	Kasus Kematian Balita Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-37
Gambar 2.48	Rata-Rata Lama Sekolah (2020-2024) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah	II-39
Gambar 2.49	Harapan Lama Sekolah (2020-2024) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah	II-39
Gambar 2.50	Persentase Penduduk 15+ Berpendidikan Tinggi di Lombok Tengah dan Provinsi NTB (2020-2024)	II-42
Gambar 2.51	Tren Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)	II-43
Gambar 2.52	Tren Indeks Toleransi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2.53	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024	II-46
Gambar 2.54	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024.	II-46
Gambar 2.55	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024	II-47
Gambar 2.56	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024	II-47
Gambar 2.57	Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024.....	II-52
Gambar 2.58	Tren Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-53

Gambar 2.59	Tren Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-54
Gambar 2.60	Tren Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Lombok Tengah dalam Miliar Rupiah, 2020-2024	II-55
Gambar 2.61	Tren Net Ekspor Kabupaten Lombok Tengah dalam Miliar Rupiah	II-56
Gambar 2.62	Tren Indeks Infrastruktur Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024.....	II-57
Gambar 2.63	Tren Rasio Kenektivitas Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024	II-58
Gambar 2.64	Tren Inflasi Gabungan Provinsi NTB, 2020-2024	II-60
Gambar 2.65	Tren Inflasi Mataram y to y (Desember), 2022-2024.....	II-60
Gambar 2.66	Tren Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024	II-61
Gambar 2.67	Tren Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024	II-62
Gambar 2.68	Tren Survei Penilaian Integritas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2024 ...	II-63
Gambar 2.69	Tren Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2024	II-63
Gambar 2.70	Tren Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Lombok Tengah dan Nasional (2022-2024).....	II-65
Gambar 3.1	Visi dan Pilar Pembangunan Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029	III-2
Gambar 3.2	Tahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 ...	III-24
Gambar 3.3	Peta Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Lombok Tengah	III-27

halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR SINGKATAN

ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Berlaku
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATBL	: Anak Tidak Bersekolah Lagi
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BIZAM	: Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPD	: Badan Perwakilan Desa
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DM	: Diabetes Mellitus
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPSP	: Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DTU	: Dana Transfer Umum
EBT	: Energi Baru Terbarukan
EKRAF	: Ekonomi Kreatif
EPPD	: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

FKDM	: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
GDPK	: Grand Design Pembangunan Kependudukan
GRK	: Gas Rumah Kaca
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: Human Immunodeficiency Viru
HLS	: Harapan Lama Sekolah
iBANGGA	: Indeks Pembangunan Keluarga
ID	: Indeks Desa
IDM	: Indeks Desa Membangun
IDSD	: Indeks Daya Saing Daerah
IID	: Indeks Inovasi Daerah
IKA	: Indeks Kualitas Air
IKD	: Identitas Kependudukan Digital
IKD	: Indeks Ketahanan Daerah
IKD	: Indikator Kinerja Daerah
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender
IKK	: Indikator Kinerja Kunci
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKLI	: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKP	: Indeks Ketahanan Pangan
IKPS	: Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
IKS	: Indeks Keluarga Sehat
IKS	: Indeks Kesejahteraan Sosial
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	: Indeks Kualitas Udara
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IMDI	: Indeks Masyarakat Digital Indonesia
IPA	: Indeks Perlindungan Anak
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPHA	: Indeks Pemenuhan Hak Anak
IPK	: Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPKD	: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
IPLM	: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pelayanan Publik

IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda
IPS	: Indeks Pembangunan Statistik
IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
IRB	: Indeks Risiko Bencana
IRH	: Indeks Reformasi Hukum
IZN	: Indeks Zakat Nasional
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KB	: Keluarga Berencana
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KIA	: Kartu Identitas Anak
KKPR	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KP	: Kelautan dan Perikanan
KS	: Kegiatan Strategis
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LKD	: Lembaga Kemasyarakatan Desa
LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LP2B	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
mCPR	: Modern Contraceptive
MEA	: Multilateral Environmental Agreements
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MPP	: Mall Pelayanan Publik
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
NTB	: Nusa Tenggara Barat
ODCB	: Objek Diduga Cagar Budaya
ODGJ	: Orang Degan Gnagguan Jiwa
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PD	: Perangkat Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	: Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
PEMDI	: Pemerintah Digital
PERBUP	: Peraturan Bupati

PERDA	: Peraturan Daerah
PERKADA	: Peraturan Kepala Daerah
PERMENUMKUMHAM	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PHMS	: Penyakit Hewan Menular Strategis
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanamam Modal Dalam Negeri
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPKAS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPLJ	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSKS	: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PSU	: Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
PTK	: Penelitian Tindak Kelas
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
RANPERDA	: Rancangan Peraturan Kepala Daerah
RANTEK	: Rancangan Teknokratik
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RISPAM	: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RKD	: Rasio Kewirausahaan Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RT	: Rumah Tangga
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDa	: Sistem Inovasi Daerah

SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SLF	: Sertifikat Laik Fungsi
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPA	: Sarana, Prasarana dan Alkes
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Survei Penilaian Integritas
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPLPD	: Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
SSK	: Strategi Sanitasi Kabupaten
TFR	: Total Fertility Rate
TKD	: Tes Kemampuan Dasar
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHC	: Universal Health Coverage
UHH	: Usia Harapan Hidup
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UTTP	: Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
UU	: Undang-Undang



halaman ini sengaja dikosongkan





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan amanat konstitusional dan kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, serta penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Tengah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

RPJMD ini disusun berdasarkan gambaran kondisi objektif daerah yang meliputi potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang mendasari kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Proses penyusunannya juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan periode sebelumnya, serta aspirasi masyarakat. Dinamika global, nasional, dan regional, termasuk perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menjadi pertimbangan penting dalam perumusan arah kebijakan pembangunan.

Secara regulasi, penyusunan RPJMD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Hal ini ditegaskan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja yang digunakan pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah telah selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

RPJMD ini juga merupakan penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa bakti 2025-2030, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030. Dokumen ini memiliki nilai strategis sebagai instrumen politik dan teknokratik yang mengikat seluruh komponen pembangunan daerah untuk mencapai tujuan bersama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk mengarahkan alokasi sumber daya, program, dan kegiatan pembangunan agar efisien, efektif, dan tepat sasaran. Proses penyusunannya melibatkan empat pendekatan utama:

- Pendekatan Teknokratik: Disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sebagai upaya dalam melihat objektivitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Lombok Tengah.
- Pendekatan Partisipatif: Menekankan pada pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJMD untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan prioritas masyarakat serta kelompok-kelompok terkait di daerah.

- Pendekatan Politis: Mengakui bahwa dokumen perencanaan pembangunan merupakan produk politik yang harus sejalan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
- Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) dan Bawah-Atas (Bottom-Up): Pendekatan perencanaan yang saling melengkapi. Pendekatan Atas-Bawah melibatkan arahan dan kebijakan pembangunan dari tingkat yang lebih tinggi (nasional dan provinsi), sedangkan pendekatan Bawah-Atas menekankan pada pengumpulan aspirasi dan kebutuhan pembangunan dari tingkat akar rumput atau masyarakat. Kombinasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa RPJMD tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan potensi unik yang ada di setiap tingkatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Kabupaten Lombok Tengah dengan segala potensi yang dimilikinya, memerlukan perencanaan yang matang, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan. RPJMD 2025-2029 ini diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam menggerakkan roda pembangunan, menciptakan sinergi antar sektor, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (Masmirah).

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045. Artinya, dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah pada periode ini merupakan tahapan pondasi awal dari capaian RPJPD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga pada periode ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2025-2029, namun juga harus memastikan seluruh tujuan RPJPD pada periode ini dapat tercapai.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 berikutnya akan menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun oleh perangkat daerah (PD).

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 83 tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24).

Selain itu peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan:

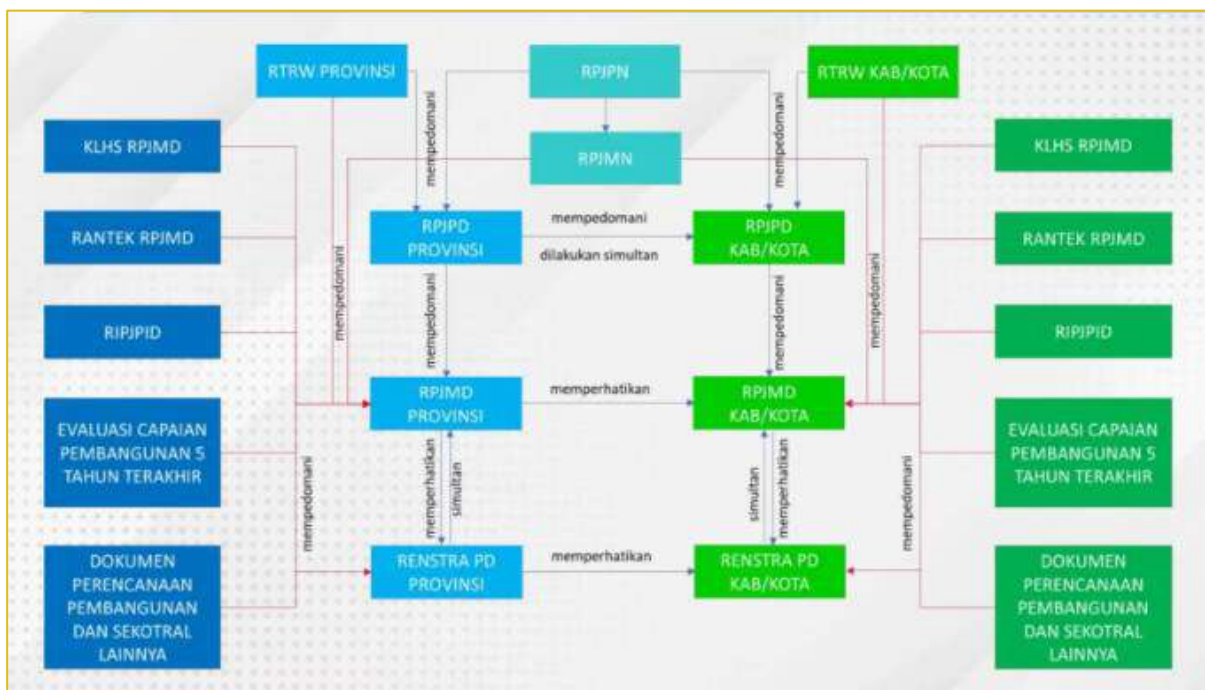
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NTB : (4-121/2024); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 205);
36. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 9 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NTB : (8-283/2024)), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 207);
37. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Nomor 6 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NTB: (7-136/2026)).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan sebuah proses strategis yang terintegrasi dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat hirarkis serta sinergis dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun dokumen sektoral yang mempengaruhi proses pembangunan dalam kabupaten. Keterkaitan ini bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi, keselarasan, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.



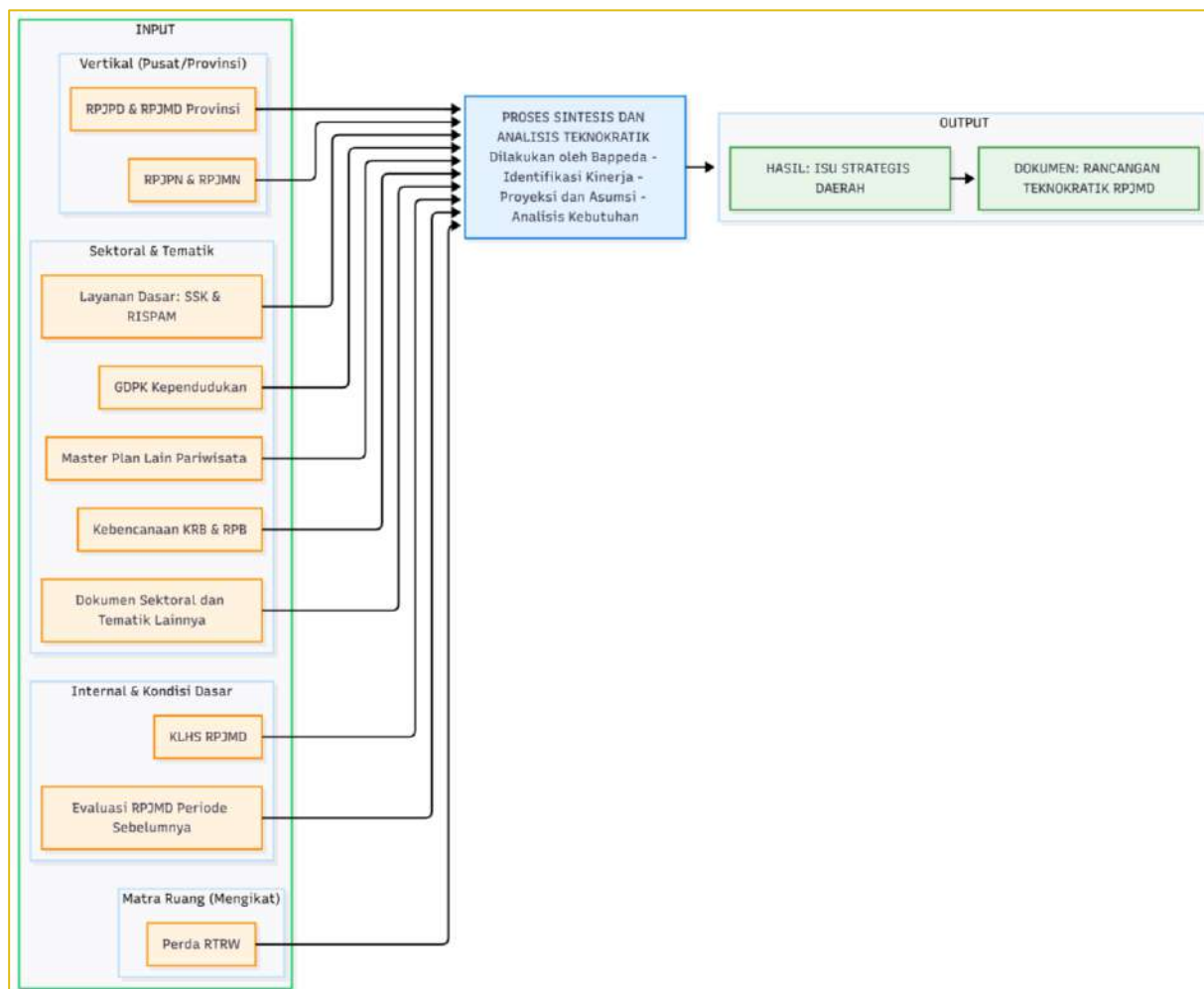
Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya

Siklus perencanaan pembangunan daerah merupakan sistem yang terintegrasi dan hirarkis, di mana setiap dokumen memiliki keterkaitan yang jelas. Gambar di atas mengilustrasikan hierarki dan keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sistem ini dirancang untuk memastikan adanya sinkronisasi, konsistensi, dan integrasi di setiap tingkatan pemerintahan.

1. Hierarki Nasional (Pusat): Dokumen perencanaan nasional, RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), menjadi pedoman utama bagi penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
2. Sinkronisasi Vertikal (Pusat ke Daerah): RPJPN dan RPJMN menjadi acuan yang memedomani penyusunan RPJPD Provinsi. Selain itu, RPJMN juga diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota guna menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan daerah.
3. Sinkronisasi Antar-Level Daerah (Provinsi ke Kab/Kota): Terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan provinsi dan kabupaten/kota. RPJPD Provinsi memedomani penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota. Demikian pula, RPJMD Provinsi memedomani RPJMD Kabupaten/Kota. Proses penyusunan dokumen di kedua tingkatan ini dilakukan secara simultan dan saling memperhatikan untuk menjaga koherensi kebijakan regional.
4. Integrasi Matra Ruang: Aspek keruangan melalui RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) juga terintegrasi secara hierarkis, di mana RTRW Provinsi memedomani RTRW Kabupaten/Kota.

5. Dokumen Input Perencanaan: Penyusunan dokumen inti perencanaan (RPJPD dan RPJMD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didasarkan pada (dipedomani oleh) serangkaian dokumen input teknokratik dan analitis. Dokumen input ini mencakup KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, RIPJID, Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun Terakhir, serta Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.
6. Penerjemahan Operasional (Renstra): Pada akhirnya, RPJMD (baik Provinsi maupun Kab/Kota) menjadi acuan yang diterjemahkan secara lebih operasional ke dalam Renstra Perangkat Daerah (PD) di masing-masing tingkatan pemerintahan.

1.3.1. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD (Rantek RPJMD)



Gambar 1.2 Input-Output Dokumen Teknokratik RPJMD

Proses ini krusial karena dirumuskan sebelum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik, sehingga murni berfokus pada analisis data dan kebutuhan obyektif daerah. Tujuannya adalah mensintesiskan berbagai dokumen input untuk menghasilkan Isu Strategis Daerah. Dokumen input utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Input dari Perencanaan Vertikal (Pusat & Provinsi)

Dokumen ini memastikan adanya sinergi dan keselarasan (sinkronisasi) dari tingkat pusat hingga daerah:

- a. RPJPN dan RPJMN (Nasional): RPJMD Kabupaten wajib selaras dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional.
- b. RPJPD dan RPJMD Provinsi (Provinsi NTB): Arah kebijakan Kabupaten Lombok Tengah harus mengacu, mendukung, dan menerjemahkan visi-misi pembangunan Provinsi NTB ke dalam konteks lokal.

2. Input dari Analisis Internal dan Kondisi Dasar

Ini adalah cermin kondisi riil dan evaluasi kinerja daerah:

- a. Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 5 Tahun Terakhir: Menjadi dasar perumusan kebijakan yang realistis, melalui evaluasi kinerja, keberhasilan, tantangan, dan isu strategis dari periode sebelumnya.
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Memastikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) terintegrasi dalam RPJMD untuk mencegah dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pembangunan terhadap lingkungan hidup.

3. Input Matra Ruang (Mengikat)

Ini adalah input yang bersifat mengikat secara spasial:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten: Ini adalah matra wajib. RPJMD harus mengacu dan grounded pada RTRW untuk memastikan seluruh program dan lokasi proyek pembangunan selaras dengan alokasi dan struktur ruang yang telah ditetapkan (Perda RTRW).

4. Input Sektoral dan Tematik

Ini adalah berbagai rencana induk (master plan) dan dokumen strategis yang memberikan pendalaman pada sektor-sektor prioritas:

- a. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK): Memberikan proyeksi dan analisis kependudukan (subjek dan objek pembangunan) sebagai dasar kebijakan yang responsif terhadap dinamika demografi.
- b. Dokumen Layanan Dasar: Mencakup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) & Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) untuk menjamin pemenuhan target layanan esensial.
- c. Dokumen Kebencanaan & Iklim: Mencakup Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon untuk mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.
- d. Dokumen Sektoral Unggulan: Seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) yang mengarahkan sektor unggulan.
- e. Dokumen Pendukung Sektoral dan Tematik Lainnya: Seperti Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah dan dokumen sektoral lain yang relevan dengan potensi daerah.

1.3.2. Integrasi Visi-Misi Politik dan Penetapan RPJMD

Setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, visi, misi, dan program kerja (janji politik) mereka diintegrasikan dengan Rantek RPJMD. Proses ini melalui tahapan:

- a. Rancangan Awal RPJMD: Hasil integrasi teknokratik-politis.
- b. Musrenbang RPJMD: Pembahasan publik untuk masukan pemangku kepentingan.
- c. Evaluasi Provinsi: Rancangan RPJMD dievaluasi oleh Gubernur.
- d. Penetapan Perda RPJMD: Dokumen final ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD, yang berkekuatan hukum.

1.3.3. Penerjemahan RPJMD ke Dokumen Operasional Tahunan

Setelah ditetapkan, Perda RPJMD bertransformasi dari dokumen politis-teknokratis menjadi panduan operasional utama. Fungsi ini dijalankan melalui dua alur utama: penerjemahan jangka menengah dan siklus perencanaan tahunan.

1. Penerjemahan Jangka Menengah (Renstra PD)

Sebagai langkah awal, RPJMD menjadi pedoman wajib bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Ini adalah momen di mana setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan) "menerjemahkan" sasaran dan strategi besar RPJMD ke dalam program dan kegiatan 5 tahunan yang spesifik sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) mereka.

2. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Ini adalah proses dinamis yang berulang setiap tahun untuk mengoperasionalkan "Buku Induk" RPJMD. Siklus ini memastikan bahwa rencana tahunan selaras dengan anggaran yang tersedia. Alurnya adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD): Ini adalah "dosis tahunan" dari RPJMD. RKPD menetapkan prioritas, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun.
- b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah: Ini adalah "dosis tahunan" dari Renstra PD. Secara krusial, Renja wajib mengacu pada RKPD. Renja menjadi titik temu antara komitmen 5 tahunan SKPD (Renstra) dengan prioritas 1 tahunan daerah (RKPD).
- c. Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS): Inilah jembatan strategis antara perencanaan dan penganggaran. Dokumen ini mengintegrasikan prioritas dari RKPD dan Renja dengan kapasitas fiskal daerah. KUA-PPAS pada dasarnya menjawab pertanyaan: "Dari semua rencana itu, mana yang kita bayar tahun ini dan dengan berapa?"
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Ini adalah dokumen penganggaran final yang mengunci alokasi anggaran tahunan, yang disetujui bersama DPRD sebagai hasil akhir dari kesepakatan KUA-PPAS.

Keterkaitan antar dokumen ini bukanlah sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah mekanisme vital untuk memastikan sinkronisasi dan integrasi. RPJMD berfungsi sebagai jangkar strategis, yang menjamin adanya konsistensi mutlak antara perencanaan jangka menengah, penganggaran tahunan, pelaksanaan di lapangan, hingga pengawasan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 yakni:

- a. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029;
- c. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029;

- d. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 yang terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Lombok Tengah meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, serta hasil evaluasi capaian pembangunan daerah. Bab ini juga menguraikan analisis fiskal daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya, kerangka pendanaan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, serta alternatif sumber pendanaan lainnya. Pada bab ini juga menguraikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum, serta isu strategis daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi pada bab gambaran umum daerah.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya. Pada Bab ini juga menjelaskan tentang Arah Kebijakan dan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat seluruh program perangkat daerah yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, serta menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Geografi

Kabupaten Lombok Tengah adalah bagian integral dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menurut data terbaru terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Lombok Tengah terletak di antara 116°05' hingga 116°24' Bujur Timur dan 8°24' hingga 8°57' Lintang Selatan. Posisi ini menempatkannya di zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan memberinya iklim tropis yang mendukung aktivitas agraris sepanjang tahun.

Letak geografisnya sangat strategis, berada tepat di jantung Pulau Lombok. Posisi sentral ini menjadikannya sebagai simpul penting yang menghubungkan wilayah barat dan timur pulau. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur, mencakup kawasan lereng selatan Gunung Rinjani.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur.
- Sebelah Selatan: Berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, yang membentang dari pesisir barat hingga timur kabupaten.
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat.

Batas selatan yang berupa garis pantai panjang dengan Samudra Indonesia merupakan aset strategis yang paling menonjol. Kawasan pesisir ini tidak hanya kaya akan sumber daya kelautan tetapi juga menjadi lokasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sebuah proyek strategis nasional yang menjadi motor penggerak utama sektor pariwisata dan industri kreatif di tingkat regional dan internasional.

2. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Lombok Tengah memiliki karakteristik iklim Tropis yang dipengaruhi oleh angin monsun, menghasilkan perbedaan musim hujan dan kemarau yang jelas. Analisis data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan gambaran rinci mengenai berbagai elemen iklim sepanjang tahun, termasuk suhu, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, hingga tekanan udara.

Tabel 2.1 Tabel Indikator Iklim Bulanan di Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam/hari)	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembaban Rata-rata (%)	Kecepatan Angin Rata-rata (knot)	Tekanan Udara Rata-rata (mbar)
Januari	134,80	19	5,5	27,77	85,33	1,80	998,81
Februari	199,90	15	5,5	27,52	88,00	1,36	999,79
Maret	209,00	15	5,8	27,47	86,94	1,88	998,93
April	320,90	11	6,6	27,58	88,27	1,60	998,37
Mei	3,20	3	8,7	26,95	86,53	2,07	999,55
Juni	10,50	9	7,5	26,13	84,71	2,17	1000,96
Juli	23,90	26	6,9	25,16	83,10	2,33	1001,48
Agustus	4,70	31	7,6	25,32	82,06	2,42	1002,67
September	17,20	30	7,5	26,66	80,84	2,28	1001,44
Oktober	22,90	31	7,6	27,92	79,13	2,16	1001,44
November	189,20	30	5,5	28,01	83,75	1,37	999,19
Desember	672,50	31	2,1	26,60	89,07	2,03	997,71

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Berdasarkan data di atas, musim hujan dengan intensitas tertinggi terjadi pada akhir dan awal tahun. Puncaknya terlihat pada bulan Desember, yang mencatatkan curah hujan tertinggi yaitu 672,50 mm. Sebaliknya, periode musim kemarau yang paling kering terjadi pada pertengahan tahun, dengan curah hujan terendah tercatat pada bulan Mei (3,20 mm) dan Agustus (4,70 mm).

Suhu udara rata-rata bulanan relatif stabil, berkisar antara 25,16°C hingga 28,01°C, yang mencerminkan iklim tropis yang hangat sepanjang tahun. Sementara itu, penyinaran matahari mencapai durasi terpanjang pada bulan Mei, sejalan dengan rendahnya curah hujan pada periode tersebut.

3. Struktur Pemerintahan dan Wilayah Administrasi

Struktur pemerintahan dan pembagian wilayah administrasi yang jelas dan mutakhir adalah tulang punggung bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, distribusi layanan publik yang merata, dan pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran. Bab ini menyajikan gambaran detail mengenai landasan hukum, pusat pemerintahan, serta komposisi wilayah administratif Kabupaten Lombok Tengah, termasuk perubahan terkini yang terjadi.

Landasan Yuridis dan Pusat Pemerintahan

Pembentukan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Tingkat II yang otonom memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958. Undang-undang ini menjadi dasar legal-formal bagi eksistensi dan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini.

Pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah berlokasi di Kecamatan Praya, yang berstatus sebagai Ibu Kota Kabupaten. Sebagai pusat administrasi, Praya menjadi lokasi kantor-kantor pemerintahan utama, termasuk Kantor Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta instansi vertikal lainnya. Kedudukannya sebagai ibu kota juga menjadikannya sebagai hub utama bagi aktivitas komersial, pendidikan, dan sosial di seluruh kabupaten.

Pembagian Wilayah Administratif

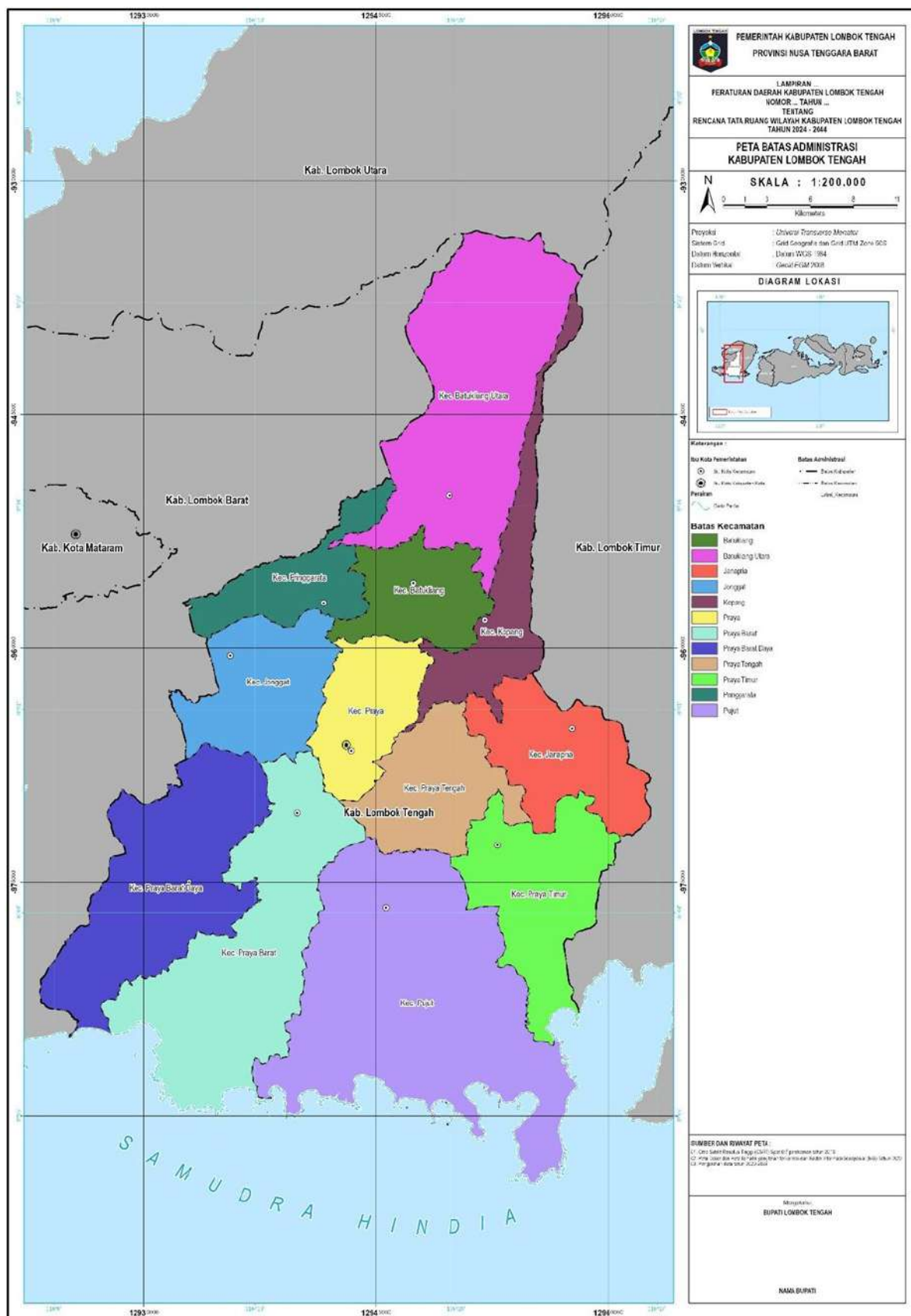
Tabel 2.2 Data Wilayah Administratif Kabupaten Lombok Tengah per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah Lingkungan
1	Praya Barat	Penujak	146,98	10	-	68	-
2	Praya Barat Daya	Darek	131,66	12	-	47	-
3	Pujut	Sengkol	238,12	18	-	119	-
4	Praya Timur	Mujur	86,52	14	-	83	-
5	Janapria	Janapria	67,38	16	-	77	-
6	Kopang	Kopang	54,33	13	-	88	-
7	Praya	Praya	51,08	6	9	37	43
8	Praya Tengah	Batunyala	62,80	10	3	67	14
9	Jonggat	Ubung	67,23	13	-	95	-
10	Pringgarata	Pringgarata	44,52	11	-	75	-
11	Batukliang	Mantang	52,19	11	-	108	-
12	Batukliang Utara	Teratak	165,32	8	-	59	-
	Lombok Tengah		1.168,13	142	12	933	57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Hingga data terbaru, wilayah Kabupaten Lombok Tengah secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kedua belas kecamatan ini memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kecamatan urban di sekitar Praya, kecamatan agraris di utara, hingga kecamatan pesisir yang berorientasi pariwisata di selatan.

Pada level di bawah kecamatan, terjadi perubahan administratif yang signifikan pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pemekaran wilayah desa dengan membentuk 15 desa baru (desa pemekaran). Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput. Dengan adanya penambahan ini, jumlah total unit administrasi setingkat desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah meningkat menjadi 154 unit.



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Lombok Tengah
 Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, 2025

4. Posisi dan Peran Strategis Daerah Berdasarkan Zona Geografis

Secara geografis, Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi tiga zona topografi utama, yang masing-masing memainkan peran krusial dan strategis dalam kontribusi ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur bagi wilayah regional

Zona Utara (Kawasan Konservasi dan Resapan)

Zona ini merupakan Dataran Tinggi di kaki Gunung Rinjani (meliputi Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata).

- **Kontribusi Lingkungan:** Berfungsi sebagai wilayah resapan air utama kabupaten. Curah hujan yang tinggi menjadikannya sumber air bersih dan irigasi.
- **Kontribusi Ekonomi:** Menyediakan aset wisata alam pegunungan yang mendukung pengembangan ekowisata dan berperan sebagai pemasok komoditas pertanian hortikultura.

Zona Tengah (Pusat Administrasi dan Ketahanan Pangan)

Zona ini merupakan Dataran Rendah yang meliputi pusat administrasi (Praya) hingga Praya Barat, Praya Timur, Janapria, dan Jonggat.

- **Kontribusi Ekonomi:** Berperan sebagai Lumbung Pangan daerah. Lahan sawah yang luas dan sistem irigasi yang memadai menghasilkan komoditas vital seperti padi, jagung, dan kedelai, yang menjamin ketahanan pangan kabupaten dan sekitarnya.
- **Kontribusi Infrastruktur:** Menjadi lokasi utama konsentrasi kegiatan pemerintahan dan ekonomi, serta simpul utama jaringan transportasi darat regional.

Zona Selatan (Pintu Gerbang Pariwisata Global)

Zona ini adalah daerah Perbukitan dan Pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia (termasuk Kecamatan Pujut).

- **Kontribusi Ekonomi:** Berfungsi sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Global. Potensi wisata pantai kelas dunia dengan lanskap pasir putih dan gelombang fantastis (ideal untuk olahraga air) menjadikan zona ini sebagai motor penggerak devisa daerah dan regional.
- **Kontribusi Infrastruktur:** Didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata yang memadai (hotel, resor, restoran) dan infrastruktur jalan yang baik, yang meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.

5. Fungsi dan Kontribusi Daerah

Kabupaten Lombok Tengah memberikan berbagai kontribusi signifikan, baik bagi wilayah sekitarnya, provinsi, maupun nasional, terutama melalui sektor pertanian dan pariwisata. Peran strategis ini termanifestasi dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, penyediaan infrastruktur vital, pelestarian lingkungan, hingga penguatan citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Kontribusi Ekonomi

Secara ekonomi, Lombok Tengah berfungsi sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan di Provinsi NTB. Lebih dari itu, kabupaten ini memegang peran krusial sebagai lumbung pangan nasional. Dengan luas lahan baku sawah mencapai 52.469 hektare, Lombok Tengah mampu mencatatkan surplus produksi beras hingga 120 ribu ton. Surplus ini tidak hanya menjamin ketahanan pangan di tingkat provinsi, tetapi juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah lain seperti Bali dan Jawa, yang menegaskan kontribusinya terhadap stabilitas pangan nasional.

Kontribusi Infrastruktur

Kabupaten Lombok Tengah menjadi lokasi bagi beberapa infrastruktur paling strategis di Provinsi NTB yang memiliki fungsi vital di tingkat regional dan nasional. Pertama, Bandar Udara Internasional Lombok (LOP), yang berlokasi di Praya, merupakan gerbang udara utama bagi seluruh Provinsi NTB. Bandara ini melayani rute penerbangan domestik dan internasional, termasuk dari Kuala Lumpur dan Singapura, sehingga menjadi simpul konektivitas esensial yang menopang pergerakan manusia dan barang, serta menjadi pintu masuk utama bagi wisatawan. Kedua,

Sirkuit Internasional Mandalika, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, telah menempatkan Indonesia di peta olahraga otomotif dunia. Keberadaan sirkuit ini, didukung oleh infrastruktur pendamping seperti Jalan Bypass BIL-Mandalika, tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas olahraga kelas dunia tetapi juga sebagai katalisator pembangunan kawasan sekitarnya.

Kontribusi Lingkungan Hidup

Dari perspektif lingkungan, Lombok Tengah memiliki dua fungsi konservasi yang fundamental. Di bagian utara, wilayahnya yang mencakup kaki Gunung Rinjani berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi Taman Nasional Gunung Rinjani, yang juga berstatus sebagai Geopark Global UNESCO. Kawasan hutan di zona ini memiliki fungsi hidrologis yang krusial, yaitu mengatur tata air dan menjaga keseimbangan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke wilayah lain, sehingga membantu mencegah kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Di bagian selatan, pemerintah daerah telah menetapkan

Kawasan Konservasi Perairan Daerah seluas lebih dari 22.000 hektare di Teluk Bumbang dan sekitarnya. Kawasan ini melindungi ekosistem pesisir yang vital, termasuk hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang, yang berkontribusi pada keanekaragaman hayati laut regional.

Kontribusi terhadap Pariwisata Nasional

Kontribusi Lombok Tengah terhadap pariwisata nasional sangat menonjol, terutama melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. KEK Mandalika merupakan salah satu dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi "Bali Baru". Sebagai proyek strategis nasional, pengembangan Mandalika bertujuan mengakselerasi pariwisata NTB dan menjadi destinasi kelas dunia. Penyelenggaraan *mega-event* seperti MotoGP secara langsung memberikan dampak ekonomi masif di tingkat nasional. Sebagai contoh, perhelatan MotoGP 2023 diperkirakan memberikan kontribusi terhadap kenaikan PDB Nasional hingga Rp 4,3 triliun. Selain itu, acara berskala internasional ini secara signifikan meningkatkan citra dan *awareness* pariwisata Indonesia di kancah global, menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, dan berpotensi meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Lombok Tengah memiliki beragam potensi sumber daya alam yang menjadi keunggulan komparatifnya, meliputi sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta ekonomi kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah memainkan peran ganda yang fundamental bagi pembangunan daerah: sebagai penjamin kedaulatan pangan dan sebagai motor penggerak ekonomi melalui agribisnis bernilai tinggi. Wilayah ini diberkahi dengan lahan subur yang luas,

memungkinkannya menjadi lumbung pangan utama. Namun, pada saat yang sama, sektor ini memiliki keunggulan komparatif pada komoditas perkebunan yang sangat menguntungkan. Tantangan strategis utamanya adalah mengelola keseimbangan antara dua pilar ini agar dapat berjalan selaras untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pilar Ketahanan Pangan: Surplus Beras sebagai Aset Strategis

Kekuatan utama pertanian Lombok Tengah terletak pada produksi padi yang luar biasa. Didukung oleh puluhan ribu hektar lahan sawah yang subur, kabupaten ini secara konsisten menghasilkan surplus beras yang masif.

- **Surplus Signifikan:** Pada tahun 2023, Lombok Tengah mencatatkan surplus beras sebesar 358.328 ton. Angka ini tidak hanya menjamin kebutuhan pangan seluruh penduduknya tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan terpenting di Nusa Tenggara Barat.
- **Fondasi yang Kokoh:** Ketersediaan pangan yang terjamin ini merupakan aset strategis yang memberikan stabilitas sosial dan ekonomi. Ini adalah fondasi yang harus dipertahankan di tengah dinamika pembangunan lainnya.
- **Tantangan Diversifikasi:** Meskipun unggul dalam produksi beras, terdapat tantangan dalam pengembangan komoditas pangan sekunder (palawija) seperti jagung dan kedelai. Keterbatasan data produksi yang terperinci menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan diversifikasi pangan yang efektif.

Pilar Ekonomi: Keunggulan Komparatif Tembakau dan Komoditas Perkebunan

Di sisi lain, Lombok Tengah memiliki keunggulan yang jelas dalam budidaya komoditas perkebunan bernilai komersial tinggi, dengan tembakau sebagai primadonanya.

- **Pertumbuhan Eksplosif:** Produksi tembakau jenis Virginia mengalami lonjakan hampir dua kali lipat, dari 11.251 ton pada tahun 2021 menjadi 21.721 ton pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menunjukkan betapa profitabelnya komoditas ini bagi petani dan perekonomian daerah.
- **Komoditas Andalan Lainnya:** Selain tembakau, komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, cengkeh, dan pinang juga menjadi andalan, dengan pengelolaan data yang baik oleh pemerintah daerah, menandakan fokus yang kuat pada subsektor ini.

2. Sektor Peternakan

Di Kabupaten Lombok Tengah, sektor peternakan berdiri di persimpangan jalan, menyimpan potensi besar yang siap untuk diungkap. Pada tingkat paling dasar, tantangan lingkungan dari limbah ternak yang melimpah sesungguhnya adalah sumber daya yang tertidur, menunggu untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Seiring dengan itu, denyut pariwisata yang semakin kencang dari KEK Mandalika telah membuka sebuah etalase pasar yang premium. Hotel dan restoran mewah di kawasan tersebut menciptakan permintaan konstan akan pasokan daging berkualitas tinggi, sebuah ceruk pasar yang ironisnya masih banyak diisi oleh pemain dari luar daerah.

Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan industri, ada pula peluang untuk merangkai kearifan lokal dalam beternak menjadi sebuah pengalaman wisata budaya yang otentik. Dengan menyatukan ketiga elemen ini (mengelola sumber daya limbah, merebut pasar modern, dan mengemas tradisi) sektor peternakan Lombok Tengah memiliki peta jalan yang jelas untuk bertransformasi menjadi pilar ekonomi daerah yang jauh lebih tangguh dan bernilai.

Tabel 2.3 Ringkasan Peluang Strategis Sektor Peternakan

Peluang Strategis	Potensi Produk / Layanan	Target Pasar Utama
Ekonomi Sirkular	Pupuk organik padat dan cair, Biogas	Petani lokal (khususnya perkebunan), Rumah tangga sekitar peternakan
Rantai Pasok Pariwisata	Potongan daging premium (<i>premium cuts</i>), Daging olahan (sisis, bakso, dendeng)	Hotel, Restoran, dan Katering di KEK Mandalika dan sekitarnya
Agrowisata dan Ekonomi Pengalaman	Paket wisata <i>farm stay</i> , Atraksi budaya (pacuan kuda, <i>malean sapi</i>), Kursus kuliner	Wisatawan domestik dan mancanegara, Rombongan pelajar/edukasi

3. Sektor Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, membentang di sepanjang pantai selatannya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Potensi ini, jika dikelola dalam kerangka "Ekonomi Biru" (*Blue Economy*), dapat menjadi pilar pembangunan yang berkelanjutan. Analisis sektor ini menyoroti pertumbuhan produksi yang pesat, namun juga menggarisbawahi urgensi penerapan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab untuk menjamin kelestarian ekosistem dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Potensi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja produksi yang sangat impresif di semua subsektor. Data tahun 2023 mencatat total produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) mencapai 8.749 ton. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai produksi dari perikanan tangkap laut saja meroket dari Rp 78,2 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 146,9 miliar pada tahun 2023, sebuah lonjakan yang luar biasa.

Namun, kekuatan utama sektor ini terletak pada perikanan budidaya (akuakultur). Pada tahun 2023, produksi dari budidaya ikan (air tawar, payau, dan laut) mencapai 14.809 ton. Angka ini bahkan dilampaui oleh produksi rumput laut yang mencapai 34.293 ton. Jika digabungkan, total produksi dari akuakultur mencapai 49.102 ton, atau lebih dari lima kali lipat volume perikanan tangkap. Dominasi akuakultur, khususnya rumput laut, menjadikannya sebagai mesin penggerak ekonomi pesisir yang sangat penting. Pemerintah daerah juga secara aktif mendukung pengembangan budidaya, terutama untuk ikan air tawar, guna meningkatkan produksi dan konsumsi protein lokal. Pertumbuhan yang sangat cepat di semua lini ini menunjukkan peluang ekonomi yang besar, sekaligus menyalakan alarm mengenai potensi tekanan ekologis.

Peningkatan Konsumsi Ikan dan Potensi Hilirisasi

Pertumbuhan produksi diimbangi oleh peningkatan permintaan domestik. Tingkat konsumsi ikan per kapita di masyarakat Lombok Tengah menunjukkan tren positif yang konsisten, meningkat dari 28,69 kg/kapita/tahun pada 2020 menjadi 34,39 kg/kapita/tahun pada 2021, dan mencapai 37,55 kg/kapita/tahun pada 2023. Pasar domestik yang kuat ini memberikan stabilitas bagi para nelayan dan pembudidaya, mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor yang seringkali berfluktuasi.

Di sisi hilir, industri pengolahan juga menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2023, produksi olahan hasil perikanan mencapai 4.713 ton, dan produksi garam rakyat tercatat sebesar 3.680 ton. Meskipun sudah ada, sektor hilirisasi ini masih memiliki ruang yang sangat luas untuk berkembang. Diversifikasi produk menjadi barang bernilai tambah tinggi (seperti ikan kaleng, abon ikan, minyak ikan, tepung ikan untuk pakan ternak, atau produk turunan rumput laut untuk industri kosmetik dan farmasi) dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Pertumbuhan eksplosif di sektor ini, baik dari sisi volume maupun nilai ekonomi, menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai sebuah keharusan mutlak. Pertumbuhan tanpa pengelolaan yang bijak akan mengarah pada siklus "eksploitasi-kerusakan" (*boom and bust*) yang klasik. Oleh karena itu, implementasi strategi Ekonomi Biru bukan lagi sebuah pilihan, melainkan syarat utama untuk kelangsungan sektor ini. Paradigma harus bergeser dari sekadar memaksimalkan ekstraksi jangka pendek menjadi mengoptimalkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

4. Sektor Kehutanan

Sektor kehutanan di Kabupaten Lombok Tengah saat ini dihadapkan pada sebuah paradoks: di satu sisi, kawasan hutan negara yang ada tidak lagi produktif menghasilkan kayu; di sisi lain, kebutuhan kayu di wilayah ini sangat tinggi. Kondisi ini telah menciptakan defisit pasokan yang signifikan. Namun, analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa masalah ini justru membuka peluang besar untuk merevitalisasi sektor kehutanan melalui model yang lebih berkelanjutan dan berbasis masyarakat, yaitu Hutan Rakyat.

Analisis Defisit Kayu dan Kondisi Hutan

Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit pasokan kayu yang sangat serius. Kebutuhan kayu tahunan di wilayah ini diperkirakan mencapai 43.444,5 meter kubik (m³). Sementara itu, produksi kayu dari kawasan hutan negara tercatat nol. Produksi yang ada saat ini hanya berasal dari hutan rakyat yang dikelola masyarakat, yang jumlahnya baru mencapai 1.981 m³ per tahun. Artinya, lebih dari 95% kebutuhan kayu harus dipenuhi dari pasokan luar daerah.

Kondisi ini memiliki beberapa implikasi negatif. Pertama, ketergantungan pada pasokan eksternal menciptakan kebocoran ekonomi (*economic leakage*), di mana uang masyarakat dibelanjakan untuk membeli produk dari luar daerah. Kedua, defisit ini dapat meningkatkan tekanan terhadap sisa-sisa tutupan hutan yang ada untuk pembalakan liar. Fakta bahwa produksi dari hutan negara adalah nol mengindikasikan bahwa kondisi vegetasi di kawasan tersebut kemungkinan besar sudah tidak optimal atau difungsikan sepenuhnya untuk konservasi. Ini adalah sebuah kegagalan pasar dan masalah kebijakan yang memerlukan solusi segera dan terstruktur.

Hutan Rakyat: Solusi Berbasis Masyarakat yang Teruji

Hutan Rakyat (*Community Forest*) merupakan solusi yang terbukti layak dan sangat potensial untuk diimplementasikan di Lombok Tengah. Berdasarkan studi, pengembangan Hutan Rakyat dengan tanaman prioritas seperti Sengon, Mahoni, dan Jati sangat layak secara ekonomi dan didukung oleh ketersediaan lahan yang luas di delapan kecamatan.

Hambatan utama pengembangannya bukanlah masalah teknis atau finansial, melainkan masalah kelembagaan, yaitu lemahnya posisi tawar petani di hadapan pedagang dan kurangnya koordinasi antar kelompok tani. Solusi yang direkomendasikan adalah pembentukan kemitraan berbasis koperasi.

Dengan membingkai program ini sebagai strategi pembangunan perdesaan dan aksi iklim, pemerintah daerah dapat menarik sumber pendanaan alternatif seperti dana perubahan iklim, CSR, dan hibah internasional untuk mendukung implementasinya.

5. Sektor Pariwisata

Kabupaten Lombok Tengah dianugerahi potensi pariwisata yang luar biasa, memadukan pesona alam, kekayaan budaya, dan infrastruktur berstandar internasional. Poros utama penggerak sektor

ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sebuah proyek strategis nasional yang dirancang sebagai etalase pariwisata kelas dunia. Namun, kekuatan sejati pariwisata daerah ini terletak pada kemampuannya untuk mensinergikan kemegahan Mandalika dengan beragam pesona otentik yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten.

KEK Mandalika: Gerbang Menuju Panggung Dunia

Sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP), KEK Mandalika adalah katalisator utama yang membuka mata dunia terhadap Lombok Tengah. Potensinya ditopang oleh tiga pilar utama:

- **Infrastruktur Kelas Dunia:** Keberadaan Sirkuit Internasional Mandalika yang menjadi tuan rumah ajang balap dunia seperti MotoGP, jajaran pantai ikonik (Kuta, Tanjung Aan, Seger), serta rencana pengembangan fasilitas premium seperti *Eco-electric Train* dan *Cable Car*, menciptakan sebuah ekosistem pariwisata modern dan mandiri.
- **Daya Tarik Investasi:** Pemerintah menawarkan insentif fiskal yang sangat kompetitif, termasuk Tax Holiday, yang berhasil memproyeksikan daya tarik investasi hingga Rp 40 triliun dan membuka puluhan ribu lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
- **Magnet Wisatawan:** Secara kuantitatif, Mandalika terbukti menjadi pemicu ledakan kunjungan wisatawan. Kawasan ini menyumbang mayoritas—sekitar 83%—dari total pergerakan wisatawan di kabupaten pada tahun 2024, menegaskan perannya sebagai daya tarik utama.



Gambar 2.2 Pertamina Mandalika International Circuit

Sumber: <https://gomandalika.com/destinasi/pertamina-mandalika-international-circuit/>



Gambar 2.3 Pantai Kuta Mandalika

Sumber: <https://panduanwisata.id/pantai-kuta-lombok/>

Pesona Alam Pesisir dan Perbukitan

Di luar gugusan pantai utama di KEK Mandalika, terdapat zona pesisir dengan karakteristik unik seperti Pantai Mawun dan Pantai Semeti yang menawarkan bentang alam yang lebih alami dan tenang. Daya tarik pesisir ini diperkaya dengan panorama perbukitan ikonik seperti Bukit Merese,

yang menyajikan pemandangan 360 derajat ke arah Samudera Hindia dan menjadi lokasi favorit untuk menikmati matahari terbenam.



Gambar 2.4 Bukit Merese
Sumber: Instagram.com/asppintb



Gambar 2.5 Pantai Semeti
Sumber: <https://gomandalika.com/destinasi/pantai-semeti/>



Gambar 2.6 Pantai Bile Sayak, Tunak
Sumber: <https://gomandalika.com/destinasi/pantai-bile-sayak/>

Pesona Alam Pegunungan dan Air Terjun

Sebagai penyeimbang wisata bahari, kawasan utara Lombok Tengah menawarkan pesona alam pegunungan yang sejuk. Destinasi andalannya adalah gugusan air terjun di kaki Gunung Rinjani, seperti Air Terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu, yang menawarkan suasana hutan tropis yang asri. Keberadaan destinasi ini menciptakan kontras yang menarik bagi wisatawan dan menjadi daya tarik utama untuk ekowisata.



Gambar 2.7 Air Terjun Benang Stokel

Sumber: mendakirinjani.wordpress.com



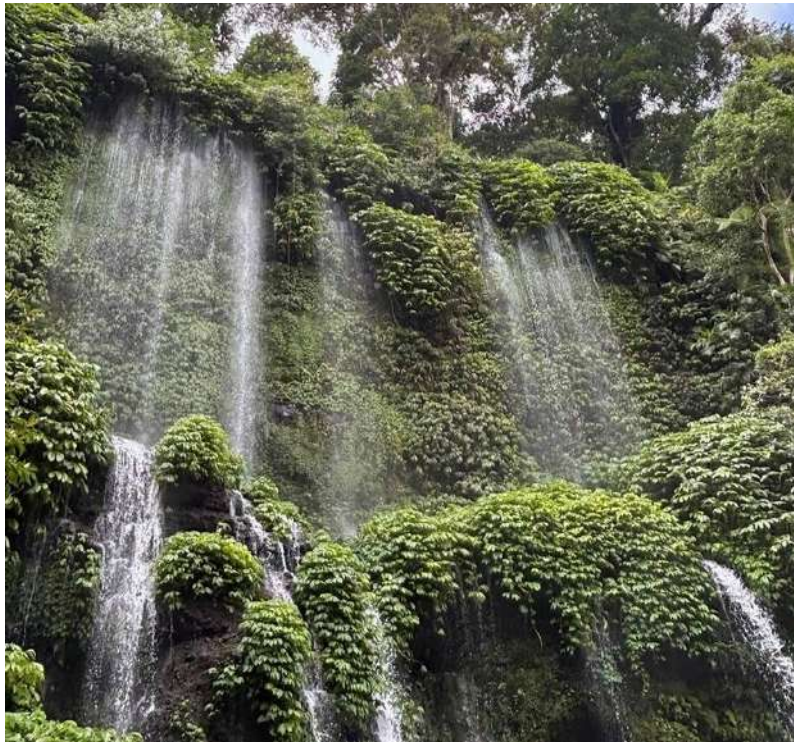
Gambar 2.8 Taman Pemandian Aiq Bukaq

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025



Gambar 2.9 Air Terjun Gunung Janggot

Sumber: Okezone



Gambar 2.10 Air Terjun Benang Kelambu

Sumber: Tangkap Layar Google Maps, 2025

Formasi Alam Unik dan Potensi Agrowisata

Selain itu, terdapat formasi alam unik seperti Gua Bangkang (dikenal juga sebagai Gua Kelelawar), yang menawarkan pengalaman petualangan dan fenomena alam eksotis saat ribuan kelelawar keluar dari gua menjelang senja. Di sisi lain, hamparan perbukitan hijau dan terasering persawahan yang subur di berbagai wilayah pedesaan juga membuka peluang besar untuk pengembangan agrowisata dan wisata pedesaan, yang dapat memberikan pengalaman otentik dan interaksi langsung dengan budaya agraris masyarakat Sasak.



Gambar 2.11 Kolam Honeymoon, Tanak Beaq

Sumber: <https://gomandalika.com/destinasi/kolam-honeymoon-tanak-beaq/>



Gambar 2.12 Desa Wisata Hijau, Desa Bilebante

Sumber: <https://gomandalika.com/destinasi/desa-wisata-hijau-bilebante/>

Potensi Budaya sebagai Aset Pembangunan Pariwisata Daerah

Kekayaan budaya Suku Sasak merupakan aset fundamental dan pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki potensi strategis untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing destinasi. Potensi ini termanifestasi dalam dua bentuk utama: warisan budaya berwujud (*tangible heritage*) dan warisan budaya tak berwujud (*intangible heritage*). Aset berwujud tecermin dalam kehidupan keseharian masyarakat di desa-desa adat seperti Sade dan Ende, yang menampilkan arsitektur vernakular rumah lumbung serta kerajinan tenun songket yang bernilai seni dan ekonomi tinggi.

Sementara itu, aset tak berwujud diekspresikan melalui berbagai ritual, festival, dan atraksi komunal yang telah mengakar. Berbagai atraksi budaya unggulan yang menjadi bagian dari warisan ini antara lain adalah Festival Bau Nyale yang berbasis legenda, seni ketangkasan Peresean yang merepresentasikan nilai-nilai heroisme, pertunjukan musik ritmis Gendang Beleq, serta tradisi Pacuan Kuda. Optimalisasi dan pelestarian seluruh elemen budaya tersebut menjadi arah kebijakan strategis untuk memperkuat identitas, citra destinasi, dan meningkatkan nilai jual pariwisata Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan.



Gambar 2.13 Masjid Kuno Rembitan

Sumber: <https://gomandalika.com/destinasi/masjid-kuno-rembitan/>



Gambar 2.14 Gendang Beleq

Sumber: <https://www.instagram.com/desawisatabonjeruk/>



Gambar 2.15 Begawe Jelo Nyeseq, Sukarara

Sumber: BPPD NTB/MetroNTB.com



Gambar 2.16 Peresean

Sumber: <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/menguji-keberanian-lewat-presean-di-lombok/>



Gambar 2.17 Festival Bau Nyale

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Bau_Nyale

Potensi Sport Tourism

Lombok Tengah juga mulai mengembangkan destinasi untuk pasar khusus. Kehadiran Sirkuit Motocross Lantan, Arena Pacuan Kuda Sasake dan Sky Lancing, Desa Montong Sari menjadi ikon baru bagi pariwisata olahraga (sport tourism). Lokasi tersebut tidak hanya menjadi pelengkap bagi Sirkuit Mandalika tetapi juga membuka peluang untuk menjadi tuan rumah event-event olahraga skala nasional dan internasional, menarik komunitas penggemar yang loyal.



Gambar 2.18 Paragliding, Sky Lancing

Sumber: <https://gomandalika.com/serunya-paragliding-di-sky-lancing-lombok-tengah/>



Gambar 2.19 Arena Pacuan Kuda Sasake

Sumber: www.instagram.com/asehpryanto/



Gambar 2.20 Sirkuit Motocross Lantan 459

Sumber: Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2022

6. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya subsektor kriya (kerajinan), bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen fundamental dari ekosistem ekonomi daerah. Sektor ini merupakan sumber lapangan kerja yang signifikan, penjaga warisan budaya, dan elemen krusial yang memperkuat daya tarik pariwisata. Mendorong pertumbuhan sektor ini adalah strategi inti untuk meningkatkan nilai tambah destinasi dan menciptakan pembangunan yang inklusif.

Sinergi Fundamental dengan Sektor Pariwisata

Hubungan antara ekonomi kreatif dan pariwisata di Lombok Tengah bersifat simbiosis mutualisme yang sangat erat. Dokumen perencanaan dan analisis secara eksplisit menyatakan bahwa produk-produk ekonomi kreatif—mulai dari kriya, kuliner, hingga fesyen—merupakan "kelengkapan" esensial di destinasi wisata. Keberadaan dan keragaman produk kreatif ini disebut memiliki "andil yang sangat kuat" terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan, yang lebih penting, lama tinggal (*length of stay*) wisatawan.

Ini menegaskan sebuah hubungan kausal yang penting: ekonomi kreatif bukanlah produk sampingan dari pariwisata, melainkan salah satu pilar yang turut menciptakan pengalaman pariwisata itu sendiri. Keindahan alam dan fasilitas modern di KEK Mandalika mungkin menjadi daya tarik awal bagi wisatawan untuk datang. Namun, pengalaman berinteraksi dengan budaya lokal, membeli kerajinan tangan yang unik, dan menikmati kuliner khas adalah faktor-faktor yang membuat kunjungan mereka berkesan, mendorong mereka untuk tinggal lebih lama, dan pada akhirnya, membelanjakan lebih banyak uang. Dengan demikian, investasi pada ekonomi kreatif adalah investasi langsung pada daya saing dan profitabilitas sektor pariwisata.



Gambar 2.21 Car Free Night Praya
Sumber: tribunlombok.com/sinto

Analisis Subsektor Unggulan: Kriya (Kerajinan)

Di antara berbagai subsektor ekonomi kreatif, kriya menonjol sebagai yang paling berdampak. Subsektor ini merupakan penyerap tenaga kerja yang masif, melibatkan hingga 26.786 pelaku atau pengrajin yang tersebar di 288 unit usaha. Skala ketenagakerjaan ini menjadikannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi perdesaan di luar sektor pertanian.



Gambar 2.22 Gerabah di Desa Penujak, Lombok Tengah.
Sumber: [Instagram.com/yadiq_yadot](https://www.instagram.com/yadiq_yadot), 2023



Gambar 2.23 Kerajinan Perak Desa Ungga
Sumber: Inside Lombok/Ida Rosanti, 2021



Gambar 2.24 Kain Tenun Sukarara
Sumber: [Liputan6.com/Gempur M Surya](http://Liputan6.com/Gempur%20M%20Surya)

Keunggulan kompetitif utama produk kriya Lombok Tengah terletak pada keunikan dan otentisitasnya yang bersumber dari proses 100% buatan tangan (*handmade*), yang diwujudkan melalui produk-produk ikonik seperti Kain Tenun Sukarara, Kerajinan Perak di Praya Barat Daya, Anyaman Ketak di Praya Timur, dan Gerabah Penujak yang legendaris. Namun, keberhasilan ini kini dihadapkan pada "paradoks otentisitas-komersialisasi" yang krusial. Ledakan permintaan pasar yang dimotori oleh KEK Mandalika menciptakan tekanan besar pada para pengrajin untuk mempercepat produksi dan menekan biaya. Jika tidak dikelola secara bijak, tekanan ini berisiko tinggi mendorong degradasi kualitas, penyederhanaan motif-motif tradisional yang rumit, dan penggunaan mesin, yang pada akhirnya dapat menghilangkan otentisitas yang justru menjadi nilai jual fundamental dan jiwa dari produk kriya tersebut.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Skenario Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Tabel 2.4 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Lombok Tengah

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah (Ha)
Batukliang	0	73.74	14.77	947.44	56.42	1092.38
Batukliang Utara	0	120.06	351.03	249.93	352.88	1074.17
Janapria	0	77.47	30.66	798.87	117.09	1024.09
Jonggat	0	187.35	569.03	450.16	266	1472.55
Kopang	0	116.21	60.21	875.19	42.08	1094.42
Praya	0	578.57	88.16	618.66	300.68	1586.08
Praya Barat	0	89.96	338.56	286.85	515.62	1231.01
Praya Barat Daya	0	35.01	147.71	505.06	218.85	907.17
Praya Tengah	0	91.76	30.69	439.91	489.09	1052.25
Praya Timur	0	171.83	48.42	170.18	454.23	844.66
Pringgarata	0	48.92	488.01	187.08	312.92	1036.94
Pujut	23.55	2.04	1332.72	303.43	723.65	2385.75
Total	23.55	1593.30	3500.26	5833.31	3851.07	14801.47
Persentase	0.16	10.76	23.65	39.41	26.02	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Kategori Tinggi (5.833 Ha) dan Sangat Tinggi (3.851 Ha) secara kolektif mencakup lebih dari 65% total area, mengkonfirmasi potensi agraris wilayah tersebut.

Terdapat variasi yang signifikan antar kecamatan. Luas lahan per kecamatan berkisar dari yang terkecil 844 Ha (Praya Timur) hingga yang terbesar 2.385 Ha (Pujut).

Lahan kategori Rendah cukup signifikan (1.593 Ha), Kecamatan Praya sebagai kontributor utamanya. Kategori Sangat Rendah hampir dapat diabaikan (23,55 Ha) dan hanya ada di Kecamatan Pujut.

Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan ke dalam peran agraris yang sangat beragam. Di satu sisi, Batukliang, Kopang, dan Janapria terdiagnosis sebagai spesialis lahan unggul dengan dominasi lahan berkualitas "Tinggi", sementara Praya Timur, Praya Tengah, dan Praya Barat menonjol sebagai kawasan strategis berkat proporsi lahan "Sangat Tinggi" yang signifikan, menjadikannya ideal untuk pertanian bernilai premium. Sebagai kontras, Kecamatan Praya menghadapi tantangan kualitas lahan terbesar dengan proporsi kategori "Rendah" yang paling signifikan, yang mengindikasikan perlunya intervensi pada kesuburan tanah atau drainase. Di antara kedua kutub ini, Pujut dan Pringgarata berfungsi sebagai pusat lahan kategori "Sedang" yang luas, merepresentasikan potensi solid yang dapat dioptimalkan lebih lanjut melalui penerapan teknologi pertanian yang tepat.

2. Skenario Jasa Ekosistem Penyedia Air

Tabel 2.5 Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kabupaten Lombok Tengah

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah (Ha)
Batukliang		98.75	993.62			1092.38
Batukliang Utara		409.12	665.05			1074.17
Janapria		144.06	879.06		0.97	1024.09
Jonggat		1237.18	235.24		0.13	1472.55
Kopang		203.44	890.98			1094.42
Praya		754.00	831.72		0.36	1586.08
Praya Barat	165.12	623.86	439.52	0.32	2.19	1231.01
Praya Barat Daya	38.29	582.13	284.48		2.28	907.17
Praya Tengah		448.02	603.27		0.97	1052.25
Praya Timur	01.21	631.49	211.96			844.66
Pringgarata		449.73	587.21			1036.94
Pujut	752.95	901.32	731.01	00.39		2385.75
Total	957.57	6483.09	7353.21	0.70		14801.47
Persentase	6.47	43.80	49.68	0.005		100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Mayoritas lahan berada pada kategori Sedang (7.353 Ha, 49.7%) dan Rendah (6.483 Ha, 43.8%). Jika digabungkan, kedua kategori ini mencakup 93.5% dari total area.

Analisis jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan polarisasi yang jelas antara wilayah dengan kualitas air terbaik dan zona kritis yang menghadapi tantangan serius. Di satu sisi, Kecamatan Batukliang, bersama Janapria dan Kopang, dapat didiagnosis sebagai area dengan jasa ekosistem air paling unggul berkat dominasi lahan kategori "Sedang". Sebaliknya, Pujut menjadi zona peringatan paling kritis dengan hampir sepertiga wilayahnya berada dalam kategori "Sangat Rendah", menandakan masalah ekologis yang mendalam, sementara Jonggat menonjol sebagai wilayah dengan masalah kualitas air "Rendah" yang paling luas secara proporsional. Di antara keduanya, kecamatan seperti Praya Barat Daya, Praya Timur, dan Praya Barat juga menghadapi tantangan signifikan dengan mayoritas wilayahnya berada dalam kategori "Rendah".

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Tabel 2.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Lombok Tengah

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah (Ha)
Batukliang		98.75	993.62			1092.38
Batukliang Utara		409.12	665.05			1074.17
Janapria		144.06	879.06		0.97	1024.09
Jonggat		1237.18	235.24		0.13	1472.55
Kopang		203.44	890.98			1094.42
Praya		754.00	831.72		0.36	1586.08
Praya Barat	165.12	623.86	439.52	0.32	2.19	1231.01
Praya Barat Daya	38.29	582.13	284.48		2.28	907.17
Praya Tengah		448.02	603.27		0.97	1052.25
Praya Timur	1.21	631.49	211.96			844.66
Pringgarata		449.73	587.21			1036.94
Pujut	752.95	901.32	731.01	00.39		2385.75
Total	957.57	6483.09	7353.21	0.70		14801.47
Persentase	6.47	43.80	49.68	0.005		100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

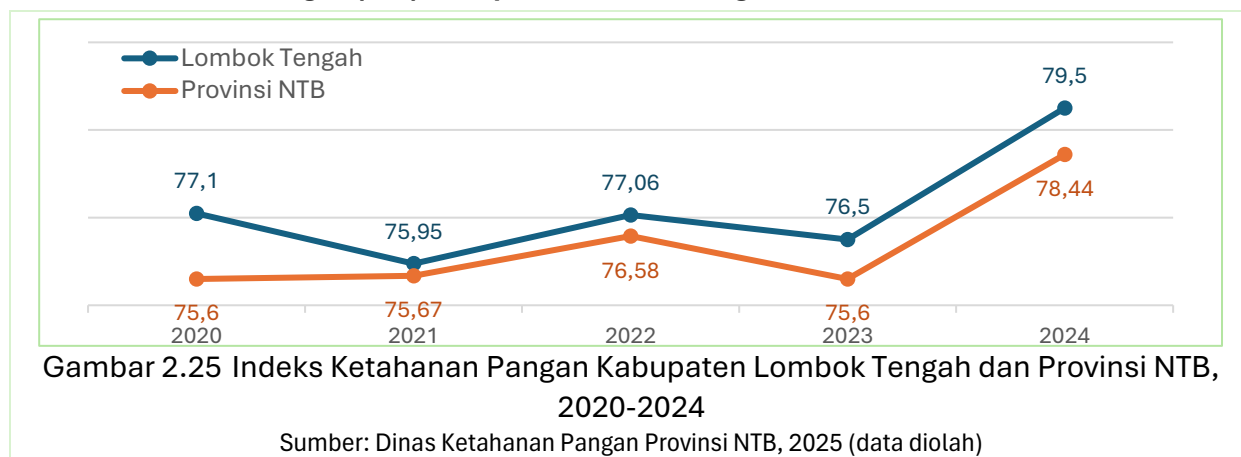
Kategori Sedang secara signifikan mendominasi lanskap dengan cakupan 9.111 Ha (61.6%). Ini menunjukkan bahwa secara umum, kapasitas pengaturan iklim di Kabupaten Lombok Tengah berada pada level moderat.

Berdasarkan analisis jasa ekosistem, wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dipetakan ke dalam tiga kategori fungsional yang kontras, di mana Kecamatan Pringgarata, Pujut, dan Batukliang Utara berperan sebagai benteng iklim utama dengan kapasitas pengaturan tertinggi. Di sisi berlawanan, Kecamatan Praya dan Praya Timur menjadi zona paling rentan akibat dominasi lahan berkemampuan rendah hingga sangat rendah, yang mengindikasikan tekanan alih fungsi lahan yang masif. Di antara kedua ekstrem tersebut, wilayah seperti Janapria, Kopang, dan Batukliang memainkan peran krusial sebagai stabilisator moderat atau zona penyangga yang menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan tiga pilar fundamental yang menopang pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Ketersediaan dan akses yang memadai terhadap sumber daya ini tidak hanya menjadi hak dasar bagi setiap warga, tetapi juga prasyarat mutlak untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi kerangka acuan utama. Perencanaan dengan acuan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya esensial.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lombok Tengah



IKP Lombok Tengah menunjukkan tren fluktuatif namun secara keseluruhan bersifat progresif (meningkat dari 77.10 di 2020 menjadi 79.50 di 2024).

Angka tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 79.50.

Terjadi pada tahun 2021 sebesar -1.15 poin (mencapai titik terendah 75.95).

Terjadi pada tahun 2024 dengan kenaikan drastis +3.00 poin, menjadikannya peningkatan tahunan terbesar.

IKP Lombok Tengah secara konsisten selalu berada di atas rata-rata Provinsi NTB (2020-2024).

Puncak kinerja di tingkat Provinsi NTB juga terjadi pada 2024, namun peningkatan absolut Lombok Tengah lebih besar.

Analisis Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan sebuah sistem yang kuat namun rentan terhadap guncangan jangka pendek, sebagaimana tercermin dari fluktuasi tajamnya. Meskipun demikian, statusnya sebagai lumbung pangan utama di NTB secara konsisten ditegaskan oleh skor IKP yang selalu melampaui rata-rata provinsi, menandakan fondasi ketahanan pangan yang kokoh. Lompatan drastis pada tahun 2024 menjadi sinyal kuat keberhasilan intervensi kebijakan yang efektif pada periode sebelumnya. Lebih jauh, kemampuan Lombok Tengah untuk mencapai puncak kinerja bersamaan dengan provinsi, bahkan dengan kenaikan absolut yang lebih tinggi, mengindikasikan kapabilitas daerah dalam memanfaatkan momentum positif makro secara lebih optimal untuk memperkuat ketahanan pangannya.

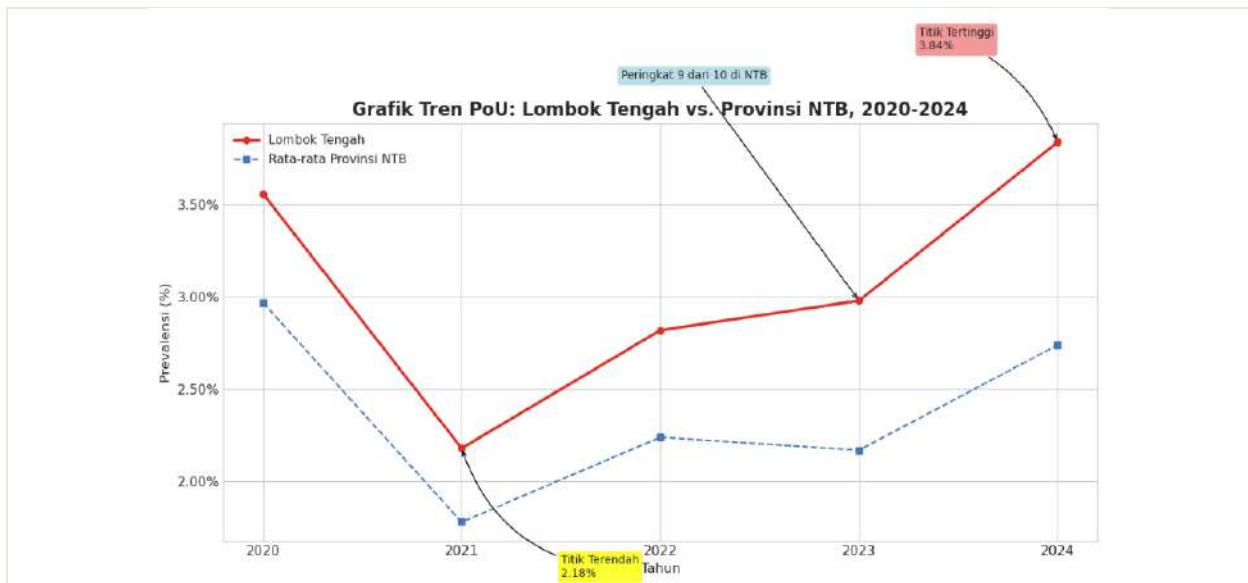
Tabel 2.7 Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Nama Kecamatan	IKP 2023	IKP 2024	Perubahan (Poin)	Pertumbuhan (%)
Pringgarata	63.41	77.98	+14.57	+22.98%
Batukliang Utara	63.17	78.71	+15.54	+24.60%
Praya Barat Daya	59.87	74.66	+14.79	+24.70%
Janapria	67.07	74.99	+7.92	+11.81%
Batukliang	73.8	82.46	+8.66	+11.73%
Praya Tengah	73.71	79.89	+6.18	+8.38%
Kopang	75.68	80.63	+4.95	+6.54%
Praya Barat	76	81.27	+5.27	+6.93%
Praya Timur	72.16	76.89	+4.73	+6.55%
Praya	79.62	84.03	+4.41	+5.54%
Jonggat	71.33	73.54	+2.21	+3.10%
Pujut	75.92	76.03	+0.11	+0.14%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data, seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari tahun 2023 ke 2024, namun dengan tingkat pertumbuhan yang sangat bervariasi. Terdapat lompatan kinerja yang signifikan di Kecamatan Batukliang Utara, Pringgarata, dan Praya Barat Daya yang tumbuh di atas 22%, menunjukkan adanya intervensi yang sangat berhasil. Di sisi lain, Kecamatan Pujut dan Jonggat menunjukkan pertumbuhan yang paling lambat dan hampir stagnan (masing-masing hanya 0,14% dan 3,10%), mengindikasikan adanya tantangan atau kendala yang perlu segera diidentifikasi dan ditangani untuk mengejar ketertinggalan dari kecamatan lainnya.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)



Gambar 2.26 Tren Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB, 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan NTB, 2025

Garis Merah (Lombok Tengah): Menunjukkan dengan jelas pola "U", di mana terjadi perbaikan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2021, namun kemudian tren berbalik arah dan terus memburuk hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2024.
 Garis Biru (Rata-rata NTB): Menunjukkan bahwa setelah tahun 2021, tren PoU Provinsi NTB bergerak lebih stabil dan cenderung membaik, menciptakan divergensi atau perbedaan arah yang semakin jelas dengan tren Lombok Tengah.

Kabupaten Lombok Tengah menghadapi paradoks ketahanan pangan yang tajam: di satu sisi, statusnya sebagai lumbung pangan surplus diperkuat oleh Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang terus membaik, namun di sisi lain, kondisi kelompok paling rentan justru memburuk, terbukti dari meningkatnya angka Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU) secara konsisten. Kontradiksi ini

berakar pada tantangan fundamental, yaitu masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif untuk urbanisasi dan pariwisata (yang ironisnya membuat pusat pemerintahan menjadi wilayah paling rawan) serta kondisi infrastruktur irigasi yang kritis sehingga menghambat produktivitas. Akibatnya, keberhasilan makro dalam produksi pangan gagal menjamin kecukupan pangan yang merata bagi seluruh warga, menciptakan kesenjangan antara surplus di tingkat kabupaten dan kerentanan di tingkat rumah tangga.

Penyediaan Sumber Daya Air

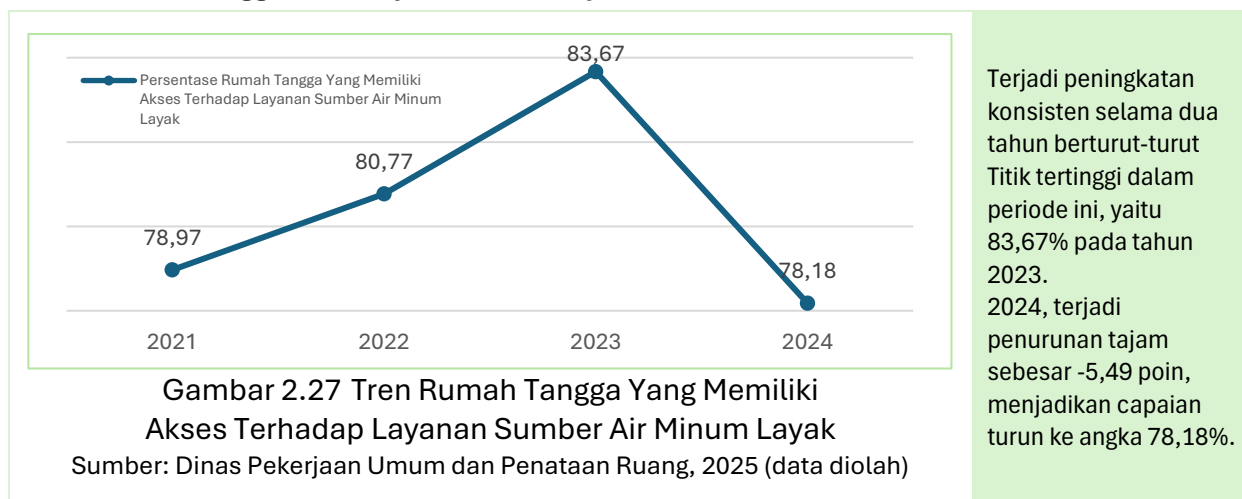
Tabel 2.8 Indikator Kunci Penyediaan Irigasi Kabupaten Lombok Tengah

Indikator Kunci (Tahun 2024)	Data
Cakupan Lahan Tanam (vs. Standar Minimum)	216.67%
Jaringan Irigasi Primer (Kondisi Baik)	40.56%
Jaringan Irigasi Sekunder (Kondisi Baik)	48.04%
Realisasi Layanan Irigasi (Target 2024)	69.19%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025 (data diolah)

Pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk mengatasi defisit irigasi. Target layanan irigasi pada tahun 2024 berhasil tercapai, dan program percepatan seperti pompanisasi dan irigasi perpompaan telah diluncurkan untuk memperluas areal tanam. Upaya ini menjadi langkah penting untuk mengamankan kapasitas produksi di tengah tekanan pembangunan yang terus meningkat.

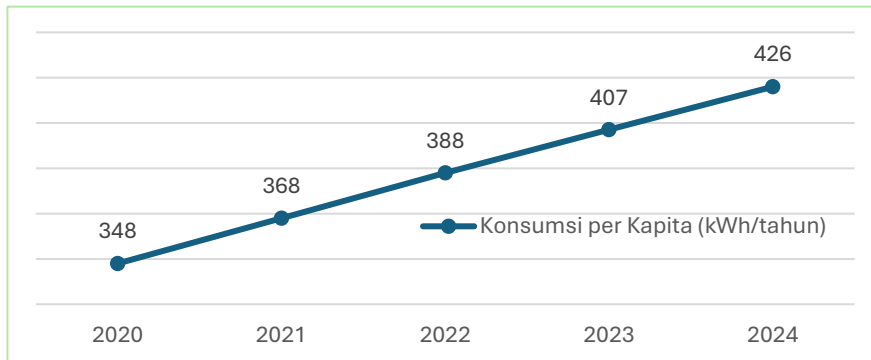
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak



Tren akses air minum menunjukkan dinamika yang kontradiktif, diawali dengan periode kemajuan signifikan antara tahun 2021-2023 berkat keberhasilan program pemerintah dan investasi infrastruktur. Namun, kemajuan ini berbalik menjadi kemunduran drastis pada tahun 2024, yang penurunannya dihipotesiskan bersumber dari faktor krusial seperti perubahan metodologi pendataan yang lebih ketat, dampak lingkungan ekstrem seperti kekeringan hebat yang mengeringkan sumber air, atau gangguan teknis operasional berskala besar. Dengan demikian, sementara peningkatan awal merupakan hasil dari intervensi terencana, kemunduran yang tajam pada akhir periode menyoroti kerentanan sistem terhadap perubahan data, guncangan iklim, dan kegagalan operasional.

Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan standar hidup masyarakat di suatu wilayah. Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ekspansi sektor ekonomi yang semakin bergantung pada pasokan listrik yang stabil.



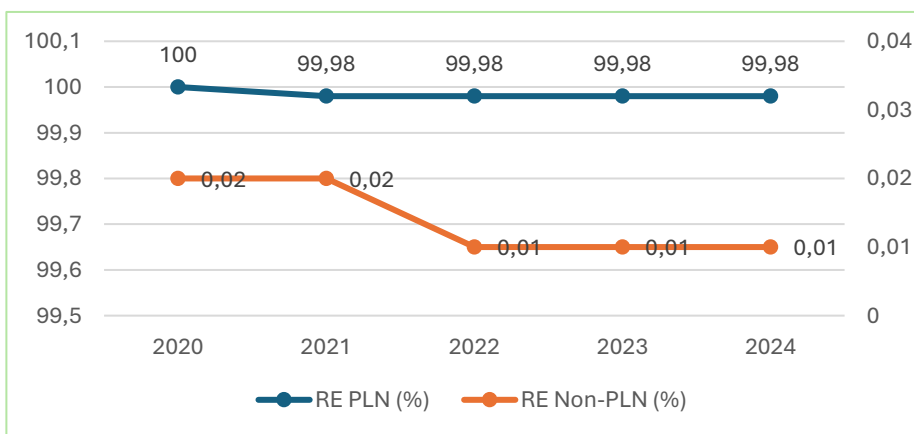
Gambar 2.28 Tren Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Terjadi kenaikan yang konsisten dan stabil dalam konsumsi listrik per kapita setiap tahun, dari 2020 hingga 2024. Tidak ada penurunan yang tercatat dalam periode lima tahun ini. Rata-rata peningkatan tahunan adalah sekitar 19–20 kWh per kapita.

Kenaikan stabil dalam konsumsi listrik per kapita merupakan indikator kunci pembangunan sosial dan ekonomi yang didorong oleh kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi pendorong fundamental yang memungkinkan rumah tangga memiliki lebih banyak perangkat elektronik, di mana penggunaannya semakin intensif akibat pergeseran gaya hidup menuju urbanisasi dan digitalisasi. Tren ini diperkuat secara signifikan oleh keberhasilan program elektrifikasi yang menambah konsumen baru serta pertumbuhan di sektor industri dan komersial yang mendongkrak total konsumsi agregat. Pada saat yang sama, adopsi teknologi baru berbasis listrik, seperti kendaraan listrik, mulai memberikan kontribusi, menegaskan bahwa peningkatan permintaan energi ini secara langsung mencerminkan dinamika positif aktivitas ekonomi dan kesejahteraan di Lombok Tengah.

Rasio Elektrifikasi dan Infrastruktur Energi



Gambar 2.29 Tren Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2025 (data diolah)

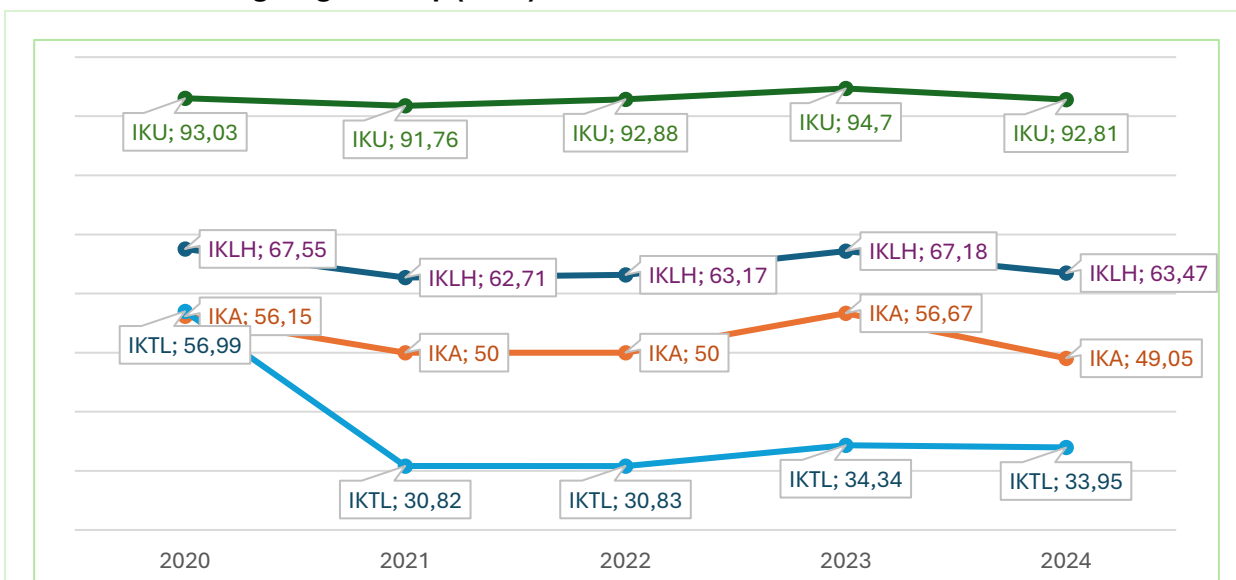
Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai kondisi akses listrik universal atau saturasi. Rasio elektrifikasi secara konsisten berada di angka 100% atau sangat mendekati (99,99%) selama lima tahun terakhir. PLN penyedia listrik dominan. Peran penyedia non-PLN sangat kecil dan cenderung menurun.

Kabupaten Lombok Tengah secara esensial telah menuntaskan masalah akses dasar listrik, sebuah keberhasilan yang ditopang oleh dominasi mutlak jaringan PLN (mencakup 99,98%) yang dianggap sebagai solusi paling andal dan ekonomis, bahkan mendorong pengguna *off-grid* untuk beralih ke jaringan utama. Dengan tercapainya elektrifikasi massal, fokus program kini telah bergeser pada tantangan "The Last Mile", yaitu upaya kompleks dan berbiaya sangat tinggi untuk menjangkau 0,01% rumah tangga tersisa yang berada di lokasi sangat terpencil. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan lagi soal perluasan akses, melainkan efisiensi biaya untuk menangani kasus-kasus sulit tersebut dan peningkatan kualitas serta konsumsi listrik bagi mayoritas populasi yang sudah terhubung.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan prasyarat mutlak bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang tercemar dapat berdampak langsung pada kesehatan publik, mengurangi produktivitas kerja, dan menghambat potensi ekonomi daerah. Sebaliknya, lingkungan yang terjaga dengan baik akan mendukung ekosistem yang sehat, menyediakan sumber daya alam yang lestari, dan menciptakan daya tarik bagi investasi serta pariwisata berkelanjutan. Pentingnya lingkungan hidup berkualitas ini juga diamanatkan dalam arahan kebijakan pemerintah daerah, yang menekankan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana digariskan dalam dokumen perencanaan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Gambar 2.30 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penyusunnya di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

- IKLH (Indeks Keseluruhan): Nilai kualitas lingkungan hidup secara umum sangat fluktuatif dan tidak stabil, dengan pola naik-turun yang tajam tanpa tren perbaikan yang jelas.
- IKA (Kualitas Air): Menjadi masalah paling kritis. Kualitas air sangat volatil (tidak menentu) dan mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir pada tahun 2024.
- IKU (Kualitas Udara): Satu-satunya indikator positif. Kualitas udara secara konsisten stabil dan berada di level sangat baik (skor selalu di atas 91).
- IKTL (Kualitas Tutupan Lahan): Mengalami penurunan drastis (kolaps) setelah tahun 2020 dan tidak pernah pulih, nilainya stagnan di level yang sangat rendah.

Pembangunan pesat di Kabupaten Lombok Tengah telah menciptakan *trade-off* ekologis yang sangat berat, di mana kemajuan infrastruktur fisik dibayar mahal dengan pengorbanan kualitas lahan dan air. Kolapsnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) didiagnosis sebagai dampak permanen dari alih fungsi lahan skala besar untuk pembangunan KEK Mandalika, yang secara masif mengubah area hijau menjadi lahan terbangun yang tidak dapat dipulihkan. Sementara itu, Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi korban dan menunjukkan volatilitas ekstrem, primernya akibat peningkatan erosi dan sedimentasi dari aktivitas konstruksi serta lonjakan pencemaran limbah domestik dari hotel dan permukiman baru yang tidak diimbangi oleh IPAL yang memadai. Meskipun Indeks Kualitas Udara (IKU) masih relatif baik berkat sirkulasi angin laut dan minimnya industri berat, kondisi kritis pada dua pilar lingkungan utama (lahan dan air) menjadi alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut.

Pengelolaan Sampah

Tabel 2.9 Rekapitulasi Timbulan Sampah Kabupaten Lombok Tengah, 2022-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (D)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (E)	Recycling Rate (D+E)/A
2022	153,263,50	23,468,78	22,630,00	46,098,78	23,465,13	2,555,00	16,98
2023	155,881,57	31,756,95	27,557,50	59,314,45	31,743,45	2,007,50	21,65
2024	159,368,34	29,888,11	27,557,50	57,445,61	29,874,60	2,737,50	20,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

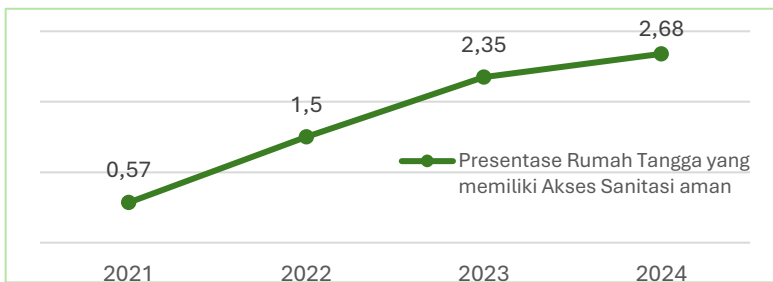
Volume total sampah yang dihasilkan (Timbulan Sampah) mengalami kenaikan tahunan konsisten dari 153.263 ton pada 2022 menjadi 159.368 ton pada 2024.

Penanganan Sampah (sampah yang diangkut ke TPA/TPST) terlihat stagnan di angka ~27.557 ton pada tahun 2023 dan 2024, mengindikasikan kemungkinan adanya batas kapasitas maksimal dari sistem yang ada.

Recycling Rate mengalami penurunan dari puncaknya di 21,65% pada tahun 2023 menjadi 20,46% pada tahun 2024, sejalan dengan menurunnya angka Pengurangan Sampah dari 31.756 ton (2023) menjadi 29.888 ton (2024).

Peningkatan volume sampah yang konsisten di Lombok Tengah, didorong oleh pertumbuhan ekonomi, populasi, dan sektor pariwisata super prioritas, kini menghadapi tantangan serius akibat menurunnya kinerja pengelolaan pada tahun 2024. Penurunan ini dihipotesiskan terjadi karena kombinasi tiga faktor krusial: berakhirnya program-program temporer yang sempat mendongkrak kinerja pada tahun 2023, melemahnya aktivitas pengurangan sampah di tingkat sumber, dan yang paling mendesak, infrastruktur persampahan seperti TPA dan armada angkut yang telah mencapai batas kapasitas maksimalnya. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran kebijakan yang fundamental dalam RPJMD mendatang, dari sekadar penanganan hilir menjadi pengendalian proaktif di hulu, yang harus didukung oleh investasi mendesak untuk merevitalisasi infrastruktur kritis dan memperkuat ekosistem ekonomi sirkular agar pengelolaan sampah menjadi berkelanjutan.

Akses Sanitasi Aman



Gambar 2.31 Tren Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 sebesar 0,93 poin persen.

Pertumbuhan pada periode 2022-2023 adalah sebesar 0,85 poin, dan melambat cukup signifikan pada periode 2023-2024 menjadi hanya 0,33 poin persen.

Selama periode 2021-2024, terjadi peningkatan total sebesar 2,11 poin persen dalam akses sanitasi aman.

Peningkatan konsisten dalam akses sanitasi layak pada periode awal merupakan hasil dari sinergi antara intervensi terencana, seperti program sanitasi berbasis masyarakat, yang didukung oleh alokasi anggaran memadai dan meningkatnya kesadaran publik. Akan tetapi, perlambatan signifikan pada periode 2023-2024 mengindikasikan munculnya tantangan yang lebih berat dan sistemik, di mana program kini harus menyasar wilayah geografis dan sosial yang lebih sulit dijangkau setelah target-target termudah tercapai. Secara krusial, perlambatan ini juga menandakan transisi isu dari sekadar penyediaan infrastruktur dasar menjadi pengelolaan sistem sanitasi aman yang jauh lebih kompleks (termasuk pengelolaan lumpur tinja) yang menuntut investasi, inovasi, dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk keberlanjutan program di masa depan.

2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Lombok Tengah sangat rentan terhadap berbagai bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan dampak perubahan iklim. Untuk mengatasi ini, diperlukan pergeseran dari pendekatan reaktif (respons setelah bencana) menjadi pendekatan resiliensi yang proaktif. Artinya, fokus utama adalah pada upaya mitigasi dan adaptasi jangka panjang yang terencana untuk mengurangi risiko. Tujuannya adalah membangun ketahanan sejati agar masyarakat tidak hanya pulih, tetapi mampu bertahan dan bangkit kembali saat menghadapi bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB)

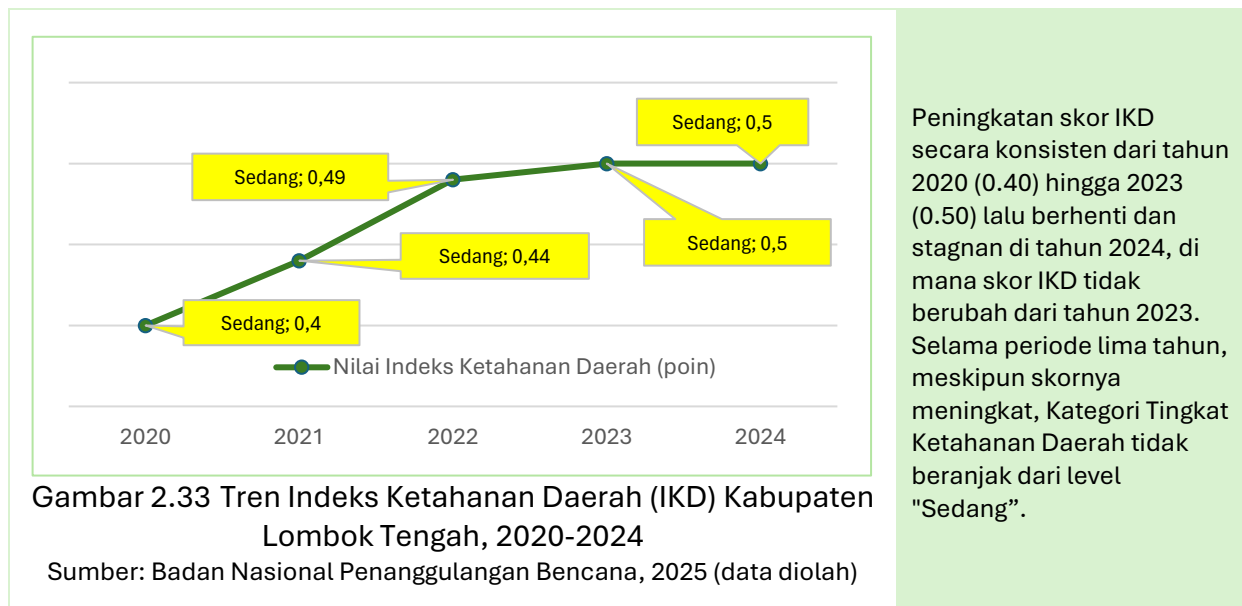


Gambar 2.32 Tren Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: inarisk.bnpb.go.id, 2025 (data diolah)

Penurunan konsisten pada skor Indeks Risiko Bencana pada periode awal mengindikasikan keberhasilan intervensi yang sistematis, didorong oleh kombinasi antara peningkatan kapasitas melalui program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang efektif, investasi pada mitigasi struktural seperti normalisasi sungai, dan penurunan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Akan tetapi, tren positif ini berbalik arah secara signifikan pada tahun 2024. Kenaikan skor pada tahun tersebut dihipotesiskan bersumber dari kemunduran dalam beberapa aspek krusial, seperti penurunan kapasitas akibat pergeseran prioritas anggaran, peningkatan kerentanan karena maraknya pembangunan baru di zona rawan, serta meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi sebagai dampak dari degradasi lingkungan yang terus berlanjut.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD)



Gambar 2.33 Tren Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025 (data diolah)

Peningkatan skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada periode awal, yang sejalan dengan penurunan risiko bencana, mengonfirmasi keberhasilan implementasi kebijakan dan penguatan kelembagaan seperti BPBD. Akan tetapi, berhentinya kemajuan IKD menandakan adanya pelemahan momentum yang kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor krusial. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kejenuhan program yang menuntut inovasi baru, keterbatasan anggaran yang menghambat investasi lebih lanjut, serta munculnya tantangan sistemik yang lebih fundamental, di mana peningkatan ketahanan daerah ke level selanjutnya menuntut integrasi pengurangan risiko bencana secara lintas sektor, sebuah upaya yang jauh lebih kompleks daripada sekadar menjalankan program yang sudah ada.

Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kabupaten Lombok Tengah kini berada di persimpangan jalan krusial, di mana akselerasi pembangunan ekonomi dan pariwisata strategis mendorong peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari konsumsi energi, transportasi, dan dekomposisi sampah. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan potensi besar untuk membalikkan tren melalui tiga pilar utama: transformasi menuju pariwisata hijau yang efisien energi, optimalisasi energi terbarukan yang melimpah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta pengembangan ekonomi sirkular yang mengubah sampah menjadi energi dan pemanfaatan aset karbon biru melalui restorasi mangrove. Dengan mengintegrasikan potensi ini secara strategis, Lombok Tengah tidak hanya dapat menekan jejak karbonnya, tetapi juga membangun citra destinasi modern yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan resiliensi dan kualitas hidup masyarakat.

2.1.1.7. Demografi

Tabel 2.10 Distribusi Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kecamatan, 2024			
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
1	Praya Barat	89.899	7,96
2	Praya Barat Daya	64.165	5,68
3	Pujut	127.840	11,33
4	Praya Timur	77.011	6,82
5	Janapria	92.793	8,22
6	Kopang	101.379	8,98
7	Praya	136.064	12,05
8	Praya Tengah	79.721	7,06
9	Jonggat	114.808	10,17
10	Pringgarata	82.430	7,30
11	Batukliang	96.752	8,57
12	Batukliang Utara	65.854	5,83
Lombok Tengah		1.128.716	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Total Populasi: Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 adalah 1.128.716 jiwa.

Konsentrasi Populasi: Persebaran penduduk antar kecamatan sangat tidak merata. Terdapat tiga kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yang menjadi pusat populasi utama, yaitu: Kecamatan Praya (12,05%) Kecamatan Pujut (11,33%) Kecamatan Jonggat (10,17%) Jika digabungkan, ketiga kecamatan ini menampung 33,55% atau lebih dari sepertiga total penduduk kabupaten.

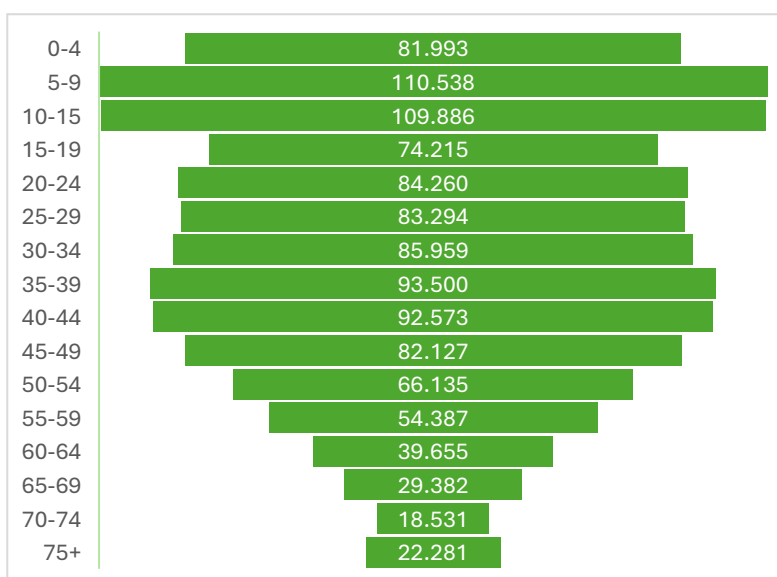
Populasi Terendah: Sebaliknya, kecamatan dengan populasi terkecil adalah Praya Barat Daya (5,68%) dan Batukliang Utara (5,83%).

Konsentrasi penduduk yang tinggi di Kecamatan Praya, Pujut, dan Jonggat menciptakan tekanan yang sangat besar pada infrastruktur dan layanan dasar di wilayah tersebut, seperti air bersih, sanitasi, pendidikan (daya tampung sekolah), kesehatan (kapasitas Puskesmas/RS), dan jaringan jalan. Tingginya populasi di kecamatan tersebut menandakan perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi, administrasi, dan pariwisata (khususnya Pujut). Namun, ini juga berisiko menciptakan ketimpangan pembangunan dengan kecamatan-kecamatan yang berpenduduk lebih sedikit dan mungkin tertinggal.

Tabel 2.11 Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	42.353	39.640	81.993
05-09	57.297	53.241	110.538
10-14	56.401	53.485	109.886
15-19	37.917	36.298	74.215
20-24	42.732	41.528	84.260
25-29	41.305	41.989	83.294
30-34	42.424	43.535	85.959
35-39	44.914	48.586	93.500
40-44	44.843	47.730	92.573
45-49	39.948	42.179	82.127
50-54	33.474	32.661	66.135
55-59	25.721	28.666	54.387
60-64	18.931	20.724	39.655
65-69	13.571	15.811	29.382
70-74	8.725	9.806	18.531
75+	10.212	12.069	22.281
Jumlah	560.768	567.948	1.128.716

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar 2.34 Piramida Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rasio jenis kelamin adalah sekitar 98,7 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Struktur umur penduduk Lombok Tengah berbentuk piramida lebar di bagian bawah, yang menandakan populasi usia muda yang dominan.

Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) menjadi kelompok terbesar, yaitu sebanyak 756.105 jiwa atau sekitar 67% dari total populasi.

Penduduk Usia Belum Produktif (0-14 tahun) berjumlah 302.417 jiwa atau sekitar 27%.

Penduduk Usia Lanjut (65+ tahun) berjumlah 70.194 jiwa atau sekitar 6,2%.

Bonus Demografi: Struktur ini secara jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah sedang berada dalam periode Bonus Demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar daripada penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Angka ketergantungan (*dependency ratio*) relatif rendah.

Bonus demografi menghadirkan jendela peluang krusial untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui ketersediaan tenaga kerja melimpah, namun berisiko tinggi berubah menjadi bencana demografi—ditandai oleh pengangguran dan masalah sosial—jika pertumbuhan tersebut gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Untuk memastikan peluang ini terwujud, prioritas investasi mutlak harus diberikan kepada kelompok usia muda (0-14 tahun) yang besar saat ini. Hal ini menuntut fokus besar-besaran pada peningkatan kualitas pendidikan, dari PAUD hingga SMK yang relevan dengan kebutuhan industri, serta perbaikan sektor kesehatan fundamental, terutama penurunan stunting dan peningkatan gizi, agar mereka tumbuh menjadi angkatan kerja masa depan yang produktif dan kompetitif, sembari tetap mulai merintis perencanaan layanan geriatri untuk populasi lansia di masa depan.

Tabel 2.12 Data Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah

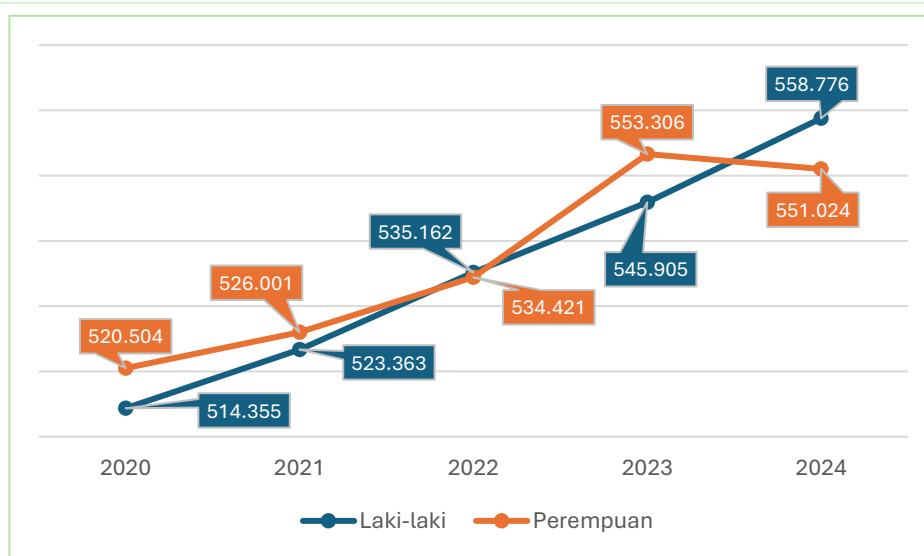
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023	Laju Pertumbuhan 2010-2022
1	Kopang	95.494	1,76
2	Janapria	87.271	1,26
3	Praya Timur	74.431	1,82
4	Batukliang Utara	62.001	1,42
5	Batukliang	90.638	1,82
6	Praya	129.881	1,94
7	Praya Tengah	74.966	1,90
8	Praya Barat	85.372	1,88
9	Pujut	120.538	1,69
10	Pringgarata	78.043	1,81
11	Jonggat	109.415	1,98
12	Praya Barat Daya	59.630	2,27
Lombok Tengah		1.067.680	1,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah periode 2010-2022 mencapai 1,80% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kecamatan Praya Barat Daya mencatatkan laju pertumbuhan paling pesat sebesar 2,27% per tahun. Kecamatan padat penduduk seperti Jonggat (1,98%) dan Praya (1,94%) juga tumbuh lebih cepat dari rata-rata kabupaten. Pertumbuhan penduduk terlambat terjadi di Kecamatan Janapria, yaitu sebesar 1,26% per tahun.

Laju pertumbuhan yang sangat tinggi di kecamatan tertentu, seperti Praya Barat Daya, merupakan indikasi kuat adanya daya tarik baru di wilayah tersebut. Kemungkinan penyebabnya adalah:

- Pembangunan Infrastruktur Skala Besar: Adanya proyek infrastruktur baru (jalan, jembatan, fasilitas pariwisata) yang membuka akses dan peluang ekonomi di wilayah tersebut.
- Perkembangan Kawasan Baru: Munculnya kawasan permukiman baru atau pengembangan masif di sektor pariwisata yang menarik penduduk untuk pindah.



Gambar 2.35 Tren Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari tahun 2020 hingga 2023, jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak atau hampir seimbang dengan laki-laki (rasio di bawah atau sekitar 100). Namun pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan di mana rasio jenis kelamin menjadi 101,41. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki telah melampaui jumlah penduduk perempuan secara absolut.

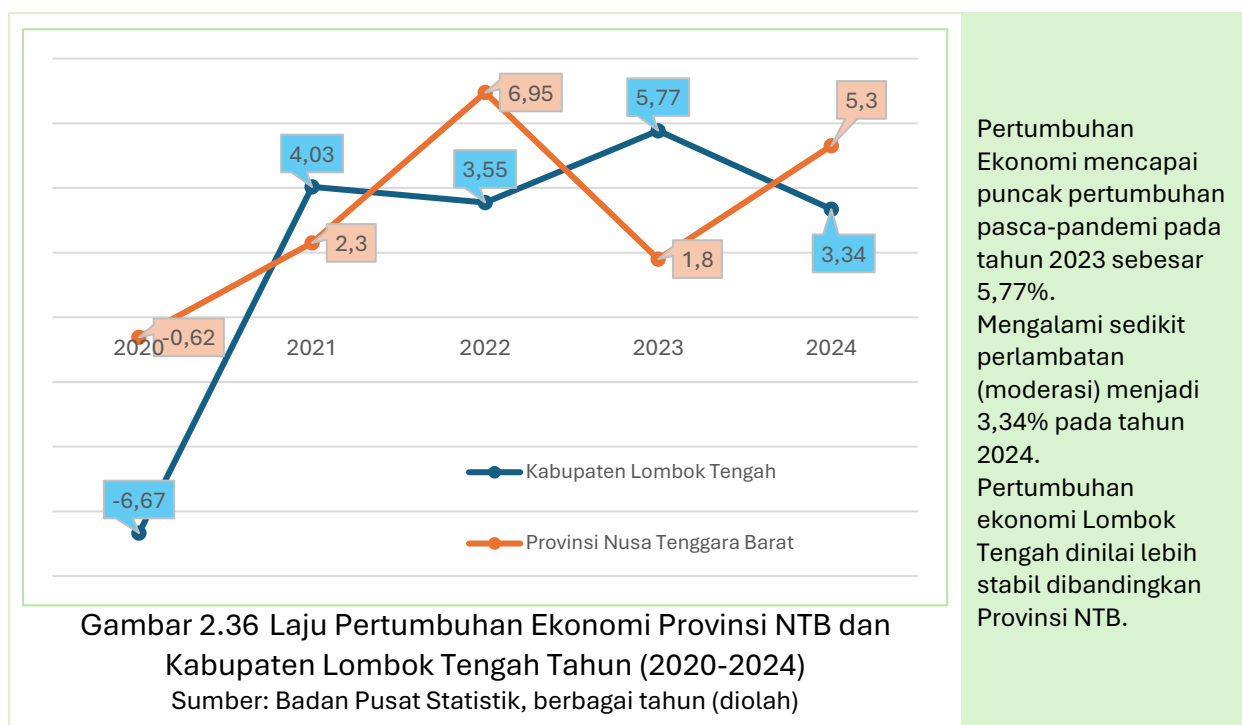
Pergeseran rasio jenis kelamin di Lombok Tengah yang menjadi didominasi laki-laki pada tahun 2024 hampir pasti merupakan dampak langsung dari migrasi masuk yang bersifat selektif gender, di mana lebih banyak laki-laki usia produktif datang ke wilayah tersebut. Fenomena ini dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja masif untuk proyek-proyek pembangunan padat karya, terutama di KEK Mandalika serta sektor konstruksi infrastruktur dan pariwisata. Meskipun peningkatan angkatan kerja ini berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, arus migrasi ini secara bersamaan menciptakan tantangan sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk tekanan berat pada kebutuhan hunian pekerja yang layak, peningkatan beban pada sumber daya lokal, dan potensi timbulnya konflik sosial yang harus dikelola secara proaktif.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Periode 2020 hingga 2024 mengukir babak penting dalam dinamika ekonomi Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun sempat terhantam keras oleh gejolak pandemi COVID-19 yang memperlambat laju perekonomian di awal, daerah ini berhasil menorehkan lintasan pertumbuhan yang stabil dan tangguh. Revitalisasi ekonomi ini tidak hanya terefleksi dari metrik makro, tetapi juga meresap ke berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat. Analisis ini akan mengupas tuntas karakteristik kesejahteraan ekonomi Lombok Tengah, menyoroti bagaimana indikator-indikator krusial seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, hingga Indeks Pembangunan Manusia saling berinteraksi dan membentuk potret komprehensif kondisi sosial-ekonomi daerah ini.

1. Pertumbuhan Ekonomi



Perekonomian Lombok Tengah, yang sempat terpukul hebat oleh pandemi 2020 akibat ketergantungannya pada sektor pariwisata, berhasil mengalami pemulihan yang sangat kuat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023. Akselerasi ini didorong oleh tiga mesin utama: injeksi ekonomi signifikan dari penyelenggaraan event internasional di Sirkuit Mandalika, investasi masif pada proyek konstruksi KEK Mandalika dan infrastruktur pendukungnya, serta permintaan domestik yang solid. Dengan demikian, perlambatan pertumbuhan yang teramati pada tahun 2024 bukanlah sinyal krisis, melainkan sebuah proses normalisasi yang wajar menuju tingkat pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, setelah mengalami lonjakan luar biasa yang bersifat sesaat (event-driven) pada tahun sebelumnya.

Distribusi Sektor Perekonomian Daerah

Perekonomian Lombok Tengah berjalan dalam dua kecepatan yang kontras, menciptakan kesenjangan antara sektor modern dan fundamental. Di satu sisi, sektor jasa modern seperti pariwisata, akomodasi, dan konstruksi mengalami akselerasi pesat berkat "Efek Mandalika" dan proses modernisasi. Namun, di sisi lain, sektor-sektor fondasi justru menghadapi tantangan serius: Sektor Pertanian mengalami stagnasi produktivitas riil, di mana peningkatannya lebih didorong oleh inflasi harga daripada volume produksi, sementara Sektor Transportasi masih berjuang

memulihkan kinerjanya ke level pra-pandemi, sehingga berisiko menjadi penghambat konektivitas (*connectivity bottleneck*) bagi pembangunan daerah.

Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.099,65	3.131,05	3.183,22	3.254,27	3.288,00
B. Pertambangan dan Penggalian	614,33	655,07	628,66	662,54	674,74
C. Industri Pengolahan	662,46	663,84	674,60	688,28	715,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,53	11,39	12,58	13,23	14,45
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13,73	13,93	14,59	14,73	14,66
F. Konstruksi	1.867,18	2.179,77	2.064,62	2.237,27	2.284,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	1.360,42	1.396,97	1.474,74	1.590,39	1.693,96
H. Transportasi dan Pergudangan	1.010,56	954,20	1.228,39	1.398,56	1.453,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102,24	104,52	136,84	148,63	162,82
J. Informasi dan Komunikasi	260,26	273,33	282,79	297,14	310,12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	300,21	319,67	330,90	344,34	359,89
L. Real Estat	444,48	451,23	472,13	492,67	512,29
M,N. Jasa Perusahaan	17,80	17,88	19,51	21,13	22,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	626,10	642,63	653,77	661,03	695,96
P. Jasa Pendidikan	574,42	582,72	601,22	631,33	652,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	329,20	355,57	363,16	384,87	409,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	277,43	283,71	322,70	342,91	359,56
Produk Domestik Regional Bruto	11.571,00	12.037,48	12.464,40	13.183,34	13.624,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sejumlah sektor jasa menunjukkan ekspansi volume produksi riil yang sangat pesat dari tahun 2020 hingga 2024. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Tumbuh paling eksplosif sebesar 59,2%.

- Jasa Keuangan dan Asuransi: Tumbuh kuat sebesar 19,9%.
- Informasi dan Komunikasi: Tumbuh konsisten sebesar 19,2%.

Konstruksi: Tumbuh signifikan sebesar 22,3%, meskipun sempat mengalami fluktuasi.

Sektor-sektor fundamental yang menjadi tumpuan utama justru menunjukkan pertumbuhan volume produksi riil yang jauh lebih rendah.

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Sebagai sektor terbesar, hanya tumbuh 6,1% selama empat tahun, atau rata-rata di bawah 2% per tahun.
- Transportasi dan Pergudangan: Meskipun pulih kuat dari titik terendahnya di tahun 2020, output riil sektor ini pada 2024 masih belum berhasil melampaui level pra-pandemi (tahun 2019).

Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	8.163,48	8.298,27	8.628,51	8.981,62	9.398,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	142,73	143,49	151,97	161,62	180,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.454,43	1.463,00	1.450,30	1.476,31	1.553,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.075,56	5.649,87	5.351,64	5.808,10	5.931,43
5. Perubahan Inventori	33,10	14,12	14,89	13,47	5,64
6. Net Ekspor	-3.298,31	-3.531,27	-3.132,91	-3.257,79	-3.445,38
Produk Domestik Regional Bruto	11.571,00	12.037,48	12.464,40	13.183,34	13.624,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT): Komponen ini adalah fondasi terbesar, secara konsisten menyumbang sekitar 69% dari total PDRB. Ini menunjukkan bahwa permintaan domestik adalah mesin utama yang menggerakkan ekonomi sehari-hari.

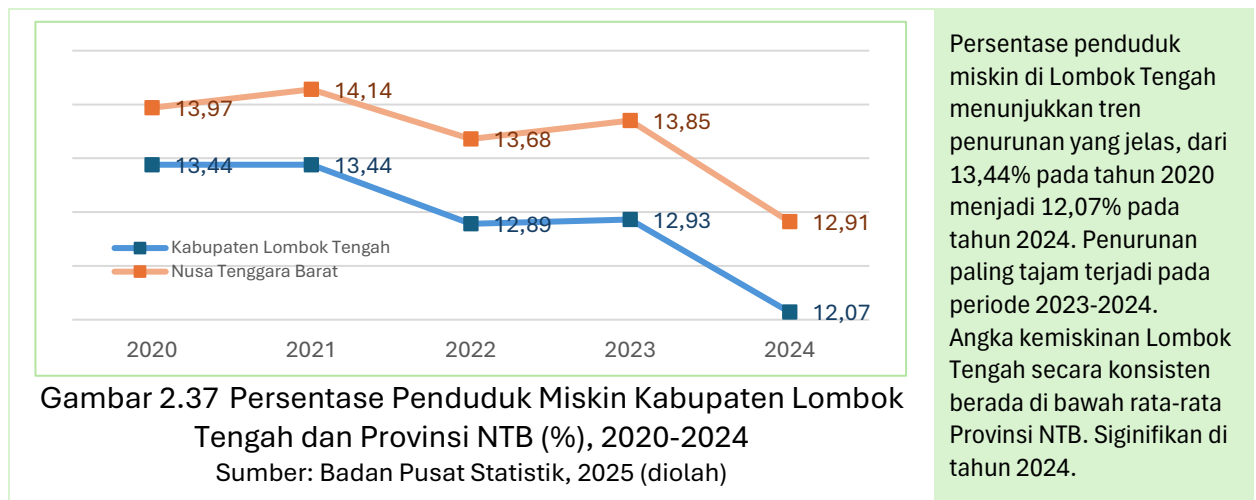
Investasi (PMTB): Komponen ini menjadi pilar kedua dengan kontribusi yang sangat besar, mencapai 43,5% dari PDRB pada 2024. Angka ini menandakan adanya aktivitas investasi atau pembentukan modal yang luar biasa tinggi di Lombok Tengah.

Net Ekspor secara konsisten bernilai negatif dan cenderung semakin melebar defisitnya, dari -Rp 3,29 triliun pada 2020 menjadi -Rp 3,44 triliun pada 2024. Ini mengindikasikan bahwa nilai impor barang dan jasa jauh melampaui nilai ekspor.

Perekonomian Lombok Tengah ditopang oleh dua pilar utama: konsumsi domestik yang kuat yang memberikan stabilitas, dan investasi masif yang didorong oleh "Efek Mandalika" sebagai motor utama pertumbuhan. Namun, model pembangunan ini menciptakan tantangan berupa defisit perdagangan yang melebar. Hal ini terjadi karena booming investasi dan konsumsi memicu tingginya impor barang modal dan konsumsi, sementara nilai ekspor daerah masih berbasis komoditas primer bernilai rendah.

2. Kemiskinan

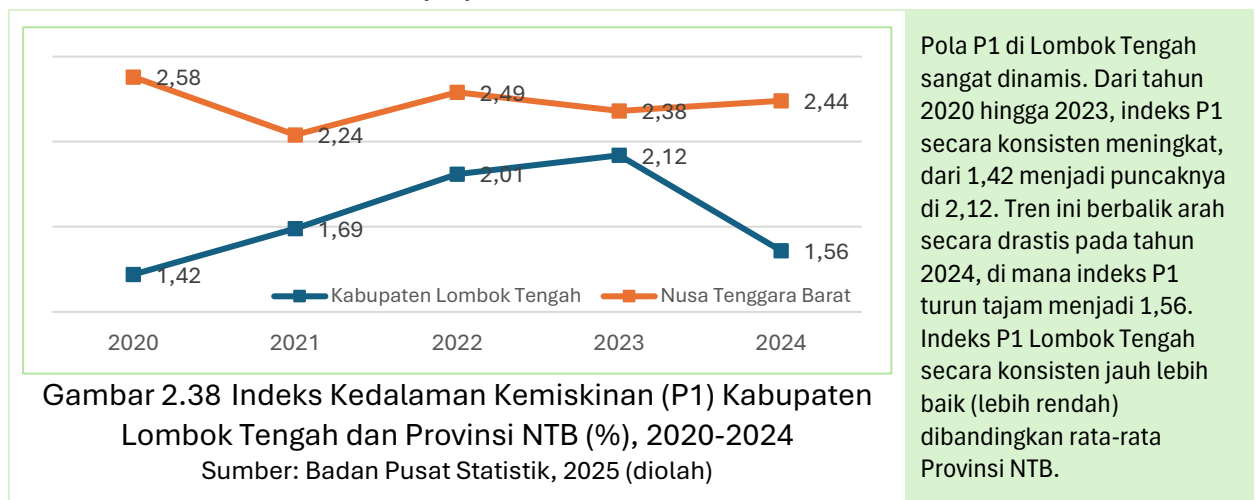
Tingkat Kemiskinan (P0)



Gambar 2.37 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB (%), 2020-2024
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh "Efek Mandalika" (pariwisata dan konstruksi) menjadi pendorong utama penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Perlambatan penurunan kemiskinan pada 2023 disebabkan oleh tekanan inflasi yang tinggi, terutama pada harga pangan dan energi, yang menggerus daya beli masyarakat kelompok rentan miskin. Secara garis besar, kinerja Lombok Tengah lebih baik dari rata-rata provinsi karena posisinya sebagai pusat (episentrum) pertumbuhan ekonomi baru NTB, sehingga dampak positif dari investasi dan pariwisata lebih terkonsentrasi dan dirasakan langsung di wilayah ini.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



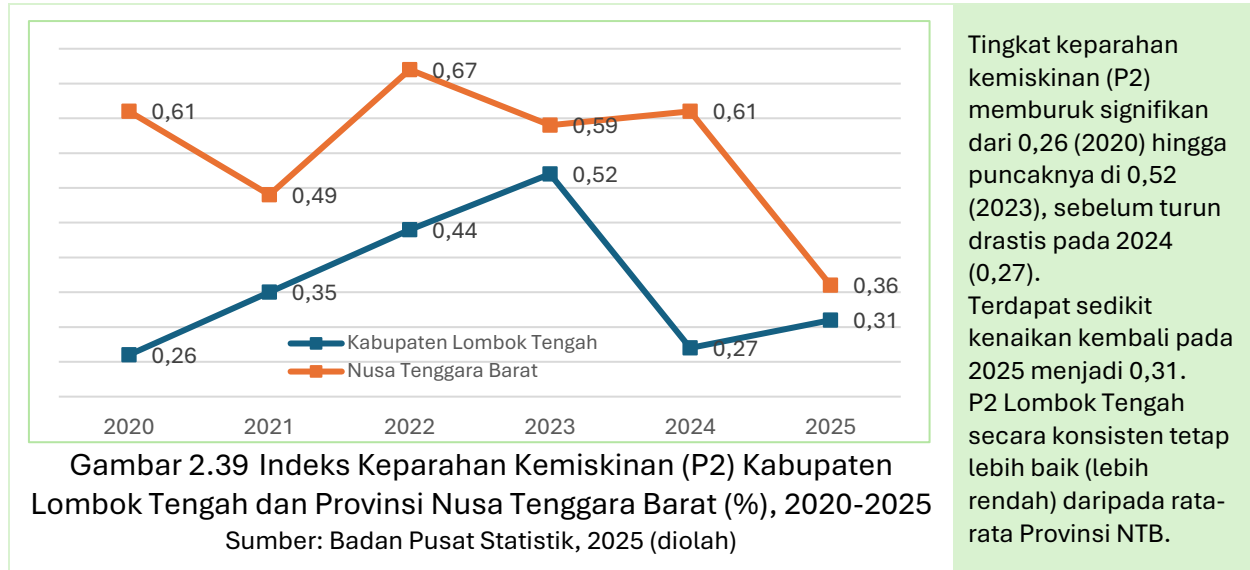
Gambar 2.38 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB (%), 2020-2024
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi angkanya, semakin dalam jurang kemiskinan. Antara tahun 2020-2023, terjadi paradoks kemiskinan: meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kondisi mereka yang masih miskin justru semakin parah (jurang kemiskinan melebar). Hal ini

disebabkan pertumbuhan ekonomi awal hanya menjangkau kelompok rentan miskin, sementara kelompok termiskin tertinggal dan semakin tertekan oleh inflasi.

Kondisi ini berhasil diperbaiki secara signifikan pada tahun 2024, kemungkinan besar berkat kombinasi antara dampak ekonomi pariwisata yang mulai meluas ke lapisan bawah dan intervensi pemerintah yang lebih efektif melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran.

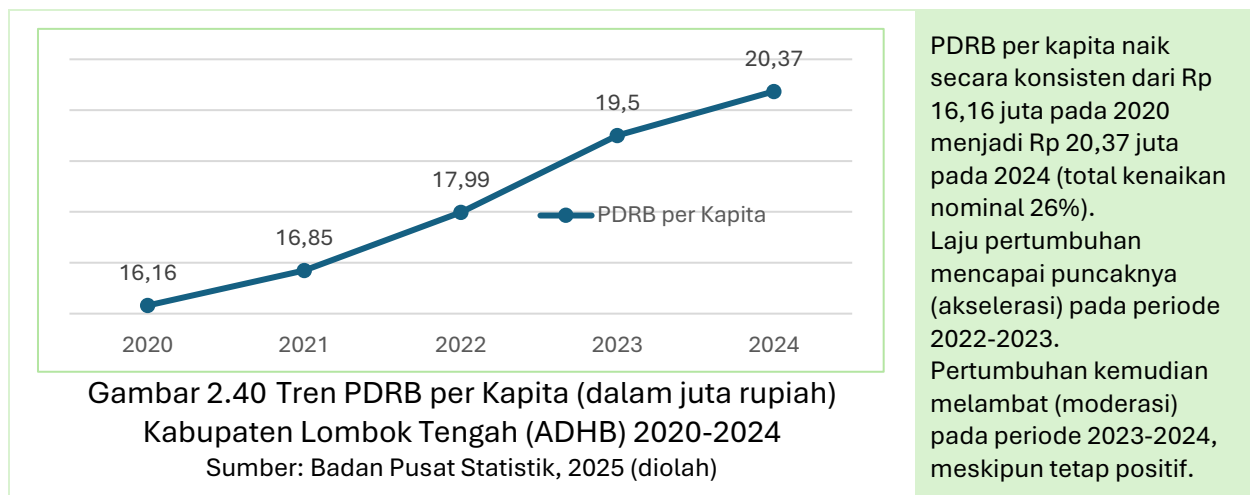
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Gambar 2.39 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (%), 2020-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Analisis tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika yang krusial. Periode 2020-2023 ditandai dengan kondisi yang terus memburuk, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal tidak inklusif dan gagal menjangkau kelompok termiskin, yang kondisinya justru semakin tertekan oleh inflasi. Perbaikan drastis yang terjadi pada tahun 2024 dapat didiagnosis sebagai hasil dari intervensi program perlindungan sosial (Bansos/BLT) yang masif dan tepat sasaran, yang secara efektif mengangkat kondisi kelompok paling bawah. Namun, kenaikan kembali angka P2 pada tahun 2025 menjadi sinyal kewaspadaan yang sangat kuat, membuktikan bahwa kondisi kelompok termiskin masih sangat rapuh dan perbaikan yang terjadi sebelumnya sangat bergantung pada konsistensi program bantuan, bukan pada perubahan struktural yang berkelanjutan.

3. PDRB Per Kapita

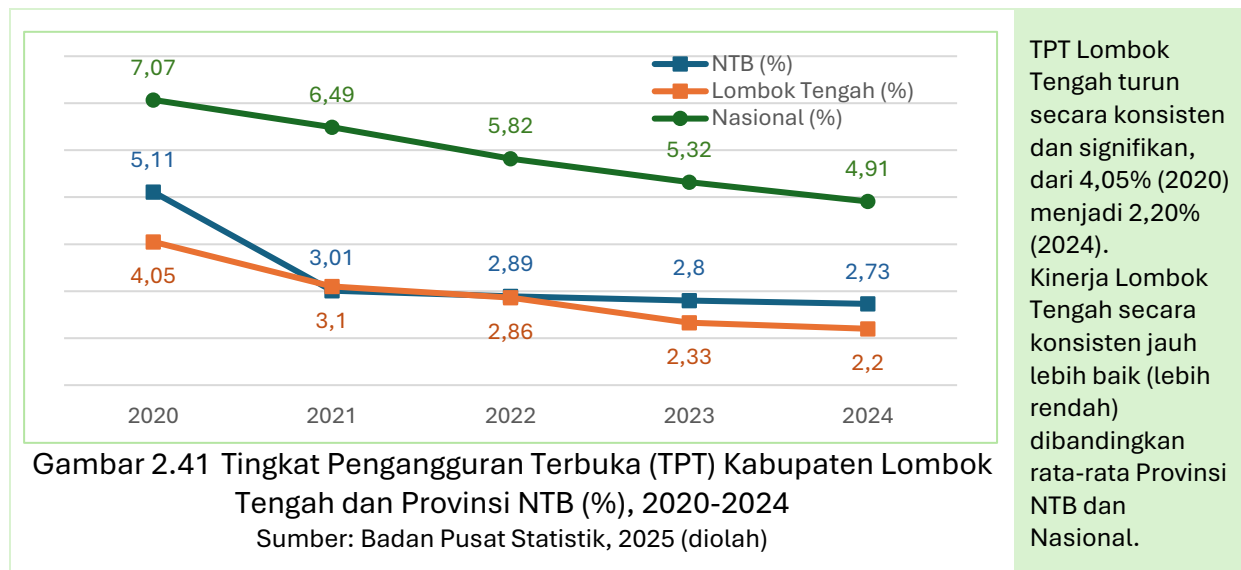


Gambar 2.40 Tren PDRB per Kapita (dalam juta rupiah) Kabupaten Lombok Tengah (ADHB) 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Kenaikan PDRB per kapita didorong oleh "Efek Mandalika" yang mengakselerasi pertumbuhan sektor Konstruksi dan Jasa. Pola pertumbuhannya—memuncak pada 2023 dan normalisasi pada 2024—sepenuhnya sejalan dengan tren Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) riil.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini tidak hanya menunjukkan perbaikan di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi.

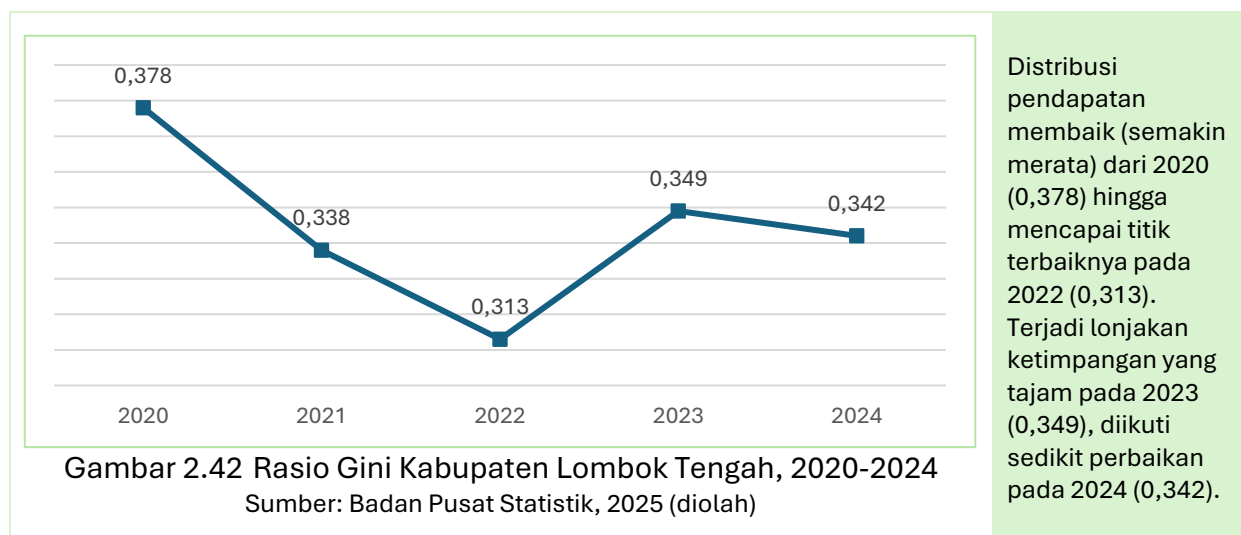


Gambar 2.41 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB (%), 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Penurunan drastis angka pengangguran didorong oleh "Efek Mandalika" yang menciptakan lapangan kerja masif di dua sektor utama:

1. Sektor Konstruksi: Menyerap banyak tenaga kerja dari proyek-proyek pembangunan fisik di KEK Mandalika.
2. Sektor Jasa Pariwisata: Menyerap tenaga kerja di hotel, restoran, dan usaha penunjang seiring pulihnya pariwisata.

5. Rasio Gini



Gambar 2.42 Rasio Gini Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Distribusi pendapatan di periode 2020-2022 membaik, kemungkinan besar didorong oleh efek pemerataan dari program bantuan sosial (Bansos) yang masif pasca-pandemi. Selanjutnya ketimpangan memburuk tajam di tahun 2023 kemungkinan terjadi karena manfaat puncak pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pendapatan kelompok yang terkait "Efek Mandalika" melesat, sementara pendapatan kelompok di sektor pertanian stagnan, menciptakan "ekonomi dua kecepatan". Sedangkan di tahun 2024, ketimpangan sedikit membaik kembali berkat peran program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, yang berhasil mengangkat pendapatan kelompok masyarakat terbawah.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2020-2024, IPM Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya, menandakan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	Nasional	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Tengah
2020	72.81	70.46	68.32
2021	73.16	70.86	68.70
2022	73.77	71.65	69.57
2023	74.39	72.36	70.41
2024	75.02	73.10	71.19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

IPM Lombok Tengah meningkat secara konsisten. Pencapaian utamanya adalah naik status dari "Sedang" menjadi "Tinggi" pada tahun 2023 setelah berhasil melampaui skor 70. Laju pertumbuhan IPM Lombok Tengah lebih cepat dari rata-rata provinsi dan nasional.

Meskipun IPM Lombok Tengah secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi NTB dan Nasional, laju pertumbuhannya lebih cepat. Hal ini mengindikasikan adanya upaya percepatan pembangunan yang efektif sehingga berhasil mempersempit kesenjangan (*gap*) dengan level provinsi dan nasional secara bertahap.

7. Indeks Zakat Nasional

Tabel 2.16 Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Dimensi Makro	Dimensi Mikro	IZN Total	Interpretasi
2020	0.76	0.52	0.59	Cukup Baik
2021	NA	NA	NA	NA
2022	NA	NA	NA	NA
2023	Tidak Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi
2024	0.71	0.56	0.60	Stable/Stabil

Sumber: BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Tabel 2.17 Nilai Indikator Penyusun IZN BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah (2024)

Indikator	Nilai	Kategori
Regulasi (X11)	1.00	Sangat Baik
Dukungan APBN/APBD (X12)	0.68	Baik
Database (X13)	0.58	Cukup Baik
Penguatan Jaringan (X14)	0.37	Kurang Baik
Literasi dan Dakwah Zakat (X15)	0.85	Sangat Baik
Indeks Tata Kelola (X21)	0.73	Baik
Indeks Dampak Zakat (X22)	0.45	Cukup Baik

Sumber: BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Kinerja IZN secara total cenderung stabil (naik tipis dari 0,59 ke 0,60), meskipun ada kesenjangan data pada 2021-2023.

Di balik skor yang stabil, Dimensi Makro (Ekosistem Perzakatan) justru MELEMAH dan Dimensi Mikro (Kinerja Kelembagaan BAZNAS) justru MENGUAT.

Performa terbaik terletak pada Regulasi dan Literasi dan Dakwah Zakat.

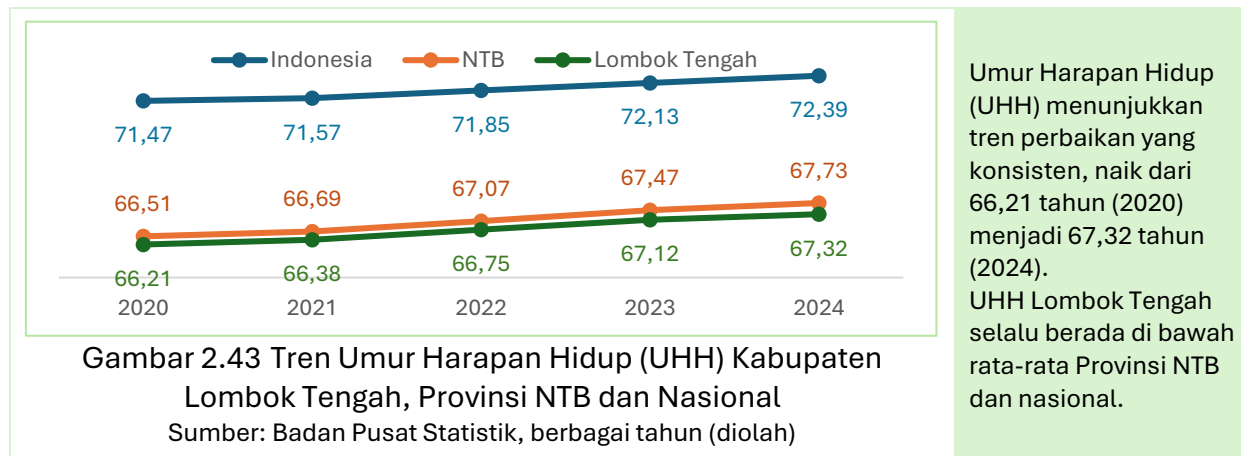
Performa terendah ada pada Penguatan Jaringan dan Indeks Dampak Zakat.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kekuatan utama pada Dimensi Mikro, yang ditopang oleh dukungan regulasi pemerintah yang solid serta tata kelola dan sosialisasi internal BAZNAS yang baik. Namun, kekuatan ini dihadapkan pada beberapa kelemahan kritis yang signifikan. Kelemahan utama terletak pada lemahnya jaringan dan kolaborasi dengan pihak eksternal, yang menjadi penyebab utama rendahnya skor pada Dimensi Makro. Selain itu, efektivitas program dinilai belum maksimal dalam mengubah kesejahteraan mustahik, sebuah tantangan yang diperparah oleh database penerima manfaat yang belum optimal sehingga berpotensi menghambat ketepatan sasaran penyaluran zakat.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

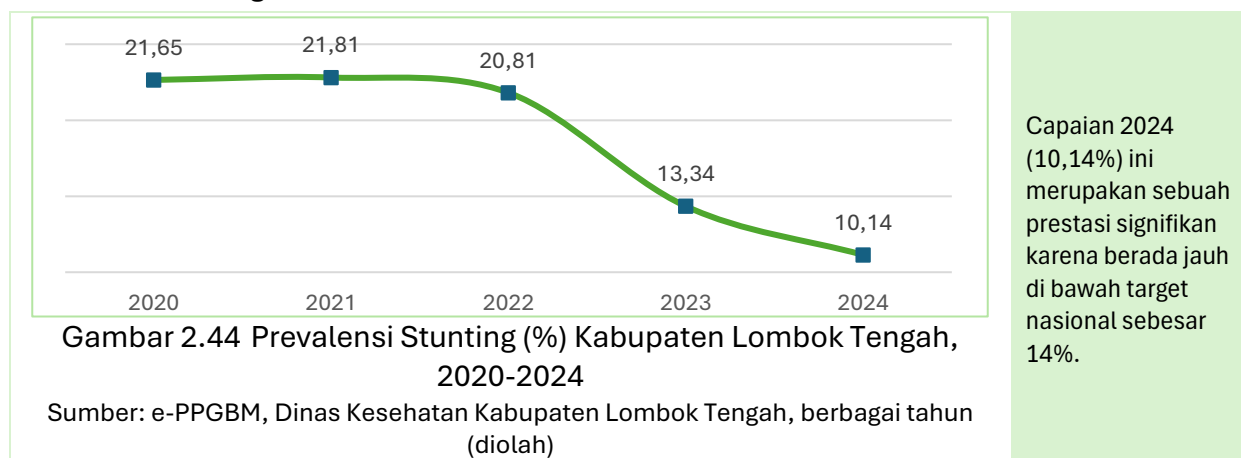
Kesehatan Untuk Semua adalah visi ambisius yang menjamin setiap individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, lokasi geografis, atau status sosial-ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas dan mampu mencapai derajat kesehatan optimal sepanjang siklus hidup mereka. Ini mencakup tidak hanya ketiadaan penyakit, tetapi juga kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera.

Umur Harapan Hidup (UHH)



Meskipun Umur Harapan Hidup (UHH) di Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang didorong oleh perbaikan layanan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi, kemajuan ini dibayangi oleh kesenjangan (lag) yang persisten dengan rata-rata provinsi. Akar masalah keterlambatan ini bersifat struktural, terutama disebabkan oleh tingginya Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB), prevalensi stunting, dan akses layanan kesehatan yang belum merata. Diagnosis paling kritis adalah kesenjangan yang justru semakin melebar, mengindikasikan bahwa laju efektivitas dan perbaikan program kesehatan di daerah lain di NTB berjalan lebih cepat. Hal ini menjadikan ketertinggalan UHH bukan sekadar masalah statis, melainkan isu prioritas yang semakin mendesak untuk ditangani secara fundamental agar tidak semakin tertinggal.

Prevalensi Stunting

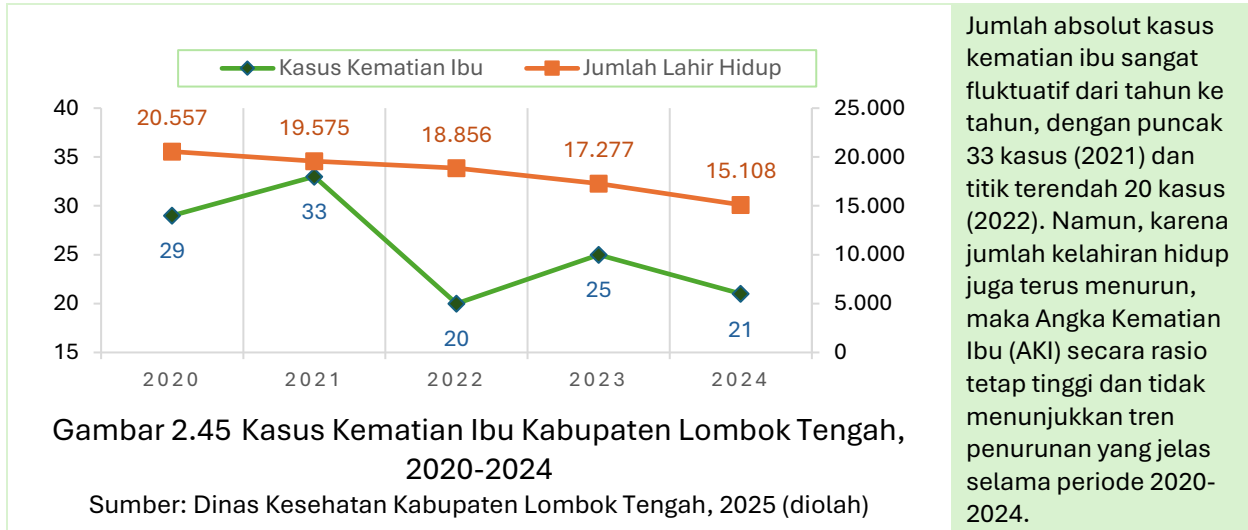


Penurunan stunting yang drastis didorong oleh beberapa faktor kunci:

1. Intervensi Konvergen dan Komitmen Kuat: Faktor utama adalah strategi konvergensi yang didukung oleh komitmen politik yang kuat. Strategi ini menggabungkan: a) Intervensi Gizi Spesifik (kesehatan langsung ke ibu dan anak). b) Intervensi Gizi Sensitif (dukungan dari sektor lain seperti air bersih, sanitasi, dan bantuan sosial).
2. Penggunaan data sasaran yang akurat ("*by name, by address*") membuat intervensi menjadi jauh lebih efektif.

3. Kenaikan pendapatan dan penurunan kemiskinan turut mendukung kemampuan keluarga menyediakan gizi yang lebih baik.

Kasus Kematian Ibu



Gambar 2.45 Kasus Kematian Ibu Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

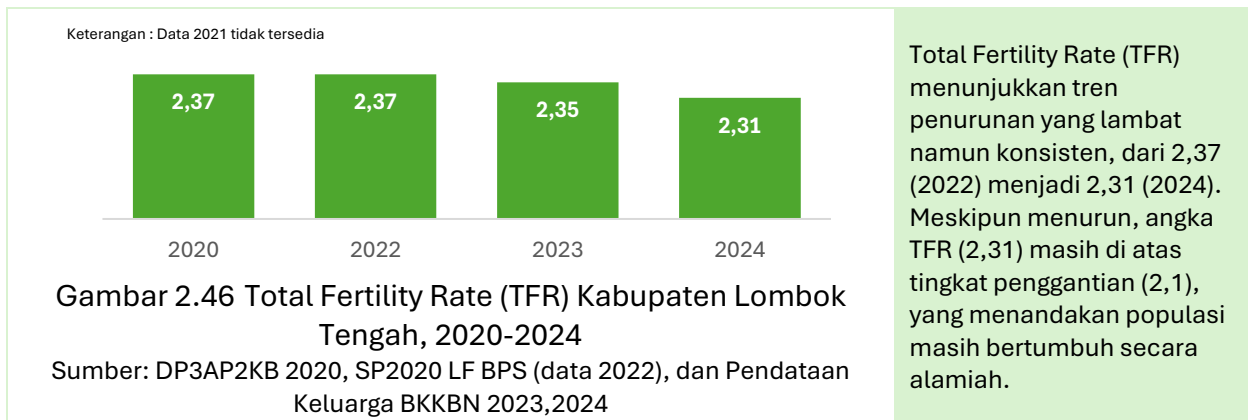
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (diolah)

Angka kematian yang tetap tinggi dan tidak stabil menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang persisten. Kegagalan ini dapat diuraikan dalam konsep "**Tiga Terlambat**":

1. Terlambat Keluarga: Lambat mengenali tanda bahaya.
2. Terlambat Akses: Lambat mencapai fasilitas kesehatan.
3. Terlambat Penanganan: Lambat menerima penanganan yang tepat di fasilitas kesehatan.

Kegagalan berulang dalam tiga aspek ini adalah akar masalah mengapa kasus kematian ibu masih terus terjadi pada level yang mengkhawatirkan dan menjadi salah satu faktor utama yang menekan capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Lombok Tengah.

Total Fertility Rate (TFR)

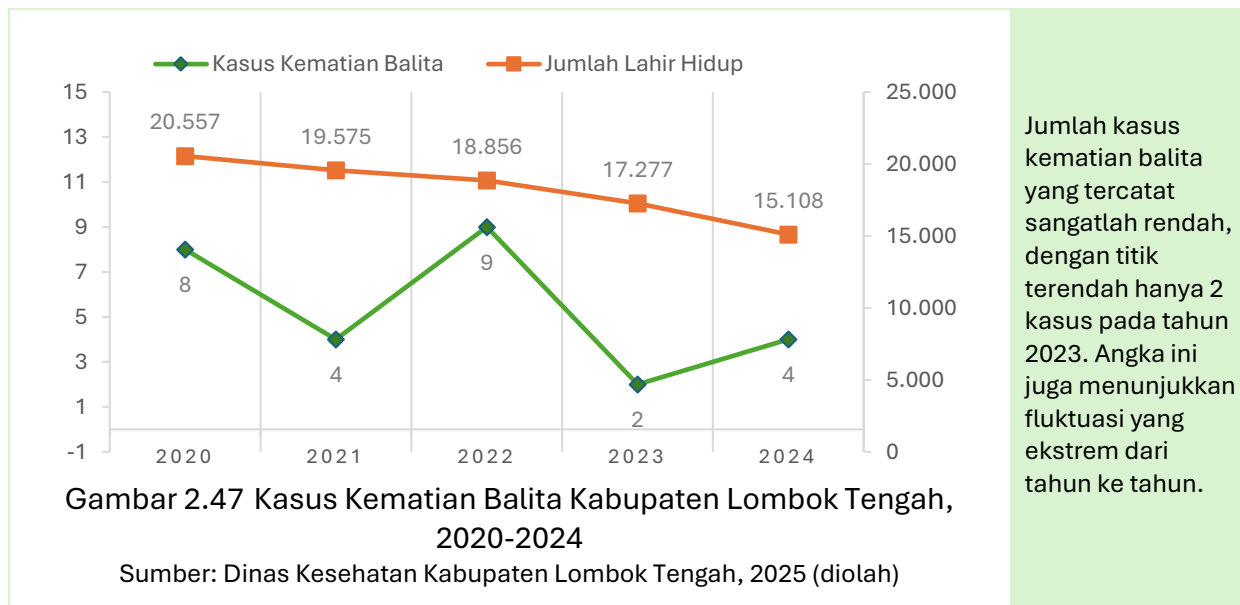


Gambar 2.46 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: DP3AP2KB 2020, SP2020 LF BPS (data 2022), dan Pendataan Keluarga BKKBN 2023,2024

Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR) di Lombok Tengah merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang didorong oleh tiga faktor utama yang saling terkait. Pertama, peningkatan pendidikan dan peran perempuan di ranah publik secara langsung memengaruhi keputusan untuk menunda usia pernikahan dan memiliki lebih sedikit anak. Kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi telah menggeser preferensi keluarga dari kuantitas menjadi kualitas anak, di mana biaya pendidikan dan kesehatan menjadi pertimbangan utama. Ketiga, efektivitas program Keluarga Berencana (KB) berhasil meningkatkan kesadaran dan akses terhadap alat kontrasepsi modern. Meskipun demikian, angka TFR yang masih berada di atas level pengganti (2,1) mengindikasikan bahwa norma sosial-kultural yang mendukung keluarga besar masih cukup kuat, terutama di wilayah perdesaan, menunjukkan bahwa perubahan pola pikir berjalan lebih lambat dibandingkan perubahan ekonomi dan akses layanan.

Kasus Kematian Balita



Angka kematian balita yang sangat rendah kemungkinan besar merupakan kombinasi dari dua faktor:

1. Terjadi perbaikan kondisi kesehatan balita berkat efektivitas program imunisasi, perbaikan gizi (stunting), dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
2. Angka yang luar biasa rendah serta volatilitas yang ekstrem (naik-turun secara drastis) adalah gejala klasik dari sistem pencatatan yang belum stabil, di mana kemungkinan tidak semua kasus kematian di masyarakat dilaporkan.

Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.18 Tren dan Kinerja dari Setiap Indikator Penanganan Penyakit Menular

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Deskripsi Kinerja dan Tren
Tuberkulosis (TBC)							
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan	Persen	12,14	22,37	37,8	58,5	72,24	Tren Peningkatan Sangat Kuat dan Akseleratif.
Cakupan Penemuan Kasus (Case Detection Rate)	Persen	30,6	32,8	33,3	44,34	-	Tren Meningkat
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate)	Persen	95,9	92,3	95,7	93,3	90,6	Tren Menurun dan Mengkhawatirkan.
Kusta							
Proporsi Kasus Kusta yang Ditemukan dan Diobati	Persen	-	24%	17%	29%	18%	Kinerja Program Rendah dan Fluktuatif.
HIV/AIDS							
Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini	Persen	64,6	63,5	77,8	62,7	80,3	Tren Fluktuatif Namun Mencapai Puncak di 2024.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (diolah)

Diagnosis yang dapat diperoleh dari data tersebut adalah:

1. TBC: Program sangat berhasil di tahap skrining (hulu), namun lemah di tahap selanjutnya (hilir). Hal ini ditandai oleh adanya kesenjangan antara skrining-diagnosis ("kasus hilang") dan tren tingkat keberhasilan pengobatan yang terus menurun.
2. Kusta: Kinerja program penemuan kasus rendah dan tidak konsisten (reaktif), yang mengindikasikan kemungkinan banyak kasus tidak terdeteksi di masyarakat.
3. HIV: Program menunjukkan kemampuan untuk pulih (resilien), namun kinerjanya tidak stabil dan kurang konsisten dari tahun ke tahun.

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 2.19 Rincian Target, Realisasi, dan Analisis Tren Keterpenuhan SPA RSUD Kabupaten Lombok Tengah (2021-2024)

Metrik	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Target (%)	88,85	88,95	89,15	89,25	89,05
Realisasi (%)	89,61	89,61	89,70	89,60	89,63
(Realisasi-Target)	+0,76	+0,66	+0,55	+0,35	+0,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, berbagai tahun (diolah)

Keterpenuhan Sarana, Prasarana, dan Alkes (SPA) di RSUD Praya menunjukkan kondisi yang sangat baik, stabil, dan konsisten melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan realisasi rata-rata 89,63%, RSUD menjadi benteng pertahanan terakhir sistem kesehatan yang relatif kuat.

Tabel 2.20 Tren Agregat Cakupan Keterpenuhan SPA Puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Rata-rata Sarana (%)	Rata-rata Prasarana (%)	Rata-rata Alkes (%)	Rata-rata Kumulatif (%)	Skor Min. Kumulatif (%)	Skor Maks. Kumulatif (%)	Standar Deviasi Kumulatif
2020	92,32	52,97	49,16	71,12	43,77	90,41	11,25
2021	94,27	53,25	51,51	73,07	50,59	91,02	10,75
2022	88,08	50,89	59,00	72,73	31,22	95,24	16,84
2023	84,80	49,73	57,66	70,44	29,44	95,16	17,21
2024	83,37	52,61	57,98	70,14	38,89	88,81	13,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, berbagai tahun (diolah)

Rata-rata keterpenuhan SPA seluruh Puskesmas cenderung stagnan bahkan sedikit menurun, dari 73,07% pada 2021 menjadi 70,14% pada 2024.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya keterpenuhan Sarana (gedung, kendaraan). Komponen Prasarana (listrik, air) stagnan, dan satu-satunya perbaikan signifikan hanya terjadi pada komponen Alat Kesehatan (Alkes).

Data Skor Minimum, Maksimum, dan Standar Deviasi menunjukkan adanya ketimpangan yang parah dan cenderung melebar antar Puskesmas. Standar Deviasi yang tinggi (mencapai 17,21 pada 2023) membuktikan bahwa ada sebagian Puskesmas dengan kondisi sangat baik (skor >90%), namun ada pula Puskesmas dengan kondisi sangat tertinggal (skor terendah hanya 29,44% pada 2023).

Berdasarkan data cakupan keterpenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA), dapat didiagnosis sebuah sistem kesehatan yang "berat di puncak tetapi rapuh di fondasi". Kondisi ini disebabkan oleh investasi dan alokasi sumber daya yang terpusat pada fasilitas tingkat rujukan (RSUD), sementara jaringan layanan primer seperti Puskesmas—terutama di lokasi terpencil—justru mengalami penurunan kualitas. Kesenjangan ini diperparah oleh ketergantungan pada pengadaan alat dari pemerintah pusat (DAK) yang tidak diimbangi oleh pemeliharaan sarana dan prasarana dari anggaran daerah. Akibatnya, fungsi promotif dan preventif di tingkat dasar melemah, memicu kelebihan beban pada RSUD oleh pasien yang seharusnya dapat ditangani di Puskesmas. Pada akhirnya, ketimpangan kualitas layanan primer inilah yang menjadi akar masalah utama di balik lambatnya peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH), karena secara langsung meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang fasilitasnya tidak memadai.

Indeks Keluarga Sehat

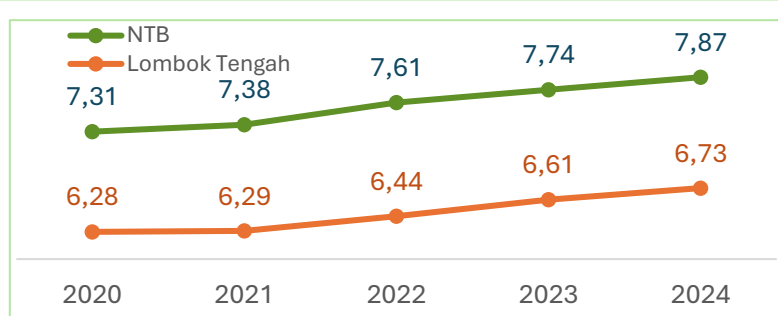
Meskipun nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lombok Tengah belum tersedia, analisis terhadap indikator-indikator pembentuknya menunjukkan gambaran yang kontradiktif. Di satu sisi, terdapat kemajuan signifikan dalam akses layanan dasar yang dibuktikan dengan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC). Namun di sisi lain, beban kesehatan keluarga masih sangat berat, ditandai dengan dominasi penyakit infeksi (ISPA, Diare) yang berdampingan dengan tingginya kasus penyakit tidak menular (Hipertensi), serta masalah gizi yang persisten (KEK, Anemia) yang menjadi akar masalah stunting.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan pilar fundamental dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan fondasi esensial untuk mewujudkan masyarakat serta bangsa yang bermartabat. Variabel ini berperan sentral dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing. Guna menjamin terwujudnya kondisi pendidikan yang diharapkan dan untuk mengukur sejauh mana capaian ini telah terealisasi, diperlukan serangkaian indikator komprehensif yang mencakup berbagai aspek aksesibilitas, partisipasi, kualitas, dan hasil belajar.

1. Rata-rata dan Harapan Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah



Gambar 2.48 Rata-Rata Lama Sekolah (2020-2024) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sangat lambat, dari 6,28 tahun (2020) menjadi 6,73 tahun (2024). Capaian ini menunjukkan rata-rata penduduk dewasa bahkan belum tamat SMP. Karena peningkatannya lebih lambat dari rata-rata provinsi, kesenjangan (gap) pendidikan antara Lombok Tengah dengan NTB justru semakin melebar (terjadi divergensi).

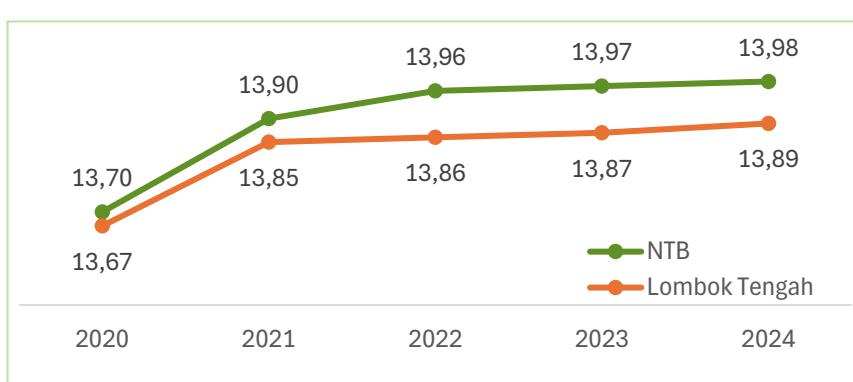
RLS adalah indikator "stok" yang merefleksikan akumulasi tingkat pendidikan dari seluruh penduduk dewasa. Angka yang rendah saat ini merupakan warisan dari masalah pendidikan di masa lalu, seperti tingginya angka putus sekolah (terutama pada transisi SD ke SMP) dan akses yang terbatas terhadap pendidikan menengah di dekade-dekade sebelumnya, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial-budaya.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi akar masalah dari tantangan pembangunan lain, seperti:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja (sulit mengisi lowongan terampil).
2. Sulitnya memutus lingkaran kemiskinan.
3. Rendahnya capaian kesehatan (UHH).

Kesenjangan dengan provinsi melebar karena efektivitas program pendidikan di Lombok Tengah di masa lalu kurang progresif dibandingkan daerah lain di NTB.

Harapan Lama Sekolah



Gambar 2.49 Harapan Lama Sekolah (2020-2024) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat hingga mencapai 13,89 tahun pada 2024, peningkatannya melambat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaiannya sedikit di bawah rata-rata Provinsi NTB, dan kesenjangan yang kecil ini cenderung sedikit melebar.

Lombok Tengah sedang berada dalam fase di mana peluang pendidikan untuk generasi sekarang (tercermin dari HLS) jauh lebih baik daripada realitas pendidikan yang dialami oleh generasi orang tua mereka (tercermin dari RLS).

Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Kategori Usia (Jenjang Pendidikan)	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Usia 7-12 Tahun (Setara SD/MI)	Lombok Tengah	99,42	99,36	97,63	99,12	99,44
	NTB	99,52	99,52	99,17	99,46	99,47
Usia 13-15 Tahun (Setara SMP/MTs)	Lombok Tengah	98,88	98,81	97,00	97,54	96,12
	NTB	98,32	98,34	97,74	97,95	97,86
Usia 16-18 Tahun (Setara SMA/SMK/MA)	Lombok Tengah	71,70	71,12	71,45	71,61	74,18
	NTB	77,64	77,49	77,43	77,46	77,81

Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas Maret), berbagai tahun (data diolah)

Adanya "pipa pendidikan yang bocor", di mana partisipasi menurun seiring bertambahnya jenjang pendidikan.

- Tingkat SD (Usia 7-12): Partisipasi hampir universal (rata-rata >99%), setara dengan capaian provinsi.
- Tingkat SMP (Usia 13-15): Menunjukkan sinyal peringatan dengan tren partisipasi yang cenderung menurun dan kini berada di bawah rata-rata provinsi.
- Tingkat SMA (Usia 16-18): Merupakan titik kebocoran terbesar, di mana partisipasi masih rendah (hanya 74,18% pada 2024). Namun, terdapat tren perbaikan positif dengan adanya lonjakan signifikan pada tahun 2024 yang berhasil mempersempit kesenjangan dengan provinsi.

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab dari fenomena "**pipa pendidikan yang bocor**" adalah sebagai berikut:

1. Tingkat SD (Fondasi Kuat): Partisipasi universal berhasil dicapai berkat program Wajib Belajar dan ketersediaan sekolah yang merata.
2. Tingkat SMP (Sinyal Peringatan): Tren penurunan partisipasi kemungkinan disebabkan oleh tekanan ekonomi pada keluarga miskin (mendorong anak bekerja) dan faktor sosial (seperti pernikahan dini).
3. Tingkat SMA (Kebocoran Terbesar): Partisipasi yang rendah disebabkan oleh tiga hambatan utama: ekonomi (biaya), akses (jarak sekolah), dan sosial-budaya (persepsi pendidikan tidak penting).

Persentase Anak Tidak Bersekolah Lagi (ATBL)

Tabel 2.22 Persentase Anak Tidak Bersekolah Lagi (Usia 7-24 Tahun) di Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	26,43	25,33	27,89	24,55	23,39
Perempuan	30,73	33,95	29,12	32,61	28,47
Total (L + P)	28,58	29,79	28,49	28,66	25,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Persentase ATBL pada perempuan secara konsisten jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Kesenjangan ini semakin melebar drastis saat terjadi tekanan ekonomi.

Fluktuasi angka Anak Tidak Bersekolah Lagi (ATBL) sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Angka memburuk pada 2021 akibat dampak pandemi, dan membaik signifikan pada 2024 seiring pemulihan ekonomi serta naiknya partisipasi sekolah jenjang SMA.

Persentase ATBL perempuan yang secara konsisten lebih tinggi disebabkan oleh masalah struktural:

1. Norma Sosial-Budaya: Terutama praktik pernikahan usia dini yang menghentikan pendidikan anak perempuan.

2. Prioritas Ekonomi Keluarga: Saat krisis, pendidikan anak perempuan lebih sering dikorbankan daripada anak laki-laki.

Partisipasi Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2.23 Tabel Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Lombok Tengah

Program Kesetaraan (Setara Jenjang)	Kelompok Usia	2023	2024	Tren
Paket A (SD)	7-12 Tahun	239	254	Meningkat
Paket B (SMP)	13-15 Tahun	405	296	Menurun
Paket C (SMA)	16-18 Tahun	1.191	345	Menurun Drastis
Total Peserta Didik	7-18 Tahun	1.835	895	Menurun Drastis

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Jumlah total peserta didik dalam program kesetaraan (untuk kelompok usia ideal) mengalami penurunan yang sangat drastis, anjlok lebih dari 50% dari 1.835 orang pada tahun 2023 menjadi hanya 895 orang pada tahun 2024.

Penurunan total ini didorong oleh tren yang berbeda di setiap jenjang program:

- a. Paket A (Setara SD): Mengalami peningkatan, menandakan program ini berjalan baik.
- b. Paket B (Setara SMP): Mengalami penurunan.
- c. Paket C (Setara SMA): Mengalami penurunan paling masif dan drastis, dari 1.191 menjadi 345 peserta didik.

Penurunan drastis jumlah peserta Paket C pada tahun 2024 kemungkinan besar bukanlah cerminan kegagalan program kesetaraan, melainkan sebuah indikator keberhasilan dari sistem pendidikan formal. Lonjakan signifikan pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMA/SMK di tahun yang sama menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang berhasil bertahan di jalur sekolah formal. Hal ini secara alamiah mengurangi jumlah anak putus sekolah yang menjadi calon peserta pendidikan kesetaraan.

2. Literasi dan Numerasi

Kualitas Pendidikan Dasar

Tabel 2.24 Indikator Urusan Pendidikan Asesmen Nasional Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	3.49	3.82	13.06	18.62
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	6.02	8.31	16.34	19.44
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	35.09	39.48	46.97	49.71
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	23.43	29.00	43.58	18.62

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025

Literasi Membaca: Menunjukkan perbaikan yang kuat dan konsisten baik di tingkat sekolah (satuan pendidikan) maupun di tingkat siswa.

Numerasi: Menunjukkan gambaran yang kontradiktif dan mengkhawatirkan:

- a. Di tingkat sekolah, terjadi peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar.
- b. Namun, di tingkat siswa, terjadi penurunan capaian yang sangat drastis pada tahun 2024 (dari 43,58% menjadi 18,62%), yang menghapus seluruh kemajuan sebelumnya.

Tren peningkatan yang konsisten baik di tingkat sekolah maupun siswa menandakan program-program peningkatan literasi berjalan efektif dan berhasil meningkatkan kompetensi membaca secara bertahap.

Terjadi diskoneksi antara kesiapan sekolah dengan hasil siswa. Peningkatan di tingkat sekolah menunjukkan adanya perbaikan kapasitas, namun anjloknya hasil di tingkat siswa pada 2024 secara drastis mendiagnosis adanya kegagalan dalam metode pembelajaran di kelas atau merupakan efek learning loss pasca-pandemi yang dampaknya baru terlihat pada kohor siswa tersebut.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

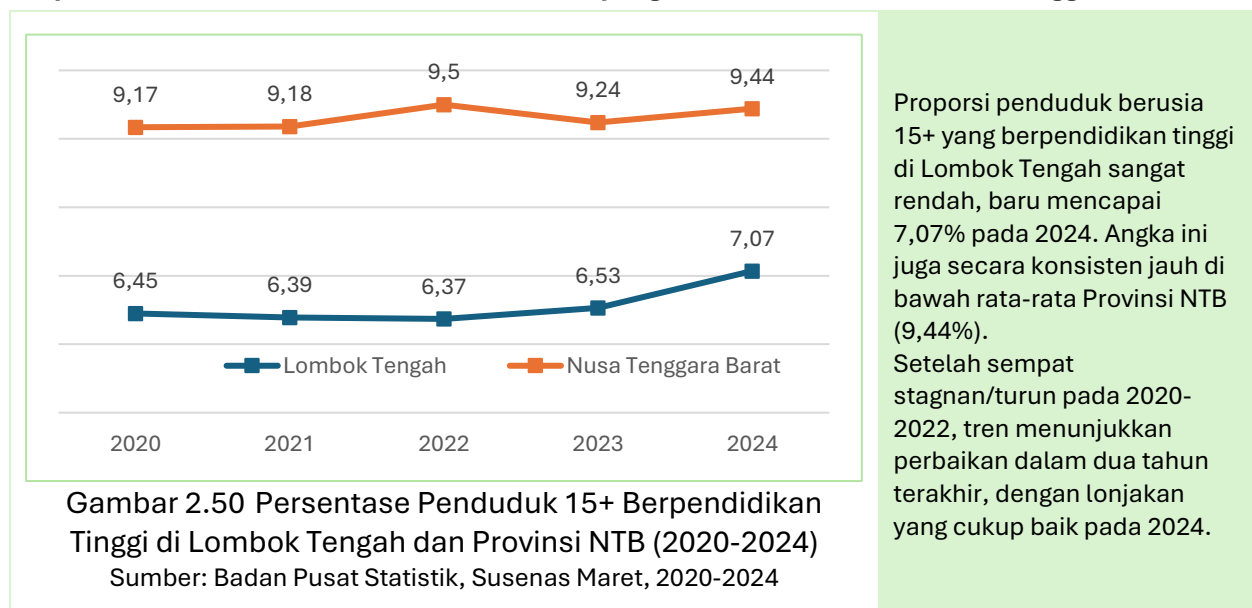
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Lombok Tengah anjlok secara drastis dari skor 61,23 (kategori "Sedang") pada 2023 menjadi 38,01 (kategori "Rendah") pada 2024. Namun, penurunan tajam ini tidak disebabkan oleh kemerosotan budaya literasi masyarakat, melainkan akibat perubahan fundamental metodologi survei dari sistem kuesioner fisik manual ke sistem daring terpusat yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Fluktuasi skor yang signifikan ini lebih mencerminkan kendala teknis dan pergeseran prosedur pendataan daripada penurunan substansial komitmen pembangunan literasi, sehingga menuntut adanya harmonisasi metode untuk memastikan akurasi pemantauan di masa depan.

Indeks Literasi Digital

Meskipun data spesifik Indeks Literasi Digital untuk Kabupaten Lombok Tengah tidak tersedia, posisi Provinsi NTB yang berada di peringkat 7 terbawah secara nasional pada tahun 2022 dengan skor 3,44 mengindikasikan adanya tantangan signifikan di tingkat kabupaten. Keterbatasan data ini kontras dengan adanya berbagai inisiatif proaktif di tingkat lokal yang menunjukkan upaya peningkatan literasi digital di akar rumput, namun kemajuan tersebut masih terhambat oleh isu fundamental seperti kesenjangan digital antar wilayah, minimnya pelatihan, dan infrastruktur yang belum memadai.

3. Pendidikan Menengah dan Tinggi

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi



Gambar 2.50 Persentase Penduduk 15+ Berpendidikan Tinggi di Lombok Tengah dan Provinsi NTB (2020-2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret, 2020-2024

Rendahnya angka ini adalah dampak langsung dari "pipa pendidikan yang bocor" di masa lalu, terutama rendahnya angka partisipasi di jenjang SMA. Sedikitnya lulusan SMA secara logis menghasilkan sedikitnya lulusan perguruan tinggi. Kenaikan pada 2023-2024 merupakan sinyal positif, kemungkinan didorong oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil akibat "Efek Mandalika" dan perbaikan bertahap pada partisipasi pendidikan menengah.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan kunci strategis dalam mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Melalui sistem perlindungan sosial yang adaptif, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dengan dilengkapi indikator seperti Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta indikator lain yang relevan dengan konteks daerah.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tabel 2.25 Data Cakupan dan Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah (2022-2024)

TAHUN	PU (Total)	BPU (Total)	JAKON (Total)	TOTAL (Kepesertaan)	PU (Aktif)	BPU (Aktif)	JAKON (Aktif)	TOTAL (Aktif)	% Aktif
2022	76.718	197.393	42.023	316.134	51.663	30.077	40.637	122.377	38,71%
2023	83.558	241.373	42.551	367.482	65.658	75.244	32.463	173.365	47,18%
2024	86.904	245.870	43.155	375.929	93.357	78.934	15.514	187.805	49,96%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 2025

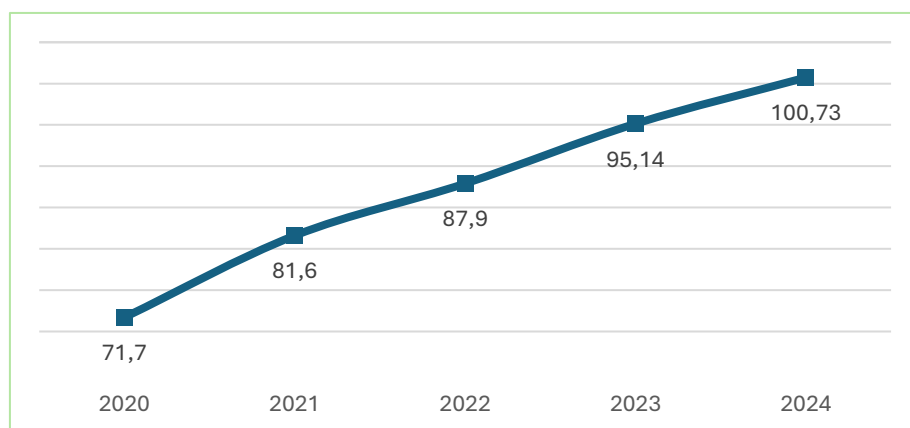
Cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan tren perbaikan yang kuat dan konsisten, meningkat dari 38,71% (2022) menjadi 49,96% (2024).

Peningkatan ini didorong oleh lonjakan peserta aktif di segmen Pekerja Penerima Upah/PU (hampir dua kali lipat) dan Bukan Penerima Upah/BPU (lebih dari dua kali lipat). Di sisi lain, terjadi penurunan yang sangat drastis pada peserta aktif segmen Jasa Konstruksi (JAKON), dari sekitar 40 ribu menjadi 15 ribu.

Peningkatan cakupan aktif secara umum adalah dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi dan formalisasi tenaga kerja ("Efek Mandalika") yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja baik di sektor formal (PU) maupun informal (BPU).

Penurunan drastis pada segmen JAKON kemungkinan besar mendiagnosis bahwa fase puncak proyek-proyek konstruksi skala besar telah selesai. Skema JAKON yang bersifat perlindungan per proyek secara alamiah menurun seiring dengan rampungnya proyek-proyek masif tersebut.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional



Gambar 2.51 Tren Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, berbagai tahun (diolah)

Terjadi tren peningkatan yang sangat kuat dan akseleratif, meroket dari 71,7% pada tahun 2020 menjadi 100,73% pada tahun 2024. Lombok Tengah berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) sejak Tahun 2023 dengan melampaui ambang batas 95%.

Dengan tercapainya cakupan mendekati 100%, narasi pembangunan kesehatan di Lombok Tengah secara alami akan bergeser. Jika sebelumnya fokus utama adalah mengejar jumlah kepesertaan (kuantitas), maka ke depan fokusnya adalah memastikan penduduk benar-benar merasakan manfaat JKN melalui layanan yang bermutu, mudah dijangkau, dan tanpa diskriminasi (kualitas).

Indeks Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.26 Indeks Kesejahteraan Sosial Nasional, Nusa Tenggara Barat, dan Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	IKS Nasional	IKS NTB	IKS Lombok Tengah
2020	72,09	70,92	67,92
2021	72,63	71,30	68,35
2022	73,18	71,85	68,90
2023	NA	NA	NA
2024	NA	NA	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Lombok Tengah menunjukkan tren perbaikan yang lambat namun konsisten, naik dari 67,92 menjadi 68,90. Capaian IKS Lombok Tengah secara konsisten jauh di bawah rata-rata Provinsi NTB dan Nasional, menandakan adanya kesenjangan kesejahteraan sosial yang signifikan.

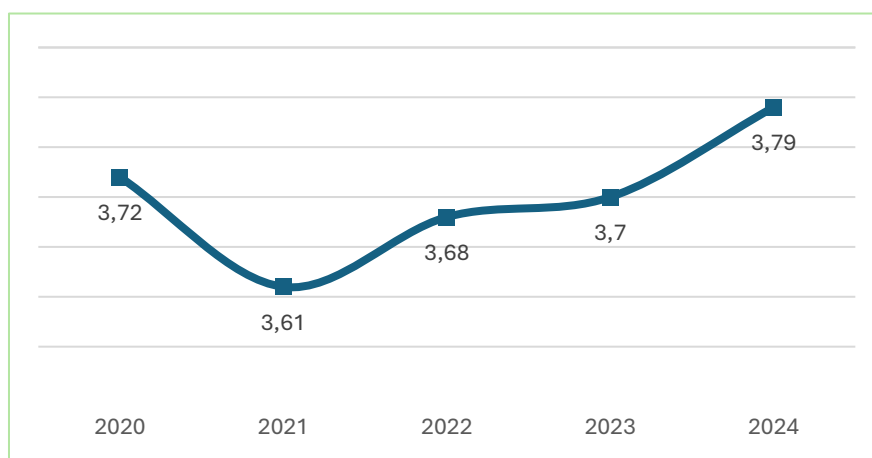
Peningkatan IKS yang lambat didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan efektivitas program perlindungan sosial (Bansos) pada periode tersebut. Keterlambatan capaian IKS dibandingkan provinsi dan nasional secara langsung mendiagnosis adanya tantangan pembangunan manusia yang struktural. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan rata-rata (RLS) dan capaian kesehatan (UHH) yang juga tertinggal, yang merupakan komponen fundamental dari kesejahteraan sosial.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai modal dasar pembangunan dan pelestarian budaya merupakan esensi dari bagian ini. Penjelasan akan difokuskan pada bagaimana agama menjadi landasan spiritual, etika, dan moral untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa.

1. Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Indeks Toleransi



Gambar 2.52 Tren Indeks Toleransi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Bapperida kabupaten Lombok Tengah, 2025

Indeks Toleransi di Lombok Tengah secara konsisten berada dalam kategori "Tinggi" selama periode 2020-2024, menandakan modal sosial yang kuat. Secara skor, indeks sempat turun pada 2021 (3,61), namun setelah itu menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan hingga mencapai titik tertingginya pada 2024 (3,79).

Kategori "Tinggi" yang stabil mendiagnosis adanya modal sosial dan kearifan lokal yang kuat di tengah masyarakat, yang menjadi fondasi bagi kerukunan. Penurunan sesaat pada 2021 kemungkinan merupakan imbas dari tekanan sosial-ekonomi saat puncak pandemi COVID-19, yang dapat sedikit mengganggu harmoni sosial. Tren perbaikan pasca-2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan sosial. Peningkatan interaksi yang positif, termasuk melalui sektor pariwisata yang membawa keberagaman, kemungkinan turut memperkuat kembali kohesi dan toleransi di masyarakat.

2. Pembangunan dan Pelestarian Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Kabupaten Lombok Tengah memiliki modal dasar kebudayaan yang sangat kuat, terutama pada dimensi Warisan Budaya yang dibuktikan dengan melimpahnya Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan dimensi Ekspresi Budaya yang tercermin dari semaraknya tradisi lokal yang masih hidup. Meskipun demikian, Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) daerah menghadapi tantangan signifikan yang menghambat potensinya. Tantangan utama terletak pada lambatnya proses penetapan status hukum cagar budaya yang menekan skor dimensi warisan, titik lemah pada Budaya Literasi yang terkonfirmasi oleh rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta belum optimalnya pemanfaatan Ekonomi Budaya sebagai penggerak ekonomi yang signifikan.

Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya

Tabel 2.27 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Lombok Tengah

Jenis Objek	Nama Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Terdaftar
Struktur	Batu Kuwur, Buwun Wali Nyatuq, Kemalik Lebe Sane, Makam Baloq Tui, makam batu lajang, Makam Batu Tinggang, makam Beleq Bawaq Joet, Makam Bile Tawah, Makam Dapur Sempene, Makam Gereng, Makam Guru Bangkol (Prapen), Makam Joret, Makam Katon Mujur, Makam Kedatuan Batujai, Makam Keleam, Makam Ketak, Makam Marong Bat, Makam Maulana Syarif Ali bin Alwi Alkadrani, Makam Mekar Sari ganti, Makam Memelaq, Makam Nyalak, Makam Nyatuq, Makam Patih kalong Asak, Makam Patih Raja Langko, makam Raden Batujai, Makam Raden Duran, Makam Raden Ganti, Makam Raden Ilang Muter, Makam Raden Ireng, Makam Raden Mas Guru Wirame (Baloq Ringgit), Makam Raden Wirecandre / Lokon, Makam Raden Wirengsane, Makam Randu, Makam Rangga Tapon, Makam Saleh, Makam Sayyid Ali Mani Mane bin Sayyid Ali Solo, makam Segampang, Makam Seketeng, Makam Semoyang, Makam tatik Getul, Makam Tebaong, Makam Tiwu Asem, makam Wareng Kandel, Pedewa Berhana, Pedewaq Kelebut, Pondasi Masjid Kuno Gunung Kelambi
Bangunan	Bale Beleq Datu Kerekok, Bale Beleq Pejanggik, Bale beleq Sukerare, Gedeng Beleq Bonjeruk, Makam Embung Puntiq, Makam Lamak Sure, Makam Marong Lauk, Masjid Kuno Rambitan, Masjid Kuno Sumbek, Perosotan Air Abangan Pringgarata
Situs	Batu Rantok, Makam Astane, Makam Serewa, Masjid Kuno Gunung Pujut, Situs Batu Rijang, Situs Gunung Pos, Situs Makam Pendem Mujur, Situs Makam Raden Kendring, Situs Sile Dendeng, situs Timbe Mas Labulie
Benda	Batu jai, Batu Penggorok, Batu Tulis, Mangkuk, Umpak

Sumber: Data Agregat ODCB, Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Kemdikbud, 2025 (data diolah)

Hanya sekitar 3 Cagar Budaya yang sudah teregistrasi di Aplikasi Data Pokok Kebudayaan (Masjid Kuno Gunung Pujut, Masjid Kuno Rambitan dan Makan Seriwa). Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total registrasi di Lombok Tengah masih berada di level yang rendah dan peningkatannya cenderung lambat.

Rendahnya persentase cagar budaya yang telah ditetapkan bukan disebabkan oleh kurangnya kekayaan budaya, melainkan karena adanya tantangan dalam proses penetapan itu sendiri. Penyebab utamanya adalah:

1. Penetapan status cagar budaya memerlukan proses panjang yang melibatkan kajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sebelum diterbitkannya SK Bupati.
2. Proses ini sering terhambat oleh kurangnya ketersediaan TACB yang tersertifikasi di tingkat kabupaten dan terbatasnya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengkajian.
3. Fokus pemerintah daerah kemungkinan besar masih pada tahap inventarisasi dan registrasi (pencatatan ODCB), bukan pada tahap penetapan (legalisasi).

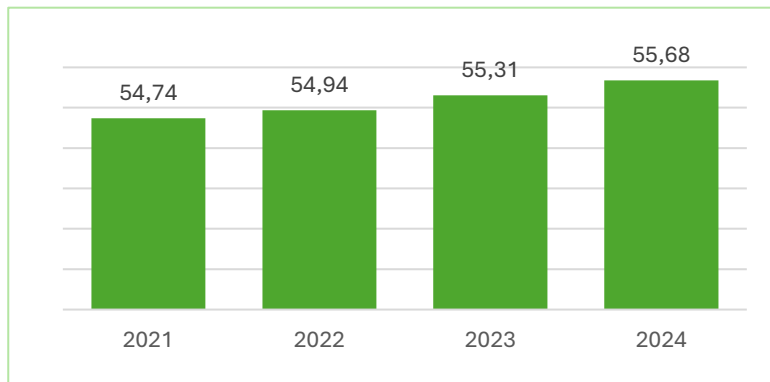
2.1.2.6. Keluarga berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan yang berkelanjutan berawal dari individu dan keluarga yang tangguh, serta masyarakat yang inklusif, menyoroti pentingnya penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan, serta upaya kolektif untuk menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas. Fokus utama juga diberikan pada penanganan isu ketimpangan gender dan strategi pengarusutamaan gender.

1. Pembangunan Keluarga dan Pemuda

Indeks Perlindungan Anak



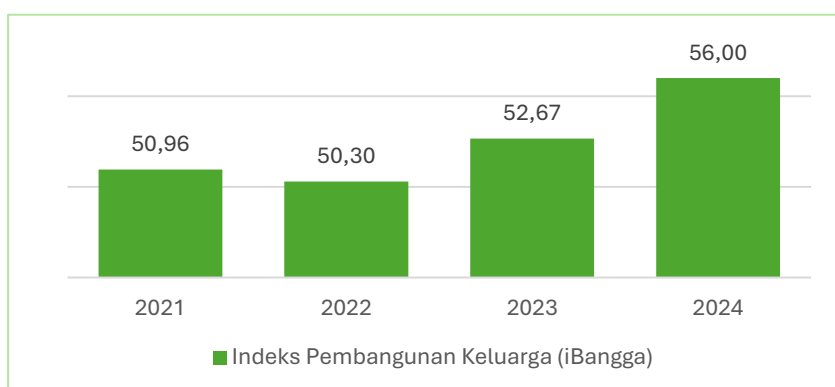
Gambar 2.53 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024

Sumber: DP3AP2KB Lombok Tengah, 2025

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Tengah telah meningkat sebesar 0,940 poin dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,313 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, dengan laju perbaikan yang sedikit mengakselerasi pada dua tahun terakhir.

Tren positif yang tak terputus ini mencerminkan adanya upaya perlindungan anak yang sistematis dan persisten, menandakan bahwa perbaikan yang terjadi merupakan hasil dari proses pembangunan jangka panjang yang efektif, bukan sekadar program sesaat.

Indeks Pembangunan Keluarga



Gambar 2.54 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024

Sumber: DP3AP2KB Lombok Tengah, 2025

Dari tahun 2021 hingga 2024, iBangga di Kabupaten Lombok Tengah telah meningkat sebesar 5,04 poin. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2024, menunjukkan adanya momentum perbaikan kualitas keluarga yang sangat kuat di akhir periode naik secara signifikan sebesar 3,33 poin dan mencapai titik tertinggi di angka 56,00.

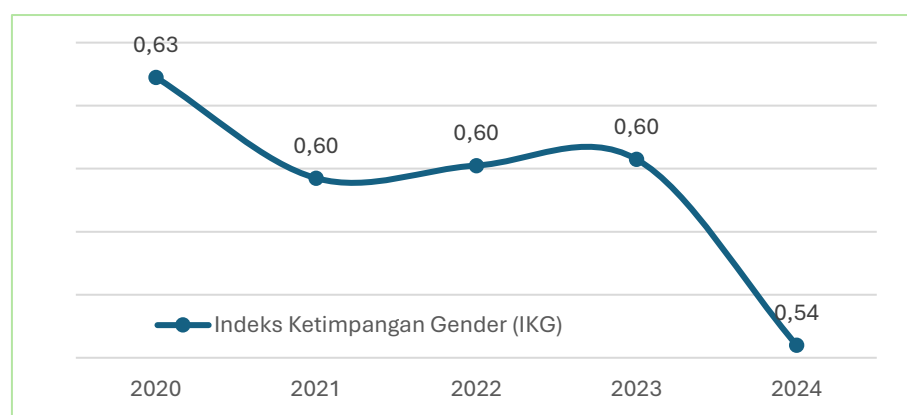
Pola pemulihan dan percepatan ini menandakan fondasi kualitas keluarga yang semakin kokoh serta keberhasilan dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi untuk mencapai tingkat ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Pemuda

Saat ini, narasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Lombok Tengah adalah tentang penantian akan data dasar yang krusial, karena pengukuran spesifik untuk kabupaten baru akan dimulai pada tahun 2025. Ketidadaan data ini menyebabkan perencanaan program kepemudaan menjadi kurang terukur dan masih mengacu pada kondisi umum provinsi. Meskipun demikian, kinerja IPP Provinsi NTB yang pada tahun 2024 mencapai 63,23, jauh melampaui rata-rata Nasional sebesar 56,33 memberikan harapan bahwa Lombok Tengah berada dalam ekosistem regional yang sangat mendukung.

2. Gender dan Masyarakat Inklusif

Indeks Ketimpangan Gender



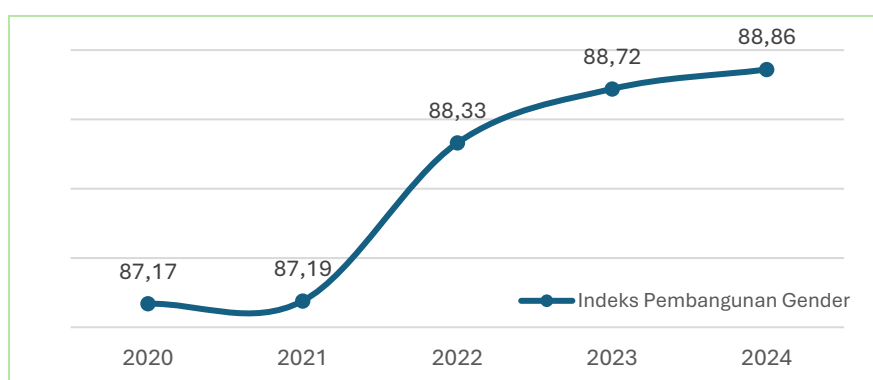
Gambar 2.55 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024

Sumber: DP3AP2KB Lombok Tengah, 2025

Selama periode 2020-2024, ketimpangan gender di Lombok Tengah berkurang sebesar 0,09 poin. Perbaikan terbesar secara absolut terjadi antara tahun 2023 dan 2024 dengan indeks turun tajam sebesar 0,06 poin menjadi 0,54, yang merupakan titik terendah (ketimpangan paling kecil) dalam periode lima tahun.

Data di atas mengindikasikan bahwa sebuah intervensi kebijakan atau program yang sangat efektif berhasil mengakselerasi upaya pengurangan ketidaksetaraan gender setelah melewati fase tantangan yang tercermin dalam lonjakan signifikan antara tahun 2023-2024.

Indeks Pembangunan Gender



Gambar 2.56 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lombok Tengah, 2021-2024

Sumber: DP3AP2KB Lombok Tengah, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren perbaikan yang konsisten namun sangat lambat, naik 1,69 poin dari 87,17 pada tahun 2020 menjadi 88,86 pada tahun 2024.

Perbaikan yang sangat lambat pada indeks pembangunan gender mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, kesenjangan gender dalam capaian pembangunan manusia masih menjadi tantangan struktural yang signifikan. Akar masalah utamanya kemungkinan besar terletak pada dimensi ekonomi, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah akibat kuatnya peran domestik (mengurus rumah tangga). Hal ini diperkuat oleh adanya kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan tinggi, yang secara keseluruhan membuat kemajuan pembangunan bagi perempuan belum secepat laki-laki, meskipun perekonomian daerah tumbuh pesat.

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Di Kabupaten Lombok Tengah, upaya untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dunia kerja menghadapi tantangan besar. Meskipun ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 yang secara eksplisit mengamankan kuota pekerjaan 1-2%, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penyerapan mereka tetap sangat rendah.

Kondisi ini dipicu oleh dua masalah utama. Pertama, kekosongan data yang membuat populasi penyandang disabilitas tidak bisa menjadi bagian yang akuntabel perencanaan pembangunan daerah. Tanpa data yang akurat, sulit untuk merancang program atau kebijakan yang tepat sasaran. Kedua, adanya kelemahan struktural dan institusional. Banyak penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan rendah, sementara penegakan hukum dan kebijakan kuota menjadi tidak efektif karena tidak adanya mekanisme pemantauan yang jelas. Belum beroperasinya Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan juga memperparah situasi ini.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor kunci dan penggerak utama pembangunan ekonomi suatu daerah. Kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan SDM sangat menentukan daya saing dan kemakmuran suatu wilayah.

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja

Tabel ini menunjukkan persentase orang yang bekerja di dalam kelompok angkatan kerja untuk setiap tingkat pendidikan. Angka di bawah 100% mengindikasikan adanya pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan tersebut.

Pendidikan Tertinggi	Laki-laki + Perempuan (%)	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
Pendidikan Menengah			
SMA Umum	96,35	95,80	97,22
SMA Kejuruan	91,96	92,68	89,57
Pendidikan Tinggi			
Diploma I/II/III	95,35	100,00	76,78
Universitas	98,43	100,00	96,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 (data diolah)

Lulusan SMA Kejuruan dan terutama Diploma I/II/III menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA Umum dan Universitas.

Terdapat kesenjangan gender yang sangat signifikan pada tingkat pengangguran, terutama bagi lulusan perempuan jenjang Diploma. Tingkat pengangguran terbuka untuk perempuan lulusan Diploma ($100\% - 76,78\% = 23,22\%$) jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (0%). Hal ini menandakan adanya tantangan serius bagi lulusan perempuan jenjang diploma untuk masuk ke pasar kerja.

Angka Beban Ketergantungan

Tahun	Total Penduduk (Jiwa)	Penduduk Usia 0-14 Tahun (Jiwa)	% (0-14 Tahun)	Penduduk Usia Produktif (15-59 Tahun) (Jiwa)	% (15-59 Tahun)	Penduduk Usia Lanjut (60+ Tahun) (Jiwa)	% (60+ Tahun)
2020	1.034.859	276.755	26,74%	690.706	66,74%	87.398	8,45%
2021	1.049.708	278.789	26,56%	679.450	64,73%	91.469	8,71%
2022	1.067.682	281.603	26,38%	680.030	63,70%	96.049	8,99%
2023	1.099.211	298.972	27,20%	695.358	63,26%	104.881	9,54%
2024	1.128.716	302.417	26,80%	716.450	63,47%	109.849	9,73%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Tabel 2.30 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Tahun	Angka Beban Ketergantungan Total	Angka Beban Ketergantungan Anak (0-14 tahun)	Angka Beban Ketergantungan Lanjut Usia (65+ tahun)
2020	45,35	38,13	7,22
2021	46,61	38,94	7,67
2022	47,24	39,20	8,04
2023	49,73	40,72	9,00
2024	49,38	39,99	9,28

Struktur umur penduduk Lombok Tengah sedang mengalami pergeseran signifikan. Pangsa penduduk usia produktif (15-59 tahun) terus menurun, sementara pangsa penduduk usia lanjut (60+ tahun) meningkat secara konsisten. Pergeseran ini secara langsung menyebabkan Angka Beban Ketergantungan terus meningkat, yang terutama didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk lansia.

Menurunnya pangsa penduduk usia produktif yang diiringi naiknya angka ketergantungan adalah sinyal jelas bahwa periode puncak bonus demografi sedang berlalu, sehingga menuntut percepatan pemanfaatan sisa peluang yang ada. Sementara itu, peningkatan konsisten proporsi penduduk lansia merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan masa lalu, khususnya keberhasilan program KB yang menekan angka kelahiran dan peningkatan Usia Harapan Hidup berkat perbaikan sektor kesehatan, yang keduanya menandai pergeseran struktural populasi yang krusial untuk diantisipasi.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pemanfaatan IPTEK dan inovasi menjadi kunci untuk menjaga dan mempercepat produktivitas, serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Dalam sub bab ini, kami akan menganalisis kondisi IPTEK dan inovasi, didukung oleh indikator-indikator krusial seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Inovasi Daerah, untuk mengevaluasi peran mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan.

1. Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan

Tabel 2.31 Distribusi Ekonomi pada PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lombok Tengah (persen), Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,03	26,18	25,07	25,07	25,01
B. Pertambangan dan Penggalan	4,95	5,05	4,66	4,62	4,53
C. Industri Pengolahan	4,87	4,74	4,61	4,5	4,64
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1
F. Konstruksi	15,52	17,66	16,21	16,27	15,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	12,13	11,94	12,24	12,41	12,66
H. Transportasi dan Pergudangan	9,6	8,68	11,59	12,4	12,6
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	1	1,25	1,27	1,34
J. Informasi dan Komunikasi	1,74	1,73	1,67	1,63	1,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,5	2,67	2,81	2,7	2,69
L. Real Estat	4,09	3,96	3,88	3,71	3,67
M,N. Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	6,27	6,19	5,9	5,55	5,58
P. Jasa Pendidikan	5,14	5,03	4,91	4,81	4,8
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,58	2,67	2,54	2,47	2,5
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,19	2,16	2,3	2,27	2,31
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Tengah saat ini masih sangat minim, berada di bawah 5% dan belum mampu menjadi motor penggerak utama. Pertumbuhan sektor ini juga lebih lambat dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa "Efek Mandalika" belum berdampak signifikan pada sektor industri pengolahan, tidak seperti sektor jasa dan konstruksi yang tumbuh pesat.

Rendahnya kontribusi ini mengindikasikan bahwa potensi hilirisasi, khususnya pengolahan hasil pertanian lokal, belum tergarap dengan optimal. Mayoritas industri yang ada masih bersifat skala kecil (UMKM). Meskipun demikian, adanya sedikit perbaikan rasio pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai sinyal positif awal, menandakan mulai tumbuhnya industri-industri kecil yang secara perlahan mendukung dan melengkapi sektor pariwisata.

Sektor Akomodasi, Makan dan Minum

Kontribusi (rasio) sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan konsisten sejak tahun 2022. Pertumbuhan pesat ini merupakan dampak langsung dari "Efek Mandalika" dan pulihnya pariwisata, yang mendiagnosis bahwa sektor ini telah menjadi mesin pertumbuhan baru (leading sector) bagi perekonomian daerah. Kinerja sektor ini dapat dijadikan indikator utama untuk memantau kesehatan industri pariwisata Lombok Tengah secara keseluruhan. Fluktuasi pada sektor ini akan menjadi sinyal dini terhadap kondisi pariwisata secara umum.

Sektor Ekonomi Kreatif

Tabel 2.32 PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Lombok Tengah (Harga Berlaku, Miliar Rupiah, 2020-2024)

URAIAN	PROPORSI NILAI EKRAF***	2020	2021	2022	2023*	2024**
C. Industri Pengolahan	0,2688	218,26	225,32	238,32	256,88	281,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,1295	261,90	273,62	305,15	341,40	370,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,2985	50,84	52,74	72,07	80,39	90,43
J. Informasi dan Komunikasi	0,1432	41,39	43,76	46,09	49,57	51,98
M,N. Jasa Perusahaan	0,0500	1,27	1,28	1,46	1,63	1,75
P. Jasa Pendidikan	0,0013	1,11	1,16	1,23	1,33	1,41
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,0065	2,38	2,48	2,88	3,13	3,39
Total Nilai Ekraf		577,15	600,36	667,20	734,33	801,31
Proporsi Nilai Ekraf terhadap PDRB		3,46%	3,39%	3,47%	3,46%	3,54%

Catatan: *angka sementara **angka sangat sementara

***Menggunakan proporsi sesuai dengan metadata dari Bappenas 2024

Sumber: BPS, Bappenas, Bapperida, 2025 (data diolah)

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap total perekonomian daerah relatif kecil dan stabil, berkisar antara 3,39% hingga 3,54% selama periode 2020-2024. Ini menunjukkan pertumbuhannya sejauh ini hanya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi umum, belum menjadi pendorong utama.

Meskipun proporsinya kecil, nilai absolut PDRB Ekraf menunjukkan pertumbuhan nominal yang kuat dan konsisten, meningkat dari Rp 577,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 801,31 miliar pada tahun 2024 (sebuah kenaikan sekitar 39%).

Perekonomian kreatif Lombok Tengah sangat didominasi oleh dua subsektor utama:

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (mencakup kuliner, kafe, dll) sebesar 29,85%.
- Industri Pengolahan (mencakup kriya/kerajinan seperti tenun, gerabah) sebesar 26,88%.

Ekonomi kreatif di Lombok Tengah sangat bergantung dan terintegrasi dengan sektor pariwisata. Pertumbuhannya didorong langsung oleh perkembangan pesat pariwisata yang meningkatkan

permintaan pada subsektor kuliner dan kriya (kerajinan) untuk oleh-oleh. Kontribusinya yang masih kecil (<4%) terhadap PDRB menandakan adanya potensi besar yang belum tergarap secara maksimal.

2. Kewirausahaan dan Koperasi

Rasio Kewirausahaan Daerah

Tabel 2.33 Rasio Kewirausahaan Daerah (RKD) Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun (0)	Pengusaha dengan Buruh Tetap (A)	Total Angkatan Kerja (B)	Rasio Kewirausahaan Daerah (A)/(B)x100 %
2020	9.821	534.601	1,84%
2021	5.246	550.270	0,95%
2022	6.582	539.755	1,22%
2023	9.026	619.421	1,46%
2024	8.448	652.591	1,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020-2024 (data diolah)

Penurunan tajam dari puncaknya 1,84% (2020) ke titik terendah 0,95% (2021) dan pemulihan dari tahun 2021 hingga 2023 (mencapai 1,46%) dan melemah kembali pada tahun 2024 menjadi 1,29%. Secara keseluruhan, trennya fluktuatif dan capaian 2024 masih di bawah level 2020.

Fluktuasi Rasio Kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi. Penurunan drastis pada 2021 merupakan dampak pandemi COVID-19 yang memaksa usaha kecil mengurangi pekerja tetap. Tren pemulihan pada 2022-2023 didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan "Efek Mandalika", sementara sedikit pelemahan pada 2024 menandakan normalisasi laju pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, rasio yang konsisten di bawah 2% mengindikasikan bahwa struktur kewirausahaan daerah masih didominasi oleh usaha skala mikro dan mandiri, bukan oleh pengusaha yang berorientasi pada pertumbuhan.

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Tabel 2.34 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (2020-2024)

Tahun	Volume Usaha Koperasi (Rupiah)	PDRB Harga Berlaku (Rupiah)	Rasio (%)
2020	105.913.378.000	16.666.620.000.000	0,64
2021	105.367.270.333	17.686.600.000.000	0,60
2022	166.823.817.000	19.243.330.000.000	0,87
2023	98.335.548.937	21.250.620.000.000	0,46
2024	84.888.672.921	22.604.870.000.000	0,38

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Kontribusi ekonomi koperasi terhadap PDRB secara konsisten sangat rendah (selalu di bawah 1%). Trennya fluktuatif, sempat mencapai puncak 0,87% pada tahun 2022. Terjadi penurunan drastis setelah 2022, hingga anjlok ke titik terendah 0,38% pada tahun 2024.

Rasio yang konsisten di bawah 1% mendiagnosis bahwa peran ekonomi koperasi di Lombok Tengah masih sangat marginal. Penurunan drastis rasio pada tahun 2024, yang disebabkan oleh anjloknya volume usaha koperasi sementara PDRB terus tumbuh, merupakan sinyal adanya masalah serius di dalam sektor koperasi. Hal ini bisa mengindikasikan terjadinya kesulitan usaha yang meluas atau adanya tantangan dalam pencatatan data.

3. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.35 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Lombok Tengah (2021-2024)

Tahun	Nilai IGA	Kategori IID (Berdasarkan Kriteria Tahun Terkait)
2021	37,7	Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2021)
2022	56,08	Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2021)
2023	33,09	Kurang Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2023)
2024	60,01	Sangat Inovatif (Berdasarkan Kriteria 2023)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 (data diolah)

Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sangat fluktuatif: setelah naik pada 2022 (56,08), indeks anjlok drastis pada 2023 (33,09), lalu melonjak ke titik tertinggi pada 2024 (60,01). Perlu dicatat, terdapat perubahan kriteria penilaian antara periode 2022 dan 2023 yang turut memengaruhi hasil.

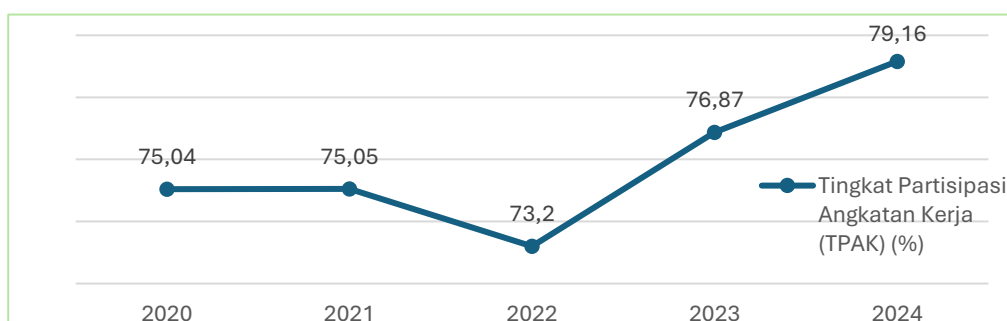
Fluktuasi ekstrem pada Indeks Inovasi Daerah (IID) kemungkinan besar bukan cerminan dari kapasitas inovasi yang naik-turun, melainkan mendiagnosis adanya inkonsistensi dalam proses administratif pelaporan inovasi setiap tahunnya. Anjloknya skor pada 2023 dapat dilihat sebagai kegagalan administratif, sementara lonjakan skor menjadi "Sangat Inovatif" pada 2024 menunjukkan keberhasilan perbaikan dalam proses pendataan dan pelaporan. Hal ini membuktikan bahwa potensi inovasi di daerah sebenarnya ada, namun tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi pelaporan agar skor indeks dapat merefleksikan kapasitas yang sesungguhnya secara berkelanjutan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 2.36 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah (2020-2024)

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)
2020	75,04	3,74	538.728	518.563	20.165
2021	75,05	2,33	546.494	533.762	12.732
2022	73,2	3,02	540.424	524.080	16.344
2023	76,87	2,78	656.129*	637.899*	18.230*
2024	79,16	2,55	651.585	634.967	16.618

Catatan: *= data merupakan perhitungan berdasarkan metadata yang ada
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (data diolah)



Gambar 2.57 Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2020-2024 (data diolah)

Tren TPAK tidak linier, melainkan membentuk pola seperti huruf 'V'. Setelah stabil di sekitar 75% pada 2020-2021, TPAK mengalami penurunan signifikan menjadi 73,2% pada tahun 2022. Sejak titik terendahnya di tahun 2022, TPAK menunjukkan tren pemulihan dan peningkatan yang sangat kuat, naik menjadi 76,87% pada 2023 dan mencapai puncaknya di 79,16% pada tahun 2024. Angka TPAK di atas 70% dan mendekati 80% menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tergolong sangat tinggi.

Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 mendiagnosis adanya fenomena pekerja pesimis (*discouraged worker*) akibat perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi pada tahun tersebut kemungkinan membuat sebagian penduduk usia kerja berhenti mencari pekerjaan dan keluar dari angkatan kerja, karena merasa sulit mendapatkan pekerjaan. Namun, kondisi ini berbalik drastis pada 2023-2024, di mana TPAK meningkat secara akseleratif. Kenaikan ini didorong oleh "Efek Mandalika" yang menciptakan banyak peluang kerja sehingga mampu menarik kembali individu yang sebelumnya tidak aktif secara ekonomi untuk masuk ke pasar kerja. Kombinasi antara kenaikan TPAK dan penurunan tingkat pengangguran (TPT) pada periode yang sama adalah indikator terkuat yang menunjukkan kesehatan dan daya tarik pasar tenaga kerja di daerah.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Transformasi ekonomi yang berkelanjutan didorong oleh implementasi ekonomi hijau dan biru, yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan tinggi sambil meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bagian ini akan menganalisis kondisi penerapan kedua konsep ini di Kabupaten Lombok Tengah.

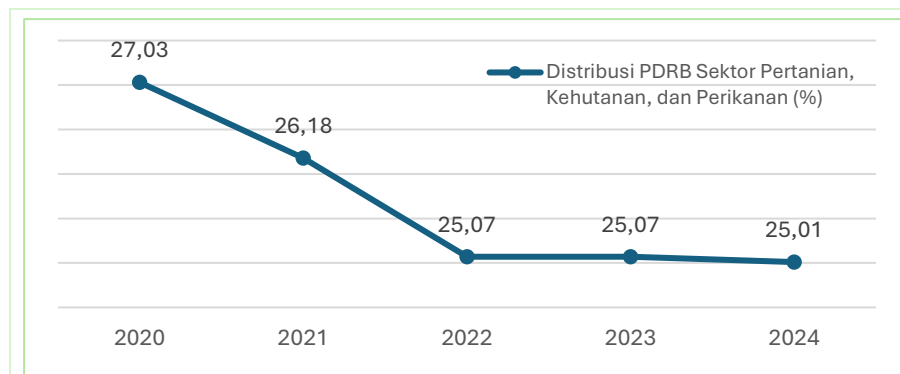
1. Penggunaan Energi Terbarukan (EBT)

Proporsi fasilitas pemerintah yang menggunakan Energi Terbarukan

Porsi fasilitas pemerintah yang memakai Energi Terbarukan (EBT) adalah indikator efektif kemajuan EBT, karena pemerintah berperan sebagai teladan. Data mereka mudah diukur, dan keberhasilan ini akan mendorong pihak swasta serta masyarakat. Meskipun baru satu dari 926 fasilitas pemerintah yang memakai panel surya, ada optimisme besar untuk terus mengembangkannya.

2. Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



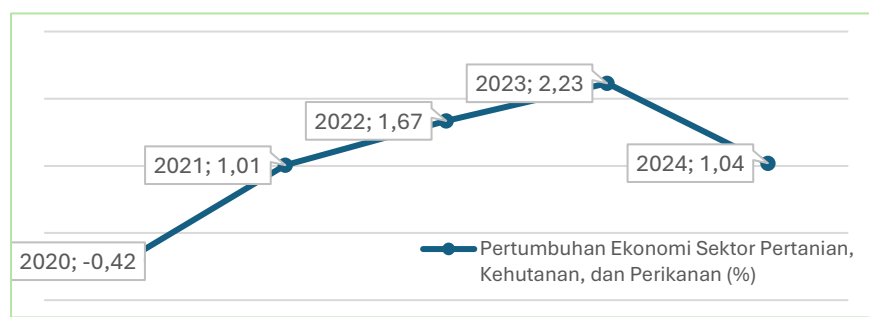
Gambar 2.58 Tren Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (data diolah)

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dari 27,03% (2020) menjadi sekitar 25% pada periode 2022-2024. Meskipun proporsinya menurun, sektor ini tetap menjadi pilar terbesar perekonomian Kabupaten Lombok Tengah.

Penurunan proporsi sektor pertanian dalam PDRB bukanlah cerminan kinerjanya yang memburuk, melainkan sebuah tanda transformasi struktural ekonomi. Hal ini terjadi karena pertumbuhan sektor lain—khususnya jasa dan konstruksi yang didorong oleh perkembangan pesat sektor pariwisata—jauh lebih cepat dan eksplosif. Meskipun pangsa menyusut, sektor pertanian tetap berperan vital sebagai bantalan ekonomi yang memberikan stabilitas dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun, tantangan utamanya adalah rendahnya pertumbuhan produktivitas riil di sektor ini dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Gambar 2.59 Tren Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (data diolah)

Tren menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Setelah mengalami pertumbuhan negatif (-0,42%) di tahun 2020, sektor ini mengalami pemulihan kuat yang mencapai puncaknya di 2023 dengan pertumbuhan 2,23%. Namun, tren positif tersebut melambat tajam pada 2024 menjadi 1,04%.

Data menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah sangat rentan terhadap faktor eksternal dan memiliki tantangan produktivitas struktural. Setelah mengalami kontraksi pada 2020 akibat pandemi (-0,42%) dan pulih pesat hingga mencapai puncak 2,23% di 2023, pertumbuhannya anjlok lebih dari setengah menjadi 1,04% di 2024, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor iklim seperti El Niño atau La Niña. Tingkat pertumbuhan yang secara rata-rata rendah ini mengindikasikan bahwa sektor ini masih memiliki masalah produktivitas, seperti ketergantungan pada faktor alam dan kurangnya adopsi teknologi modern.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi, mencakup pengembangan super platform, percepatan adopsi teknologi, dan produksi talenta digital. Bagian ini akan menganalisis sejauh mana upaya ini telah diimplementasikan di Kabupaten Lombok Tengah, dengan meninjau indikator utama seperti 1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk mengevaluasi kesiapan dan dampak transformasi digital terhadap kemajuan daerah.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Tabel 2.37 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Lombok Tengah per Pilar dan Sub-Pilar (2022-2024)

Pilar/Sub-Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	41.24	59.97	55.34
- Akses dan adaptasi teknologi digital	33.35	60.87	67.44
- Ekosistem pembelajaran	49.14	48.38	43.51
- Digitalisasi pemerintah	-	81.00	59.78
Keterampilan Digital	56.70	64.14	62.16
- Komplementaritas	52.83	55.26	59.78
- Pengenalan	64.76	68.19	67.98
- Keamanan TIK	52.48	68.75	58.78
Pemberdayaan	25.46	26.98	27.66
- Konsumen/pengguna	27.21	31.09	34.64
- Penjual/penyedia	23.71	22.87	20.69
Pekerjaan	45.40	33.97	39.69
- Permintaan	56.16	48.21	61.54
- Penawaran	34.64	19.72	17.84
IMDI Kabupaten Lombok Tengah	42.17	46.52	45.97

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Skor IMDI total Kabupaten Lombok Tengah naik signifikan pada 2023 (46,52), namun sedikit menurun pada 2024 (45,97).

- Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, Pilar Keterampilan digital, dan Pilar Pemberdayaan menunjukkan peningkatan yang konsisten
- Pilar Pekerjaan menunjukkan tren penurunan yang signifikan, jatuh dari 45,40 menjadi 39,69. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya sub-pilar Penawaran (dari 34,64 menjadi 17,84).

Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil membangun fondasi digital yang kuat. Berkat program pemerintah dan investasi swasta, jangkauan internet dan adopsi teknologi di tengah masyarakat

telah melesat pesat. Namun, keberhasilan di sisi infrastruktur ini belum diimbangi oleh pemanfaatan di sisi ekonomi. Pertumbuhan yang terjadi belum mampu menciptakan lapangan kerja digital yang memadai, yang mengindikasikan bahwa masyarakat lebih berperan sebagai konsumen daripada produsen di ranah digital. Salah satu akar masalahnya diduga adalah adanya kesenjangan keterampilan (*skills gap*), di mana kemampuan digital yang ada mungkin masih bersifat dasar dan belum sesuai dengan kebutuhan spesifik ekonomi digital yang lebih maju.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Investasi dan Pembentukan Modal

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Tabel 2.38 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.296,65	12.761,56	13.791,71	14.789,22	15.857,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	210,00	214,96	238,87	263,62	299,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.417,01	2.474,09	2.514,57	2.611,03	2.821,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.307,25	9.560,22	9.512,91	10.646,12	11.029,88
5. Perubahan Inventori	51,39	22,40	24,15	19,94	8,23
6. Net Ekspor	-6.615,68	-7.346,64	-6.838,89	-7.079,30	-7.411,57
Produk Domestik Regional Bruto	16.666,62	17.686,60	19.243,33	21.250,62	22.604,87

Catatan: *angka sementara **angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2025



Gambar 2.60 Tren Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Lombok Tengah dalam Miliar Rupiah, 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah didorong oleh investasi masif akibat pembangunan KEK Mandalika, yang terlihat dari tingginya kontribusi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB (Pada tahun 2024, kontribusinya mencapai sekitar 48,8% dari total PDRB, menandakan hampir separuh aktivitas ekonomi berasal dari kegiatan investasi). Penurunan investasi pada tahun 2022 hanya merupakan jeda siklus konstruksi, bukan hilangnya kepercayaan investor. Meskipun pertumbuhan berbasis investasi ini menciptakan lapangan kerja, tantangan utamanya adalah memastikan aset-aset yang telah dibangun dapat beroperasi secara produktif untuk menopang ekonomi saat fase konstruksi berakhir.

Realisasi Investasi Daerah

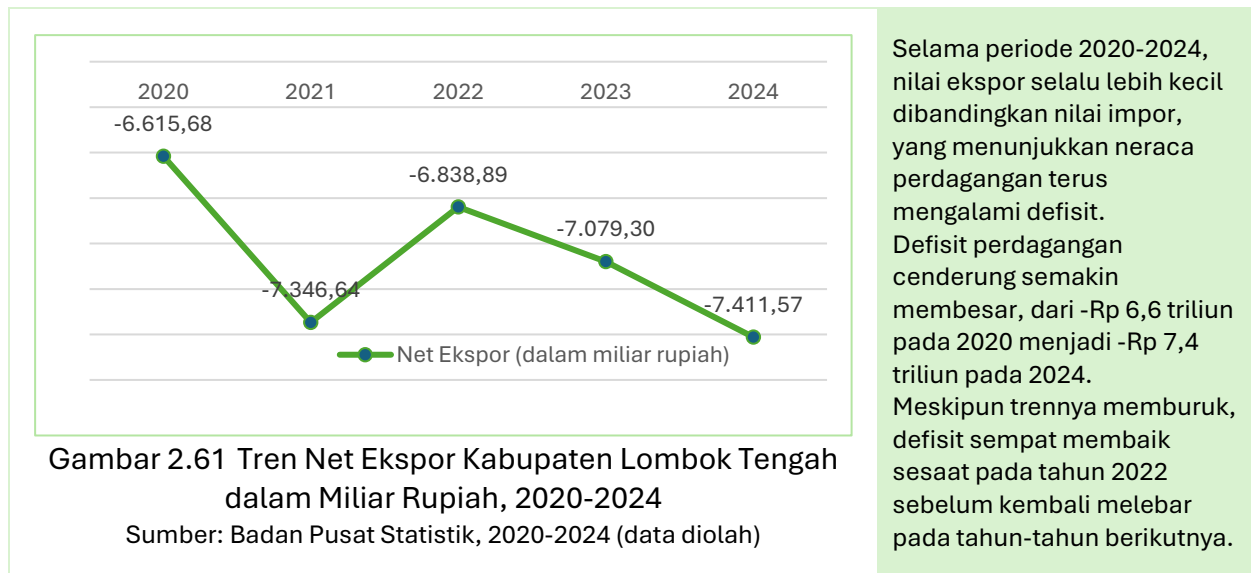
Realisasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 hanya mencapai Rp 1,12 triliun, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 3 triliun. Angka ini hanya mencapai sekitar 37,19%

dari target, menunjukkan adanya kegagalan pencapaian target yang signifikan. Penyebab utamanya adalah: 1) Target yang mungkin terlalu ambisius, dan 2) Penundaan realisasi proyek-proyek besar.

Perlu diingat bahwa data realisasi investasi dari DPMPTSP ini hanya mencakup proyek-proyek terdaftar (PMA/PMDN), dan tidak sama dengan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) yang digunakan dalam PDRB. PMTB mencakup semua investasi, termasuk dari pemerintah, rumah tangga, dan sektor informal yang tidak terdaftar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar investasi di Lombok Tengah didominasi oleh belanja pemerintah dan masyarakat, bukan dari proyek investasi besar yang terdaftar.

2. Kinerja Perdagangan Luar Negeri

Net Ekspor



Gambar 2.61 Tren Net Ekspor Kabupaten Lombok Tengah dalam Miliar Rupiah, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (data diolah)

Defisit perdagangan yang terjadi di Lombok Tengah adalah konsekuensi dari model pertumbuhan berbasis investasi. Tingginya impor didorong oleh kebutuhan untuk:

1. Proyek konstruksi,
2. Operasional pariwisata, dan
3. Peningkatan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, nilai ekspor, yang masih bergantung pada komoditas primer (pertanian, perikanan), tidak mampu mengimbangi laju impor. Perbaikan defisit yang terjadi pada 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh melambatnya aktivitas investasi pada tahun tersebut, yang secara langsung mengurangi impor barang modal.

3. Akses Permodalan dan Inklusi Keuangan

Rasio Total Kredit terhadap PDRB

Tabel 2.39 Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah, 2022-2023

Tahun	PDRB (dalam miliar rupiah)	Total Kredit (dalam miliar rupiah)	Total Kredit/PDRB
2022	19.243,33	3.313,29	0,172178482
2023	21.250,62	3.749,06	0,176421261

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024 (data diolah)

Rasio Total Kredit terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan, naik dari 0,172 (atau 17,2%) pada tahun 2022 menjadi 0,176 (atau 17,6%) pada tahun 2023. Total kredit tumbuh sekitar 13,15%, sementara PDRB tumbuh sekitar 10,43%.

Tingkat kedalaman finansial di Kabupaten Lombok Tengah masih tergolong rendah, dengan rasio 17-18%. Ini menunjukkan bahwa peran perbankan formal dalam membiayai aktivitas ekonomi lokal

belum dominan, di mana sebagian besar pendanaan masih berasal dari modal sendiri atau sumber informal. Meskipun demikian, tren rasio yang meningkat merupakan sinyal positif bahwa sektor perbankan mulai berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat, seperti yang dipicu oleh "Efek Mandalika." Rendahnya rasio ini juga mengindikasikan bahwa proyek investasi skala besar di Lombok Tengah umumnya didanai oleh sumber di luar perbankan lokal, seperti investasi pemerintah pusat, Penanaman Modal Asing (PMA), atau dana korporat besar.

Rasio Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB

Meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) secara nominal sedikit meningkat dari Rp 1.625,71 Miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 1.627,81 Miliar pada tahun 2023, rasionya terhadap PDRB justru mengalami penurunan dari sekitar 8,45% menjadi 7,66%. Secara diagnostik, rasio yang tergolong rendah dan menurun ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan simpanan masyarakat di perbankan formal jauh lebih lambat dibandingkan ledakan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Hal ini dapat menandakan bahwa peningkatan pendapatan lebih banyak dialokasikan untuk konsumsi, diinvestasikan pada aset non-finansial (properti), atau keuntungan ekonomi skala besar tidak tersimpan di sistem perbankan lokal.

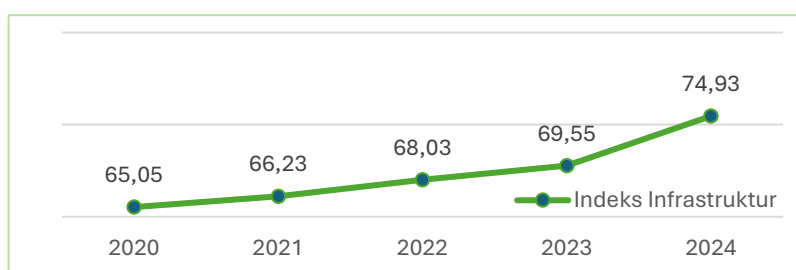
Rasio Nilai Transaksi Saham

Nilai rata-rata tahunan transaksi saham di Kabupaten Lombok Tengah meningkat dari sekitar Rp 31 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 32 triliun pada tahun 2023. Secara diagnostik, nilai yang luar biasa besar ini—jauh melampaui total PDRB daerah pada tahun-tahun tersebut—mengindikasikan bahwa aktivitas pasar modal tidak didominasi oleh investor ritel lokal. Sebaliknya, ini menandakan adanya konsentrasi modal finansial dari investor institusional atau korporasi besar yang memiliki rekening terdaftar di Lombok Tengah, kemungkinan besar terkait dengan geliat investasi pada proyek-proyek strategis. Dengan demikian, angka ini lebih mencerminkan status Lombok Tengah sebagai pusat pencatatan aktivitas finansial tingkat tinggi daripada partisipasi masyarakat umum di pasar saham.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas

Indeks Infrastruktur



Gambar 2.62 Tren Indeks Infrastruktur Kabupaten Lombok Tengah, 2020-2024

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, 2025 (data diolah)

Indeks Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan berakselerasi, naik dari 65,05 pada tahun 2020 menjadi 74,93 pada tahun 2024, dengan lonjakan paling signifikan terjadi pada tahun terakhir.

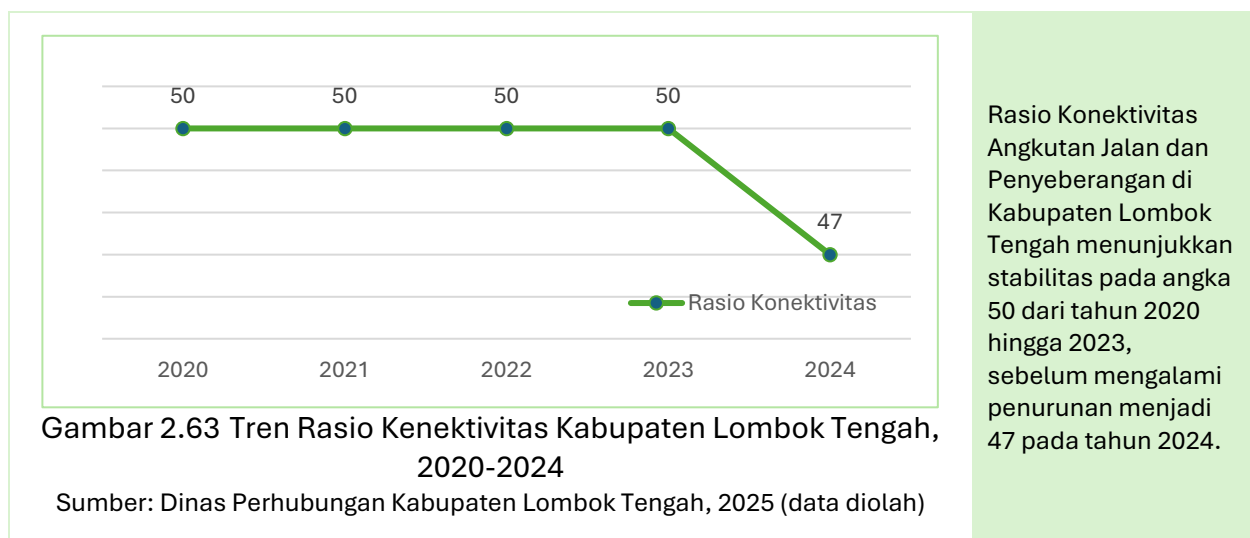
Tren positif ini adalah cerminan langsung dari adanya investasi infrastruktur yang masif dan berkelanjutan, terutama untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan wilayah penyangganya. Akselerasi pada tahun 2024 kemungkinan besar menandakan rampungnya sejumlah proyek strategis seperti jalan, sistem penyediaan air minum,

dan fasilitas dasar lainnya yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) adalah alat ukur kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan telekomunikasi, berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas investasi dan kualitas layanan publik. Meskipun data IKLI yang teragregasi untuk seluruh Kabupaten Lombok Tengah dari 2020-2024 tidak tersedia secara komprehensif, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Praya Barat dari 82 poin (2023) menjadi 83 poin (2024) menunjukkan tren positif dalam kualitas layanan di tingkat lokal. Ketiadaan data kabupaten secara keseluruhan mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaporan dan konsolidasi data, yang menghambat evaluasi kebijakan infrastruktur secara holistik di tingkat daerah.

Rasio Konektivitas



Periode stabilitas di angka 50 mengindikasikan bahwa sistem transportasi hanya mampu memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan masyarakat secara konsisten. Penurunan pada tahun 2024 menjadi sinyal peringatan yang mendiagnosis adanya ketidakseimbangan baru antara penyediaan layanan dan permintaan, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan trayek yang tidak diimbangi dengan penambahan layanan baru atau penurunan efisiensi sistem yang ada.

2. Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Tabel 2.40 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2020-2024)

Tahun	Lombok Tengah (%)	Nusa Tenggara Barat (%)
2020	61,55	-
2021	-	-
2022	55,66	62,30
2023	59,21	66,31
2024	60,30	67,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024 (data diolah)

Persentase rumah layak huni di Lombok Tengah menunjukkan pola "V-shape", di mana terjadi penurunan signifikan dari 61,55% pada tahun 2020 menjadi 55,66% pada tahun 2022, sebelum berangsur pulih menjadi 60,30% pada tahun 2024.

Penurunan pada tahun 2022 kemungkinan disebabkan oleh kombinasi dampak ekonomi pandemi yang menunda perbaikan rumah dan potensi perubahan metodologi pendataan. Tren pemulihan

setelah 2022 merupakan sinyal positif yang didorong oleh membaiknya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan efektivitas program bantuan perbaikan rumah oleh pemerintah. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 yang masih di bawah level tahun 2020 dan konsisten tertinggal dari rata-rata Provinsi NTB (67,74%) mengindikasikan bahwa tantangan pemenuhan rumah layak huni masih besar.

3. Pembangunan dan Kemandirian Desa

Persentase Desa Mandiri

Tabel 2.41 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023)

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Total Desa	Persentase Desa Mandiri
2020	10	67	50	0	127	7,87
2021	15	70	42	0	127	11,81
2022	29	73	25	0	127	22,83
2023	52	64	26	0	142	36,62

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Status desa "Tertinggal" dan "Sangat Tertinggal" yang konsisten nol sejak tahun 2020 dan lonjakan akseleratif jumlah Desa Mandiri sebanyak 42 desa antara tahun 2020 dan 2023

Kemajuan pesat Desa Mandiri di Kabupaten Lombok Tengah merupakan cerminan dari efektivitas program pemberdayaan desa dan pemanfaatan dana desa yang terfokus, yang didukung oleh dampak ikutan dari pertumbuhan ekonomi regional ("Efek Mandalika"). Keberhasilan ini semakin menonjol karena tren positif ini tetap berlanjut kuat bahkan setelah adanya penambahan jumlah desa menjadi 142 pada tahun 2023, yang menunjukkan resiliensi dan momentum pembangunan desa yang kuat.

Indeks Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 mengubah Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID), yang bertujuan untuk pengukuran pembangunan desa yang lebih komprehensif. Perubahan ini mencakup penyederhanaan nama, penambahan dimensi dari tiga menjadi enam (Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa), dan penyesuaian indikator serta metode pengumpulan data. Perubahan ini membuat perbandingan data sebelum dan sesudah tahun 2025 menjadi lebih kompleks, karena fokusnya bergeser dari sekadar capaian pembangunan desa menjadi pengukuran ketahanan desa berbasis data yang lebih terintegrasi.

4. Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Tabel 2.42 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (2020-2024)

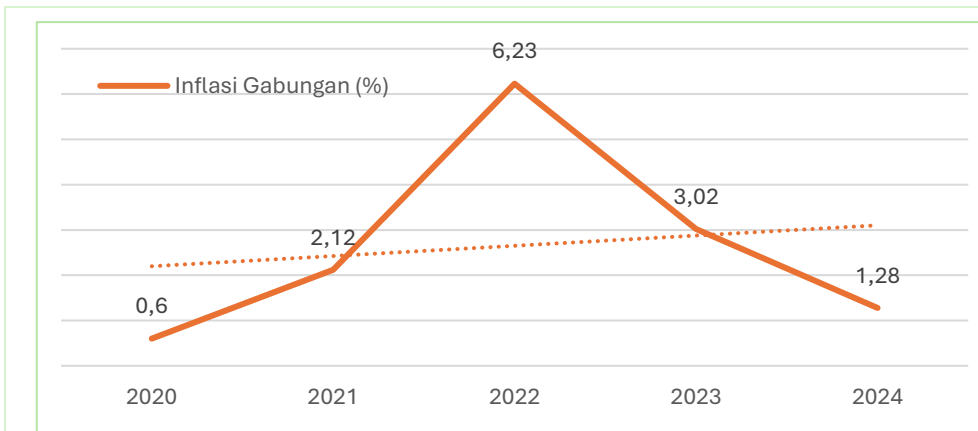
Tahun	Realisasi Pajak Daerah (miliar Rupiah)	PDRB ADHB (miliar rupiah)	Pajak/PDRB (%)
2020	55,50	16.666,62	0,33%
2021	66,53	17.686,60	0,38%
2022	117,71	19.243,33	0,61%
2023	147,24	21.250,62	0,69%
2024	182,33	22.604,87	0,81%

Sumber: Bappenda Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan yang sangat kuat dan konsisten, naik lebih dari dua kali lipat dari 0,33% pada tahun 2020 menjadi 0,81% pada tahun 2024.

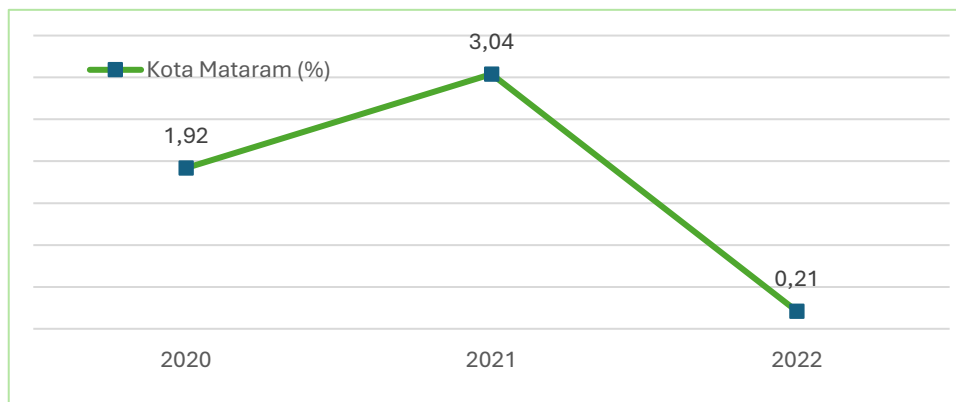
Tren positif data di atas mengindikasikan bahwa pertumbuhan realisasi pajak daerah jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi secara umum. Hal ini mendiagnosis adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan ekstensifikasi pajak (dengan menjangkau basis pajak baru dari geliat ekonomi pariwisata) dan intensifikasi pajak melalui perbaikan sistem pemungutan. Peningkatan rasio ini merupakan sinyal positif penguatan kemandirian fiskal daerah, di mana kemampuan pemerintah untuk mendanai pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah semakin membaik.

Tingkat Inflasi



Gambar 2.64 Tren Inflasi Gabungan Provinsi NTB, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar 2.65 Tren Inflasi Mataram y to y (Desember), 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Laju inflasi gabungan di Provinsi NTB sangat fluktuatif, melonjak drastis dari 2,12% pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di 6,23% pada tahun 2022, sebelum berhasil diredam kembali ke level rendah 1,28% pada tahun 2024.

Lonjakan inflasi gabungan Provinsi NTB di tahun 2022 didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi yang secara langsung meningkatkan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok di daerah. Namun, pada tahun 2022 yang sama, pusat urban Kota Mataram justru mencatatkan inflasi yang sangat rendah di level 0,21%. Perbedaan drastis ini mendiagnosis bahwa daerah-daerah di luar ibu kota, termasuk Lombok Tengah, kemungkinan besar menanggung beban inflasi yang jauh lebih berat. Hal ini bisa disebabkan oleh rantai pasok yang kurang efisien dan efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang lebih terkonsentrasi di pusat provinsi, menjadikan masyarakat Lombok Tengah lebih rentan terhadap gejolak harga.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting bagi pembangunan, ditandai oleh pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Bagian ini akan mengupas kondisi tata kelola di Kabupaten Lombok Tengah yang mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan

kepatuhan hukum. Kami akan menganalisisnya dengan menggunakan indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pemerintahan Digital, Indeks Pelayanan Publik, dan Survei Penilaian Integritas untuk mengukur kualitas dan kemajuan tata kelola pemerintahan daerah.

1. Reformasi Birokrasi dan Hukum

Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 2.43 Data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Tengah 2020-2024

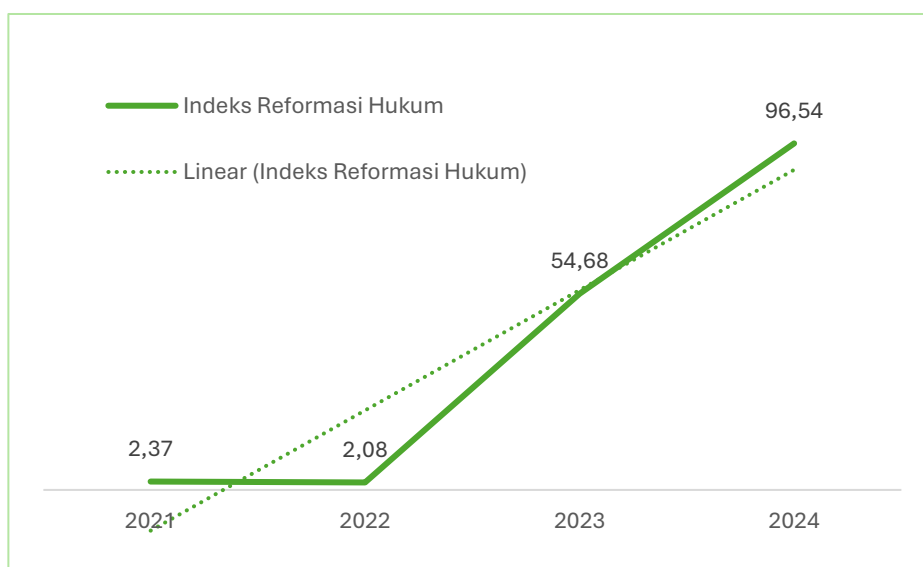
Tahun	IRB	Kategori
2020	51,77	CC
2021	50,73	CC
2022	55,77	CC
2023	70,28	BB
2024	77,28	BB

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2025

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan lonjakan kinerja yang sangat signifikan, di mana setelah stagnan di kategori "CC" hingga tahun 2022, nilainya melesat naik dan berhasil mencapai kategori "BB" (Baik) pada tahun 2023 dan 2024.

Lonjakan drastis skor Indeks Reformasi Birokrasi Lombok Tengah bertepatan dengan perubahan metodologi penilaian yang mulai diterapkan pada tahun 2023. Metodologi baru ini tidak lagi hanya menilai aspek formal, tetapi fokus pada dampak nyata dan hasil dari program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Dengan demikian, tingginya skor pada 2023-2024 mendiagnosis bahwa birokrasi Lombok Tengah dinilai berhasil dan efektif dalam mengimplementasikan dan mendukung agenda-agenda pembangunan strategis di daerah.

Indeks Reformasi Hukum



Gambar 2.66 Tren Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024

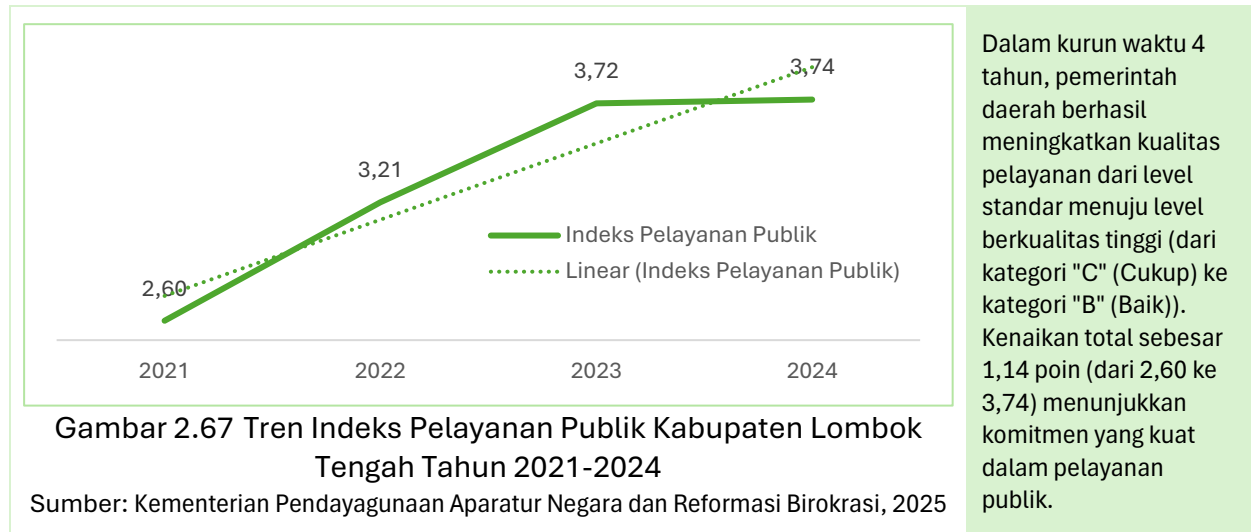
Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2025

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan lonjakan kinerja yang luar biasa dan eksponensial. Setelah stagnan di level sangat rendah sekitar 2 poin pada periode 2021-2022, indeks ini melesat tajam menjadi 54,68 pada tahun 2023 dan mencapai 96,54 pada tahun 2024

Kenaikan signifikan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan komitmen dan adaptasi yang kuat terhadap perubahan kerangka penilaian nasional. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan peraturan baru, yaitu Permenkumham No. 17 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 23 Tahun 2024. Capaian skor yang nyaris sempurna pada tahun 2024 membuktikan bahwa meskipun ada perubahan metodologi, Kabupaten Lombok Tengah tetap berdedikasi tinggi terhadap agenda reformasi hukum.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik



Gambar 2.67 Tren Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Kenaikan pesat skor Indeks Pelayanan Publik (IPP) didorong oleh keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah layanan bagi masyarakat.

Stagnasi 2023-2024 pertumbuhan skor menunjukkan dua hal: efek saturasi, di mana kualitas layanan sudah mencapai tingkat yang sangat baik, dan pergeseran fokus birokrasi dari reformasi besar ke pemeliharaan dan perbaikan kecil. Perlambatan ini bukan kemunduran, melainkan tanda kedewasaan baru dalam pelayanan publik.

Indeks Pemerintahan Digital (PemDi)

Pencapaian Kabupaten Lombok Tengah dalam Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) menunjukkan adanya laju positif, hal ini diwakili dengan keberadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di mana skor Indeks SPBE melonjak dari 2,08 pada tahun 2022 menjadi 3,04 pada tahun 2024, bahkan melampaui target nasional. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pergeseran strategis dari inisiatif digital yang terfragmentasi menjadi pendekatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan terstandardisasi, mencerminkan kematangan tata kelola digital serta komitmen pemerintah daerah terhadap reformasi birokrasi berbasis teknologi.

3. Integritas dan Akuntabilitas

Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah

Tabel 2.44 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

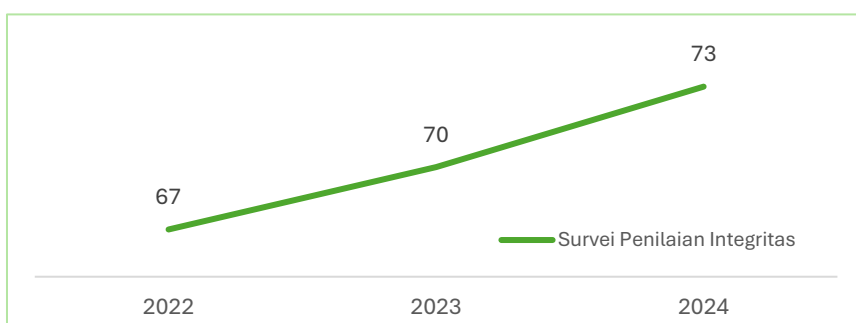
Komponen yang Dinilai	Nilai (2019)	Nilai (2020)	Nilai (2021)	Nilai (2022)	Nilai (2023)	Nilai (2024)
Perencanaan Kinerja	18,99	19,73	19,27	19,35	19,66	20,40
Pengukuran Kinerja	13,59	13,77	13,27	16,58	16,94	17,20
Pelaporan Kinerja	9,57	9,97	10,16	9,41	9,59	9,66
Evaluasi Kinerja	5,35	5,48	5,60	-	-	-
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-	-	14,85	14,94	15,64
Capaian Kinerja	7,38	7,53	8,16	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi	54,88	56,48	57,10	60,19	61,13	62,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	B	B	B

Catatan: Terjadi perubahan komposisi komponen evaluasi pada tahun 2022, di mana komponen "Evaluasi Kinerja" dan "Capaian Kinerja" digabungkan menjadi "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal".
 Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2020-2024

Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan, dengan lompatan kualitatif dari kategori "CC" pada tahun 2021 menjadi kategori "B" (Baik) pada tahun 2022, dan terus membaik hingga mencapai 62,90 pada tahun 2024

Lonjakan pada tahun 2022 bertepatan dengan adanya perubahan metodologi penilaian yang memberikan bobot lebih besar pada "Pengukuran Kinerja" dan terutama "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal". Tingginya skor yang berhasil diraih dan terus ditingkatkan di bawah kerangka baru ini mendiagnosis bahwa pemerintah daerah telah berhasil memperkuat sistem akuntabilitas dan evaluasi kinerja internalnya, menandakan adanya perbaikan tata kelola yang lebih berorientasi pada hasil dan pengawasan internal yang efektif.

Survey Penilaian Integritas (SPI)



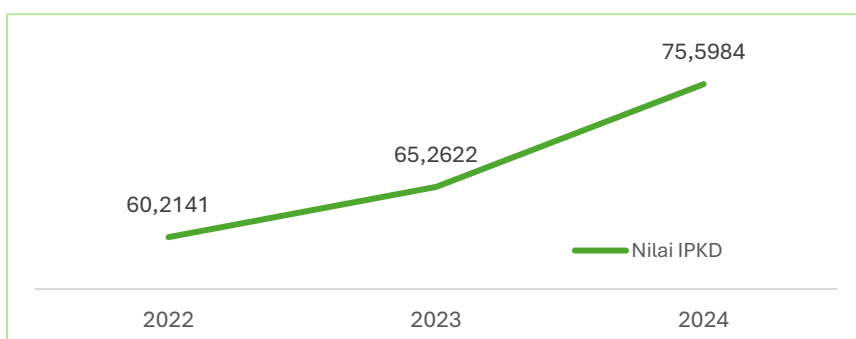
Gambar 2.68 Tren Survei Penilaian Integritas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2024

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren perbaikan yang kuat dan konsisten, dengan skor yang terus meningkat dari 67 pada tahun 2022, menjadi 70 pada tahun 2023, dan mencapai 73 pada tahun 2024.

Tren positif ini merefleksikan keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi yang berfokus pada penguatan sistem integritas dan pencegahan korupsi. Peningkatan ini dapat didiagnosis sebagai dampak dari berbagai upaya perbaikan tata kelola, seperti digitalisasi layanan (termasuk melalui Mal Pelayanan Publik), peningkatan transparansi, dan penguatan pengawasan internal, yang secara kolektif berhasil menurunkan risiko korupsi dan meningkatkan persepsi integritas di lingkungan pemerintah daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)



Gambar 2.69 Tren Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2024

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren perbaikan yang kuat dan akseleratif, meningkat dari 60,21 pada tahun 2022 menjadi 75,60 pada tahun 2024, dengan lonjakan kinerja paling signifikan terjadi pada tahun terakhir.

Peningkatan pesat ini merupakan cerminan dari keberhasilan implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Tren ini sangat sejalan dengan capaian tinggi pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), SAKIP, dan Survei Penilaian Integritas (SPI), yang secara kolektif mendiagnosis adanya perbaikan fundamental dalam akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan melalui digitalisasi sistem (seperti SIPD) dan penguatan pengawasan internal.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Bagian ini membahas kondisi pembangunan hukum, keamanan, dan demokrasi. Pembangunan hukum berfokus pada supremasi hukum yang berkeadilan dan berlandaskan hak asasi manusia, sementara pembangunan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Analisis ini didukung oleh indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, dan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban untuk mengukur kemajuan di bidang ini.

1. Penegakan dan Ketertiban Hukum

Persentase Penegakan Perda

Tabel 2.45 Konsolidasi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Berdasarkan Jenis

Jenis Perda/Perkada	2020	2021	2022	2023
Perda Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras	0	16	22	8
Perda 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	40	143	63	113
Instruksi Bupati Lombok Tengah Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Disiplin PNS/PTT dan Pelajar Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	0	14	11	18
Perda 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan	-	-	7	0
Perbup nomor 36 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	2	0
Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 12.b Tahun 2020	59	-	-	-
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12.b Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker	-	14	-	-
Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam I, II, dan III Tahun 2018/2019	0	-	-	-
Himbauan Bupati Lombok Tengah Tahun 2019	0	-	-	-

Sumber: Satu Data Lombok Tengah, 2025

Penegakan Perda di Kabupaten Lombok Tengah dari 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, di mana Satpol PP mencatat keberhasilan terukur seperti penurunan pelanggaran secara keseluruhan, namun data pelanggaran terhadap Perda Ketertiban Umum dan Perda Minuman Keras cenderung tidak konsisten.

Fluktuasi ini mengarah pada penegakan hukum cenderung reaktif terhadap isu spesifik (misalnya, penindakan COVID-19 atau kolaborasi dengan Bea Cukai), bukan merupakan strategi yang konsisten. Selain itu, adanya hambatan struktural seperti kelemahan koordinasi antar-OPD dan kurangnya keberanian politik dalam menangani kasus besar (contohnya, vila ilegal) menjadi tantangan yang perlu perbaikan lebih lanjut.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja Trantibumlinmas yang beragam. Data menunjukkan keberhasilan dalam hal penegakan Perda/Perkada (meningkat menjadi 76,92% di tahun 2024), realisasi anggaran tinggi, dan respons 100% terhadap gangguan. Namun, terdapat kelemahan yang signifikan, seperti waktu tanggap kebakaran yang memburuk (19,7 menit) dan persentase layanan pencegahan bencana yang sangat rendah (0,12%). Data ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan strategis yang mendasar antara pendekatan reaktif (respons cepat pasca-kejadian) yang kuat, dan pendekatan proaktif (pencegahan dan kesiapsiagaan) yang masih lemah. Keberhasilan pada acara besar seperti MotoGP menunjukkan kapasitas lonjakan yang baik, namun tidak merefleksikan efektivitas operasional sehari-hari yang terhambat oleh kendala struktural seperti kekurangan PPNS dan pendanaan pencegahan bencana yang minim.

2. Keamanan dan Kondisi Sosial

Indeks Kriminalitas

Tabel 2.46 Angka Kriminalitas (*Crime Rate*) di Kabupaten Lombok Tengah (2020-2023)

Tahun	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)
2020	946	1,053,280	89,81
2021	597	1,059,042	56,37
2022	403	1,082,573	37,23
2023	547	1,099,211	49,76
2024	541	1,129,778	47,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Angka Kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren penurunan drastis dari 89,81 pada tahun 2020 menjadi titik terendahnya di 37,23 pada tahun 2022, namun tren ini berbalik dengan kenaikan signifikan menjadi 49,76 pada tahun 2023.

Penurunan awal kemungkinan besar merupakan dampak dari pembatasan mobilitas sosial selama pandemi COVID-19 yang mengurangi peluang kejahatan. Sebaliknya, kenaikan kembali pada tahun 2023 mendiagnosis adanya "normalisasi" aktivitas sosial pasca-pandemi yang kembali membuka peluang kejahatan, dan bisa jadi merupakan sinyal awal dari dampak sosial negatif (seperti peningkatan kesenjangan) yang seringkali menyertai pembangunan ekonomi yang sangat pesat.

3. Kualitas Demokrasi

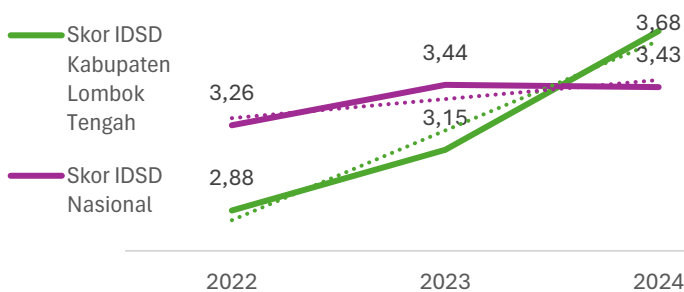
Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren negatif, dengan penurunan signifikan dari 57,34 pada tahun 2023 menjadi 51,63 pada tahun 2024, yang keduanya berada pada level "sedang". Penurunan ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi di Kabupaten Lombok Tengah bersifat sistemik dan mendalam, bukan sekadar masalah sementara. Penurunan sebesar 5,71 poin dalam setahun mengindikasikan kerentanan serius terhadap tekanan politik dan perlunya reformasi fundamental untuk memperkuat fondasi demokrasi.

2.1.4.3. Ketangguhan Berdiplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Bagian ini membahas tentang Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasional, membina hubungan konstruktif antarnegara, dan memperkuat pengaruh Indonesia. Analisis ini akan mengupas kondisi terkini dengan berfokus pada indikator-indikator relevan seperti Indeks Daya Saing Daerah, yang mencerminkan kapabilitas daerah dalam mendukung ketahanan nasional.

Indeks Daya Saing Daerah



Gambar 2.70 Tren Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Lombok Tengah dan Nasional (2022-2024)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan lonjakan kinerja yang luar biasa dan akseleratif, meroket dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3,68 pada tahun 2024. Peningkatan pesat ini membuatnya berhasil melampaui skor rata-rata nasional (3,43) pada tahun 2024, setelah sebelumnya selalu berada di bawahnya.

Ledakan daya saing ini merupakan cerminan langsung dari dampak transformatif pembangunan proyek strategis (KEK Mandalika) yang secara masif memperluas skala ekonomi daerah. Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan eksplosif pada pilar "Ukuran Pasar", yang ditopang oleh kemajuan signifikan dalam pilar Infrastruktur, Adopsi TIK, dan Kapabilitas Inovasi.

Tabel 2.47 Skor Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lombok Tengah (2022-2024)

Pilar	2022	2023	2024
Pilar 1 (Institusi)	4.00	4.18	4.58
Pilar 2 (Infrastruktur)	2.30	2.15	3.75
Pilar 3 (Adopsi TIK)	2.99	4.35	4.30
Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	2.98	3.35	4.02
Pilar 5 (Kesehatan)	3.54	3.80	3.51
Pilar 6 (Keterampilan)	2.83	2.97	3.75
Pilar 7 (Pasar Produk)	2.91	3.35	3.82
Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	3.62	3.17	3.64
Pilar 9 (Sistem Keuangan)	1.97	1.69	2.04
Pilar 10 (Ukuran Pasar)	0.79	4.20	4.23
Pilar 11 (Dinamisme Bisnis)	5.00	2.18	4.23
Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	1.47	2.81	3.75

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Lonjakan daya saing daerah utamanya didorong oleh pertumbuhan eksplosif pada pilar Ukuran Pasar (dari 0,79 menjadi 4,23), Kapabilitas Inovasi (dari 1,47 menjadi 3,75), dan Infrastruktur (dari 2,30 menjadi 3,75) antara tahun 2022 dan 2024

Ledakan pada pilar-pilar di atas merupakan cerminan langsung dari dampak transformatif pembangunan pariwisata yang secara masif memperluas skala ekonomi dan memicu pembangunan infrastruktur fisik maupun digital (Adopsi TIK naik ke 4,30). Namun, kemajuan ini tidak merata. Stagnasi pada pilar Kesehatan (turun ke 3,51) dan kelemahan persisten pada Sistem Keuangan (hanya 2,04) mendiagnosis bahwa manfaat dari ledakan ekonomi belum sepenuhnya meresap untuk memperbaiki semua aspek fundamental, yang menjadi tantangan struktural dalam pembangunan jangka panjang.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan tersedianya sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi:

- pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi;
- pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD;
- pengelolaan belanja daerah;
- pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan
- pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui

restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, baik dari segi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, optimalisasi pendapatan dan penerimaan daerah, serta menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk menyusun kerangka pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum komponen APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 - 2024 terdiri dari (1) Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (2) Belanja Daerah yang didalamnya memuat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. (3) Pembiayaan dengan sub komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020-2024 meliputi perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.48 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024
1	PENDAPATAN	2.096.751.245.984,90	2.109.739.782.960,12	2.210.181.941.992,33	2.278.299.769.297,99	2.729.660.115.585
	A. Pendapatan Asli Daerah	206.419.405.625,90	163.077.512.900,58	238.785.324.104,33	274.112.885.092,99	331.059.847.831
	B. Pendapatan Transfer	1.776.714.951.375	1.802.016.562.853	1.934.225.978.231	1.972.976.082.091	2.289.284.360.966
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	113.616.888.984	144.645.707.206,54	37.170.639.657	31.210.802.114	109.315.906.788
	JUMLAH PENDAPATAN	2.096.751.245.984,90	2.109.739.782.960,12	2.210.181.941.992,33	2.278.299.769.297,99	2.729.660.115.585
2	BELANJA	2.093.636.570.402,34	2.118.548.957.565,49	2.364.532.554.209,97	2.261.190.989.048,73	2.569.787.924.780
	A. Belanja Operasi	1.423.541.520.448,25	1.550.644.602.114,46	1.620.124.451.870,38	1.683.457.039.797,73	1.978.538.947.668
	B. Belanja Modal	282.545.185.043,79	225.852.588.845,75	385.171.625.121,59	236.112.590.581	236.112.590.581
	C. Belanja Tak Terduga	62.707.900.977	6.932.998.714	9.818.545.946	14.359.344.815	8.838.353.947
	D. Belanja Transfer	324.841.963.933,30	335.118.767.891,28	349.417.931.272	327.262.013.855	346.298.032.584
	JUMLAH BELANJA	2.093.636.570.402,34	2.118.548.957.565,49	2.364.532.554.209,97	2.261.190.989.048,73	2.569.787.924.780
	SURPLUS/DEFISIT	3.114.675.582,56	-8.809.174.605,37	-.154.350.612.217,64	17.108.780.249,26	159.872.190.805
3	PEMBIAYAAN	94.335.304.687,30	77.581.672.737,36	235.978.713.933,99	61.755.373.445,73	64.851.696.103
	A. Penerimaan Pembiayaan	74.434.051.439,30	57.680.419.489,36	216.077.460.685,99	41.854.120.219,73	44.064.564.543
	B. Pengeluaran Pembiayaan	19.901.253.248	19.901.253.248	19.901.253.248	19.901.253.226	20.787.131.560
	JUMLAH PEMBIAYAAN	94.335.304.687,30	77.581.672.737,36	235.978.713.933,99	61.755.373.445,73	64.851.696.103
	PEMBIAYAAN NETTO	54.532.798.191,30	37.779.166.241,36	196.176.207.437,99	21.952.866.993,73	23.277.432.983
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	57.647.473.773,86	28.969.991.635,99	41.825.595.220,35	39.061.647.242,99	183.149.623.788

Sumber: BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

2.2.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah, termasuk aset, utang, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan ini penting untuk memenuhi peraturan dan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dan efisien dalam mengelola sumber daya daerah.

Tabel 2.49 Neraca Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET	3.227.366.941.408,69	3.557.847.017.990,05	3.773.724.510.526,44	4.064.515.880.340,89	4.137.529.844.063,77
	A. Aset Lancar	153.685.729.072,43	196.667.384.750,82	184.221.474.622,59	208.688.779.340,19	239.380.450.241,04
	B. Investasi Jangka Panjang	149.906.700.376,35	147.647.020.202,62	137.954.986.253,13	140.158.906.519,13	143.047.444.147,13

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	C. Aset Tetap	2.877.776.085.909,65	3.162.056.969.281,76	3.399.189.985.021,81	3.646.662.721.461,85	3.712.625.425.091,81
	D. Aset Lainnya	45.998.426.050,26	51.475.643.754,85	52.358.064.628,91	69.005.473.019,72	42.476.524.583,79
	JUMLAH ASET	3.227.366.941.408,69	3.557.847.017.990,05	3.773.724.510.526,44	4.064.515.880.340,89	4.137.529.844.063,77
2	KEWAJIBAN	85.679.983.584,22	77.300.515.061,42	255.945.050.438,71	274.280.400.793,06	234.004.897.217,79
	A. Kewajiban Jangka Pendek	45.877.477.110,22	57.399.261.835,42	68.860.881.388,71	109.401.756.303,06	100.306.950.067,79
	B. Kewajiban Jangka Panjang	39.802.506.474	19.901.253.226	187.084.169.050	164.878.644.490	133.697.947.150
	JUMLAH KEWAJIBAN	85.679.983.584,22	77.300.515.061,42	255.945.050.438,71	274.280.400.793,06	234.004.897.217,79
3	EKUITAS	3.141.686.957.824,47	3.480.546.502.928,62	3.538.683.561.951,73	3.816.068.873.789,84	3.928.911.099.331,98
	A. Ekuitas	3.141.686.957.824,47	3.480.546.502.928,62	3.538.683.561.951,73	3.816.068.873.789,84	3.928.911.099.331,98
	JUMLAH EKUITAS	3.141.686.957.824,47	3.480.546.502.928,62	3.538.683.561.951,73	3.816.068.873.789,84	3.928.911.099.331,98
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.227.366.941.408,69	3.557.847.017.990,04	3.794.628.612.390,44	4.090.349.274.582,90	4.162.915.996.549,77

2.2.2.1. Analisis Likuiditas dan Solvabilitas Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah adalah instrumen penting untuk mengevaluasi kesehatan finansial suatu pemerintah daerah. Analisis ini tidak hanya melihat angka, tetapi juga kondisi di baliknya.

1. Analisis Likuiditas

Likuiditas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Ini sangat penting untuk memastikan operasional sehari-hari berjalan lancar. Bayangkan sebuah rumah tangga, likuiditas adalah kemampuan mereka untuk membayar tagihan bulanan seperti listrik, air, dan cicilan utang jangka pendek.

Dalam konteks pemerintah daerah, analisis likuiditas bertujuan untuk menjawab pertanyaan: "Apakah pemerintah daerah memiliki cukup aset lancar (misalnya kas, piutang pajak, dan dana setara kas) untuk menutupi utang jangka pendeknya, seperti pembayaran gaji pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan biaya operasional lainnya?". Analisis ini sangat relevan bagi manajemen pemerintahan daerah untuk:

- Menilai efisiensi pengelolaan kas.
- Mengidentifikasi potensi risiko gagal bayar.
- Memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan operasional yang mendesak.

2. Analisis Solvabilitas

Solvabilitas memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam jangka panjang. Solvabilitas menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan finansial pemerintah daerah. Ini seperti melihat apakah sebuah perusahaan bisa bertahan dalam jangka panjang dan tidak bangkrut.

Analisis solvabilitas bertujuan untuk menjawab pertanyaan: "Apakah total aset yang dimiliki pemerintah daerah (termasuk aset tetap seperti gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya) cukup untuk menutupi seluruh total utang (baik jangka pendek maupun jangka panjang)?"

Informasi solvabilitas sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang, seperti:

- Penilaian kelayakan untuk memperoleh pinjaman atau obligasi daerah.
- Perencanaan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur besar.
- Menilai kesehatan finansial secara keseluruhan untuk keberlanjutan pembangunan daerah.

Dengan demikian, analisis likuiditas berfokus pada kemampuan jangka pendek untuk operasional, sementara analisis solvabilitas berfokus pada stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang pemerintah daerah. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi keuangan daerah. Berdasarkan analisis tersebut, berikut disajikan hasil Analisis Rasio Keuangan (2020-2024) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020-2024.

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Data Utama					
Aset	3.227,37 M	3.557,85 M	3.794,63 M	4.090,35 M	4.162,92 M
Aset Lancar	181,69 M	196,47 M	154,22 M	208,70 M	239,38 M
Kewajiban	85,68 M	77,30 M	255,95 M	274,25 M	337,89 M
Kewajiban Jangka Pendek	45,88 M	57,40 M	68,86 M	109,40 M	100,31 M
Kewajiban Jangka Panjang	39,80 M	19,90 M	187,08 M	164,88 M	133,70 M
Ekuitas	3.141,69 M	3.480,55 M	3.538,68 M	3.816,07 M	3.928,91 M
Hasil Analisis Rasio					
Likuiditas					
Current Ratio	3,96	3,42	2,24	1,91	2,39
Quick Ratio	3,96	3,42	1,26	1,71	2,35
Solvabilitas					
Rasio Utang terhadap Aset	0,03	0,02	0,07	0,07	0,08
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,03	0,02	0,07	0,07	0,09

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025 (data diolah)

Likuiditas: Kondisi likuiditas daerah tetap sehat, ditunjukkan oleh rasio di atas 1,00. Namun, ada tren penurunan dari 2020 hingga 2023, yang disebabkan oleh kenaikan utang jangka pendek.

Solvabilitas: Meskipun rasio utang masih rendah, tren peningkatan yang tajam terlihat jelas, terutama karena lonjakan kewajiban jangka panjang pada 2022. Ini menunjukkan bahwa meskipun daerah masih sangat solven, ketergantungan pada utang sebagai sumber pendanaan meningkat signifikan.

Neraca Keuangan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan solven. Kemampuan daerah untuk membayar utang jangka pendek (likuiditas) dan utang jangka panjang (solvabilitas) tergolong sangat baik.

Namun, penting untuk mencermati tren yang ada. Terdapat peningkatan signifikan dalam kewajiban, terutama utang jangka panjang. Meskipun rasio solvabilitas masih kuat, laju pertumbuhan utang ini perlu diperhatikan. Hal ini dapat menjadi dasar untuk melakukan studi lebih

lanjut mengenai sumber dan penggunaan utang tersebut agar tetap terkendali dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi keuangan yang kuat untuk menghadapi lima tahun ke depan. Namun, tren yang terlihat dalam neraca keuangan menyiratkan perlunya manajemen keuangan yang lebih proaktif dan strategis.

Agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga, fokus perencanaan harus mencakup:

- Pengendalian pertumbuhan utang jangka pendek untuk menjaga likuiditas agar tetap pada tingkat aman.
- Pemanfaatan utang jangka panjang secara bijak untuk investasi yang produktif. Investasi ini harus mampu meningkatkan solvabilitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

2.2.3.1 Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Daerah dan Sumber-sumbernya

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menambah nilai kekayaan bersihnya dalam satu tahun anggaran, yang merupakan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dokumen ini menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan otonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah diklasifikasikan menjadi tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan umum yang dianut berfokus pada pengoptimalan sumber pendapatan yang sudah ada sambil terus mengupayakan sumber pendapatan baru, dengan tujuan mendorong investasi dan daya saing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari wilayah daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komponen ini dianggap sebagai indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam menghadapi tuntutan peningkatan layanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan target dan capaian PAD. Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang ditempuh mencakup beberapa langkah kunci, yaitu pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, serta peningkatan layanan berbasis daring untuk memudahkan wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan koordinasi dan pengawasan, sosialisasi, kualitas data, serta sinergitas dengan instansi terkait untuk memastikan pemungutan berjalan efektif dan efisien.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lainnya. Dana ini berfungsi sebagai instrumen untuk mendanai desentralisasi dan mengurangi ketimpangan keuangan antar-daerah.

- Transfer Pemerintah Pusat: Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan terbagi menjadi beberapa jenis. Dana Perimbangan adalah dana utama yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah, didasarkan pada konsep bagi hasil pendapatan (*revenue sharing policy*) dengan prinsip pemberdayaan dan keadilan. Di dalamnya terdapat Dana Transfer Umum (DTU), yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak (seperti

PBB dan PPh) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan, perikanan), serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan. Selain itu, terdapat Dana Transfer Khusus (DTK) yang mendanai kegiatan spesifik seperti DAK Fisik dan Non Fisik, serta Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan sebagai penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu. Terakhir, ada Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Transfer Antar Daerah: Pendapatan ini berasal dari pemerintah daerah lain, seperti bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan bagi hasil ini, yang juga sangat bergantung pada peningkatan aktivitas perekonomian lokal.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

"Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" adalah kategori pendapatan yang menampung penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Kategori ini memiliki sifat yang spesifik dan seringkali tidak bersifat rutin. Secara umum, pendapatan ini dibagi menjadi dua sub-kategori utama:

- Pendapatan Hibah: Merupakan bantuan finansial atau non-finansial yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, baik di dalam maupun luar negeri. Sifat utamanya adalah tidak mengikat, yang berarti dana tersebut tidak memiliki kewajiban untuk dikembalikan dan penggunaannya umumnya telah disepakati untuk menunjang urusan pemerintahan tertentu. Sumber hibah sangat beragam, mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, hingga pihak ketiga seperti masyarakat atau badan usaha. Bahkan, hibah dari luar negeri juga termasuk dalam kategori ini. Penting untuk dicatat bahwa penerimaan hibah harus didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan dan tidak boleh menimbulkan konsekuensi pengeluaran atau kewajiban yang memberatkan di kemudian hari.
- Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan: mencakup penerimaan lain yang tidak termasuk dalam hibah, PAD, maupun pendapatan transfer, namun diatur secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Contoh yang sering ditemui adalah Hibah Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana ini, meskipun disebut hibah, memiliki landasan hukum yang jelas dan alokasi spesifik untuk satuan pendidikan dasar negeri. Penganggarannya direncanakan secara terpisah karena sifatnya yang khusus dan penggunaannya yang sudah ditetapkan, yaitu untuk mendukung operasional sekolah. Dengan demikian, kategori ini menampung pendapatan yang memiliki payung hukum khusus di luar struktur pendapatan daerah yang reguler.

2. Analisis Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah disusun secara dinamis dan terencana. Proyeksi ini tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menjelaskan strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber pendapatan.

PAD diproyeksikan tumbuh dengan sangat ambisius, rata-rata 19,06% per tahun. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap kemandirian fiskal. Pertumbuhan tinggi ini akan dicapai melalui upaya strategis, seperti peningkatan koordinasi, akurasi data, dan perbaikan kinerja. Fokusnya adalah pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi pendapatan internal secara lebih efisien dan efektif.

Sumber pendapatan dari transfer menunjukkan tren yang berbeda namun saling melengkapi. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan tumbuh lebih moderat, rata-rata 5,10% per tahun. Angka ini mencerminkan stabilitas dan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan melonjak secara signifikan, rata-rata 14,50% per tahun. Pertumbuhan yang tinggi ini mengindikasikan korelasi positif dengan aktivitas ekonomi lokal dan regional, serta optimisme bahwa ekonomi wilayah akan meningkat.

Secara keseluruhan, proyeksi ini mencerminkan bauran pendapatan yang seimbang. Pertumbuhan PAD yang agresif bertindak sebagai motor penggerak kemandirian fiskal, didukung oleh stabilitas dari transfer pemerintah pusat dan vitalitas ekonomi lokal yang terlihat dari transfer antardaerah. Kombinasi ini bertujuan untuk membentuk pondasi keuangan yang solid demi membiayai program pembangunan daerah.

2.2.3.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah perwujudan dari kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat kuantitatif. Pengelolaan belanja daerah merupakan instrumen penting untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pengelolaan belanja harus dilakukan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ada, dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran harus transparan, berbasis skala prioritas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi empat jenis utama, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah dan memberikan manfaat dalam jangka pendek. Kelompok ini terdiri dari beberapa jenis belanja, antara lain:

- Belanja Pegawai: Anggaran yang digunakan untuk kompensasi, seperti gaji, tunjangan, dan honorarium, bagi Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN. Penganggaran ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.
- Belanja Barang dan Jasa: Pengeluaran untuk pengadaan barang atau jasa yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja ini ditujukan untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai sasaran prioritas daerah.
- Belanja Bunga: Pengeluaran untuk membayar bunga utang pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
- Belanja Hibah: Pemberian dana kepada pihak lain yang bertujuan untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja ini diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan belanja urusan pemerintahan wajib.

- **Belanja Bantuan Sosial:** Bantuan yang diberikan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat untuk melindungi mereka dari risiko sosial. Bantuan ini bersifat selektif dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Jenis belanja ini mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap dan aset tidak berwujud lainnya. Nilai yang dianggarkan mencakup harga beli atau bangun aset ditambah seluruh biaya terkait hingga aset tersebut siap digunakan.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh pengeluaran darurat mencakup penanganan bencana alam, non-alam, bencana sosial, serta operasi pencarian dan pertolongan. Sementara itu, keperluan mendesak meliputi kebutuhan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia, belanja wajib dan mengikat, serta pengeluaran lain yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran dana dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja ini terdiri dari dua jenis:

- **Belanja Bagi Hasil:** Pengeluaran untuk bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- **Belanja Bantuan Keuangan:** Bantuan keuangan yang dapat bersifat umum atau khusus, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas urusan pemerintahan.

2. Peran Belanja Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Makro

Belanja daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong atau stimulus bagi perkembangan ekonomi daerah secara makro, menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus sistematis dan terstruktur. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan antara pendapatan dan pembiayaan, serta memprioritaskan alokasi belanja untuk urusan pemerintahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Belanja daerah juga harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana setiap kegiatan memiliki tolok ukur dan target yang jelas. Penggunaan anggaran harus diprioritaskan pada bidang-bidang vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan, khususnya untuk urusan wajib pelayanan dasar, guna memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata.

2.2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pada penerimaan pembiayaan daerah, angka rata-rata penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang relatif cukup tinggi pada kurun waktu tahun 2020- 2024 menunjukkan adanya progres perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.51 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026-2030

KODE AKUN	NAMA AKUN	P-APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027	APBD 2028	APBD 2029	APBD 2030
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	504.607.362.379	490.646.179.000	508.617.693.000	528.039.429.000	548.355.781.000	569.630.231.000
4.2	Pendapatan Transfer	2.295.656.655.953	2.292.401.791.000	2.366.562.281.998	2.444.019.704.994	2.524.770.155.943	2.608.973.905.996
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26.626.521.293	26.626.522.000	27.153.013.000	27.690.034.000	28.237.795.000	28.517.154.000
	Jumlah Pendapatan	2.826.890.539.625	2.809.674.492.000	2.902.332.987.998	2.999.749.167.994	3.101.363.731.943	3.207.121.290.996
5	BELANJA DAERAH						
5.1	Belanja Operasi	2.176.392.968.461	2.187.274.934.000	2.198.211.309.000	2.209.202.366.000	2.220.248.378.000	2.231.349.620.000
5.2	Belanja Modal	361.820.972.794	277.124.971.000	355.361.955.998	440.106.118.994	526.432.215.943	618.192.805.996
5.3	Belanja Tidak Terduga	19.556.796.096	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	368.330.208.078	369.005.867.000	372.656.826.000	376.343.395.000	380.065.910.000	383.824.708.000
	Jumlah Belanja	2.926.100.945.429	2.838.405.772.000	2.931.230.090.998	3.030.651.879.994	3.131.746.503.943	3.238.367.133.996
	Total Surplus/(Defisit)	(99.210.405.804)	(28.731.280.000)	(28.897.103.000)	(30.902.712.000)	(30.382.772.000)	(31.245.843.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	153.840.110.634	28.731.280.000	28.897.103.000	30.902.712.000	30.382.772.000	31.245.843.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	54.629.704.830	49.180.698.000	49.180.698.000	49.180.698.000	49.180.698.000	49.180.698.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	54.629.704.830	49.180.698.000	49.180.698.000	49.180.698.000	49.180.698.000	49.180.698.000
	Pembiayaan Netto	99.210.405.804	(20.449.418.000)	(20.283.595.000)	(18.277.986.000)	(18.797.926.000)	(17.934.855.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APBD	2.980.730.650.259	2.887.586.470.000	2.980.560.789.000	3.079.982.578.000	3.181.078.950.000	3.287.697.832.000

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025 (data diolah)

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Potensi Daerah

Potensi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tidak berdiri di atas satu pilar tunggal, melainkan ditopang oleh sebuah ekosistem yang terdiri dari lima modal strategis yang saling terkait dan bersinergi untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Modal Manusia

Pilar pertama dan paling fundamental bagi masa depan Lombok Tengah adalah **Modal Manusia**. Daerah ini dianugerahi bonus demografi yang signifikan, yang berarti memiliki ketersediaan tenaga kerja dalam usia produktif dalam jumlah yang melimpah. Ini bukanlah sekadar angka statistik, melainkan sebuah aset strategis yang hidup. Sumber daya manusia ini merepresentasikan energi, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang tinggi, yang sangat krusial untuk mengisi kebutuhan industri pariwisata, sektor ekonomi kreatif, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang kini sedang tumbuh pesat.

2. Modal Ekonomi Strategis

Modal manusia tersebut didukung oleh **Modal Ekonomi Strategis** yang unik karena berjalan di atas dua mesin penggerak yang saling melengkapi.

Di satu sisi, KEK Mandalika berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan makro. Kawasan ini dirancang sebagai magnet investasi berskala global, pendorong utama di sektor pariwisata premium, dan generator devisa yang kuat bagi daerah dan negara.

Di sisi lain, sebagai penyeimbang dan fondasi ekonomi kerakyatan, adalah potensi Ekonomi Kreatif (Ekraf). Dengan bertumpu pada kekuatan kriya (seperti tenun dan gerabah) serta kekayaan budaya yang mengakar, Ekraf menjadi basis ekonomi berbasis komunitas yang partisipatif. Ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kawasan elit, tetapi juga mengalir ke akar rumput, memberdayakan masyarakat lokal secara langsung, dan menjaga kearifan lokal tetap hidup.

3. Modal Infrastruktur dan Konektivitas

Untuk menggerakkan kedua modal sebelumnya, **Modal Infrastruktur dan Konektivitas** memegang peranan yang absolut. Keunggulan utama Lombok Tengah adalah keberadaan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). BIZAM tidak hanya berfungsi sebagai hub domestik, tetapi telah terbukti menjadi hub strategis yang membuka aksesibilitas regional dan internasional. Ini adalah pintu gerbang vital yang menghubungkan potensi daerah, khususnya KEK Mandalika, langsung ke pasar global dan arus wisatawan mancanegara.

Selain konektivitas udara, infrastruktur pendukung ketahanan pangan—seperti bendungan-bendungan besar (Mujur, Batujai) dan jaringan irigasi—menjadi esensial. Infrastruktur ini menjamin stabilitas sosial dan ekonomi dengan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah percepatan pembangunan sektor pariwisata dan industri.

4. Modal Alam dan Budaya

Semua potensi pembangunan ini berakar kuat pada **Modal Alam dan Budaya**, yang menjadi DNA dan daya tarik otentik Lombok Tengah. Potensi geografisnya luar biasa, dari bentang pantai selatan

yang memesona hingga kekayaan bahari, menyediakan kanvas ideal bagi pengembangan pariwisata kelas dunia.

Namun, yang membuatnya unik adalah warisan budaya yang kaya dan masih hidup di tengah masyarakat, seperti tradisi Bau Nyale atau adat istiadat Suku Sasak. Kombinasi antara alam yang indah dan budaya yang otentik inilah yang menciptakan *value proposition* (nilai jual) yang tidak tergantikan. Ini membedakan Lombok Tengah dari destinasi lain sekaligus menjadi sumber inspirasi yang tak terbatas bagi pengembangan produk Ekonomi Kreatif.

5. Modal Tata Kelola

Akhirnya, sebagai fondasi yang mengikat dan mengarahkan keempat pilar lainnya, terdapat **Modal Tata Kelola**. Komitmen awal dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mendukung pembangunan menjadi landasan krusial. Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah prasyarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan iklim investasi; tanpanya, investor akan ragu. Lebih dari itu, komitmen terhadap reformasi birokrasi dan perencanaan yang matang berfungsi sebagai 'lem perekat', memastikan bahwa seluruh modal strategis (manusia, ekonomi, infrastruktur, dan budaya) dapat bersinergi secara efektif, efisien, dan harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.

2.3.2. Permasalahan Teridentifikasi

Meskipun memiliki potensi besar, Lombok Tengah menghadapi sejumlah permasalahan krusial yang menjadi penghambat kemajuan:

1. Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Hambatan pertama adalah adanya kesenjangan sosial-ekonomi. Terdapat disparitas antara pertumbuhan di kawasan strategis (KEK) dan kondisi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Fenomena ini teridentifikasi sebagai enclave development (pembangunan kantong), yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah penyangga. Hal ini mengindikasikan penyerapan tenaga kerja lokal ke dalam rantai nilai utama pariwisata belum optimal. Selain itu, sengketa lahan dan isu kompensasi yang belum terselesaikan menjadi faktor yang menimbulkan friksi sosial dan hambatan implementasi pembangunan.

2. Degradasi Lingkungan dan Tekanan Sumber Daya

Hambatan kedua adalah meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang cepat telah mendorong alih fungsi lahan produktif secara masif. Secara simultan, daerah menghadapi krisis pengelolaan sampah (TPA) akibat volume limbah yang melampaui kapasitas pengelolaan. Tantangan sumber daya juga terlihat pada menipisnya ketersediaan sumber daya air bersih dan buruknya akses sanitasi aman, yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sektor pariwisata.

3. Kelemahan Tata Kelola

Hambatan ketiga berkaitan dengan aspek tata kelola. Masih terdapat defisit dalam penyelesaian konflik agraria yang berdampak pada kepastian hukum dan sosial. Selain itu, teridentifikasi lemahnya pengendalian tata ruang, di mana instrumen (RTRW/RDTR) belum berjalan efektif untuk mengendalikan spekulasi lahan di koridor-koridor strategis. Kelemahan ini juga tercermin pada

layanan publik yang belum optimal dan belum sepenuhnya memanfaatkan data untuk perumusan kebijakan (*evidence-based policy*).

2.3.3. Isu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dirumuskan dalam IS-KLHS 1 hingga 11, memberikan konfirmasi yang komprehensif dan validasi formal mengenai akar permasalahan pembangunan di daerah. Secara tematik, temuan ini mencakup empat pilar utama:

1. Manusia:

IS-KLHS3 Masih terdapat masyarakat dengan tingkat penyelesaian pendidikan dan kemampuan literasi yang masih rendah

IS-KLHS4 Belum optimalnya akses layanan kesehatan dan taraf kesehatan masyarakat masih rendah.

2. Ekonomi:

IS-KLHS1 Pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah belum optimal

IS-KLHS2 Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan kurangnya diversifikasi ekonomi kreatif berbasis UMKM

IS-KLHS5 Masih rendahnya penurunan persentase penduduk miskin

IS-KLHS6 Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan cakupan perlindungan sosial tenaga kerja

3. Lingkungan dan Infrastruktur:

IS-KLHS7 Pengelolaan sanitasi belum optimal

IS-KLHS8 Degradasi sumber daya air dan pelayanan air minum belum optimal

IS-KLHS9 Degradasi lingkungan hidup, risiko bencana alam dan perubahan iklim

4. Sosial dan Tata Kelola:

IS-KLHS10 Digitalisasi dan pelayanan publik belum optimal

IS-KLHS11 Tingginya tingkat kriminalitas serta belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.3.4. Pengaruh Kontekstual Global, Nasional, dan Regional

Pembangunan Lombok Tengah tidak terlepas dari pengaruh berbagai tingkatan kontekstual:

1. Pengaruh Global

Isu-Isu Kunci dalam SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs menyediakan 17 tujuan sebagai kerangka kerja global yang komprehensif. Isu-isu yang paling relevan bagi daerah adalah:

- Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan (SDG 1 & 10): Isu utamanya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi (seperti KEK) bersifat inklusif, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan memberantas kemiskinan ekstrem di kantong-kantong kemiskinan.
- Peningkatan Kualitas SDM (SDG 3 & 4): Isu ini berfokus pada pemenuhan hak dasar, yaitu menjamin akses layanan kesehatan yang layak (termasuk penanganan stunting) dan akses pendidikan berkualitas secara merata.
- Air Bersih dan Sanitasi (SDG 6): Isu krusial mengenai pengelolaan sumber daya air (terkait status "STRES" regional) dan memastikan akses sanitasi aman bagi seluruh masyarakat, yang menjadi masalah mendasar di daerah.

- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8): Isunya adalah menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif, serta memastikan penyerapan tenaga kerja lokal (mengatasi enclave development).
- Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SDG 12): Isu ini sangat relevan bagi pariwisata (KEK). Fokusnya adalah menerapkan praktik sustainable tourism dan mengelola limbah (sampah) secara bertanggung jawab.
- Aksi Iklim dan Lingkungan (SDG 13, 14, 15): Isu ini mencakup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (risiko bencana), perlindungan ekosistem laut (bahari), dan perlindungan ekosistem darat (mengatasi alih fungsi lahan).
- Kelembagaan yang Kuat (SDG 16): Isu ini berfokus pada penguatan tata kelola, penegakan hukum (termasuk penyelesaian sengketa lahan), dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai.

Isu-Isu Kunci dalam MEA (Multilateral Environmental Agreements)

MEA adalah perjanjian internasional yang fokusnya spesifik pada perlindungan lingkungan. Isu-isu utamanya adalah:

- Perubahan Iklim (dari UNFCCC/Paris Agreement): Isu utamanya adalah keharusan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan melakukan dekarbonisasi. Bagi daerah, isu turunannya adalah adaptasi perubahan iklim, terutama risiko kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan bencana hidrometeorologi yang mengancam kawasan pesisir dan pariwisata.
- Pengelolaan Limbah Berbahaya (dari Konvensi Basel): Isu utamanya adalah pengelolaan limbah B3 dan limbah padat (sampah) yang bertanggung jawab. Ini memberi tekanan internasional pada daerah untuk segera menyelesaikan krisis TPA (seperti TPA Pengingat) dan beralih ke model ekonomi sirkular.
- Kehilangan Keanekaragaman Hayati (dari CBD): Isu ini berfokus pada penghentian laju kepunahan spesies dan kerusakan ekosistem. Bagi daerah, ini berarti perlunya pengendalian ketat terhadap alih fungsi lahan (terutama di kawasan lindung) akibat ekspansi infrastruktur.
- Degradasi Lahan (dari UNCCD): Isu ini terkait dengan penggurunan dan penurunan kualitas lahan. Ini relevan dengan alih fungsi lahan **produktif** (pertanian) dan **krisis ketersediaan air** yang dapat memperparah kekeringan.

Isu-Isu Kunci dalam AEC (ASEAN Economic Community)

AEC menciptakan sebuah pasar tunggal di ASEAN. Isu-isu (tantangan sekaligus peluang) yang muncul bagi daerah adalah:

- Daya Saing SDM dan Mobilitas Tenaga Kerja: Isu terbesarnya adalah persaingan tenaga kerja. Dengan adanya Mutual Recognition Arrangements (MRA), tenaga kerja terampil asing (misalnya di sektor pariwisata) dapat lebih mudah masuk. Ini menjadi ancaman jika daya saing SDM lokal (keterampilan, bahasa) tidak segera ditingkatkan.
- Transformasi Digital (Implementasi DEFA): AEC mendorong ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Isunya adalah kesiapan daerah (termasuk UMKM/Ekraf) untuk terintegrasi dalam ekosistem digital, e-commerce, dan pembayaran lintas batas.

- **Transisi Ekonomi Hijau (Green Transition):** AEC memiliki standar baru terkait pembangunan berkelanjutan. Isunya adalah tuntutan dekarbonisasi dan penerapan circular economy. Proyek strategis (seperti KEK) akan semakin dituntut untuk memenuhi standar hijau regional.
- **Konektivitas dan Rantai Pasok (Supply Chain):** AEC bertujuan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi tunggal. Isunya adalah bagaimana daerah (melalui BIZAM dan potensi Ekraf/Agro) dapat terhubung ke rantai pasok regional, bukan hanya menjadi pasar bagi produk impor.

2. Pengaruh Nasional

Pembangunan daerah saat ini harus beroperasi di tengah empat tantangan makro nasional yang kompleks, yang dampaknya merambat langsung ke tingkat lokal.

Tantangan pertama dan paling fundamental adalah Krisis SDM & Produktivitas. Secara nasional, rendahnya kualitas pendidikan (tercermin dari skor PISA) telah menciptakan angkatan kerja dengan produktivitas yang rendah. Hal ini berkontribusi langsung pada lambatnya pertumbuhan produktivitas total (TFP), yang berarti mesin ekonomi nasional—dan juga daerah—berjalan tidak efisien.

Krisis produktivitas ini berkorelasi langsung dengan Krisis Ekonomi-Sosial. Ketika produktivitas dan pertumbuhan berkualitas stagnan, daya beli masyarakat tergerus. Ini memicu fenomena berbahaya di mana "kelas menengah" nasional justru menyusut, sementara kelompok "rentan miskin" dan "calon kelas menengah" membengkak. Bagi daerah, ini berarti risiko turun kelas akibat guncangan (seperti PHK) sangat tinggi, membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi semakin berat.

Di atas semua itu, Indonesia menghadapi Krisis Lingkungan atau Triple Planetary Crisis. Ancaman perubahan iklim (bencana), polusi (tercemarnya air minum), dan hilangnya keanekaragaman hayati (alih fungsi lahan) bukan lagi isu abstrak. Ini adalah ancaman nyata yang mengancam keberlanjutan sektor-sektor utama di daerah, seperti pariwisata dan pertanian, serta meningkatkan biaya ekonomi dan kesehatan.

Terakhir, upaya untuk mengatasi ketiga krisis tersebut terhambat oleh Krisis Tata Kelola. Stagnansi Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan lemahnya keamanan data siber pemerintah menunjukkan bahwa kelembagaan nasional masih lemah. Kondisi ini menghambat investasi, menurunkan kepercayaan publik, dan mengurangi efektivitas kebijakan yang seharusnya dapat menyelesaikan masalah SDM, ekonomi, dan lingkungan di daerah.

3. Pengaruh Regional

Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, isu strategis regional tersebut juga menjadi fokus utama yang harus diintervensi pada skala Kabupaten, diantaranya sebagai berikut:

- **Penurunan Tingkat Kemiskinan** Angka kemiskinan NTB (12,91% per Maret 2024) masih di atas rata-rata nasional. Penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas SDM, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan, kesenjangan infrastruktur, dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan yang belum padu.
- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** Kualitas SDM masih rendah, ditandai dengan rata-rata lama sekolah (7,87 tahun) dan tingginya proporsi penduduk tamatan SD ke bawah (42,08%). Sektor kesehatan juga menghadapi tantangan serius seperti stunting, angka kematian ibu/balita (AKI/AKB), serta meningkatnya penyakit menular dan tidak menular.

- Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah (misalnya, Mataram vs. daerah lain) dan pertumbuhan ekonomi belum merata. Pembangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan (terjadi degradasi lahan) dan pengembangan infrastruktur belum mampu meningkatkan daya saing wilayah.
- Produktivitas dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Produktivitas dan pendapatan per kapita masih rendah di tengah potensi ekonomi (pertanian, pariwisata) yang tinggi. Tantangan utama meliputi:
 - ❖ Keterbatasan infrastruktur dasar dan pendukung.
 - ❖ Rendahnya produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi.
 - ❖ Ketimpangan ekonomi (pendapatan, wilayah, akses sumber daya).
 - ❖ Terbatasnya lapangan kerja dan iklim investasi.
 - ❖ Pembangunan yang belum optimal mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Birokrasi masih dianggap lambat, berbelit, dan rawan KKN. Fokus perbaikan adalah peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan melalui digitalisasi (e-government), reformasi birokrasi (penyederhanaan struktur, meritokrasi), dan peningkatan kualitas SDM aparatur.

2.3.5. Harmonisasi Isu KLHS dan Isu Strategis Daerah

Proses perumusan isu KLHS dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu-isu strategis daerah disimpulkan melalui analisis komprehensif yang mempertimbangkan permasalahan yang ada, isu-isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional) yang memengaruhi daerah, serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.52 Pemetaan Isu Strategis Daerah Kabupaten Lombok Tengah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU Strategis KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS RPJMD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bonus Demografi (usia produktif 63,26%).	Kualitas pendidikan dan literasi rendah; Akses dan taraf kesehatan rendah.	IS-KLHS3: "Masih terdapat masyarakat dengan tingkat penyelesaian pendidikan dan kemampuan literasi yang masih rendah." IS-KLHS4: "Belum optimalnya akses layanan kesehatan dan taraf kesehatan masyarakat masih rendah."	Terkait komitmen global SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Tantangan AEC menuntut kesiapan dan daya saing SDM (skill digital/bahasa).	Rendahnya Kualitas SDM: Produktivitas tenaga kerja (US\$28.600) masih di bawah ASEAN; Nilai PISA (369,3) jauh di bawah rata-rata OECD (488,33); Struktur tenaga kerja didominasi lulusan SMP ke bawah (52,32%). Kebutuhan Hidup Tinggi: Besarnya penduduk usia kerja (147,71 juta jiwa) menuntut penyediaan perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang masif.	Isu Strategis NTB 2 (Peningkatan Kualitas SDM).	IS1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Dukungan Kebijakan dan Investasi (Komitmen pemerintah).	Defisit tata kelola (keadilan agraria); Pengelolaan tata ruang (RTRW/RDTR) belum optimal; Keterbatasan data; Layanan publik belum optimal.	IS-KLHS10: "Digitalisasi dan pelayanan publik belum optimal."	Didorong komitmen SDG 16 (Institusi Kuat dan Keadilan). Tantangan AEC adalah gap implementasi kesepakatan regional di tingkat lokal.	Tata Kelola dan Akuntabilitas: Indeks Persepsi Korupsi (CPI) stagnan di skor 34 (Peringkat 115); Tingkat keamanan data privasi dan siber pemerintah masih lemah dan rentan peretasan.	Isu Strategis NTB 5 (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan).	IS6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
KEK Mandalika; Geografis dan Bahari; Potensi Ekraf; Potensi Irigasi.	Enclave development (KEK); Gagalnya trickle-down effect (penyerapan kerja); Kemiskinan tinggi sekitar KEK; Sengketa lahan; Diversifikasi Ekraf (UMKM) belum optimal.	IS-KLHS1: "Pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah belum optimal." IS-KLHS2: "Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan kurangnya diversifikasi ekonomi kreatif berbasis UMKM." IS-KLHS5: "Masih rendahnya penurunan	Tuntutan global SDG 8 (Pekerjaan Layak) dan SDG 12 (Produksi/Konsumsi Bertanggung Jawab), termasuk sustainable tourism. Tantangan AEC pada transformasi digital dan konektivitas supply chain bagi UMKM/Ekraf.	Pemulihan Ekonomi: Pemulihan ekonomi pasca-krisis belum optimal dan dampaknya ke daerah belum merata. Rendahnya Produktivitas: Pertumbuhan TFP sangat lambat (0,60 basis poin), tertinggal dari Tiongkok/Korea Selatan, akibat SDM dan kelembagaan lemah. Pergeseran Struktur Kelas: Kelas menengah menyusut; kelompok	Isu Strategis NTB 1 (Penurunan Kemiskinan); Isu Strategis NTB 4 (Produktivitas dan Ekonomi Berkelanjutan).	IS7: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; IS4: Peningkatan Produktivitas Daerah

POTENSI DAERAH (1)	PERMASALAHAN (2)	ISU Strategis KLHS (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS RPJMD (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
		persentase penduduk miskin." IS-KLHS6: "Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan cakupan perlindungan sosial tenaga kerja."		"calon kelas menengah" (49,2%) dan "rentan miskin" (24,33%) membengkak akibat PHK dan daya beli rendah. Geopolitik dan Geoekonomi: Ketidakstabilan global memicu inflasi, krisis energi, dan krisis pangan.		
Hub Konektivitas (BIZAM); Infrastruktur Irigasi (Bendungan Batujai dan Pengga).	Krisis TPA Pengengat; Alih fungsi lahan; Akses sanitasi dan air minum menipis; Spekulasi lahan.	IS-KLHS9: "Degradasi lingkungan hidup, risiko bencana alam dan perubahan iklim." IS-KLHS7: "Pengelolaan sanitasi belum optimal." IS-KLHS8: "Degradasi sumber daya air dan pelayanan air minum belum optimal."	Tuntutan MEA (Perubahan Iklim/UNFCCC dan Limbah/Basel). Komitmen SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) dan SDG 13 (Aksi Iklim). Dorongan AEC untuk transisi ekonomi hijau (dekarbonisasi).	Krisis Lingkungan/Triple Planetary Crisis: 1) Perubahan Iklim (kerugian Rp 22,8 T/tahun); 2) Krisis Keanekaragaman Hayati; 3) Krisis Polusi (PM 2.5 tertinggi di ASEAN, 70% air minum tercemar, 40,3% sampah makanan). Hambatan Perdagangan: Ekspor komoditas (yang relevan dengan daerah) terhambat oleh isu lingkungan dan keberlanjutan global.	Isu Strategis NTB 3 (Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan sesuai Daya Dukung Lingkungan).	IS5: Kualitas Lingkungan Hidup; IS2: Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan
Kekayaan Warisan Budaya (Sasak, Bau Nyale).	Potensi degradasi budaya; Konflik sosial (akibat kesenjangan dan sengketa lahan); Tingkat kriminalitas.	IS-KLHS11: "Tingginya tingkat kriminalitas serta belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."	Terkait komitmen SDG 16 (Masyarakat Damai dan Inklusif). Tuntutan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) sebagai akar penyelesaian konflik sosial.			IS3: Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 3

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI,
BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS”**

Visi tersebut terangkai dalam akronim “MASMIRAH” dengan makna bersama masyarakat menjadikan Lombok Tengah sebagai *permata* yang paling berharga. Pilar strategis yang membangun visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Mandiri

Merupakan gambaran kondisi daerah yang mampu memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan kewenangan otonominya melalui Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berbasis Ekonomi Hijau, Biru, dan Kreatif yang ditunjukkan dengan PDRB per kapita level menengah atas.

Berdaya Saing

Menggambarkan kualitas prima sumber daya Lombok Tengah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya tersebut dapat menjadi produk unggulan daerah yang mengisi kebutuhan regional, nasional maupun internasional dengan Peningkatan Kualitas SDM sebagai Fondasi Generasi Emas yang ditunjukkan dengan IPM sangat tinggi.

Sejahtera

Menggambarkan masyarakat Lombok Tengah yang makmur, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan, dengan akses memadai terhadap layanan dasar dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman melalui Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Kewilayahan yang ditunjukkan dengan Ketimpangan Pendapatan Rendah.

Harmonis

Menggambarkan masyarakat yang hidup dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar semua elemen masyarakat dengan berbasis keimanan dan kebudayaan lokal melalui Penguatan Harmoni Sosial dan Budaya Lokal yang ditunjukkan dengan Zero Conflict Horizontal.

Secara filosofis, "MASMIRAH" mencerminkan cita-cita luhur dan tujuan mulia masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Cita-cita ini diwujudkan melalui kerja sama dalam berbagai sektor kehidupan yang dilandasi oleh keluhuran budaya, menunjukkan adanya semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan.

Adapun secara harfiah, "MASMIRAH" berarti permata, yang menggambarkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai aset berharga bagi warganya. Permata ini perlu terus dijaga dan dipoles agar nilainya semakin tinggi dan dapat menjadi kebanggaan di tingkat dunia. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan kepedulian, kerja sama, dan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari seluruh elemen masyarakat terhadap daerahnya.

Masmirah

Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis



Gambar 3.1 Visi dan Pilar Pembangunan Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

Tabel 3.1 Visi Pada RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

RPJMN	RPJMD Provinsi NTB	RPJMD Kabupaten Lombok Tengah
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis

Visi pada RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan semangat kerja sama (gotong royong) dari seluruh elemen bangsa untuk membangun fondasi yang kuat demi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Orientasinya adalah kemajuan bangsa secara kolektif. Sedangkan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadopsi semangat “bersama” dari visi nasional, namun dengan konteks yang lebih spesifik. Ada empat kata kunci utama: Bangkit Bersama (kolaborasi), Provinsi Kepulauan (menonjolkan karakteristik geografis), Makmur (sejahtera), dan Mendunia (berstandar global). Visi ini mengangkat potensi lokal (kepulauan) untuk mencapai kemakmuran yang berdaya saing di tingkat internasional.

Melalui ini dapat ditemukan alur hirarkis dimana visi Lombok Tengah untuk menciptakan masyarakat yang "Sejahtera" dan "Berdaya Saing" merupakan prasyarat mutlak bagi Provinsi NTB untuk menjadi "Makmur Mendunia". Kemakmuran provinsi dibangun dari kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota. Semangat "Harmonis" yang berbasis budaya lokal di Lombok Tengah juga mendukung visi provinsi yang ingin mengembangkan seni budaya daerah. Jadi, Visi Kabupaten Lombok Tengah adalah fondasi operasional untuk merealisasikan Visi Provinsi NTB, yang pada akhirnya berkontribusi pada Visi Indonesia Emas 2045.

3.1.2. Misi

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai VISI tersebut sebagai berikut:

1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat Dan Cerdas

Memprioritaskan investasi di sektor pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, kurikulum inovatif, serta pelatihan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, mengimplementasikan program kesehatan berbasis komunitas yang mencakup pelayanan kesehatan preventif, kuratif, dan promotif, sehingga menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga memiliki fisik dan mental yang kuat.

2 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau

Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, seperti sistem layanan digital terpadu, untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Menyediakan pusat layanan terpadu di wilayah Lombok Tengah, agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan dasar, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Selain itu, mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan profesionalisme dan empati dalam melayani masyarakat.

3 Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha adalah esensial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan semua pihak, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Untuk mendukung hal ini, akan disusun kebijakan insentif bagi investasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Selain itu, pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis budaya lokal akan diintensifkan untuk mempromosikan Lombok Tengah di kancah internasional. Seiring dengan upaya-upaya tersebut, resiliensi terhadap bencana akan diperkuat melalui pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas mitigasi, dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam seluruh tahapan pembangunan.

4 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah

Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan seimbang antarwilayah dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan tetapi juga menjangkau hingga perdesaan, pengembangan transportasi yang menghubungkan desa dengan kota, penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik, dan air bersih, serta fasilitas publik seperti sekolah dan pusat kesehatan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan konektivitas wilayah yang mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

5 Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Menginisiasi program-program yang bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya yang luhur, seperti pelatihan seni budaya lokal, penguatan lembaga adat, festival budaya, dan kegiatan gotong royong. Selanjutnya menyusun kebijakan yang mendukung pendidikan karakter di sekolah, yang memadukan nilai-nilai religius dan moral dengan pelajaran sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga kokoh secara spiritual dan sosial.

Tabel 3.2 Keterkaitan Antar Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi NTB (Sapta Cita)	Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah (Panca Asa)
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah	5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	3. Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian,	3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi RPJMN (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi NTB (Sapta Cita)	Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah (Panca Asa)
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agro Maritim yang Berkelanjutan. 6. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan.	
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan. 3. Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agro Maritim yang Berkelanjutan. 4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga 6. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan.	3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif. 4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan	3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan	3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	7. Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah	2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau. 5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga 5. Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan.	3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan. 5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Lima misi pembangunan (Panca Asa) Kabupaten Lombok Tengah merupakan turunan strategis dan selaras dengan tujuh misi (Sapta Cita) Provinsi NTB dan delapan misi (Asta Cita) RPJMN. Keterkaitan dan keselarasan ini tercermin secara spesifik dalam setiap misi. Sebagai contoh, Panca Asa ke-1 tentang “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas” merupakan penjabaran langsung dari Sapta Cita ke-1 Provinsi NTB tentang “Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif”, yang mana merupakan implementasi dari Asta Cita ke-4 RPJMN tentang “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”.

Sinkronisasi serupa juga terlihat pada misi lainnya. Panca Asa ke-2 mengenai “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau” adalah jawaban operasional terhadap Sapta Cita ke-7 Provinsi NTB untuk “Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah”, yang berpedoman pada Asta Cita ke-7 RPJMN tentang “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.”. Demikian pula, Panca Asa ke-3 tentang “Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan” dan Panca Asa ke-4 mengenai “Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antarwilayah” secara terpadu mengimplementasikan beberapa misi provinsi sekaligus, yaitu Sapta Cita ke-2 (Ekonomi Daerah), ke-3 (Industri Agromaritim), ke-4 (Pariwisata), dan ke-6 (Infrastruktur). Alur ini menunjukkan bahwa setiap misi yang diemban oleh Kabupaten Lombok Tengah memiliki landasan dan keterkaitan yang kuat dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat regional maupun nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Lombok Tengah yang merepresentasikan tolok ukur keberhasilan pemerintah. Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Tujuan 1 Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas

Tujuan ini menegaskan hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya kondisi ideal di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Kualitas SDM yang unggul akan menjadi pendorong utama produktivitas nasional dan daya saing di tingkat global.

Sasaran (S1 - S5)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang saling berkaitan dan mendukung. Setiap sasaran menargetkan area intervensi yang spesifik dan krusial.

S1. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan adalah prasyarat dasar bagi produktivitas dan kecerdasan. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dengan masyarakat yang sehat, potensi bonus demografi dapat dioptimalkan.

S2. Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan

Pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi intelektual dan meningkatkan taraf hidup. Sasaran ini berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang. Pendidikan yang adil memastikan setiap anak, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi dan geografisnya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

S3. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam pembentukan karakter generasi. Sasaran ini bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga, mendorong kesetaraan gender, serta menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Masyarakat yang inklusif memberikan ruang bagi setiap individu, termasuk kelompok rentan dan disabilitas, untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh. sosial.

S4. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Kecukupan dan kualitas gizi adalah faktor esensial untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, terutama pada anak-anak. Sasaran ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan yang kuat merupakan pilar utama dalam upaya pencegahan stunting dan penciptaan generasi yang sehat.

S5. Meningkatnya Daya Saing Pemuda

Pemuda adalah agen perubahan dan motor penggerak kemajuan bangsa. Sasaran ini difokuskan untuk membekali pemuda dengan keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dan semangat kewirausahaan. Dengan daya saing yang tinggi, pemuda akan mampu menjadi pencipta lapangan kerja dan pemimpin masa depan.

Tujuan 2 Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Inovatif dan Kolaboratif

Tujuan ini adalah "ruang mesin" dari misi pelayanan publik. Tidak mungkin memberikan pelayanan yang profesional dan mudah jika birokrasi di dalamnya masih rumit dan tidak efisien. Oleh karena itu, untuk mencapai Misi 2, pemerintah harus terlebih dahulu membangun sistem birokrasi dan tata kelola yang kuat dengan karakteristik:

- Akuntabel: Setiap proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan.
- Efektif dan Efisien: Program berjalan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- Inovatif dan Kolaboratif: Selalu mencari cara-cara baru yang lebih baik dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan solusi.

Sasaran (S6 – S8)

Tujuan ini kemudian dipecah menjadi beberapa sasaran yang lebih konkret dan terukur untuk memastikan pencapaiannya.

S6. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran ini secara langsung menjawab aspek "Akuntabel" pada Tujuan 2. Dengan pengawasan yang kuat dan sistem akuntabilitas yang jelas, setiap unit kerja didorong untuk bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik.

S7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Ini adalah sasaran yang paling langsung berhubungan dengan Misi 2 dan menjawab aspek "Efektif dan Efisien" pada Tujuan 2. Peningkatan kualitas ini diukur melalui survei kepuasan masyarakat,

penurunan jumlah keluhan, dan percepatan waktu layanan. Ini adalah bukti nyata bahwa perbaikan birokrasi memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

S8. Penguatan Riset dan Inovasi Daerah

Sasaran ini mendukung aspek "Inovatif dan Kolaboratif" pada Tujuan 2. Tanpa riset yang kuat, kebijakan dan pelayanan akan bersifat stagnan. Dengan mendorong inovasi, pemerintah daerah dapat menciptakan terobosan-terobosan baru yang membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau, sesuai dengan amanat Misi.

Tujuan 3 Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan ini menegaskan kembali komitmen Misi dan menjadikannya target utama yang harus dicapai oleh seluruh pemangku kepentingan. Tujuan ini menjadi payung strategis bagi semua inisiatif ekonomi, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berorientasi pada penciptaan pertumbuhan yang merata dan ramah lingkungan. Pencapaian tujuan ini diukur melalui serangkaian sasaran yang lebih spesifik dan terperinci dan dibangun oleh 3 pilar utama:

1. Penguatan Fondasi Ekonomi yang bermaksud menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan.
2. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan berfokus pada pengembangan motor penggerak ekonomi daerah.
3. Dampak Kesejahteraan Sosial memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sasaran (S9 – S17)

Untuk mencapai tujuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan serangkaian sasaran strategis yang mencakup berbagai aspek fundamental ekonomi daerah.

S9. Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas adalah fondasi dari semua aktivitas ekonomi. Sasaran ini berfokus pada pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terjaga. Dengan stabilitas makroekonomi, dunia usaha mendapatkan kepastian untuk berinvestasi dan merencanakan pengembangan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

S10. Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan

Industri pengolahan memiliki peran krusial dalam menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal. Sasaran ini bertujuan meningkatkan kapasitas industri daerah melalui modernisasi teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan fasilitasi akses pasar. Tujuannya adalah menghasilkan produk olahan lokal yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

S11. Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memperkenalkan potensi daerah ke dunia luar. Sasaran ini diarahkan pada pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan kualitas layanan perhotelan dan kuliner, serta pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif (seperti pengrajin, seniman, dan desainer) agar karya mereka memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

S12. Peningkatan Produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) harus terus diberdayakan. Sasaran ini fokus pada peningkatan kapasitas UKM melalui pelatihan manajemen, kemudahan akses permodalan, pendampingan untuk digitalisasi pemasaran, dan penguatan kelembagaan koperasi agar lebih profesional dan mandiri.

S13. Peningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus tercermin dari tersedianya pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Sasaran ini tidak hanya menargetkan penurunan angka pengangguran, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta memberikan upah yang adil, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

S14. Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan

Sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar vital ketahanan pangan serta penggerak ekonomi kerakyatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi modern, penggunaan bibit dan benih unggul, optimalisasi infrastruktur irigasi, serta penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap maupun budidaya yang memadai. Melalui penguatan manajemen rantai pasok dan standardisasi pengolahan pasca-panen guna meminimalkan kehilangan hasil (losses), sasaran ini diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang secara langsung meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan.

S15. Meningkatnya Iklim Berusaha

Iklim usaha yang kondusif adalah magnet bagi investasi. Sasaran ini berfokus pada reformasi birokrasi dengan menyederhanakan proses perizinan, menciptakan regulasi yang pro-investasi, dan menjamin kepastian hukum. Lingkungan bisnis yang ramah akan mendorong pengusaha lokal untuk berkembang dan menarik investor dari luar untuk menanamkan modalnya di daerah.

S16. Meningkatnya Kondusifitas Daerah

Aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya jaminan keamanan dan stabilitas. Sasaran ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial, kerukunan antarwarga, dan supremasi hukum. Daerah yang aman dan damai akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas dan bagi investor untuk menjalankan usahanya.

S17. Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi

Fokus pengentasan kemiskinan adalah pada pemberdayaan yang berkelanjutan. Sasaran ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dari sekadar memberikan bantuan sosial menjadi program "graduasi", di mana masyarakat miskin dibekali keterampilan dan modal usaha agar mampu mandiri secara ekonomi. Tujuannya adalah agar mereka tidak lagi bergantung pada bantuan dan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen.

Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan

Tujuan ini merupakan penjabaran teknis dari Misi 4. Kata kunci utamanya adalah "Seimbang" dan "Berkelanjutan".

Seimbang: Pembangunan tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga dari distribusinya yang merata, memastikan setiap wilayah mendapatkan porsi pembangunan yang adil sesuai dengan kebutuhannya.

Berkelanjutan: Infrastruktur yang dibangun harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang. Ini berarti pembangunan harus ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan dirancang untuk bertahan lama. Dampak Kesejahteraan Sosial memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sasaran (S18-S20):

Tujuan pembangunan infrastruktur yang seimbang dan berkelanjutan diwujudkan melalui tiga sasaran spesifik berikut:

S18. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Sasaran ini berfokus pada peningkatan standar dan mutu infrastruktur dasar di seluruh wilayah. Ini tidak hanya mencakup pembangunan jalan baru, tetapi juga pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, perluasan jaringan air bersih dan sanitasi, serta modernisasi infrastruktur energi dan digital. Kualitas infrastruktur yang baik adalah tulang punggung yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, konektivitas sosial, dan efektivitas layanan publik.

S19. Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Infrastruktur

Sasaran ini bukan hanya tentang fasilitas umum, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap perumahan yang layak huni, aman, dan terjangkau. Program ini akan fokus pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penataan kawasan kumuh, dan pengembangan perumahan yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung serta ramah lingkungan.

S20. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Mengingat kondisi geografis yang rawan bencana, setiap pembangunan infrastruktur harus memiliki daya tahan (resiliensi). Sasaran ini menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, pembangunan juga harus mengadopsi prinsip-prinsip mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, misalnya dengan membangun drainase yang lebih baik untuk mengantisipasi curah hujan ekstrem atau menggunakan material konstruksi yang berkelanjutan.

Tujuan 5 Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis

Tujuan ini adalah muara dari implementasi Misi 5. Masyarakat yang harmonis adalah kondisi di mana interaksi sosial berjalan dengan damai, saling menghormati, dan penuh toleransi di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Keharmonisan ini tidak terjadi secara alami, melainkan harus diupayakan melalui penguatan ikatan sosial, penanaman nilai-nilai kebersamaan, dan resolusi konflik yang damai. Terwujudnya masyarakat yang harmonis menjadi indikator keberhasilan integrasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran (S21-S22):

Untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang harmonis, ditetapkan dua sasaran utama yang saling mendukung:

S21. Kerukunan Hidup Bermasyarakat

Sasaran ini secara spesifik berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup fasilitasi dialog antarumat beragama dan antarsuku, penguatan forum-forum kerukunan, serta promosi nilai-nilai toleransi dan saling pengertian. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi konflik sosial dan membangun fondasi yang kuat bagi kehidupan bersama yang damai dan produktif.

S22. Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Daerah

Sasaran ini bertujuan untuk membentengi masyarakat dari pengaruh negatif budaya luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, sekaligus melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Penguatan ini dilakukan melalui program revitalisasi adat istiadat, pelestarian seni dan tradisi, serta edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai kearifan lokal. Dengan ketahanan sosial budaya yang kuat, masyarakat akan mampu beradaptasi dengan modernisasi tanpa kehilangan identitas dan karakter budayanya.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

VISI MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)												
MISI 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas												
	T.1.1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,19	71,49	72,23	72,96	73,69	74,41	75,13	Sasaran Visi RPJPD
		S.1.1.1 Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,59	72,48	73,17	73,86	74,54	75,23	75,91	IUP 1
		S.1.1.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Peserta Didik Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	%	49,71	49,79	52,10	54,41	56,72	59,03	61,34	IUP 5a-i
			Peserta Didik Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	%	18,62	46,19	48,68	51,17	53,66	56,15	58,64	IUP 5a-ii
			Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	%	19,44	24,76	28,02	31,29	34,55	37,81	41,07	IUP 5b-i
			Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	%	18,62	21,64	25,06	28,47	31,89	35,31	38,73	IUP 5b-ii
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,73	6,78	6,91	7,05	7,18	7,31	7,45	IUP 5c
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,89	14,00	14,07	14,15	14,22	14,29	14,37	IUP 5d

VISI MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		S1.13	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	%	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	IUP 43b	
		S1.14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	56,00	60,23	64,46	68,69	72,92	77,15	81,38	IUP 39	
				Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,544	0,485	0,426	0,367	0,308	0,249	0,190	IUP 40	
		S1.15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	n/a	50,21	50,71	51,21	51,71	52,21	52,71		
MISI 2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau														
	T.2.1	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Inovatif dan Kolaboratif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,28	78,13	78,76	79,38	80,00	80,62	81,23	Sasaran Visi RPJPD	
					Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,68	3,72	3,76	3,79	3,82	3,84	3,87	Sasaran Visi RPJPD
		S2.11	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	73,01	73,56	74,10	74,61	75,10	75,57	76,02	IUP 27	
				Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah	Poin	62,90	69,98	77,06	80,60	82,37	84,14	85,91		
		S2.12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pemerintah Digital (PemDi)	Poin	n/a	1,00	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	IUP 25	
				Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,74	3,76	3,78	3,80	3,82	3,84	3,86	IUP 26	
		S2.13	Penguatan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	60,01	61,56	63,11	64,66	66,21	67,76	69,32	IUP 17b	
MISI 3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan														
	T.3.1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	3,34	6,05	6,13	6,34	6,54	6,64	6,73	Sasaran Visi RPJPD	
					PDRB Per Kapita ADHB	Juta/Tahun	20,37	21,99	24,04	25,81	27,82	30,01	32,79	Sasaran Visi RPJPD
					Tingkat Kemiskinan	%	12,07	11,66	11,27	10,90	10,53	10,17	9,91	Sasaran Visi RPJPD dan IUP 8
					Rasio Gini	Nilai	0,342	0,341	0,339	0,338	0,337	0,335	0,333	Sasaran Visi RPJPD
		S3.11	Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi	%	2,47	2	2	2	2	2	2	IUP 32	
				Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok AntarWaktu	Nilai	1	1	0,86	0,74	0,64	0,55	0,48	IUP 20	

VISI MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		S3.12	Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,64	4,86	5,08	5,25	5,41	5,56	5,71	Sasaran Visi RPJPD dan IUP 11
		S3.13	Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	%	1,34	1,47	1,59	1,69	1,78	1,86	1,95	IUP 12a
				Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	734.317.718.800	801.247.938.300	916.019.427.929	1.058.503.775.620	1.189.129.441.486	1.337.065.691.014	1.500.123.758.357	IUP 13
		S3.14	Peningkatan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	IUP 14c
				Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,30	1,41	1,53	1,65	1,77	1,89	2,10	IUP 14 b
		S3.15	Peningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,55	2,47	2,38	2,28	2,19	2,11	2,02	IUP 15a
		S3.16	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	6,14	6,97	7,65	8,64	9,00	9,11	10,43	IUP 18a
				Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	3,55	2,36	2,39	2,42	2,45	2,48	2,51	Sasaran Visi RPJPD
		S3.17	Meningkatnya Iklim Berusaha	Nilai Investasi Daerah	Rupiah	1.115.608.293.678	3.000.000.000.000	3.183.900.000.000	3.385.759.260.000	3.607.187.915.604	3.846.705.193.200	4.105.588.452.702	IUP 35
		S3.18	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Indeks Kriminalitas	Poin	47,89	42,66	41,75	40,88	40,04	39,23	38,45	IUP 28a
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	n/a	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
		S3.19	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	1,51	1,43	1,36	1,29	1,23	1,17	1,15	
MISI 4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah													
	T.4.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	54,34	56,71	58,98	61,74	64,64	68,47	70,03	IUP 36 Sasaran Visi RPJPD dan IUP 42a
				Indeks Desa	Poin	0,799	0,805	0,794	0,797	0,809	0,780	0,795	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,47	71,90	72,11	72,32	72,53	72,74	72,95	
		S4.11	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur	Poin	55,45	56,35	58,55	60,63	63,18	65,86	69,46	
				Rasio Konektivitas	Poin	33,33	40,00	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90	

VISI MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		S4.12	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	60,30	60,66	61,56	62,46	63,35	64,25	65,15	IUP 23b
		S4.13	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	n/a	3,28	3,71	4,15	4,58	5,02	5,45	Sasaran Visi RPIPD dan IUP45
				Indeks Risiko Bencana	Poin	133,05	126,36	125,76	125,16	124,57	123,97	123,38	IUP44
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	36,05	48,33	52,33	58,33	65,33	69,33	73,33	
MISI 5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat													
	T5.1	Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis		Indeks Harmoni Indonesia	Poin	n/a	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	
		S5.11	Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3,70	3,73	3,75	3,77	3,79	3,81	3,83	IUP 38
		S5.12	Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Melalui Musyawarah Adat	%	100	100	100	100	100	100	100	

3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2025-2029

3.3.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah merupakan kerangka kerja operasional yang menjabarkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yang mampu menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun rincian strategi pencapaian setiap sasaran pembangunan dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)			
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas			
	T.1.1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas	
		S.1.1.1	Kesehatan Untuk Semua Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu layanan primer dan sekunder
		S.1.1.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan Penguatan mutu layanan pendidikan Penguatan akses pendidikan secara merata, berkualitas, dan inklusif
		S.1.1.3	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		S.1.1.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Penjaminan Ketersediaan Pangan Peningkatan Keterjangkauan Pangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan
		S.1.1.5	Meningkatnya Daya Saing Pemuda Penguatan kapasitas dan karakter pemuda
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau			
	T.2.1	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Inovatif dan Kolaboratif	
		S.2.1.1	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja Manajemen SDM Aparatur Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel
		S.2.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik prima
		S.2.1.3	Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Optimalisasi peran riset dan inovasi daerah
Misi 3: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan			
	T.3.1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	
		S.3.1.1	Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Pengendalian inflasi daerah
		S.3.1.2	Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan Membangun industri agromaritim komoditas unggulan
		S.3.1.3	Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengembangan destinasi wisata bertaraf internasional Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan, sumber daya dan kearifan budaya lokal
		S.3.1.4	Peningkatan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro Modernisasi koperasi dan Usaha Mikro
		S.3.1.5	Peningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas Pemenuhan kebutuhan lapangan kerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
		S.3.1.6	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan secara berkelanjutan
		S.3.1.7	Meningkatnya Iklim Berusaha	Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan menarik
		S.3.1.8	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		S.3.1.9	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Perlindungan dan jaminan sosial tepat sasaran serta pemberdayaan sosial
Misi 4: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah				
	T.4.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan		
		S.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur berkualitas Pengembangan kawasan perdesaan terpadu
		S.4.1.2	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		S.4.1.3	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan partisipasi dan inklusivitas ketahanan bencana dan perubahan iklim Peningkatan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan
Misi 5: Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat				
	T.5.1	Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis		
		S.5.1.1	Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban bermasyarakat
		S.5.1.2	Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Integrasi nilai budaya dan sosial dalam masyarakat

3.3.2. Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, permasalahan, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)				
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas				
	T.1.1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas		
		S.1.1.1	Kesehatan Untuk Semua	Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu layanan primer dan sekunder
				Layanan kesehatan di semua siklus hidup Eliminasi penyakit menular Pengendalian penyakit tidak menular Peningkatan kualitas sanitasi (penyehatan lingkungan)

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas Penyediaan layanan kesehatan bergerak (mobile) Akreditasi layanan kesehatan Peningkatan kualitas laboratorium Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Digitalisasi layanan kesehatan Meningkatkan rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk Meningkatkan rasio dokter dan tenaga kesehatan lainnya terhadap jumlah penduduk Pemberian Insentif Tenaga Medis Non ASN Jaminan Sosial dan Kesehatan untuk tenaga medis Non ASN Jaminan Kesehatan Tuan Guru dan Pemuka Agama Lainnya Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar layanan Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan
		S.1.1.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan Penguatan mutu layanan pendidikan Penguatan akses pendidikan secara merata, berkualitas, dan inklusif	Penyusunan regulasi dan kebijakan pendidikan Penyusunan peta jalan pendidikan Membangun sistem data dan informasi yang mendukung pengambilan kebijakan unggul untuk akselerasi pendidikan dasar Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan kepribadian untuk satuan pendidikan dasar Penyusunan kurikulum pendidikan muatan lokal Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru Beasiswa pendidikan ke Jenjang Lebih Tinggi bagi Tenaga Pendidik Penguatan Komunitas dan Kolaborasi Antar Guru Pemberian Insentif dan Tunjangan Kesejahteraan untuk tenaga honorer guru/untuk Guru Non sertifikasi Jaminan Sosial dan Kesehatan untuk Guru Honorer Beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah Mengembangkan sekolah-sekolah unggulan dan sekolah rakyat Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana antar satuan pendidikan Pemberian beasiswa kedokteran bagi keluarga miskin dan Tahfiz Alqur'an Program Kejar Paket A dan B untuk masyarakat yang putus sekolah Mengembangkan sekolah inklusi Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) Peningkatan akses pendidikan usia dini dan pendidikan dasar bagi semua kalangan masyarakat
		S.1.1.3	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga	Revitalisasi program Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS) Pendidikan keluarga Pengasuhan berbasis hak anak Pendewasaan usia pernikahan pertama Pemberdayaan perempuan kepala keluarga

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penguatan ketahanan keluarga, kelompok rentan dan marjinal Penuntasan stunting dan gizi buruk Layanan kesehatan reproduksi dan KB Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan usia Desa/Kelurahan Ramah Anak dan inklusif disabilitas Pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia Partisipasi kelompok marginal dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan Sistem data terpilah (gender, usia, disabilitas) untuk kebijakan responsive Penguatan kelembagaan PUG dan perlindungan anak
		S.1.14	Meningkatnya Ketahanan Pangan Peningkatan Keterjangkauan Pangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan	Peningkatan produktivitas dan produksi pangan berkelanjutan Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal Pengelolaan cadangan pangan strategis Efisiensi rantai pasok dan stabilitas harga Penguatan kelembagaan distribusi pangan lokal Peningkatan daya beli dan bantuan pangan tepat sasaran Promosi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) Penguatan keamanan dan mutu pangan
		S.1.15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda Penguatan kapasitas dan karakter pemuda	Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Fasilitasi organisasi kepemudaan aktif dan inklusif Pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal Pengembangan keterampilan dan literasi digital Dukungan kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan oleh komunitas pemuda Pelibatan pemuda dalam forum perencanaan dan pengawasan pembangunan Penyediaan ruang-ruang kreativitas pemuda (bale kreasi)
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau				
	T.21	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Inovatif dan Kolaboratif		
		S.2.1.1	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, SPI, SPIP Penguatan Sistem Penilaian Integritas (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengawasan dan Pengendalian melalui penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang Transparansi proses perencanaan dan penganggaran Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko Rekrutmen berbasis merit

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi ASN Pengembangan jenjang karir Pengembangan sistem insentif Budaya kerja adaptif Penyediaan insentif umroh dan perjalanan ibadah lainnya bagi ASN dan Non ASN berprestasi
			Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi dan penggunaan dana pemerintah yang efisien dan tepat sasaran Pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif yang inovatif termasuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) Revitalisasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah Transparansi pengelolaan anggaran daerah Informasi penggunaan anggaran melalui platform online Efisiensi belanja publik Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Diversifikasi sumber PAD Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kemudahan pelayanan pajak dan retribusi daerah
		S.2.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan publik prima Pemenuhan standar pelayanan publik Inovasi pelayanan publik Menyiapkan gedung Mal Pelayanan Publik sesuai dengan standar gedung layanan Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat Pelayanan publik digital Penerapan e government Transparansi layanan perizinan berbasis digital. Pemberian insentif dan kemudahan investasi di KEK Mandalika Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Pengelolaan arsip daerah Perluasan akses internet dan teknologi digital Memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
		S.2.1.3	Penguatan Riset dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran riset dan inovasi daerah Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat Riset sebagai dasar pengambilan kebijakan sektoral Penguatan penelitian dan pengembangan sebagai clearing house kebijakan berbasis IPTEK Peningkatan kapasitas ASN dalam metode riset kebijakan dan inovasi sosial Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Pemanfaatan hasil riset Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat
Misi 3: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan				
	T.3.1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		S.3.1.1	Terjaganya Stabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian inflasi daerah Optimalisasi TPID Pemantauan harga komoditas strategis

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Ekonomi Makro Daerah		Peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok Operasi pasar
		S.3.1.2 Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan	Membangun industri agromaritim komoditas unggulan	Peningkatan Akses Teknologi Produksi dan inovasi produk olahan Fasilitasi Sertifikasi Mutu dan Standar Produk olahan Promosi dan akses pasar produk olahan pendampingan akses permodalan/perkreditan Pengawasan perijinan berusaha Pengembangan kawasan industri Pengolahan hasil perikanan menuju zero waste Penyederhanaan regulasi perizinan usaha
		S.3.1.3 Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan destinasi wisata bertaraf internasional	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim Pembangunan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi wisata prioritas kabupaten dengan KEK Mandalika Penguatan akses wisatawan melalui multimoda dari dan menuju destinasi prioritas kabupaten dan KEK Mandalika Pembinaan, pengembangan dan standarisasi desa wisata pada destinasi prioritas kabupaten dan daerah penyangga KEK Mandalika Pembinaan, pengembangan dan standarisasi pelaku jasa usaha pariwisata pada destinasi prioritas kabupaten dan KEK Mandalika Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata Penataan dan pembangunan fasilitas penunjang dan amenities pada destinasi wisata prioritas kabupaten dan daerah penyangga KEK Mandalika Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra pariwisata daerah Mengembangkan destinasi pariwisata baru yang berbasis pada keunikan alam dan budaya daerah Pengembangan desa wisata unggul Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang adaptif, kreatif dan inovatif
		S.3.1.4 Peningkatan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro	Modernisasi koperasi dan Usaha Mikro	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Transformasi kelembagaan koperasi Digitalisasi proses usaha dan manajemen koperasi dan usaha mikro Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro Pembentukan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk promosi dan pemasaran produk usaha mikro

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pasar dan kemitraan Formalisasi dan legalitas usaha Pengembangan hilirisasi produk unggulan Kemitraan dan kolaborasi pentahelix Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis. Pengembangan UMKM unggulan 	
		S.3.1.5	Peningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pemenuhan kebutuhan lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi kurikulum berbasis proyek (project-based learning) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja Pengembangan kewirausahaan produktif Platform SiapKerja Integrasi data kebutuhan industri dan sistem informasi pasar kerja berbasis AI dan big data Penegakan norma K3 Hubungan industrial transformatif Penyelenggaraan bursa kerja Revitalisasi penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja. Peningkatan program magang dan penempatan kerja Pengembangan program pelatihan yang berfokus pada keahlian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Migran Peningkatan kualitas upah, penegakan hak dan jaminan sosial pekerja
		S.3.1.6	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Adopsi varietas unggul dan teknologi spesifik lokasi Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara massif Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi Ketersediaan pupuk, benih dan pestisida yang terjangkau Korporatisasi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan penguatan kelompok Peningkatan akses pembiayaan dan fasilitasi akses pasar ekspor Dukungan pengolahan hasil pertanian dan sertifikasi produk Pengembangan armada dan alat tangkap ramah lingkungan revitalisasi tambak udang dan bandeng (major project nasional) Pengembangan budidaya laut, payau, air tawar, dan ikan hias dengan teknologi ramah lingkungan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Integrasi data nelayan, pembudidaya, dan komoditas Sertifikasi produk, SKP, dan SNI Teknologi pertanian dan budidaya ikan adaptif terhadap perubahan iklim Asuransi pertanian dan perikanan Early warning system untuk cuaca ekstrem dan hama penyakit
		S.3.1.7	Meningkatnya Iklim Berusaha	Penciptaan iklim investasi yang	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian insentif dan kemudahan investasi di KEK Mandalika

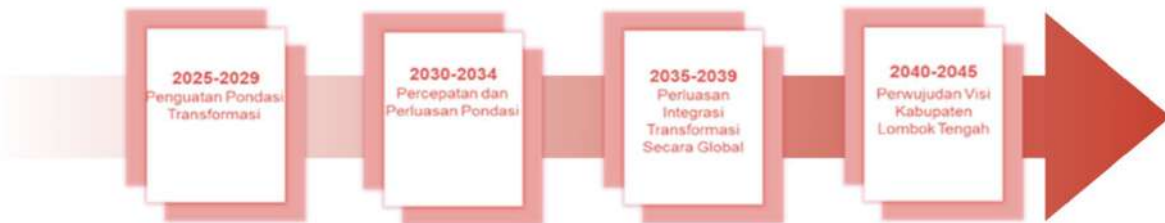
VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			kondusif dan menarik	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata Penyederhanaan regulasi investasi dan pengelolaan SDA Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta Pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional untuk memanfaatkan peluang investasi Transparansi layanan perizinan berbasis digital.
		S.3.1.8	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Penegakan Perda dan Perkada berbasis HAM Transparansi dan akuntabilitas regulasi daerah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum Peningkatan kesadaran publik Peningkatan perlindungan masyarakat
		S.3.1.9	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Perlindungan dan jaminan sosial tepat sasaran serta pemberdayaan sosial Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan sosial adaptif Basis data terpadu untuk penentuan penerima bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial Pemenuhan sarana dan prasarana untuk perlindungan sosial adaptif yang inklusif Optimalisasi dana jaminan sosial Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial lintas urusan/bidang Penguatan Kapasitas Individu dan Komunitas Dukungan yang bermakna bagi disabilitas, anak, perempuan, lansia, dan kelompok marjinal lainnya Investasi program sosial dari mitra pembangunan dan swasta Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Marginal Intervensi perlindungan dan jaminan sosial di seluruh siklus hidup manusia (balita, usia sekolah, usia produktif dan lansia) Desain kegiatan dan sub kegiatan yang adaptif terhadap dampak krisis ekonomi, perubahan iklim dan bencana
Misi 4: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah				
	T.4.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan		
		S.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur berkualitas Peningkatan kualitas jalan daerah penghubung antarwilayah Peningkatan kualitas jembatan penghubung hinterland Rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur lama Penerapan standar teknis dan keberlanjutan (<i>green infrastructure</i>) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten Revitalisasi daerah aliran sungai Pengembangan sistem drainase ramah lingkungan. Penyediaan infrastruktur yang ramah penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya serta ramah anak Membangun fasilitas/infrastruktur kota (Landmark) di Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah Pengembangan infrastuktur pendukung KEK Mandalika dan kawasan penyangga KEK

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemanfaatan struktur dan pola ruang sesuai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>Menyusun dokumen rencana detail tata ruang yang memperhitungkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah serta tangguh iklim dan bencana</p> <p>Sistem pemantauan infrastruktur berbasis GIS</p> <p>Penyediaan dashboard konektivitas antarwilayah</p> <p>Peningkatan sarana keselamatan jalan</p> <p>Pengembangan transportasi publik</p> <p>Penguatan akses antarwilayah melalui multimoda</p> <p>Penyediaan moda transportasi ramah disabilitas, lansia dan anak</p>
			Pengembangan kawasan perdesaan terpadu	<p>Fasilitasi sarana prasarana desa</p> <p>Pengembangan administratif Kewilayahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan</p> <p>Kemitraan antarwilayah dalam pengembangan potensi lokal</p> <p>Penetapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan</p>
		S.4.1.2	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	<p>Optimalisasi pengelolaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan</p> <p>Pembangunan rumah layak huni</p> <p>Rehabilitasi rumah tidak layak huni</p> <p>Fasilitasi perizinan dalam proses penyediaan perumahan sesuai Tata Ruang Wilayah.</p> <p>Penanganan kawasan kumuh secara terpadu</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KEK, dan kawasan strategis lainnya</p> <p>Penyediaan prasarana dan sarana umum kawasan perumahan dan permukiman</p> <p>Penguatan sistem penyediaan air minum (SPAM)</p> <p>Penyediaan sistem pengolahan limbah domestik</p> <p>Pemenuhan akses air minum aman</p> <p>Pemenuhan akses sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif</p> <p>Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan</p> <p>Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman</p> <p>Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal</p> <p>Optimalisasi lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal</p>
		S.4.1.3	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<p>Peningkatan partisipasi dan inklusivitas ketahanan bencana dan perubahan iklim</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan</p> <p>Adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas</p> <p>Pendidikan kebencanaan dan perubahan iklim</p> <p>Pengkajian risiko bencana dan perencanaan terpadu</p> <p>Penyusunan rencana kontijensi semua jenis skenario bencana</p> <p>Pengembangan sistem informasi bencana berbasis digital</p> <p>Penanganan tematik kawasan rawan bencana</p> <p>Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana</p> <p>Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana</p>

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adaptif
				Integrasi multi-ancaman (gempa, banjir, kekeringan, kebakaran hutan)
			Peningkatan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penurunan emisi GRK dari sektor limbah
				Pemantauan kualitas air, udara, dan tanah
				Optimalisasi pengelolaan persampahan terpadu
				Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab
				Peningkatan infrastruktur pengolahan sampah terpadu
				Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan limbah
				Perluasan cakupan sistem bank sampah serta metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
				Peningkatan kapasitas dan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan teknologi yang mampu mengolah sampah menjadi energi (<i>waste-to-energy</i>)
Misi 5: Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat				
	T.5.1	Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis		
		S.5.1.1	Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban bermasyarakat
				Penguatan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal
				Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sara
				Internalisasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat
				Pemetaan dan penanganan potensi konflik sosial secara partisipatif
				Penguatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah
				Kolaborasi lintas sektor dan lintas agama
		S.5.1.2	Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Integrasi nilai budaya dan sosial dalam masyarakat
				Meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi
				Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Fondasi Ketahanan Sosial
				Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial
				Mengaktifkan FKDM, FKUB, dan tokoh masyarakat sebagai mediator sosial
				Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan
				Integrasi agama dan budaya dalam pembangunan daerah
				Pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah
				Membangun sinergi antara forkopinda dan masyarakat
				Penguatan peran tokoh adat dalam mediasi sosial dan pelestarian nilai lokal
				Melestarikan warisan budaya tak benda dan benda melalui dokumentasi, festival, dan pendidikan budaya
				Penguatan literasi bahasa dan sastra sebagai ekspresi sosial dan identitas

3.3.3 Pentahapan Pembangunan

Pentahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan utama pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lombok Tengah memuat tahapan perodesasi pembangunan jangka menengah yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi NTB Emas 2045 sesuai dengan karakteristik daerah. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 per periode nya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Tahapan Implementasi RPJPD
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045
Sumber: RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045

Periode RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045. Pada tahapan ini difokuskan pada langkah penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045 yang mencakup lima aspek utama, yaitu transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, keseimbangan pembangunan antarwilayah, dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan-tahapan pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis dan berjenjang sesuai dengan dinamika capaian serta kemampuan fiskal daerah. Pentahapan ini akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan pertahunnya.

Berdasarkan rumusan strategi pencapaian masing-masing sasaran dan memperhatikan arah kebijakan pada tiap misi, maka perlu ditetapkan pentahapan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini untuk memberikan arah pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada akhir periode perencanaan.

Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap (V) 2029
Konsolidasi dan Penataan Awal Sebagai Persiapan Dalam Memperkuat Pondasi Transformasi Pembangunan	Eksekusi Program Prioritas Untuk Menuju MASMIRAH	Akselerasi Transformasi Menuju MASMIRAH	Konsolidasi Hasil dan Penyesuaian untuk Mewujudkan MASMIRAH	Finalisasi: Perwujudan MASMIRAH

Tahap I (2025)

Pada tahap awal pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memprioritaskan konsolidasi perencanaan dan penataan kelembagaan sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) OPD dilakukan agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD, disertai penetapan indikator kinerja daerah dan baseline data pembangunan yang akurat dan terukur.

Program unggulan daerah mulai diluncurkan sebagai bentuk komitmen terhadap visi dan misi kepala daerah, dengan integrasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti

RTRW, RPJPD, RPJMN, dan SIPD. Penataan kelembagaan dan regulasi pendukung juga menjadi fokus utama untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika pembangunan.

Tahap II (2026)

Memasuki tahun kedua, pelaksanaan RPJMD diarahkan pada eksekusi program prioritas secara menyeluruh. Pemerintah daerah mengimplementasikan program unggulan lintas sektor dengan pendekatan inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Perluasan cakupan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan digitalisasi layanan publik menjadi bagian integral dari strategi peningkatan efisiensi dan aksesibilitas. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis SIPD serta dashboard kinerja diperkuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program.

Tahap III (2027)

Pada tahun ketiga, RPJMD memasuki fase akselerasi transformasi yang bertujuan mempercepat perubahan struktural dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah mendorong hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terus digulirkan untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketahanan pangan dan energi berbasis desa diperkuat sebagai bagian dari strategi kemandirian dan keberlanjutan.

Tahap IV (2028)

Tahap keempat merupakan fase evaluatif dan adaptif dalam pelaksanaan RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan evaluasi tengah periode untuk menilai capaian, tantangan, dan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Penyesuaian strategi dilakukan secara berbasis data dan partisipatif untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat melalui harmonisasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Perluasan kerja sama internasional dan investasi strategis juga menjadi bagian dari upaya memperluas sumber daya pembangunan dan memperkenalkan potensi daerah ke tingkat global.

Tahap V (2029)

Pada tahun terakhir RPJMD, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memfokuskan perwujudan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis melalui pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian target makro pembangunan daerah, termasuk indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Seluruh capaian program dan kebijakan didokumentasikan secara sistematis sebagai bagian dari akuntabilitas dan pembelajaran pembangunan.

Penyiapan transisi kepemimpinan dan kesinambungan program dilakukan untuk memastikan bahwa agenda pembangunan tidak terputus oleh dinamika politik dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tahap ini menjadi refleksi atas perjalanan lima tahun pembangunan,

sekaligus fondasi untuk merancang arah kebijakan jangka menengah berikutnya yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

3.3.4 Lokus Pembangunan

Dalam perencanaan dan pembangunan wilayah, terdapat berbagai macam dan jenis pendekatan dan konsep pengembangan wilayah. Dalam perkembangannya terdapat beberapa pendekatan dalam pengembangan wilayah seperti pembangunan dari atas (*development from above*), pembangunan dari bawah (*development form below*), dan pembangunan dari tengah (*development from within*). Pembangunan dari tengah menjadi opsi yang paling optimal yang dapat diterapkan di Lombok Tengah. Pembangunan dari tengah dapat lebih fleksible, tidak hanya berbasis dari pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis modal dan industri namun juga bagaimana sektor-sektor potensial dan ekonomi lokal dapat berkembang.

Dalam pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Tengah, pendekatan pembangunan yang dapat digunakan antara lain:

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang seimbang
2. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis
4. Mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan
5. Mengurangi disparitas antar kawasan

Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Lombok terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Kawasan Utara, Kawasan Tengah, dan Kawasan Selatan. Pembagian wilayah ini ditujukan untuk terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai dengan potensi, isu, karakteristik kawasan, dan sejumlah kebijakan strategis.

<p>UTARA Mengendalikan</p>	<p>Kawasan ini merupakan daerah dengan limitasi pembangunan yang cukup tinggi karena berada pada area kaki gunung Rinjani dan yang merupakan kawasan konservasi. Kawasan ini meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan unggulan di sektor pertanian. Di samping itu, kondisi yang masih asri dan dekat dengan hutan memiliki potensi dalam pengembangan wisata alam berbasis ekowisata. Dari kondisi tersebut, strategi pengembangan kawasan ini perlu mengedepankan pengendalian pembangunan, keseimbangan alam, dan keberlanjutan.</p>
<p>TENGAH Mengoptimalkan</p>	<p>Kawasan ini merupakan daerah yang berada pada dataran rendah dengan dominasi wilayah pertanian dan permukiman. Kawasan ini meliputi kawasan di Kecamatan Praya, Praya Tengah, Jonggat, dan Janapria. Kawasan ini memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Di samping memiliki lahan pertanian yang luas, kawasan ini dapat menjadi kawasan yang mendorong pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan. Dari kondisi tersebut, strategi pengembangan kawasan ini perlu mengoptimalkan pembangunan yang harmonis antara peningkatan produktivitas pertanian dan pembangunan kawasan permukiman yang kompak.</p>
<p>SELATAN Mendorong</p>	<p>Kawasan ini merupakan daerah yang berbukit-bukit dan menjadi wilayah pesisir yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Laju investasi pada kawasan ini juga cukup tinggi. Kawasan ini menjadi kawasan prioritas dalam pengembangan perkotaan atau perdesaan dengan sektor unggulan pariwisata serta sektor perikanan dan kelautan. Dari kondisi tersebut, strategi pengembangan kawasan ini adalah dengan mendorong pembangunan berbasis pariwisata dengan tersedianya amenities yang memadai, infrastruktur penunjang, serta pemberdayaan masyarakat lokal.</p>



Gambar 3.3 Peta Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Lombok Tengah
 Sumber: Draft Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045

Tabel 3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Zona

Kebijakan	Strategi Pengembangan Wilayah
Wilayah Pengembangan Utara	<p>Strategi Pengembangan Wilayah dilakukan dengan Mengendalikan Pengembangan Wilayahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang ditetapkan Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman dan sentra-sentra produksi. Meningkatkan produktifitas lahan dan kegiatan budidaya dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang ditetapkan Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan yang luas dan potensial menyebabkan/berdampak kepada alih fungsi lahan sawah (KP2B) dan kawasan lindung
Wilayah Pengembangan Tengah	<p>Strategi Pengembangan Wilayah dilakukan dengan Membatasi dan mengoptimalkan Pengembangan Wilayahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan yang luas dan potensial menyebabkan/berdampak kepada alih fungsi lahan sawah (KP2B) dan kawasan lindung. Memenuhi Kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Mengembangkan sistem transportasi massal (Kaw. Mataram Raya – Bandara BIL-KEK Mandalika) Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan pusat-pusat pelayanan. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah.
Wilayah Pengembangan Selatan	<p>Strategi Pengembangan Wilayah dilakukan dengan Mendorong Pengembangan Wilayahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa serta kelautan. (Kaw. Global Hub, KEK Mandalika) Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan sesuai RTRW. (Kaw. Global Hub dan KEK Mandalika) Mengembangkan infrastruktur wilayah. (Kaw. Global Hub, KEK Mandalika) Mengembangkan sistem jaringan transportasi (Lembar – BIL – KEK Mandalika – dst) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menjaga keberlanjutan struktur ruang antara wilayah (kualitas keterhubungan struktur ruang) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk mewujudkan perimbangan peran dan fungsi wilayah Menerapkan kebijakan pengelolaan pembangunan antarwilayah untuk kegiatan pengembangan pariwisata pelayanan air minum, sampah, transportasi massal, migrasi penduduk, KP2B, DAS, kawasan lindung dan sumber daya alam. Memprioritaskan investasi untuk pengembangan kawasan Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah. Meningkatkan optimalisasi potensi wilayah perairan Meningkatkan produktivitas potensi kelautan dan perikanan Menjaga kawasan lindung sekitar kawasan TWA Menerapkan kebijakan pengelolaan pembangunan antarwilayah

Tabel 3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sektor Utama

Kebijakan	Strategi
Pengembangan dan pemantapan wilayah-wilayah yang berbasis utama pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Kuta, Teluk Awang, Bumbang dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya, Selong Belanak dan sekitarnya serta obyek-obyek wisata unggulan yang tersebar di Kabupaten. Mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah/budaya. Merevitalisasi nilai-nilai budaya, situs/cagar budaya yang bernilai historis. Mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan lokal setempat, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, ekowisata, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan; dan Mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Menyediakan, memelihara dan meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, pertanian dan perikanan

Kebijakan	Strategi
Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan perikanan sebagai daerah produksi. 2) Mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan. 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi. 4) Menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis. 5) Menetapkan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan. 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering; dan 7) Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut dan tawar, pengolahan hasil ikan dan pemasarannya.
Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan kawasan potensial pantai dan laut dengan tetap 2) Memperhatikan kelestarian alam. 3) Mengembangkan jaringan sarana dan prasarana guna mendukung investasi. 4) Memantapkan fungsi-fungsi kawasan pantai dan laut.
Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, agropolitan dan minapolitan. 2) Memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah. 3) Memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya. 4) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan 5) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
Wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat 2) Mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian. 3) Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan pertanian. 4) Meningkatkan jaringan energi dan kelistrikan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan 5) Mengoptimalkan tingkat penanganan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
Pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melestarikan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi. 2) Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung kabupaten. 3) Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah. 4) Menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas das yang berada di wilayah lombok tengah. 5) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 6) Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 7) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. 8) Mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung. 9) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun.

Kebijakan	Strategi
	10) Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana. 11) Mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana. 12) Memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana. 13) Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana; dan 14) Menetapkan alokasi ruang kawasan rawan bencana dengan mengacu pada peta rawan bencana
Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan.	1) Meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya dan melibatkan peran serta masyarakat. 2) Mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. 3) Mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan. 4) meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya melalui sentra pengolahan hasil ikan. 5) Meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan. 6) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan 7) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan	1) Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. 2) Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya; dan 3) Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	1) Mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan. 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun 3) Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan untuk menjaga fungsi peruntukannya. 4) Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan / TNI

Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam lokasi prioritas pembangunan wilayah berdasarkan kawasan strategis provinsi NTB sesuai RTRW 2024-2044 yakni pada Kuta Mandalika dan sekitarnya yang menjadikannya kawasan pariwisata, perikanan, dan industri berbasis potensi sumber daya alam yang mendukung KEK Mandalika. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mengembangkan dan peningkatan kualitas sektor-sektor yang terlibat seperti: sektor ekonomi unggulan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perikanan dan mina industri. Sehingga arah kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi Kuta Mandalika dan sekitarnya:

- a. Pengembangan linkage sistem sektor Pariwisata, perikanan dan industri yang terintegrasi
- b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya kelautan dan perikanan yang mendukung sektor pariwisata, perikanan, dan industri
- c. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana

- d. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, perikanan lestari yang berwawasan lingkungan, dan berbasis kerakyatan
- e. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, perikanan, dan industri
- f. Peningkatan produktifitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, perikanan, dan industri
- g. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha pariwisata, perikanan, dan industri
- h. Peningkatan peran masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, perikanan dan industri

Bentuk intervensi pemerintah daerah dalam rangka mendukung arah pengembangan kewilayahan untuk provinsi NTB di Kabupaten Lombok Tengah dalam RPJMN Tahun 2024-2029 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayahan Lombok Tengah dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	Highlight Indikasi Intervensi Pusat	Output
Kawasan Pertumbuhan		
Kawasan DPP Lombok-Gili Tramena	Peningkatan jalan nasional	Pembangunan jalan akses simpul transportasi
	Pengembangan atraksi (alam, budaya dan buatan)	Event MICE, Event daerah, Event nasional, jejaring destinasi pariwisata, Dok Ren Pariwisata terintegrasi, koordinasi perencanaan dan pengembangan Geopark (bisa juga termasuk Cagar Biosfer)
	Pembangunan Sarpras umum, fasilitas umum dan amenitas	Sistem pengelolaan air limbah domestik skala kota
	Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata	Fasilitasi dan pembinaan dlm pengembangan kapasitas SDM, Sertifikasi SDM Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata	Publikasi promosi terpadu, konten promosi wisata minta khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadu dan kerjasama dengan maskapai
	Pengembangan industri, usaha Masyarakat dan investasi pariwisata	Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan, Implementasi Blue Green, Circular Ekonomi, penerapan pariwisata berkelanjutan
	Fasilitasi KEK	Pengendalian Pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi Kerjasama komunikasi dan informasi
	Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah	Bank Sampah Induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem kelola sampah skala kota, instalasi pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
	Pemanfaatan dan pengelolaan sampah laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Prasarana penanggulangan sampah di laut dan pesisir, bantuan pengembangan desa pesisir bersih. Fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi sirkular
Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani	Benih ternak unggul, sarana pembibitan ternak, prasarana pembibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong,

Agenda	Highlight Indikasi Intervensi Pusat	Output
		pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan layanan kesehatan hewan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarpras kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut (Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut)	Hilirisasi peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia	Fasilitasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola, kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra rumput laut
	Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut	Peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis Kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan
	Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktifitas budidaya	Bibit rumput laut kultur jaringan, sarana budidaya yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur Kawasan budidaya rumput laut, dll
	Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil laut dan perikanan
	Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	
	Pengembangan budidaya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut	

3.3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.3.5.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas Pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama Pembangunan daerah, isu strategis Pembangunan daerah, prioritas nasional dan prioritas Pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Untuk menindaklanjutinya, maka dibuat prioritas-prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Adapun uraian prioritas Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
4. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
5. Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat

Keterkaitan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 dengan isu strategis Pembangunan daerah dan isu strategis KLHS disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Keterkaitan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029 dengan Isu Strategis

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029		Isu Strategis RPJMD		Isu Strategis KLHS	
PD1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IS1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IS-KLHS3 IS-KLHS4	Masih terdapat masyarakat dengan tingkat penyelesaian pendidikan dan kemampuan literasi yang masih rendah Belum optimalnya akses layanan kesehatan dan taraf kesehatan masyarakat masih rendah
PD2	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	IS6	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IS-KLHS10	Digitalisasi dan pelayanan publik belum optimal
PD3	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	IS7	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	IS-KLHS1	Pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah belum optimal
		IS4	Peningkatan Produktivitas Daerah	IS-KLHS2 IS-KLHS5 IS-KLHS6	Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan kurangnya diversifikasi ekonomi kreatif berbasis UMKM Masih rendahnya penurunan persentase penduduk miskin Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan cakupan perlindungan sosial tenaga kerja
PD4	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	IS5	Kualitas Lingkungan Hidup	IS-KLHS9	Degradasi lingkungan hidup, risiko bencana alam dan perubahan iklim
		IS2	Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	IS-KLHS7 IS-KLHS8	Pengelolaan sanitasi belum optimal Degradasi sumber daya air dan pelayanan air minum belum optimal
PD5	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	IS3	Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju	IS-KLHS11	Tingginya tingkat kriminalitas serta belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah selain untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi NTB. Prioritas pembangunan nasional atau disebut dengan Asta Cita merupakan agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2024-2029. Delapan agenda Pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara Pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (Asta Cita), prioritas Provinsi NTB (10 program unggulan) dan prioritas Kabupaten Lombok Tengah, maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Lombok Tengah Tahun 2025-2029 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan Asta Cita yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan 10 Program Unggulan Provinsi NTB yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

Tabel 3.11 Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi NTB dengan Prioritas Kabupaten Lombok Tengah

Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Daerah NTB (10 Program Unggulan)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah
ASTA CITA 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	DESA BERDAYA	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
	NTB AGRO MARITIM	
ASTA CITA 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	NTB CONNECTED	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	NTB TERAMPIL DAN CERDAS	
	NTB AGRO MARITIM	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
	E-MANIA (EKRAF MENDUNIA)	
ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandangdisabilitas	NTB SEHAT DAN CERDAS	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	NTB TERAMPIL DAN CERDAS	
	NTB INKLUSIF	
ASTA CITA 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	NTB AGRO MARITIM	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
	NTB PARIWISATA BERKUALITAS	
ASTA CITA 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	NTB AGRO MARITIM	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
ASTA CITA 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	NTB GOOD DAN SMART GOVERNANCE	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
	DESA BERDAYA	
ASTA CITA 8: Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
	NTB INKLUSIF	

3.5.5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas.

Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi atau kebijakan serta dalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406-24 Tahun 2024.

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 menerjemahkan Visi dan Misinya melalui program unggulan dan janji politiknya sebagai berikut:

LOTENG MANDIRI	LOTENG SEJAHTERA
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitas Publik Ramah Anak dan Ramah Disabilitas ❖ Membangun Desa Menata Kota ❖ Kemitraan Pondok Pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Cinta Yatim Piatu ❖ Desa Wisata Unggul ❖ UMKM Go International ❖ Asuransi Petani, Peternak dan Nelayan ❖ Insentif Desa Berprestasi (Rumah Layak Huni, infrastruktur jalan, irigasi, layanan Persampahan) ❖ Reban Bagus Pare Solah
LOTENG BERDAYA SAING	LOTENG HARMONIS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Insentif Guru Ngaji ❖ Umroh untuk ASN dan Non ASN Berprestasi ❖ Beasiswa kedokteran bagi keluarga miskin dan Tahfiz Alqur'an ❖ Mencetak Generasi Emas Berprestasi ❖ Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang Representatif ❖ Pendidikan Unggul ❖ Kesehatan untuk semua ❖ Bale Kreasi ❖ Fasilitas Pendukung Operasional Aparat Desa dan BPD ❖ Insentif Guru Honorer dan Tenaga Medis Honorer ❖ Insentif Guru Honorer dan Tenaga Medis Honorer ❖ Fasilitas Olahraga di Setiap Kecamatan ❖ Insentif Ketua RT ❖ Insentif Kader Posyandu ❖ Jamsostek Untuk BKD dan BKK ❖ Menuju Nol Stunting 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Insentif Marbot ❖ Jaminan Kesehatan Tuan Guru dan Pemuka Agama Lainnya ❖ Air Bersih Gratis untuk Masjid dan Tempat Ibadah Agama Lainnya ❖ Beriuik Tandang Perapet Sile ❖ Pemajuk Adat Budaya. Pembangunan Sentra Budaya sebagai wadah untuk mempertemukan berbagai pelaku kebudayaan pada tiap zona wilayah

Tabel 3.12 Integrasi Program Unggulan Kepala Daerah dengan Program Nomenklatur dan Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
LOTENG MANDIRI		
Fasilitas Publik Ramah Anak dan Ramah Disabilitas	Program pengelolaan pendidikan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
	Program penataan bangunan gedung	
Membangun Desa Menata Kota	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Kemitraan Pondok Pesantren	Program pengembangan UMKM	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
LOTENG BERDAYA SAING		
Insentif Guru Ngaji	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Umroh untuk ASN dan Non ASN Berprestasi (Bidan, Perawat, Guru)	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Beasiswa kedokteran bagi keluarga miskin dan Tahfiz Alqur'an	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mencetak Generasi Emas Berprestasi	Program pengelolaan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	
Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang Representatif	Program penataan bangunan gedung	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
	Program pelayanan penanaman modal	
Pendidikan Unggul: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan sekolah-sekolah unggulan	Program pengelolaan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk Semua	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
Bale Kreasi: Ruang kreatifitas untuk meningkatkan kapasitas generasi millennial di semua sektor seperti sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan lainnya	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Fasilitas Pendukung Operasional Aparat Desa dan BPD	Program administrasi pemerintahan desa	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Insentif Guru Honorer dan Tenaga Medis Honorer	Program pengelolaan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
Fasilitas Olahraga di Setiap Kecamatan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Insentif Ketua RT	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Insentif Kader Posyandu	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Jamsostek untuk BKD dan BKK	Program administrasi pemerintahan desa	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
Menuju Nol Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Program perlindungan dan jaminan sosial	
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
	Program kawasan permukiman	
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Program pengelolaan persampahan	
LOTENG SEJAHTERA		
Cinta Yatim Piatu	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
Desa Wisata Unggul	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
UMKM Go International	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Program pengembangan UMKM	
Asuransi Petani, Peternak dan Nelayan	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Program pengelolaan perikanan tangkap	
Insentif Desa Berprestasi (Rumah layak huni, infrastruktur jalan, irigasi, layanan persampahan)	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Program penyelenggaraan jalan	Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Program kawasan permukiman	
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
Reban Bagus Pare Solah	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
LOTENG HARMONIS		
Insentif Marbot	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
Jaminan Kesehatan Tuan Guru dan Pemuka Agama Lainnya	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
Air Bersih Gratis untuk Masjid dan Tempat Ibadah Agama Lainnya	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
Beriuk Tandang Perapet Site	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat
Pemajuk Adat Budaye. Pembangunan sentra budaya sebagai wadah untuk mempertemukan berbagai pelaku kebudayaan pada tiap zona wilayah	Program pengembangan kebudayaan	Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2025-2029 dirumuskan dengan menggunakan pohon kinerja dan cascading penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)					
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas					
	T.1.1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas		Indeks Pembangunan Manusia	
		S.1.1.1	Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Bayi Prevalensi Stunting pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		S.1.1.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Berkeadilan	Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah PAUD dan DIKDAS	APK PAUD APK SD APK SMP/MTs	Program Pengelolaan Pendidikan
		S.1.1.3	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Ketimpangan Gender	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		S.1.1.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		S.1.1.5	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training dan Memperoleh Sertifikat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau					
	T.2.1	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Inovatif dan Kolaboratif		Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Daya Saing Daerah	
		S.2.1.1 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Survei Penilaian Integritas (SPI) Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Rentra Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya upaya ekstentifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		S.2.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pemerintah Digital (PemDi) Indeks Pelayanan Publik	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KIA Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Program Pencatatan Sipil
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai SNP	Tingkat Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Tingkat Digitalisasi Arsip	Program Pengelolaan Arsip
		S.2.1.3	Penguatan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah
Misi 3: Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan					
	T.3.1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi PDRB Per Kapita ADHB Tingkat Kemiskinan Rasio Gini	
		S.3.1.1		Tingkat Inflasi	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		S.3.1.2	Penguatan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Meningkatnya olahan hasil perikanan dan produksi garam rakyat	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan Produksi Garam Rakyat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		S.3.1.3	Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		S.3.1.4	Peningkatan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Rasio Kewirausahaan Daerah	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
		S.3.1.5	Peningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
		S.3.1.6	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		S.3.1.7	Meningkatnya Iklim Berusaha	Nilai Investasi Daerah	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		S.3.1.8	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Indeks Kriminalitas Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	
			Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, penanganan gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		S.3.1.9	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Misi 4: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah					
	T.4.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks Desa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		S.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah Rasio Konektivitas	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Program Penataan Desa
		S.4.1.2	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten Ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		S.4.1.3	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK Indeks Risiko Bencana Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	
			Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Pasca Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Misi 5: Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah Dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat					
	T.5.1	Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis		Indeks Harmoni Indonesia	
		S.5.1.1	Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Indeks Toleransi	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		S.5.1.2	Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Melalui Musyawarah Adat	
			Meningkatnya Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Prioritas Pembangunan daerah diterjemahkan dengan berbagai kegiatan strategis yang memiliki sasaran kinerja yang terukur. Adapun kegiatan strategis daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3.14 Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM NOMENKLATUR
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.1	Pembangunan puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	KS.2	Peningkatan sarana pelayanan kesehatan	
	KS.3	Peningkatan kualitas alat kesehatan di Faskes	
	KS.4	Ketersediaan tenaga Kesehatan	
	KS.5	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan Tenaga Kesehatan	
	KS.6	Peningkatan status tenaga Kesehatan	
	KS.7	Peningkatan fasilitas sarana prasarana kesehatan primer	
	KS.8	Gerai Santri Sehat	
	KS.9	Menuju Zero Stunting	
	KS.10	Pembangunan rumah sakit Tipe D di wilayah utara dan selatan	
	KS.11	Tes Kebugaran ASN dan Perangkat Desa	
	KS.12	Peningkatan kualitas layanan RSUD	
	KS.13	Peningkatan sarana dan prasarana RSUD, terutama ketersediaan air bersih dan listrik	
	KS.14	Pemeliharaan gedung fasilitas kesehatan	
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.15	Peningkatan akses jalan ke fasilitas kesehatan	Program Penyelenggaraan Jalan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.16	Literasi dan Numerasi	Program Pengelolaan Pendidikan
	KS.17	Sarana dan prasarana pendidikan yang Inklusif	
	KS.18	Sekolah unggulan di masing-masing kecamatan untuk SD dan SMP	
	KS.19	Pengembangan pendidikan Inklusi	
	KS.20	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	
	KS.21	Revitalisasi sekolah (SD dan SMP)	
	KS.22	Penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun	
	KS.23	Grand Design Pendidikan	
	KS.24	Penguatan sekolah sehat	
KS.25	Perpustakaan Sekolah		
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.26	Penyediaan Guru untuk Sekolah Rakyat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.27	Integrasi perubahan iklim pada proses pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.28	Angkutan anak sekolah gratis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	KS.29	Sarana dan prasarana Halte BUS Sekolah	
	KS.30	Zona Selamat Sekolah	
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.31	Anggaran Responsif Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.32	Peningkatan status KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.33	Kelas Orang Tua Hebat (Kerabat)	Program Perlindungan Khusus Anak
	KS.34	PUP goes to school/pesantren	

PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM NOMENKLATUR
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.35	Penguatan Kelompok Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.36	Peningkatan prestasi olahraga dan penghargaan kepada pelatih dan atlet	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	KS.37	Sarana prasarana olahraga	
	KS.38	Kompetisi Olahraga	
	KS.39	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.40	Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.41	Pembinaan Pemuda Pelopor	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	KS.42	Kewirausahaan pemuda	
	KS.43	Sosialisasi Narkoba kepada Pemuda	
	KS.44	Pelatihan Kepemimpinan	
	KS.45	Penghargaan kepada pemuda berprestasi	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.46	Sarana prasarana layanan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
	KS.47	SPOT Baca	
	KS.48	Akreditasi Perpustakaan Sekolah	
	KS.49	Rumah Baca Integrasi per zona	
	KS.50	Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial (TPBIS) di semua Desa	
	KS.51	Sosialisasi Literasi Digital	
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.52	Pengelolaan limbah di fasilitas kesehatan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	KS.53	Pengelolaan sampah untuk siswa	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.54	Penyiapan SDM Statistik Sektoral dan Keamanan Cyber	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.55	Infrastruktur SPBE (Keamanan cyber, Hardware, data centre, aplikasi, dll)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	KS.56	Penyediaan infrastruktur dan layanan Digital	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.57	Revitalisasi MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal
	KS.58	Peningkatan layanan perizinan dan konsultasi melalui Klinik Investasi	
	KS.59	Pelatihan dan pengelolaan digitalisasi perizinan	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.60	Digitalisasi Pelayanan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.61	Peningkatan pelayanan Adminduk yang ramah kelompok rentan	Program Pendaftaran Penduduk
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.62	Perluasan jangkauan penggunaan aplikasi SEMAIK sampai ke Desa dan kelurahan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.63	Pembangunan Rumah Singgah	Program Pemberdayaan Sosial
	KS.64	Sosialisasi dan pendataan infrastruktur publik yang inklusif	
	KS.65	Peningkatan kualitas SDM kelompok rentan	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.66	Peningkatan perlindungan korban bencana sebelum dan sesudah bencana	Program Penanganan Bencana
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.67	Pendataan dan pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM NOMENKLATUR
	KS.68	Peningkatan anggaran infrastruktur publik sesuai dengan regulasi yang berlaku	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.69	Pelayanan sosialisasi Survei Pelayanan Integritas (SPI)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	KS.70	Pelayanan tata kelola keuangan negara	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.71	Peningkatan layanan dan kualitas data Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
	KS.72	Digitalisasi Kepegawaian	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.73	Peningkatan kompetensi teknis dan managerial ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.74	Digitalisasi dalam mengoptimalkan pajak daerah melalui penyediaan virtual account	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	KS.75	Layanan pajak PBB sampai ke desa	
	KS.76	Peningkatan pajak kendaraan dinas melalui sensus pajak kendaraan dinas	
	KS.77	Pemutakhiran data pajak SPT	
	KS.78	Digitalisasi sistem pembayaran pajak	
	KS.79	Penguatan kapasitas SDM pengelola pajak retribusi daerah	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.80	Penggalian potensi-potensi pajak daerah	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	KS.81	Review regulasi pengelolaan Dana Desa	
	KS.82	Penyesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan hibah dan keamanan langsung ke desa	
	KS.83	Sinkronisasi perencanaan daerah dan desa	
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	KS.84	Penguatan dan penataan kelembagaan Desa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	KS.85	Pembangunan unit layanan terpadu penanganan konflik sosial	
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	KS.86	Pembentukan laboratorium pemberdayaan ormas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.87	Optimalisasi layanan Call center 112	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	KS.88	Peningkatan kapasitas SDM relawan kebakaran sampai ke tingkat Desa	
	KS.89	Sosialisasi dan peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.90	Peningkatan keamanan desa dalam kebencanaan	Program Penanggulangan Bencana
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KS.91	Pengamanan dan penertiban non yustisi maupun penertiban yustisi terhadap pelanggaran perda/perkada	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	KS.92	Penguatan kapasitas SDM Satpol-PP dan Satlinmas	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.93	Pengembangan dan pemanfaatan E-commerce	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	KS.94	Peningkatan daya saing produk industri	
	KS.95	Peningkatan hilirisasi pertanian	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.96	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata	

PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM NOMENKLATUR
	KS.97	Penyiapan masyarakat insan pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.98	Penguatan promosi pariwisata digital dan non-digital	Program Pemasaran Pariwisata
	KS.99	Penguatan kerjasama antar pelaku pariwisata	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.100	Revitalisasi dan optimalisasi BLK agar lebih inklusif	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	KS.101	Pembentukan wirausaha baru, tenaga kerja mandirisampai ke Kecamatan	
	KS.102	Pelatihan sertifikasi dan kerja sama dengan badan sertifikasi nasional	
	KS.103	Optimalisasi Pepadu Pintar	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.104	Penguatan perlindungan pekerja migran	Program Penempatan Tenaga Kerja
	KS.105	Pelaksanaan dan optimalisasi Job Fair	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.106	Penguatan kapasitas koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	KS.107	Pendampingan dan peningkatan koperasi merah putih	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.108	Promosi dan optimalisasi pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.109	Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor skala nasional dan internasional	Program Pengembangan Ekspor
	KS.110	Peningkatan promosi dagang	
	KS.111	Pelatihan dan bimtek pemasaran	
	KS.112	Optimalisasi fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.113	Penyediaan sarana distribusi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.114	Pembinaan dan pengendalian pelaku usaha	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.115	Pembinaan dan pengawasan metrologi legal	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	KS.116	Peningkatan ketersediaan data pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	KS.117	Peningkatan keamanan distribusi dan akses pangan kepada masyarakat	
	KS.118	Peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	
	KS.119	Sosialisasi Beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) sampai tingkat desa	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.120	Optimalisasi minapadi organik	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	KS.121	Peningkatan produksi rumput laut dengan penggunaan teknologi modern	
	KS.122	Peningkatan tangkapan budidaya perikanan laut dan tawar	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.123	Peningkatan alat tangkap ikan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	KS.124	Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan	
	KS.125	Penyediaan sarpras PPN Awang	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.126	Pembentukan Perda Perlindungan KP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.127	Penyediaan sarpras pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	KS.128	Peningkatan kapasitas Poktan dan Gapoktan	
	KS.129	Fasilitasi program nasional petani melenial dan brigade pangan	

PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM NOMENKLATUR
	KS.130	Peningkatan teknologi tepat guna	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.131	Pengawasan perda investasi dan perizinan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	KS.132	Peningkatan peran Satgas investasi	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.133	Penyusunan SOP investasi dan perijinan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	KS.134	Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)	
	KS.135	Penyusunan peta potensi investasi dan LKPM	
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.136	Penyusunan dan pembaruan baseline data dan profil permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman
	KS.137	Penuntasan kawasan permukiman kumuh	
	KS.138	Penuntasan RTLH	
	KS.139	Penanganan darurat dampak bencana	
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.140	Kerjasama pengelolaan limbah B3 di TPA Lajut atau di TPA Pengingat	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.141	Pelaksanaan program kampung iklim (Proklam)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	KS.142	Peningkatan status akreditasi lab LH	
	KS.143	Pemantauan Kualitas Air dan Udara	
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.144	Pemantauan pengelolaan sampah dan limbah	Program Pengelolaan Persampahan
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.145	Pembentukan desa tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana
	KS.146	Peningkatan kapasitas dan kuantitas aparatur kebencanaan	
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	KS.147	Pemenuhan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.148	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.149	Pemenuhan SR air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.150	Pemenuhan sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.151	Peningkatan Rasio konektifitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	KS.152	Subsidi angkutan Umum	
	KS.153	Bus Sekolah dalam Kota	
	KS.154	Pemenuhan sarana prasarana keselamatan jalan (ZOSS, Rambu-Rambu Jalan, Rambu Lalu lintas dll)	
	KS.155	Pemeliharaan sarana prasarana keselamatan Jalan	
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.156	Peningkatan Jalan Kopang-Biao	Program Penyelenggaraan Jalan
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.157	Penuntasan Dokumen RDTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.158	Revitalisasi Masjid Agung	Program Penataan Bangunan Gedung
	KS.159	Database Bangunan Pemerintah	
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.160	MoU tentang penuntasan RTLH	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	KS.161	Penanganan permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	KS.162	Penanganan Permukiman Pesisir	
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	KS.163	Pelestarian kesenian tradisional	Program Pengembangan Kebudayaan
	KS.164	Perlindungan cagar budaya	

PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS		PROGRAM NOMENKLATUR
	KS.165	Pengembangan pusat sistem kebudayaan	
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	KS.166	Inventarisasi dan sertifikasi warisan budaya tak benda	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	KS.167	Penyusunan buku bahasa sasak (Lombok Tengah)	
	KS.168	Pembentukan tim ahli cagar budaya	
	KS.169	Pembangunan taman budaya	
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	KS.170	Pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	KS.171	Festival Kebangsaan	
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	KS.172	Dialog dan silaturahmi tokoh Lintas Agama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Penguatan Modal Sosial, Budaya dan Harmoni Masyarakat	KS.173	Patroli Simpatik Masmirah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



BAB 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Penyusunan program perangkat daerah merujuk pada nomenklatur program yang mengacu pada Permendagri Nomor 900.115.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					978.796.108.000		989.280.424.000			1.010.082.150.000		1.030.223.604.000		1.051.142.992.000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					707.874.388.000		709.124.433.000			714.442.867.000		719.801.189.000		725.199.698.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	707.874.388.000	100	709.124.433.000	100	714.442.867.000	100	719.801.189.000	100	725.199.698.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					269.497.644.000		278.683.375.000			292.617.544.000		307.248.422.000		322.610.844.000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah PAUD dan DIKDas	APK PAUD (poin)	71,89	72,44	72,99	269.497.644.000	73,54	278.683.375.000	74,09	292.617.544.000	74,64	307.248.422.000	75,19	322.610.844.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APK SD (poin)	105,46	106,01	106,56		107,11	107,66	108,21		108,76					
	APK SMP/MTs (poin)	109,22	109,77	110,32		110,87	11,42	111,97		112,52					
	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan PAUD	35,06	35,77	36,77		38,50	42,46	47,23		51,99					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Terakreditasi Minimal B (%)														
	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SD Terakreditasi Minimal B (%)	72,83	73,03	73,23		73,43		73,63		73,83		74,03			
	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi Minimal B (%)	57,52	57,72	57,92		58,12		58,32		58,52		58,72			
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase jamban dalam kondisi baik (%)	25,26	27,40	27,46		27,52		27,58		27,64		27,70			
	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)	20,05	21,39	21,48		21,57		21,66		21,75		21,84			
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					78.950.000		81.641.000		84.365.000		87.206.000		90.163.000		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan PAUD dan DIKDAS	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	100	100	100	78.950.000	100	81.641.000	100	84.365.000	100	87.206.000	100	90.163.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.215.000.000		1.256.413.000		2.798.323.000		2.943.053.000		3.093.679.000		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi (%)	19,00	19,00	19,31	1.215.000.000	19,47	1.256.413.000	23,50	2.798.323.000	23,80	2.943.053.000	24,10	3.093.679.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
tenaga kependidikan	Persentase PTK SD tersertifikasi (%)	20,95	36,60	37,60		38,60		39,60		40,60		41,60		
	Persentase PTK SMP tersertifikasi (%)	31,11	30,39	30,66		30,96		31,36		31,66		31,98		
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	87,41	86,12	86,62		87,12		87,62		88,12		88,62		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					10.309.000		10.661.000		11.017.000		11.388.000		11.775.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan PAUD dan DIKDAS	Persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui (%)	100	100	100	10.309.000	100	10.661.000	100	11.017.000	100	11.388.000	100	11.775.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					119.817.000		123.901.000		128.034.000		132.346.000		136.833.000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	100	100	100	119.817.000	100	123.901.000	100	128.034.000	100	132.346.000	100	136.833.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					597.614.302.000		669.483.775.000		690.147.395.000		711.701.934.000		734.134.531.000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					310.760.558.000		321.352.721.000		332.071.823.000		343.253.083.000		354.889.829.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan	Persentase Pencapaian IKU	100	100	100	310.760.558.000	100	321.352.721.000	100	332.071.823.000	100	343.253.083.000	100	354.889.829.000	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pemerintahan daerah	Perangkat Daerah (Persentase)													
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					285.265.113.000		344.988.273.000		354.827.958.000		365.091.884.000		375.773.927.000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	25	23	21	285.265.113.000	19	344.988.273.000	17	354.827.958.000	16	365.091.884.000	15	375.773.927.000	DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kematian Balita (Orang)	122	120	118		116		114		112		110		
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	24,9	20	17		14		12		11		10		
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)		5	10		15		20		25		25		
	Persentase Desa/Kelurahsanita si total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		60	59		58		57		56		55		
	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuaistandar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	80	81	82		84		86		88		90		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	49,5	50	50		55		60		65		70		
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	33,74	90	90		90		90		90		90		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	tuberkulosis (treatment coverage) ((%))														
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	28,4	30	32		34		26		38		40			
	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)		60	75		76		78		80		82			
	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	96	100	100		100		100		100		100			
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	90	90,8	91		92		93		94		95			
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)		14,20	14,14		12		11,50		11		10			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	83,31	100	100		100		100		100		100			
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	77	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)														
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	72	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	85	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	90,2	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,9	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	82	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	92	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	94	100	100		100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)													
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					540.840.000		2.059.275.000		2.127.965.000		2.199.617.000		2.274.188.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	80	82	85	540.840.000	90	2.059.275.000	100	2.127.965.000	100	2.199.617.000	100	2.274.188.000	DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga kesehatan dantenaga medis terhadap populasi (Rasio)	0:0	22:40	22:40		22:40		22:40		22:40		22:40		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					732.128.000		757.083.000		782.337.000		808.680.000		836.096.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	85	88	732.128.000	89	757.083.000	90	782.337.000	91	808.680.000	92	836.096.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					315.663.000		326.423.000		337.312.000		348.670.000		360.491.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	80	81	82	315.663.000	83	326.423.000	85	337.312.000	87	348.670.000	90	360.491.000	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
masyarakat bidang kesehatan														
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					149.597.451.000		112.934.113.000		129.009.096.000		147.795.719.000		167.899.594.000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.488.306.000		30.372.956.000		32.222.670.000		32.222.670.000		33.189.351.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	29.488.306.000	100	30.372.956.000	100	32.222.670.000	100	32.222.670.000	100	33.189.351.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.091.247.000		7.162.160.000		7.233.728.000		7.306.120.000		7.379.182.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota (%)	82,00	85,00	88,69	7.091.247.000	92,38	7.162.160.000	96,07	7.233.728.000	99,76	7.306.120.000	100,00	7.379.182.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					13.662.195.000		13.798.817.000		13.936.806.000		14.076.175.000		14.216.937.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap		94,87	95,81	13.662.195.000	96,77	13.798.817.000	97,75	13.936.806.000	98,73	14.076.175.000	98,93	14.216.937.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
penyediaan air minum	layanan sumber air minum layak (%)														
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	78,82	80,59	81,32		82,05		82,78		83,51		84,24			
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.805.129.000		2.889.283.000		2.975.962.000		3.065.241.000		3.157.199.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman (%)	87,94	88,18	88,93	2.805.129.000	89,68	2.889.283.000	90,43	2.975.962.000	91,18	3.065.241.000	91,93	3.157.199.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,75	3,5	4,47		5,44		6,41		7,38		12,52			
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.515.616.000		1.561.085.000		1.607.918.000		1.656.156.000		1.705.841.000		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	20,15	21,46	1.515.616.000	22,35	1.561.085.000	22,55	1.607.918.000	22,75	1.656.156.000	23,15	1.705.841.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					7.113.236.000		7.209.976.000		7.303.706.000		7.398.655.000		7.113.236.000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)		97	100	7.113.236.000	100	7.209.976.000	100	7.303.706.000	100	7.398.655.000	100	7.113.236.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					27.105.687.000		27.918.858.000		28.756.424.000		29.619.117.000		30.507.691.000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Proporsi fasilitas pemerintah daerah yang menggunakan EBT (%)	0,11	0,76	1,51	27.105.687.000	2,70	27.918.858.000	3,89	28.756.424.000	5,08	29.619.117.000	6,26	30.507.691.000	
	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	0	360,93	374,69		388,97		403,80		419,19		435,17		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.200.000.000		2.272.208.000		2.348.001.000		2.427.062.000		2.509.343.000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan dan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	2.200.000.000	100	2.272.208.000	100	2.348.001.000	100	2.427.062.000	100	2.509.343.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					57.757.392.000		18.854.667.000		31.702.954.000		49.075.967.000		67.143.801.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	74	75	76,786	57.757.392.000	77,281	18.854.667.000	78,144	31.702.954.000	79,501	49.075.967.000	81,166	67.143.801.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					101.343.000		104.084.000		107.207.000		110.424.000		113.737.000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	20,24	20,90	21,57	101.343.000	22,44	104.084.000	23,24	107.207.000	24,24	110.424.000	25,25	113.737.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					757.300.000		790.019.000		813.720.000		838.132.000		863.276.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	757.300.000	100	790.019.000	100	813.720.000	100	838.132.000	100	863.276.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					61.392.955.000		66.984.746.000		68.994.291.000		71.064.122.000		73.196.048.000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.084.342.000		7.296.873.000		7.515.780.000		7.741.254.000		7.973.492.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Peringkat IKU Daerah (Persentase)	77,50	100	100	7.084.342.000	100	7.296.873.000	100	7.515.780.000	100	7.741.254.000	100	7.973.492.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					935.777.000		963.851.000		992.767.000		1.022.551.000		1.053.228.000	
Terpenuhinya layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	935.777.000	100	963.851.000	100	992.767.000	100	1.022.551.000	100	1.053.228.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100		100		100		100				
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.605.397.000		4.183.559.000		4.309.066.000		4.438.338.000		4.571.489.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	3,29	4,06	6,25	2.605.397.000	9,19	4.183.559.000	13,64	4.309.066.000	14,26	4.438.338.000	15,84	4.571.489.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					10.726.415.000		11.548.208.000		11.894.655.000		12.251.495.000		12.619.040.000	
Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	3,03	3,44	3,56	10.726.415.000	3,69	11.548.208.000	3,83	11.894.655.000	3,99	12.251.495.000	4,15	12.619.040.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					40.041.024.000		42.992.255.000		44.282.023.000		45.610.484.000		46.978.799.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	15,80	25,93	36,06		46,19		56,31		66,44		76,57		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100	40.041.024.000	100	42.992.255.000	100	44.282.023.000	100	45.610.484.000	100	46.978.799.000	
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun (%)	0,01	0,01	1,54		3,07		4,60		6,13		7,66		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					41.550.171.000		42.935.427.000		44.367.593.000		45.861.506.000		47.416.276.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.668.894.000		36.856.973.000		38.086.383.000		39.368.798.000		40.703.455.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Satpol PP)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	21.916.356.000	100	22.635.684.000	100	23.390.725.000	100	24.178.319.000	100	24.997.997.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Damkartan)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	9.419.926.000	100	9.741.001.000	100	10.065.924.000	100	10.404.856.000	100	10.757.595.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (BPBD)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	4.332.612.000	100	4.480.288.000	100	4.629.734.000	100	4.785.623.000	100	4.947.863.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.601.184.000		2.686.559.000		2.776.173.000		2.869.651.000		2.966.937.000	
Meningkatnya penegakan Perda dan penangan gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat	Persentase Perda yang ditegakkan (%)	76	86	87,5		88,24		89,47		94,74		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	0	100		100		100		100		100		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	0	74,68	2.601.184.000	81,17	2.686.559.000	87,66	2.776.173.000	94,16	2.869.651.000	100	2.966.937.000	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	25	50		50		50		50		50		
	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	207	193	181		171		163		155		148		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.965.010.000		2.031.987.000		2.099.767.000		2.170.469.000		2.244.051.000	
Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	1.965.010.000		2.031.987.000		2.099.767.000		2.170.469.000		2.244.051.000	
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.315.083.000		1.359.908.000		1.405.270.000		1.452.588.000		1.501.833.000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	500.611.000	100	453.303.000	100	468.424.000	100	484.196.000	100	500.611.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	814.472.000	100	906.605.000	100	936.846.000	100	968.392.000	100	1.001.222.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					11.428.510.000		12.057.272.000		13.303.872.000		13.824.902.000		15.171.100.000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.129.010.000		6.214.172.000		6.833.072.000		6.808.702.000		7.501.600.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP PD (Angka)	65,24	70,27	72,00	6.129.010.000	74,00	6.214.172.000	77,00	6.833.072.000	80,25	6.808.702.000	82,00	7.501.600.000	DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					860.500.000		946.800.000		1.041.700.000		1.146.200.000		1.261.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan	100	100	100	860.500.000	100	946.800.000	100	1.041.700.000	100	1.146.200.000	100	1.261.000.000	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<p>pelayanan sosial di luar panti Rehabilitasi Sosial (%)</p> <p>Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti Rehabilitasi Sosial bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)</p> <p>Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)</p> <p>Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)</p> <p>Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)</p>	100	100	100		100		100		100		100			
		100	100	100		100		100		100		100			
		100	54,39	54,39		54,39		54,39		54,39		54,39			
		40	8,96	8,96		8,96		8,96		8,96		8,96			
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA					28.000.000		31.000.000		34.000.000		36.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														
Meningkatnya layanan penanganan warga negara korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang) Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	4	8	10	28.000.000	12	31.000.000	14	34.000.000	16	36.000.000	18	40.000.000	DINAS SOSIAL
		100	100	100		100		100		100		100		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.548.000.000		1.771.300.000		2.050.100.000		2.288.000.000		2.634.500.000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti sesuai standar (%) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti (%) Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	100	100	100	1.548.000.000	100	1.771.300.000	100	2.050.100.000	100	2.288.000.000	100	2.634.500.000	DINAS SOSIAL
		30	33,19	46,55		59,91		73,27		86,63		100		
		37	41,17	52,94		64,71		76,48		88,25		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	dasarnya di Luar Panti (%)														
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	11	30,72	44,58		58,44		72,30		86,16		100			
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKs) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	24,03	41,81		56,47		74,03		87,61		100			
	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	91,39	80	81		82		83		84		85			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan dan pasca bencana sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					185.000.000		220.000.000		275.000.000		280.000.000		310.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	185.000.000	100	220.000.000	100	275.000.000	100	280.000.000	100	310.000.000	DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					13.377.609.000		13.880.982.000		14.295.020.000		14.776.352.000		15.329.641.000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.098.370.000		8.374.401.000		8.653.740.000		8.945.122.000		9.248.374.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	99	100	100	8.098.370.000	100	8.374.401.000	100	8.653.740.000	100	8.945.122.000	100	9.248.374.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		47.400.000		0		0		52.349.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100,00	100,00	100,00	0	100,00	47.400.000	100,00	0	100,00	0	100,00	52.349.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.148.935.000		3.256.266.000		3.364.883.000		3.478.183.000		3.596.099.000	
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	52,71	55,00	60,00	3.148.935.000	62,00	3.256.266.000	63,00	3.364.883.000	64,00	3.478.183.000	65,00	3.596.099.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					574.685.000		594.273.000		614.096.000		634.774.000		656.294.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	96,00	96,50	96,75	574.685.000	97,00	594.273.000	97,25	614.096.000	97,50	634.774.000	97,75	656.294.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.555.619.000		1.608.642.000		1.662.301.000		1.718.273.000		1.776.525.000	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	49,96	72,37	73,75		75,13		76,51		77,89		79,27		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	45,44	50,00	51,00	1.555.619.000	52,00	1.608.642.000	53,00	1.662.301.000	54,00	1.718.273.000	55,00	1.776.525.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.956.195.000		8.223.463.000		8.493.933.000		8.776.065.000		9.069.690.000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					6.301.977.000		6.516.778.000		6.734.153.000		6.960.901.000		7.196.885.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	87,82	100	100	6.301.977.000	100	6.516.778.000	100	6.734.153.000	100	6.960.901.000	100	7.196.885.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					214.216.000		221.518.000		228.907.000		236.615.000		244.637.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	71,38	73,58	75,78	214.216.000	77,97	221.518.000	80,17	228.907.000	82,37	236.615.000	84,56	244.637.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					256.984.000		265.744.000		274.609.000		283.856.000		293.480.000		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	256.984.000	100	265.744.000	100	274.609.000	100	283.856.000	100	293.480.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					39.149.000		40.484.000		41.835.000		43.244.000		44.711.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak (Lembaga)	1	1	1	39.149.000	2	40.484.000	2	41.835.000	2	43.244.000	2	44.711.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	11,11	33,33	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					214.066.000		221.363.000		228.747.000		236.450.000		244.466.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	53,88	54,04	54,20	214.066.000	54,36	221.363.000	54,52	228.747.000	54,68	236.450.000	54,84	244.466.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
															KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					814.803.000		842.576.000		870.682.000		899.999.000		930.511.000		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	814.803.000	100	842.576.000	100	870.682.000	100	899.999.000	100	930.511.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.428.278.000		7.681.470.000		7.937.698.000		8.204.973.000		8.483.135.000		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.149.272.000		3.256.614.000		3.365.243.000		3.478.555.000		3.596.483.000		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	99,66	100	100	3.149.272.000	100	3.256.614.000	100	3.365.243.000	100	3.478.555.000	100	3.596.483.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					169.001.000		174.762.000		180.592.000		186.673.000		193.002.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat (%)	118,74	118,99	119,24	169.001.000	119,50	174.762.000	119,75	180.592.000	120,00	186.673.000	120,50	193.002.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3.510.005.000		3.629.643.000		3.750.715.000		3.877.007.000		4.008.443.000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah (%)	70,00	100,80	110,00	3.510.005.000	119,00	3.629.643.000	120,00	3.750.715.000	124,00	3.877.007.000	125,00	4.008.443.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.631,62	2.650,00	2.650,10		2.650,50		2.651,00		2.651,60		2.652,00		
	Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	72,90	73,00	73,20		73,40		73,60		74,00		74,50		
	Indeks Stabilitas Harga Pangan Strategis (Beras, Telur Ayam Ras, Cabe Merah, Cabe Rawit, Bawang Merah) (Indeks)	1	1	1		1		1		1		1		
	Konsumsi energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.376	2.375	2.374		2.373		2.372		2.371		2.37		
	Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)	73,5	73,00	72,50		72,00		71,50		70,00		69,50		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					400.000.000		413.634.000		427.432.000		441.825.000		456.804.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	8,44	6,49	5,19	400.000.000	3,90	413.634.000	2,60	427.432.000	1,30	441.825.000	0,00	456.804.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					200.000.000		206.817.000		213.716.000		220.913.000		228.403.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	72,00	77,00	80,00	200.000.000	83,00	206.817.000	85,00	213.716.000	90,00	220.913.000	95,00	228.403.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					80.001.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					34.743.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	34.743.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					45.258.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Dokumen penatagunaan tanah (Dokumen)	1	1	1	45.258.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	52,97	55,75	58,72	0	61,69	100.000.000	64,67	100.000.000	67,64	100.000.000	70,61	100.000.000	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.548.367.000		20.436.411.000		21.297.562.000		22.387.814.000		23.632.971.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.545.310.000		7.802.490.000		8.062.752.000		8.334.235.000		8.616.777.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	83,33	100	100	7.545.310.000	100	7.802.490.000	100	8.062.752.000	100	8.334.235.000	100	8.616.777.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					0		89.689.000		100.000.000		115.000.000		122.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang	100	100	100	0	100	89.689.000	100	100.000.000	100	115.000.000	100	122.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
memitigasi dampak KRP	Ditindaklanjuti (Persentase)														
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					577.224.000		596.899.000		616.810.000		637.579.000		659.194.000		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau ketrusakan lingkungan (%)	100	100	100	577.224.000	100	596.899.000	100	616.810.000	100	637.579.000	100	659.194.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)					67.047.000		69.333.000		220.000.000		78.000.000		87.000.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luasan taman kehati (ha) (Hektar)	4	5	5,37	67.047.000	5,69	69.333.000	5,85	220.000.000	6	78.000.000	6,15	87.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)		100	100	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)															
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					78.000.000	635.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000						
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)		50	52	78.000.000	55	635.000.000	57	125.000.000	60	130.000.000	65	135.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000						
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	8,33	16,66	0	24,99	50.000.000	33,22	50.000.000	41,55	50.000.000	49,88	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN					11.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000				93.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	11.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.269.786.000		11.050.000.000		11.980.000.000		12.900.000.000		13.820.000.000		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	19,24	25	28		31		34		37		40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	6,76	9,17	10,21	6.269.786.000	11,24	11.050.000.000	12,28	11.980.000.000	13,31	12.900.000.000	14,43		13.820.000.000	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.451.470.000		8.739.538.000		9.031.058.000		9.335.147.000		9.651.623.000		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.762.224.000		8.026.797.000		8.294.541.000		8.573.829.000		8.864.494.000		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	89	91	93	7.762.224.000	95	8.026.797.000	97	8.294.541.000	99	8.573.829.000	100	8.864.494.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
pemerintahan daerah															
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					216.584.000		223.967.000		231.438.000		239.232.000		247.343.000		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	3,23	10,00	13,23	216.584.000	16,46	223.967.000	19,69	231.438.000	22,92	239.232.000	26,15	247.343.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	48,76	55	60		65		70		75		80			
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					250.353.000		258.887.000		267.523.000		276.531.000		285.906.000		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%)	98,36	99,5	99,58	250.353.000	99,66	258.887.000	99,74	267.523.000	99,82	276.531.000	99,9	285.906.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,47	99,55	99,63		99,71		99,79		99,87		99,95			
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	33,80	36,30	38,80		41,30		43,80		46,30		48,80			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	16,90	18,59	20,45		22,49		24,74		27,22		29,94			
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI					222.309.000		229.887.000		237.556.000		245.555.000		253.880.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah (%)	17,25	20,50	23,75		27,00		30,25		33,50		36,75		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	2	2	2	222.309.000	2	229.887.000	2	237.556.000	2	245.555.000	2	253.880.000	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.600.579.000		6.825.560.000		7.053.237.000		7.290.731.000		7.537.900.000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.092.727.000		4.232.227.000		4.373.398.000		4.520.656.000		4.673.913.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	4.092.727.000	100	4.232.227.000	100	4.373.398.000	100	4.520.656.000	100	4.673.913.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					100.000.000		103.409.000		106.859.000		110.458.000		114.203.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	28,85	31,34	7,95		8,42		7,77		8,11		8,33		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	9,86	9,86	20,51	100.000.000	20,51	103.409.000	20,51	106.859.000	5,32	110.458.000	5,32	114.203.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					1.025.000.000		1.059.937.000		1.095.293.000		1.132.173.000		1.170.556.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	89,44	90,85	91,67	1.025.000.000	95,51	1.059.937.000	98,08	1.095.293.000	98,40	1.132.173.000	100	1.170.556.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					645.999.000		668.018.000		690.301.000		713.545.000		737.736.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	9,28	645.999.000	19,26	668.018.000	7,96	690.301.000	8,22	713.545.000	5,00	737.736.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100				
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					736.853.000		761.969.000		787.386.000		813.899.000		841.492.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	18,08	34,74	31,94	736.853.000	33,65	761.969.000	33,97	787.386.000	37,59	813.899.000	41,13	841.492.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	74,65	78,17	80,13		84,62		90,38		92,02		95,21		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					11.772.740.000		11.047.008.000		11.419.332.000		11.807.708.000		12.211.905.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					519.557.000		537.266.000		555.188.000		573.882.000		593.338.000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung KB Klasifikasi Mandiri (%)	4,3	5,7	6,9		8,1		9,3		10,4		10,4		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)	19	19	19	519.557.000	19	537.266.000	19,14	555.188.000	19,42	573.882.000	19,56	593.338.000	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.667.483.000		4.711.573.000		4.872.570.000		5.040.508.000		5.215.287.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	55,50	56,50	56,88		57,36		57,74		58,02		59,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase PUS akseptor KB (%)	15	15,19	15,49	4.667.483.000	15,79	4.711.573.000	16,09	4.872.570.000	16,39	5.040.508.000	16,40	5.215.287.000	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10	9	8		7		6		5		4		
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode	15	15,19	15,49		15,79		16,09		16,39		16,69		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)														
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					6.585.700.000		5.798.169.000		5.991.574.000		6.193.318.000		6.403.280.000		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	77,62	78	79	6.585.700.000	80	5.798.169.000	81	5.991.574.000	81	6.193.318.000	81	6.403.280.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					23.655.597.000		24.461.890.000		25.277.847.000		26.128.984.000		27.014.793.000		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.159.493.000		7.403.522.000		7.650.476.000		7.908.077.000		8.176.172.000		
Tertaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase)	96,42	100	100	7.159.493.000	100	7.403.522.000	100	7.650.476.000	100	7.908.077.000	100	8.176.172.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					15.896.104.000		16.318.368.000		16.933.371.000		17.457.507.000		17.998.881.000		
	Konektivitas (Persentase)	33,33	40,00	46,67	15.896.104.000	53,33	16.318.368.000	60,00	16.933.371.000	66,67	17.457.507.000	73,33	17.998.881.000	DINAS PERHUBUNGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (%)	0	0	9,09		18,18		27,27		36,36		45,45		
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	26,93	27,11	27,91		28,83		29,86		31,00		32,26		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					600.000.000		740.000.000		694.000.000		763.400.000		839.740.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (%)	0	0	33,33	600.000.000	50,00	740.000.000	66,67	694.000.000	83,33	763.400.000	100,00	839.740.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.344.326.000		11.684.658.000		12.035.199.000		12.396.256.000		12.768.145.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.954.969.000		5.103.619.000		5.256.728.000		5.414.430.000		5.576.863.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	4.954.969.000	100	5.103.619.000	100	5.256.728.000	100	5.414.430.000	100	5.576.863.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN					3.388.689.000		3.490.350.000		3.595.061.000		3.702.913.000		3.814.001.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KOMUNIKASI PUBLIK															
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	41,70	45,75	49,80	3.388.689.000	53,85	3.490.350.000	57,89	3.595.061.000	61,94	3.702.913.000	65,99	3.814.001.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.000.668.000		3.090.689.000		3.183.410.000		3.278.913.000		3.377.281.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	28,89	46,67	64,44		68,89		71,11		73,33		75,56		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	28,89	46,67	64,44	3.000.668.000	68,89	3.090.689.000	71,11	3.183.410.000	73,33	3.278.913.000	75,56	3.377.281.000		
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)		2,22	4,44		6,67		8,89		11,11		13,33			
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					14.620.079.000		15.118.403.000		15.622.698.000		16.148.737.000		16.696.206.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.173.722.000		5.350.067.000		5.528.525.000		5.714.678.000		5.908.414.000	
Tertaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	5.173.722.000	100	5.350.067.000	100	5.528.525.000	100	5.714.678.000	100	5.908.414.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					15.707.000		16.243.000		16.785.000		17.351.000		17.940.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2	2	2	15.707.000	2	16.243.000	2	16.785.000	2	17.351.000	2	17.940.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					194.450.000		201.078.000		207.786.000		214.783.000		222.065.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	19	21	23	194.450.000	25	201.078.000	28	207.786.000	29	214.783.000	30	222.065.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					106.853.000		110.496.000		114.182.000		118.027.000		122.029.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	9	9	9	106.853.000	9	110.496.000	9	114.182.000	9	118.027.000	9	122.029.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN					996.394.000		1.030.356.000		1.064.725.000		1.100.576.000		1.137.888.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	14,55	15,44	16,33	996.394.000	17,22	1.030.356.000	18,11	1.064.725.000	19	1.100.576.000	19,89	1.137.888.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					294.896.000		304.948.000		315.120.000		325.731.000		336.774.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	25	25,1	25,6	294.896.000	26,1	304.948.000	26,5	315.120.000	27	325.731.000	27,3	336.774.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					7.838.057.000		8.105.215.000		8.375.575.000		8.657.591.000		8.951.096.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,1	0,1	0,1	7.838.057.000	0,1	8.105.215.000	0,1	8.375.575.000	0,1	8.657.591.000	0,1	8.951.096.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.963.511.000		6.166.777.000		6.372.479.000		6.587.052.000		6.810.366.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					5.127.293.000		5.302.055.000		5.478.912.000		5.663.394.000		5.855.391.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	40	100	100	5.127.293.000	100	5.302.055.000	100	5.478.912.000	100	5.663.394.000	100	5.855.391.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					350.001.000		361.931.000		374.004.000		386.598.000		399.705.000		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		51,78	52,20		52,59		52,96		53,30		53,62		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	59	100	100	350.001.000	100	361.931.000	100	374.004.000	100	386.598.000	100	399.705.000		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100.018.000		103.428.000		106.878.000		110.477.000		114.223.000		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-23,83	2,45	2,54	100.018.000	2,63	103.428.000	2,70	106.878.000	2,77	110.477.000	2,83	114.223.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					156.199.000		161.523.000		166.911.000		172.532.000		178.382.000		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	100	100	100	156.199.000	100	161.523.000	100	166.911.000	100	172.532.000	100	178.382.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Sesuai Ketentuan (Persentase)														TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					200.000.000		206.817.000		213.716.000		220.913.000		228.403.000		
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	206.817.000	100	213.716.000	100	220.913.000	100	228.403.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					30.000.000		31.023.000		32.058.000		33.138.000		34.262.000		
Meningkatnya pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	30.000.000	100	31.023.000	100	32.058.000	100	33.138.000	100	34.262.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					18.201.262.000		18.821.647.000		19.449.468.000		20.104.358.000		20.785.925.000		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.278.916.000		3.390.677.000		3.503.778.000		3.621.755.000		3.744.538.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat IKU Daerah (Persentase)	100	100	100	3.278.916.000	100	3.390.677.000	100	3.503.778.000	100	3.621.755.000	100	3.744.538.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					4.131.136.000		4.271.945.000		4.414.441.000		4.563.081.000		4.717.776.000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	0,06	0,07	0,08	4.131.136.000	0,08	4.271.945.000	0,09	4.414.441.000	0,10	4.563.081.000	0,10	4.717.776.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN					10.567.420.000		10.927.607.000		11.292.111.000		11.672.331.000		12.068.039.000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk pelatda provinsi (%)	3,7	4,00	4,22	10.567.420.000	4,44	10.927.607.000	4,63	11.292.111.000	5,05	11.672.331.000	5,20	12.068.039.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					223.790.000		231.418.000		239.138.000		247.191.000		255.572.000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Satuan Organisasi Gerakan Pramuka yang aktif (%)	25	30	35	223.790.000	40	231.418.000	45	239.138.000	50	247.191.000	55	255.572.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					240.388.000		382.600.000		394.078.000		405.901.000		418.079.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					240.388.000		382.600.000		394.078.000		405.901.000		418.079.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
N STATISTIK SEKTORAL															
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))	33,33	44,44	55,56	240.388.000	66,67	382.600.000	77,78	394.078.000	88,89	405.901.000	100	418.079.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					355.498.000		366.163.000		377.148.000		388.463.000		400.117.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					355.498.000		366.163.000		377.148.000		388.463.000		400.117.000		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	15,38	26,67	35,29	355.498.000	42,11	366.163.000	47,62	377.148.000	52,17	388.463.000	56	400.117.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.899.827.000		1.964.583.000		3.530.115.000		3.598.472.000		3.669.615.000		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.765.101.000		1.825.264.000		1.886.148.000		1.949.657.000		2.015.754.000		
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	3	3	3	1.765.101.000	3	1.825.264.000	3	1.886.148.000	3	1.949.657.000	3	2.015.754.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					0		0		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan (%)	0	0	26,66	0	62,66	0	89,33	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					134.726.000		139.319.000		143.967.000		148.815.000		153.861.000	
Meningkatnya warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan budaya tak benda yang didaftarkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah (%)	1,25	1,50	1,75	134.726.000	2,00	139.319.000	2,25	143.967.000	2,50	148.815.000	2,75	153.861.000	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					8.722.029.000		9.019.318.000		9.320.169.000		9.633.992.000		9.960.598.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.784.238.000		5.981.392.000		6.180.909.000		6.389.028.000		6.605.625.000	
Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	5.784.238.000	100	5.981.392.000	100	6.180.909.000	100	6.389.028.000	100	6.605.625.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					2.917.391.000		3.016.830.000		3.117.460.000		3.222.429.000		3.331.674.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai SNP	Tingkat Kunjungan Perpustakaan (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan (%)	1,2 85,26	1,7 85,40	2 86,25	2.917.391.000	4 87,12	3.016.830.000	6 87,99	3.117.460.000	8 88,87	3.222.429.000	10 89,76	3.331.674.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					20.400.000		21.096.000		21.800.000		22.535.000		23.299.000	
Meningkatnya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	5	6	7	20.400.000	9	21.096.000	11	21.800.000	13	22.535.000	15	23.299.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					203.815.000		210.763.000		217.795.000		225.131.000		232.766.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					184.240.000		190.520.000		196.876.000		203.506.000		210.406.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Tata Kelola Arsip dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	25	30	40	184.240.000	50	190.520.000	60	196.876.000	65	203.506.000	70	210.406.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Tingkat Digitalisasi Arsip (%)	50,05	52,55	55		58		62		66		70		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					10.200.000		10.548.000		10.900.000		11.268.000		11.651.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	0	0	20	10.200.000	25	10.548.000	35	10.900.000	50	11.268.000	70	11.651.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					9.375.000		9.695.000		10.019.000		10.357.000		10.709.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	5	5	10	9.375.000	15	9.695.000	20	10.019.000	25	10.357.000	30	10.709.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.548.346.000		9.834.800.000		10.129.845.000		10.433.743.000		10.746.758.000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG					5.698.834.000		5.869.800.000		6.045.894.000		6.227.271.000		6.414.090.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	5.698.834.000	100	5.869.800.000	100	6.045.894.000	100	6.227.271.000	100	6.414.090.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.187.520.000		1.223.146.000		1.259.841.000		1.297.637.000		1.336.567.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	4.084,18	3.438,00	3.224,59	1.187.520.000	3.279,41	1.223.146.000	3.335,16	1.259.841.000	3.391,86	1.297.637.000	3.449,52	1.336.567.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.032.680.000		2.093.661.000		2.156.471.000		2.221.166.000		2.287.801.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	46.125,46	47.800,51	28.980,31	2.032.680.000	29.281,71	2.093.661.000	29.586,23	2.156.471.000	29.893,93	2.221.166.000	30.204,83	2.287.801.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					39.801.000		40.996.000		42.226.000		43.493.000		44.798.000		
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya KP	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Sumberdaya KP (%)	100	100	100	39.801.000	100	40.996.000	100	42.226.000	100	43.493.000	100	44.798.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					589.511.000		607.197.000		625.413.000		644.176.000		663.502.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat dan Produksi Garam Rakyat	Produksi Garam Rakyat (Ton) (Ton)	3.811,61	2.554,48	2.574,48		2.580,03		2.605,83		2.631,89		2.631,89		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Ton) (Ton)	4.834,23	4.970,54	4.987,54	589.511.000	5.040,21	607.197.000	625.413.000	5.110,69	5.182,23	644.176.000	5.182,23	663.502.000	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.889.747.000		12.321.848.000		12.723.458.000		13.224.038.000		13.698.994.000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.543.435.000		6.766.467.000		6.992.171.000		7.227.606.000		7.472.632.000	
Tertindakannya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pencapaian Perangkat IKU Daerah (Persentase)	66,67	100	100	6.543.435.000	100	6.766.467.000	100	6.992.171.000	100	7.227.606.000	100	7.472.632.000	DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					443.515.000		458.633.000		473.932.000		489.890.000		506.498.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Orang)	200.526	216.569	234.313		253.526		275.449		299.695		326.671		DINAS PARIWISATA
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3,56	6,5	6,6	443.515.000	6,7	458.633.000	473.932.000	7,0	7,1	489.890.000	7,3	506.498.000	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.030.248.000		1.065.364.000		1.100.901.000		1.137.970.000		1.176.549.000	
Meningkatnya jangkauan	Persentase Peningkatan Media	100 5,6	25 7,13	25 7,25	1.030.248.000	25 7,34	1.065.364.000	50 7,43	1.100.901.000	50 7,68	1.137.970.000	50 7,73	1.176.549.000	DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
pemasaranKegiatan	Pemasaran Pariwisata (Persentase)														
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					393.297.000		412.962.000		429.480.000		455.249.000		473.459.000		
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,10	0,11	0,13	393.297.000	0,15	412.962.000	0,18	429.480.000	0,21	455.249.000	0,23	473.459.000	DINAS PARIWISATA	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					3.479.252.000		3.618.422.000		3.726.974.000		3.913.323.000		4.069.856.000		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan yang tervalidasi (%)	23,7	10,7	12,4	3.479.252.000	14	3.618.422.000	15,5	3.726.974.000	16,9	3.913.323.000	18,2	4.069.856.000	DINAS PARIWISATA	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					90.150.801.000		93.223.563.000		96.333.149.000		99.576.805.000		102.952.597.000		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.773.407.000		32.856.393.000		33.952.358.000		35.095.575.000		36.285.363.000		
Meningkatnya pelayanan	Persentase Pencapaian IKU	25	100	100	31.773.407.000	100	32.856.393.000	100	33.952.358.000	100	35.095.575.000	100	36.285.363.000	DINAS PERTANIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
penunjang urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah (Persentase)																	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					34.054.900.000		35.215.650.000		36.390.310.000		37.615.616.000		38.890.837.000					
Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3,00	3,05	3,07		3,09		3,10		3,12		3,15		DINAS PERTANIAN				
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	5,00	5,02	5,05	34.054.900.000	5,07	35.215.650.000	5,09	36.390.310.000	5,10	37.615.616.000	5,12	38.890.837.000					
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	2,00	2,02	2,05											2,07	2,09	2,10	2,15
	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	5,00	5,02	5,05											5,07	5,09	5,10	5,15
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														16.009.440.000		16.555.117.000		17.107.333.000
Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	37.225,19	37.225,19	37.225,19	16.009.440.000	37.225,19	16.555.117.000	37.225,19	17.107.333.000	37.225,19	17.683.358.000	37.225,19	18.282.848.000	DINAS PERTANIAN				
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					5.172.230.000		5.348.524.000		5.526.931.000		5.713.030.000		5.906.710.000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)		30,00	30,69	31,15		32,50		35,00		37,70		40,00		DINAS PERTANIAN
Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10,00	10,50	10,75	5.172.230.000	11,00	5.348.524.000	11,50	5.526.931.000	11,75	5.713.030.000	12,00	5.906.710.000	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					736.000.000		761.087.000		786.474.000		812.956.000		840.517.000	
Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	30,00	30,50	30,75		31,00		31,50		31,75		32,00		DINAS PERTANIAN
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	15,00	15,50	15,75	736.000.000	16,00	761.087.000	16,50	786.474.000	16,75	812.956.000	17,00	840.517.000	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					636.000.000		657.678.000		679.616.000		702.500.000		726.316.000	
Meningkatnya Kualitas Dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	10,00	10,50	10,75	636.000.000	11,00	657.678.000	11,50	679.616.000	11,75	702.500.000	12	726.316.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.768.824.000		1.829.114.000		1.890.127.000		1.953.770.000		2.020.006.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10,07	13,42	16,78	1.768.824.000	20,13	1.829.114.000	23,49	1.890.127.000	26,85	1.953.770.000	30,20	2.020.006.000	DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					9.769.175.000		10.170.339.000		10.575.411.000		10.994.716.000		11.428.047.000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.669.417.000		8.964.912.000		9.263.948.000		9.575.878.000		9.900.514.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	8.669.417.000	100	8.964.912.000	100	9.263.948.000	100	9.575.878.000	100	9.900.514.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	60	60	60	100.000.000	70	150.000.000	80	200.000.000	90	250.000.000	100	300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					373.286.000		386.010.000		398.886.000		412.317.000		426.296.000	
Meningkatnya kualitas sarana	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	9	9	10	373.286.000	10	386.010.000	10	398.886.000	10	412.317.000	10	426.296.000	DINAS PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
perdagangan dan distribusi barang	Kualitasnya (Persentase)														DAN PERDAGANGAN
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	100	100	100		100		100		100		100			
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	80	80	80		81		82		83		84			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (Koefisien)	1,00	1,00	0,86		0,74		0,64		0,55		0,48			
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					305.648.000		316.066.000		326.609.000		337.607.000		349.053.000		
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	-32,98	-32,64	-32,10		-31,56		-31,03		-30,52		-30,01			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		200.000.000	200.000.000	250.000.000	305.648.000	300.000.000	316.066.000	350.000.000	326.609.000	400.000.000	337.607.000	450.000.000	349.053.000		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					220.824.000		228.351.000		235.968.000		243.914.000		252.184.000		
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	90	93	95	220.824.000	100	228.351.000	100	235.968.000	100	243.914.000	100	252.184.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (Persentase)	80	81	82		85		87		90		91		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					7.900.910.000		8.148.619.000		8.399.596.000		8.662.472.000		8.937.075.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					7.570.310.000		7.781.459.000		7.995.876.000		8.222.192.000		8.460.235.000	
Meningkatnya Relisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (%)	0,9	0,9	1		1,1		1,2		1,3		1,4		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) (Orang)	0,15	0,16	0,17	7.570.310.000	0,18	7.781.459.000	0,19	7.995.876.000	0,20	8.222.192.000	0,21	8.460.235.000	
	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) (Nilai)	2	2	3		3		4		4		5		
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) (Rp)	0,1	0,1	0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					330.600.000		367.160.000		403.720.000		440.280.000		476.840.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	30	30	30		35		40		45		50		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	8,4	8,5	8,6	330.600.000	8,7	367.160.000	8,8	403.720.000	8,9	440.280.000	9	476.840.000	
	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten (%)	0,3	0,4	0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		
	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (%)	50	52	54		56		58		60		62		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					58.045.000		60.024.000		62.027.000		64.116.000		66.290.000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					58.045.000		60.024.000		62.027.000		64.116.000		66.290.000	
Meningkatnya penempatan transmigran	Persentase transmigran yang difasilitasi (%)	100	100	100	58.045.000	100	60.024.000	100	62.027.000	100	64.116.000	100	66.290.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					43.373.624.000		44.797.212.000		46.291.478.000		47.850.169.000		49.472.356.000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.132.233.000		29.055.575.000		30.024.759.000		31.035.729.000		32.087.883.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Efektifitas Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	68,8	69	70,8		72,8		74,8		76,8		78,8		SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah (Poin)	81,05	81,10	81,15	28.132.233.000	81,20	29.055.575.000	81,25	30.024.759.000	81,30	31.035.729.000	81,35	32.087.883.000	
	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					13.582.000.000		14.027.782.000		14.495.696.000		14.983.784.000		15.491.755.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	96,54	96,69	96,84		96,99		97,14		97,29		97,43		SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	0	75,18	75,68	13.582.000.000	76,18	14.027.782.000	76,68	14.495.696.000	77,18	14.983.784.000	77,68	15.491.755.000	
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah (Nilai)	0	75,18	75,68		76,18		76,68		77,18		77,68		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.659.391.000		1.713.855.000		1.771.023.000		1.830.656.000		1.892.718.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian (Nilai)	0	82,18	82,68		83,18		83,68		84,18		84,68		SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan (Nilai)	0	82,18	82,68	1.659.391.000	83,18	1.713.855.000	83,68	1.771.023.000	84,18	1.830.656.000	84,68	1.892.718.000	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Poin)	71,46	74,27	80,00		83,00		87,00		94,00		98,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					48.450.384.000		50.353.254.000		52.101.135.000		53.930.201.000		55.840.462.000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.372.415.000		38.599.034.000		39.886.551.000		41.229.580.000		42.627.319.000	
Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	99,83	100	100	37.372.415.000	100	38.599.034.000	100	39.886.551.000	100	41.229.580.000	100	42.627.319.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					11.077.969.000		11.754.220.000		12.214.584.000		12.700.621.000		13.213.143.000	
Meningkatnya Kualitas Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD (Tepat Waktu)	1	1	1	10.054.345.000	1	10.729.572.000	1	11.087.470.000	1	11.460.799.000	1	11.849.336.000	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	0	50	52,50		55,00		57,50		60,00		62,50		
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	1.023.624.000	100	1.024.648.000	100	1.127.114.000	100	1.239.822.000	100	1.363.807.000	SEKRETARIAT DPRD
5.01 PERENCANAAN					12.437.947.000		12.837.935.998		13.272.889.994		13.719.804.998		14.184.926.000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.896.621.000		8.155.800.000		8.427.847.000		8.711.623.000		9.006.959.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat IKU Daerah (Persentase)	100	100	100	7.896.621.000	100	8.155.800.000	100	8.427.847.000	100	8.711.623.000	100	9.006.959.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.619.467.000		1.672.621.000		1.728.414.000		1.786.612.000		1.847.181.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara RKP dengan APBD (%)	100	100	100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan dengan RPJMD RKP (Persentase)	100	100	100	1.619.467.000	100	1.672.621.000	100	1.728.414.000	100	1.786.612.000	100	1.847.181.000	
	Persentase Keselarasan dengan Renstra RPJMD PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.921.859.000		3.009.514.998		3.116.628.994		3.221.569.998		3.330.786.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	1.211.065.408	100	1.240.284.075	100	1.275.988.741	100	1.310.969.075	100	1.347.374.408	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Kualitas	Persentase Keselarasan RKP	100	100	100	1.019.399.117	100	1.048.617.784	100	1.084.322.450	100	1.119.302.784	100	1.155.708.117	BADAN PERENCANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perekonomian dan SDA	dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)														PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	691.394.475	100	720.613.139	100	756.317.803	100	791.298.139	100	827.703.475	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.02 - KEUANGAN					494.619.541.000	510.853.695.000		527.893.830.000		545.668.656.000		564.167.567.000			
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	25.532.989.000	100	26.371.020.000	100	27.250.657.000	100	28.168.220.000	100	29.123.161.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	68.681.660.000	100	70.935.895.000	100	73.302.047.000	100	75.770.216.000	100	78.338.930.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	37	37,52	36,78	393.005.059.000	36,06	405.904.072.000	35,35	419.443.485.000	34,65	433.566.655.000	33,97	448.265.154.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90	90,70	91,20		91,40		91,80		92,10		92,30		
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-4,0	-5,0	-6,0		-6,2		-7,5		-8,3		-8,5		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	27	27,98	29,32		30,72		32,19		33,73		35,35		
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.751.721.000		1.809.216.000		1.869.565.000		1.932.516.000		1.998.031.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5,29	5,30	5,40	1.751.721.000	5,50	1.809.216.000	5,51	1.869.565.000	5,52	1.932.516.000	5,53	1.998.031.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.648.112.000		5.833.492.000		6.028.076.000		6.231.049.000		6.442.291.000	
Meningkatnya upaya Ekstentifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	12,13	15,60	15,87		16,11		15,76		15,63		16,41		
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	5.648.112.000	100	5.833.492.000	100	6.028.076.000	100	6.231.049.000	100	6.442.291.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Penerapan Sistem Informasi	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Keuangan Berbasis Digital (Persentase)													
5.03 KEPEGAWAIAN					8.480.620.000		8.758.968.000		9.051.134.000		9.355.897.000		9.673.075.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.626.746.000		5.811.425.000		6.005.272.000		6.207.477.000		6.417.919.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	5.626.746.000	100	5.811.425.000	100	6.005.272.000	100	6.207.477.000	100	6.417.919.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.853.874.000		2.947.543.000		3.045.862.000		3.148.420.000		3.255.156.000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	95	95,10	95,20		95,30		95,40		95,50		95,60		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	65	66	67	2.853.874.000	68	2.947.543.000	69	3.045.862.000	70	3.148.420.000	71	3.255.156.000	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.061.116.000		1.095.944.000		1.132.501.000		1.170.634.000		1.210.321.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.061.116.000		1.095.944.000		1.132.501.000		1.170.634.000		1.210.321.000	
Meningkatnya layanan	Persentase ASN yang mendapatkan	75,00	75,40	75,80	1.061.116.000	76,00	1.095.944.000	77,00	1.132.501.000	78,00	1.170.634.000	79,00	1.210.321.000	BADAN KEPEGAWAIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)														DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.007.644.000		3.076.821.000		3.147.589.000		3.218.235.945		3.294.044.996		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.700.442.000		1.739.553.000		1.779.563.000		1.820.493.000		1.862.364.996		
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	160.592.278	100	160.592.278	100	163.592.278	100	170.708.528	100	175.360.972	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100	828.387.404	100	828.387.404	100	840.391.154	100	858.739.904	100	872.697.236	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100	554.471.856	100	554.471.856	100	564.474.356	100	574.706.856	100	584.011.744	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100	100	100	156.990.462	100	196.101.462	100	211.105.212	100	216.337.712	100	230.295.044	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.307.202.000		1.337.268.000		1.368.026.000		1.397.742.945		1.431.680.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan (%)	100	100	100	120.879.365	100	80.879.365	100	113.071.698	100	116.567.815	100	120.144.367	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	100	100	100	51.885.676	100	41.885.676	100	43.594.452	100	45.342.509	100	47.130.787	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	100	100	100	230.123.352	100	157.189.352	100	231.832.130	100	235.328.240	100	238.904.796	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penyelesaian Permasalahan Daerah															
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100	904.313.607	100	1.057.313.607	100	979.527.720	100	1.000.504.381	100	1.025.500.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					24.416.307.000		25.217.688.000		27.058.855.000		27.969.961.000		28.918.182.000		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.577.983.000		19.187.741.000		19.827.771.000		20.495.397.000		21.190.219.000		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	18.577.983.000	100	19.187.741.000	100	19.827.771.000	100	20.495.397.000	100	21.190.219.000	INSPEKTORAT	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.358.019.000		4.501.056.000		5.651.195.000		5.841.478.000		6.039.513.000		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	91,77	91,92	92,06	4.358.019.000	92,21	4.501.056.000	92,36	5.651.195.000	92,50	5.841.478.000	92,65	6.039.513.000	INSPEKTORAT	
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian			Wajar Tanpa Pengecualian
	Manajemen Risiko Indeks (Level)	3	3	3		3		3		3		3			3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.480.305.000		1.528.891.000		1.579.889.000		1.633.086.000		1.688.450.000		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Pengawasan Pemerintah (Level)	Aparat Intern (APIP)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	1.480.305.000	Terintegrasi (Integrated)	1.528.891.000	Terintegrasi (Integrated)	1.579.889.000	Terintegrasi (Integrated)	1.633.086.000	Terintegrasi (Integrated)	1.688.450.000	INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					69.539.852.000		71.912.431.000		74.317.604.000		76.823.062.000		79.430.863.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					44.418.474.000		45.932.466.000		47.464.604.000		49.062.800.000		50.726.103.000		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Jonggat)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase)	IKU Daerah	49,80	100	100	2.609.445.000	100	2.698.387.000	100	2.788.395.000	100	2.882.284.000	100	2.979.998.000	KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Pringgarata)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase)	IKU Daerah	100	100	100	2.031.148.000	100	2.100.379.000	100	2.170.440.000	100	2.243.522.000	100	2.319.581.000	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Batukliang)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase)	IKU Daerah	66,67	100	100	2.990.673.000	100	3.092.610.000	100	3.195.768.000	100	3.303.374.000	100	3.415.363.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan	Persentase Pencapaian	IKU	100	100	100	2.417.699.000	100	2.500.106.000	100	2.583.501.000	100	2.670.491.000	100	2.761.025.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
pemerintahan daerah (Kec. Batukliang Utara)	Perangkat Daerah (Persentase)														
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Barat)	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	IKU Daerah	66,67	100	100	2.983.095.000	100	3.084.773.000	100	3.187.670.000	100	3.295.003.000	100	3.406.709.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	IKU Daerah	90,69	100	100	2.599.106.000	100	2.687.696.000	100	2.777.348.000	100	2.870.865.000	100	2.968.192.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec.Pujut)	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	IKU Daerah	50	100	100	3.268.734.000	100	3.380.148.000	100	3.492.897.000	100	3.610.508.000	100	3.732.910.000	KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Timur)	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	IKU Daerah	50	100	100	2.382.464.000	100	2.463.670.000	100	2.545.849.000	100	2.631.571.000	100	2.720.785.000	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Janapria)	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	IKU Daerah	100	100	100	2.888.598.000	100	2.987.055.000	100	3.086.692.000	100	3.190.625.000	100	3.298.792.000	KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase Pencapaian Perangkat Daerah (Persentase)	IKU Daerah	100	100	100	2.754.903.000	100	2.848.803.000	100	2.943.829.000	100	3.042.952.000	100	3.146.113.000	KANTOR CAMAT KOPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
daerah (Kec. Kopang)															
Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kec. Praya)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	12.045.912.000	100	12.456.493.000	100	12.871.995.000	100	13.305.411.000	100	13.756.483.000	KANTOR PRAYA	CAMAT
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Kec. Praya Tengah)	Persentase Pencapaian Perangkat (Persentase) IKU Daerah	100	100	100	5.446.697.000	100	5.632.346.000	100	5.820.220.000	100	6.016.194.000	100	6.220.152.000	KANTOR PRAYA TENGAH	CAMAT
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.087.428.000		1.124.499.000		1.162.015.000		1.201.148.000		1.241.875.000		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	144.035.000	100	148.945.000	100	153.914.000	100	159.097.000	100	164.491.000	KANTOR PRAYA	CAMAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Tengah)	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan (%)	100	100	100	30.768.000	100	31.817.000	100	32.879.000	100	33.987.000	100	35.140.000	KANTOR PRAYA TENGAH	CAMAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Jonggat)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	75.944.000	100	78.533.000	100	81.153.000	100	83.886.000	100	86.730.000	KANTOR JONGGAT	CAMAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Pringgarata)	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan (%)	100	100	100	73.923.000	100	76.443.000	100	78.993.000	100	81.653.000	100	84.422.000	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Batukliang)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	40.693.000	100	42.081.000	100	43.485.000	100	44.950.000	100	46.474.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Batukliang Utara)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	80.169.000	100	82.902.000	100	85.668.000	100	88.553.000	100	91.556.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Barat)	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan (%)	100	100	100	120.465.000	100	124.572.000	100	128.728.000	100	133.063.000	100	137.575.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	97.016.000	100	100.323.000	100	103.670.000	100	107.161.000	100	110.794.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Pujut)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	117.912.000	100	121.931.000	100	125.999.000	100	130.242.000	100	134.658.000	KANTOR CAMAT PUJUT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Praya Timur)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	97.215.000	100	100.529.000	100	103.883.000	100	107.381.000	100	111.022.000	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Janapria)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	131.686.000	100	136.175.000	100	140.718.000	100	145.457.000	100	150.389.000	KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang dilimpahkan (Kec. Kopang)	Persentase penyelesaian dokumen administrasi (%)	100	100	100	77.602.000	100	80.248.000	100	82.925.000	100	85.718.000	100	88.624.000	KANTOR CAMAT KOPANG
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.929.029.000		16.474.275.000		17.030.212.000		17.606.707.000		18.206.962.000	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya)	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif (%)	65	70	75	11.431.052.000	80	11.820.676.000	85	12.214.969.000	90	12.626.262.000	95	13.054.310.000	KANTOR CAMAT PRAYA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Tengah)	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	3.827.084.000	100	3.957.529.000	100	4.089.538.000	100	4.227.238.000	100	4.370.548.000	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Jonggat)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	67.070.000	100	69.357.000	100	71.671.000	100	74.085.000	100	76.597.000	KANTOR CAMAT JONGGAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Pringgarata)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	83	100	100	53.804.000	100	55.638.000	100	57.494.000	100	59.430.000	100	61.445.000	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Batukliang)	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	51.264.000	100	53.012.000	100	54.781.000	100	56.626.000	100	58.546.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Batukliang Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	41.527.000	100	42.943.000	100	44.376.000	100	45.871.000	100	47.427.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Barat)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	100.559.000	100	103.987.000	100	107.456.000	100	111.075.000	100	114.841.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	34.978.000	100	38.476.000	100	46.171.000	100	50.788.000	100	55.867.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Pujut)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	100	100	100	99.243.000	100	102.626.000	100	106.050.000	100	109.621.000	100	113.338.000	KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Praya Timur)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	65	68	71	100.442.000	83	103.866.000	89	107.331.000	93	110.945.000	95	114.707.000	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Janapria)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	83,33	100	100	43.118.000	100	44.588.000	100	46.076.000	100	47.628.000	100	49.243.000	KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kec. Kopang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	71	73	75	78.888.000	77	81.577.000	79	84.299.000	81	87.138.000	83	90.093.000	KANTOR CAMAT KOPANG
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					619.628.000		640.754.000		662.133.000		684.433.000		707.641.000	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	93.361.000	100	96.544.000	100	99.765.000	100	103.125.000	100	106.622.000	KANTOR CAMAT PRAYA
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Tengah)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	24.379.000	100	25.210.000	100	26.051.000	100	26.929.000	100	27.842.000	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Jonggat)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	18.340.000	100	18.966.000	100	19.599.000	100	20.259.000	100	20.946.000	KANTOR CAMAT JONGGAT
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Pringgara)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	57.700.000	100	59.667.000	100	61.658.000	100	63.735.000	100	65.896.000	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Batukliang)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	51.662.000	100	53.423.000	100	55.205.000	100	57.064.000	100	58.999.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Batukliang)	ketertiban umum yang ditangani (%)														
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Batukliang Utara)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	62.264.000	100	64.387.000	100	66.535.000	100	68.776.000	100	71.108.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Barat)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	59.612.000	100	61.644.000	100	63.701.000	100	65.846.000	100	68.079.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	70.980.000	100	73.400.000	100	75.849.000	100	78.403.000	100	81.061.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Pujut)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	89.002.000	100	92.036.000	100	95.106.000	100	98.309.000	100	101.642.000	KANTOR CAMAT PUJUT	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Praya Timur)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	17.780.000	100	18.387.000	100	19.001.000	100	19.641.000	100	20.307.000	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Janapria)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	29.893.000	100	30.912.000	100	31.944.000	100	33.020.000	100	34.140.000	KANTOR CAMAT JANAPRIA	
Meningkatnya penyelenggaraan	Persentase gangguan ketentraman dan	100	100	100	44.655.000	100	46.178.000	100	47.719.000	100	49.326.000	100	50.999.000	KANTOR CAMAT KOPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ketentraman dan ketertiban umum (Kec. Kopang)	ketertiban umum yang ditangani (%)														
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					6.770.086.000		7.000.849.000		7.234.377.000		7.477.972.000		7.731.492.000		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Jonggat)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	489.475.000	100	506.159.000	100	523.043.000	100	540.655.000	100	558.984.000	KANTOR CAMAT JONGGAT	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	646.055.000	100	668.076.000	100	690.361.000	100	713.607.000	100	737.800.000	KANTOR CAMAT PRAYA	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya Tengah)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	579.802.000	100	599.565.000	100	619.565.000	100	640.427.000	100	662.139.000	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Pringgarata)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	646.933.000	100	668.984.000	100	691.299.000	100	714.576.000	100	738.802.000	KANTOR CAMAT PRINGGARATA	
Meningkatnya kualitas	Persentase penyelenggaraan	100	100	100	555.019.000	100	573.937.000	100	593.082.000	100	613.052.000	100	633.836.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Batukliang)	urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Batukliang Utara)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	440.789.000	100	455.814.000	100	471.019.000	100	486.879.000	100	503.385.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya Barat)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	531.925.000	100	550.056.000	100	568.404.000	100	587.543.000	100	607.462.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Praya Barat Daya)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	492.267.000	100	509.046.000	100	526.026.000	100	543.738.000	100	562.172.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Pujut)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	649.413.000	100	671.549.000	100	693.950.000	100	717.317.000	100	741.636.000	KANTOR CAMAT PUJUT	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100	100	100	643.596.000	100	665.533.000	100	687.733.000	100	710.890.000	100	734.991.000	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
umum (Kec. Praya Timur)	dan dikoordinasikan (%)														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Janapria)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	582.612.000	100	602.471.000	100	622.568.000	100	643.531.000	100	665.348.000	KANTOR JANAPRIA	CAMAT
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Kec. Kopang)	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi dan dikoordinasikan (%)	100	100	100	512.200.000	100	529.659.000	100	547.327.000	100	565.757.000	100	584.937.000	KANTOR KOPANG	CAMAT
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					715.207.000		739.588.000		764.263.000		790.002.000		816.790.000		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya)	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	65	70	75	14.696.000	80	15.197.000	85	15.704.000	90	16.233.000	95	16.784.000	KANTOR PRAYA	CAMAT
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya Tengah)	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	60	70	80	45.524.000	90	47.076.000	100	48.647.000	100	50.286.000	100	51.991.000	KANTOR PRAYA TENGAH	CAMAT
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Jonggat)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	53,85	69,23	92,31	98.956.000	100	102.329.000	100	105.743.000	100	109.304.000	100	113.010.000	KANTOR JONGGAT	CAMAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Pringgarata)	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	100	100	100	78.592.000	100	81.271.000	100	83.982.000	100	86.810.000	100	89.753.000	KANTOR CAMAT PRINGGARATA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Batukliang)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	79.055.000	100	81.750.000	100	84.477.000	100	87.322.000	100	90.283.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Batukliang Utara)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	28.333.000	100	29.299.000	100	30.277.000	100	31.297.000	100	32.359.000	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya Barat)	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu (%)	60	70	80	36.202.000	90	37.436.000	100	38.685.000	100	39.988.000	100	41.344.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Prabarda)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	25,00	41,67	58,33	45.936.000	75,00	47.502.000	91,67	49.087.000	100	50.740.000	100	52.461.000	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Pujut)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	110.064.000	100	113.816.000	100	117.613.000	100	121.574.000	100	125.696.000	KANTOR CAMAT PUJUT
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Praya Timur)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	48.488.000	100	50.141.000	100	51.814.000	100	53.559.000	100	55.375.000	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Janapria)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	72.196.000	100	74.657.000	100	77.148.000	100	79.746.000	100	82.450.000	KANTOR CAMAT JANAPRIA
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kec. Kopang)	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu (%)	100	100	100	57.165.000	100	59.114.000	100	61.086.000	100	63.143.000	100	65.284.000	KANTOR CAMAT KOPANG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.900.645.000		8.159.958.000		8.432.145.000		8.716.070.000		9.011.560.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.898.521.000		2.993.655.000		3.093.512.000		3.197.675.000		3.306.081.000	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian Perangkat IKU Daerah (Persentase)	100	100	100	2.898.521.000	100	2.993.655.000	100	3.093.512.000	100	3.197.675.000	100	3.306.081.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.308.461.000		1.351.407.000		1.396.485.000		1.443.507.000		1.492.444.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.308.461.000	100	1.351.407.000	100	1.396.485.000	100	1.443.507.000	100	1.492.444.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang	100	100	100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)														
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.121.296.000		1.158.099.000		1.196.729.000		1.237.025.000		1.278.962.000		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Tingkat Partisipasi Pemilu (%)	83,58	0	0		0		0		85,18		0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik (%)	100	100	100	1.121.296.000	100	1.158.099.000	100	1.196.729.000	100	1.237.025.000	100	1.278.962.000		
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	72,22	72,22	72,22		77,78		83,33		88,89		94,44			
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.431.038.000		1.478.007.000		1.527.308.000		1.578.735.000		1.632.257.000		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	5,32	10,00	40,43	1.431.038.000	47,52	1.478.007.000	54,61	1.527.308.000	61,70	1.578.735.000	68,79	1.632.257.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					362.057.000		373.941.000			386.415.000		399.427.000		412.969.000	
Meningkatnya Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	362.057.000	100	373.941.000	100	386.415.000	100	399.427.000	100	412.969.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					779.272.000		804.849.000			831.696.000		859.701.000		888.847.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	779.272.000	100	804.849.000	100	831.696.000	100	859.701.000	100	888.847.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL KESELURUHAN					2.838.405.772.000		2.931.230.090.998			3.030.651.879.994		3.131.746.503.943		3.238.367.133.996	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, yang pada umumnya merupakan hasil dari *crosscutting* beberapa urusan atau program. Dalam mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71.19	71.49	72,23	72.96	73,69	74,41	75,13	Sasaran Visi RPJPD
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	IUP 43b
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,28	78,13	78,76	79,38	80,00	80,62	81,23	Sasaran Visi RPJPD
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,68	3,72	3,76	3,79	3,82	3,84	3,87	Sasaran Visi RPJPD
5	Nilai Implementasi SAKIP Pemda	Poin	62,90	69,98	77,06	80,6	82,37	84,14	85,91	
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,34	6,05	6,13	6,34	6,54	6,64	6,73	Sasaran Visi RPJPD
7	PDRB Per Kapita ADHB	Juta/ Tahun	20,37	21,99	24,04	25,81	27,82	30,01	32,79	Sasaran Visi RPJPD
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	12,07	11,66	11,27	10,90	10,53	10,17	9,91	Sasaran Visi RPJPD; IUP 8
9	Rasio Gini	Indeks	0,342	0,341	0,339	0,338	0,337	0,335	0,333	Sasaran Visi RPJPD
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,55	2,47	2,38	2,28	2,19	2,11	2,02	IUP 15a
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/ a	78,58	80,58	82,58	84,58	86,58	88,58	
12	Indeks Desa	Poin	0,7988	0,8551	0,8692	0,8903	0,9115	0,9326	0,9537	IUP 36
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	63,47	71,90	72,11	72,32	72,53	72,74	72,95	Sasaran Visi RPJPD; IUP 42a
14	Indeks Risiko Bencana	Indeks	133,05	126,36	125,76	125,16	124,57	123,97	123,38	IUP 44
15	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	n/ a	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai

kewenangan daerah. IKD secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah yang disajikan dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Aspek geografi dan demografi merupakan indikator yang mengukur kemampuan sesuai kapasitas daerah dan tantangan lokal. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Mengukur keberhasilan pembangunan maka ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	Dinas Ketahanan Pangan	IUP 43b
2	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	3,50	3,00	2,70	2,40	2,10	1,80	1,50	Dinas Ketahanan Pangan	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	426,00	446,00	465,00	485,00	504,00	524,00	543,00	Perusahaan Listrik Negara (PLN)/ Dinas Perhubungan/ Badan Pendapatan Daerah	IUP 43a
4	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Persen	78,82	94,97	95,81	96,77	97,75	98,73	98,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IUP 43c
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,47	71,90	72,11	72,32	72,53	72,74	72,95	Dinas Lingkungan Hidup	Sasaran Visi RPJPD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan IUP 42a
6	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,75	3,50	4,47	5,44	6,41	7,38	12,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IUP 42b
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	19,24	25,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	Dinas Lingkungan Hidup	IUP 42c-i
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	6,76	9,17	10,21	11,24	12,28	13,31	14,43	Dinas Lingkungan Hidup	IUP 42c-ii
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	n/a	3,28	3,71	4,15	4,58	5,02	5,45	Dinas Lingkungan Hidup	Sasaran Visi RPJPD dan IUP 45
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	133,05	126,36	125,76	125,16	124,57	123,97	123,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IUP 44
11	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	36,05	48,33	52,33	58,33	65,33	69,33	73,33	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,50	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
13	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun	Persen	0,01	0,01	1,54	3,07	4,60	6,13	7,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	IUP 41
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,34	6,05	6,13	6,34	6,54	6,64	6,73	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	12,07	11,66	11,27	10,9	10,53	10,17	9,91	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD dan IUP8
3	PDRB Per Kapita ADHB	Juta/ Tahun	20,37	21,99	24,04	25,81	27,82	30,01	32,79	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD
4	Tingkat Pengganguran Terbuka	Persen	2,55	2,47	2,38	2,28	2,19	2,11	2,02	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IUP 15a
5	Rasio Gini	Angka	0,342	0,341	0,339	0,338	0,337	0,335	0,333	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,19	71,49	72,23	72,96	73,69	74,41	75,13	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,59	72,48	73,17	73,86	74,54	75,23	75,91	Dinas Kesehatan/ Badan Pusat Statistik (BPS)	IUP 1
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	24,90	20,00	17,00	14,00	12,00	11,00	10,00	Dinas Kesehatan	IUP 2b

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah Kematian Ibu	Orang	25	23	20	19	17	16	15	Dinas Kesehatan	IUP2a
10	Jumlah Kematian Balita	Orang	122	120	118	116	114	112	110	Dinas Kesehatan	
11	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Persen	33,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan	IUP3a
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan	IUP3b
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,00	99,03	99,05	99,08	99,10	99,13	99,15	Dinas Kesehatan	IUP4
14	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,31	2,31	2,30	2,30	2,29	2,29	2,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
15	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	0	30,00	40,00	55,00	61,00	70,00	75,00	Dinas Kesehatan	
16	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
17	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	90,20	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
18	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	n/a	64,30	66,10	67,90	69,70	72,00	75,00	Dinas Kesehatan	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,73	6.78	6,91	7,05	7,18	7,31	7,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Badan Pusat Statistik (BPS)	IUP5c
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,89	14,00	14,07	14,15	14,22	14,29	14,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Badan Pusat Statistik (BPS)	IUP5d
21	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	49,71	49,79	52,10	54,41	56,72	59,03	61,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP5a-i
22	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	18,62	46,19	48,68	51,17	53,66	56,15	58,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP5a-ii
23	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	19,44	24,76	28,02	31,29	34,55	37,81	41,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP5b-i
24	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	18,62	21,64	25,06	28,47	31,89	35,31	38,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP5b-ii

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	7,07	7,16	7,32	7,49	7,68	7,87	8,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP 6
26	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	38,01	42,01	46,21	50,61	55,21	60,01	65,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
27	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ)	Persen	49,96	72,37	73,75	75,13	76,51	77,89	79,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IUP 9
28	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	1,59	1.81	1.94	2.08	2.22	2.38	2.55	Dinas Sosial	IUP 10
29	Indeks Perlindungan Anak	Poin	55,680	56,050	56,420	56,790	57,160	57,530	57,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	56,00	60,23	64,46	68,69	72,92	77,15	81,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	IUP 39
31	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,544	0,485	0,426	0,367	0,308	0,249	0,190	Badan Pusat Statistik (BPS)/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	IUP 40
32	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,78	89,01	89,23	89,46	89,68	89,91	90,13	Badan Pusat Statistik (BPS)/Dinas	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
33	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	n/ a	50,21	50,71	51,21	51,71	52,21	52,71	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
34	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	n/ a	57,11	57,61	58,11	58,61	59,11	59,61	Dinas Sosial/ Kementerian Sosial	
35	Indeks Zakat Daerah	Poin	0,60	0,63	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	Sekretariat Daerah	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	Persen	12,40	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	Badan Pusat Statistik (BPS)/Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD dan IUP 23a
2	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,68	3,72	3,76	3,79	3,82	3,84	3,87	Badan Riset dan Inovasi Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD
3	Indeks Inovasi Daerah	Poin	60,01	61,56	63,11	64,66	66,21	67,76	69,32	Kementerian Dalam Negeri/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	IUP 17b
4	Indeks Kapabilitas Inovasi	Poin	3,75	3,81	3,87	3,93	3,99	4,05	4,11	Badan Riset dan Inovasi Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	IUP 17a

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Persen	1,34	1,47	1,59	1,69	1,78	1,86	1,95	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Pariwisata	IUP 12a
6	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	734.317.718.800	801.247.938.300	916.019.427.929	1.058.503.775.620	1.189.129.441.486	1.337.065.691.014	1.500.123.758.357	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Pariwisata	IUP 13
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	200526	216569	234313	253526	275449	299695	326671	Dinas Pariwisata	IUP 12b
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	4,64	4,86	5,08	5,25	5,41	5,56	5,71	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sasaran Visi RPJPD dan IUP 11
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	Badan Pusat Statistik (BPS)/Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	IUP 14c
10	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	1,29	1,41	1,53	1,65	1,77	1,89	2,10	Badan Pusat Statistik (BPS)/Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	IUP 14b
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	91,30	93,10	94,01	94,94	95,87	96,81	97,05	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	IUP 14a-i
12	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	0,83	0,83	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IUP 14a-ii
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	Persen	48,79	51,78	52,20	52,59	52,96	53,30	53,62	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Penanaman	IUP 21

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14	Nilai Investasi Daerah	Rupiah	1.115.608.293.678	3.000.000.000.000	3.183.900.000.000	3.385.759.260.000	3.607.187.915.604	3.846.705.193.200	4.105.588.452.702	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IUP 35
15	Jumlah BUMD	Persen	1	1	1	1	1	2	2	Sekretariat Daerah	IUP 14d
16	Rasio Pajak Terhadap PDRB	Persen	0,81	0,81	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	Badan Pendapatan Daerah/ Badan Pusat Statistik (BPS)	IUP 31
17	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	n/a	3,32	3,36	3,40	3,44	3,49	3,51	Sekretariat Daerah	IUP 34
18	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	6,14	6,97	7,65	8,64	9,00	9,11	10,43	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Pertanian	IUP 18a
19	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	3,55	2,36	2,39	2,42	2,45	2,48	2,51	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Kelautan dan Perikanan	Sasaran Visi RPJPD
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	79,16	79,21	79,36	79,51	79,66	79,81	79,96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	71,38	73,58	75,78	77,97	80,17	82,37	84,56	Badan Pusat Statistik (BPS)/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	IUP 16
22	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan	Persen	95,52	95,71	95,90	96,09	96,29	96,48	96,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IUP 7

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Menengah dan Tinggi yang Bekerja										
23	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	45,97	46,32	46,67	47,02	47,36	47,71	48,06	Dinas Komunikasi dan Informatika	IUP 19
24	Indeks Infrastruktur	Pon	55,45	56,35	58,55	60,63	63,18	65,86	69,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
25	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	54,34	56,71	58,98	61,74	64,64	68,47	70,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
26	Rasio Konektivitas	Persen	33,33	40,00	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90	Dinas Perhubungan	
27	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	60,30	60,66	61,56	62,46	63,35	64,25	65,15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	IUP 23b
28	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Koefisien	1	1	0.86	0.74	0.64	0.55	0.48	Badan Pusat Statistik (BPS)/Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IUP 20
29	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-32,98	-32,64	-32,10	-31,56	-31,03	-30,52	-30,01	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IUP 22
30	Proporsi Fasilitas Pemerintah Daerah yang Menggunakan EBT	Persen	0,11	0.76	1.51	2.70	3.89	5.08	6.26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IUP 18b
31	Persentase Desa Mandiri	Persen	47,18	61,97	60,90	66,03	71,15	63,83	69,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IUP 23c
32	Tingkat Inflasi	Persen	2,47	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Badan Pusat Statistik (BPS)/ Sekretariat Daerah	IUP 32

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	7,66	7,83	7,97	8,11	8,16	8,18	8,19	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ Sekretariat Daerah	IUP 33a
34	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Milyar Rupiah	31999,45	33999,45	34999,45	35999,45	36999,45	37999,45	38999,45	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ Sekretariat Daerah	IUP 33b
35	Total Kredit/ PDRB	Persen	17,64	17,87	18,11	18,35	18,58	18,80	19,02	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ Sekretariat Daerah/ Badan Pusat Statistik (BPS)	IUP 33c
36	Indeks Desa	Poin	0,799	0,805	0,794	0,797	0,809	0,780	0,795	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IUP 36
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,28	78,13	78,76	79,38	80,00	80,62	81,23	Sekretariat Daerah	Sasaran Visi RPJPD
2	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,68	3,72	3,76	3,79	3,82	3,84	3,87	Badan Riset dan Inovasi Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran Visi RPJPD
3	Indeks Reformasi Hukum	Poin	96,54	96,69	96,84	96,99	97,14	97,29	97,43	Sekretariat Daerah	IUP 24
4	Indeks Pemerintah Digital (PemDi)	Poin	n/a	1,00	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	Dinas Komunikasi dan Informatika	IUP 25
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,74	3,76	3,78	3,80	3,82	3,84	3,86	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	IUP 26

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Birokrasi (KemenPAN-RB)/ Sekretariat Daerah	
6	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	73,01	73,56	74,10	74,61	75,10	75,57	76,02	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Inspektorat	IUP 27
7	Nilai Implementasi SAKIP Pemda	Poin	62,90	69,98	77,06	80,60	82,37	84,14	85,91	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)/ Sekretariat Daerah	
8	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Poin	3,4547	3.4551	3.4561	3.4571	3.4581	3.5000	3.7000	Kementerian Dalam Negeri/ Sekretariat Daerah	
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	75,60	75,70	76,48	76,64	76,77	76,85	76,97	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
10	Indeks Kriminalitas	Poin	47,89	42,66	41,75	40,88	40,04	39,23	38,45	Satuan Polisi Pamong Praja/ Badan Pusat Statistik (BPS)	IUP 28a
11	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	n/a	60	65	70	75	80	85	Satuan Polisi Pamong Praja/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	n/a	81,69	82,12	82,55	82,98	83,43	83,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1 : 207	1 : 193	1 : 181	1 : 171	1 : 163	1 : 155	1 : 148	Satuan Polisi Pamong Praja	IUP 29
14	Tingkat Partisipasi Pemilu	Persen	83,58	0	0	0	0	85.18	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IUP 30
15	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	n/a	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
16	Indeks Toleransi	Poin	3,70	3,73	3,75	3,77	3,79	3,81	3,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IUP 38
17	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Melalui Musyawarah Adat	Persen	100	100	100,	100,	100,	100,	100,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
18	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pendaftaran	Persen	4,23	7,04	9,86	12,68	15,49	18,31	21,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP 37a
19	Persentase Warisan Budaya Tak Benda Terhadap Total Pencatatan yang Telah Ditetapkan	Persen	2,21	3,60	4,93	6,21	7,43	8,61	9,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IUP 37b
INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a	Pendidikan										
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	87,60	90,57	93,12	95,67	98,21	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	99,44	99,52	99,60	99,68	99,77	99,85	99,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	29,97	34,94	39,92	44,90	49,88	54,85	59,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Persentase jamban dalam kondisi baik	Persen	25,26	27,40	27,46	27,52	27,58	27,64	27,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Persen	20,05	21,39	21,48	21,57	21,66	21,75	21,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
b	Kesehatan										
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	25	23	20	19	17	16	15	Dinas Kesehatan	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	24,90	20,00	17,00	14,00	12,00	11,00	10,00	Dinas Kesehatan	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	83,31	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	77,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	72,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	90,20	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	98,90	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	82,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	92,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	Persen	94,00	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
c	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>										
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	82,00	85,00	88,69	92,38	96,07	99,76	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	Persen	74,00	75,00	76,786	77,281	78,144	79,501	81,166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	78,82	80,59	81,32	82,05	82,78	83,51	84,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	Persen	87,94	88,18	88,93	89,68	90,43	91,18	91,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	3,29	4,06	6,25	9,19	13,64	14,26	15,84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Persen	3,03	3,44	3,56	3,69	3,83	3,99	4,15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
e	<i>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</i>										
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	76,00	86,00	87,50	88.24	89.47	94.74	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Persen	66,67	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
f	Sosial										
1	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Dinas Sosial	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a	Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	45,44	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
b	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	mendapatkan layanan komprehensif									Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
c	Pangan										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persen	70,00	100,80	110,00	119,00	120,00	124,00	125,00	Dinas Ketahanan Pangan	
d	Pertanahan										
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	52,97	55,75	58,72	61,69	64,67	67,64	70,61	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
e	Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Poin	63,47	71,90	72,11	72,32	72,53	72,74	72,95	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/ Kota	Persen	50,00	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00	65,00	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Jumlah sampah yang tertangani	Persen	17,29	18,39	19,49	20,59	21,69	22,79	23,89	Dinas Lingkungan Hidup	
f	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,47	99,55	99,63	99,71	99,79	99,87	99,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Persentase Akta Perkawinan yang	Persen	33,80	36,30	38,80	41,30	43,80	46,30	48,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	diterbitkan bagi yang melaporkan										
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	16,90	18,59	20,45	22,49	24,74	27,22	29,94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persen	98,36	99,50	99,58	99,66	99,74	99,82	99,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	48,76	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	3,23	10,00	13,23	16,46	19,69	22,92	26,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
g	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	28,85	31,34	7,95	8,42	7,77	8,11	8,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	89,44	90,85	91,67	95,51	98,08	98,40	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
h	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	2,31	2,31	2,30	2,30	2,29	2,29	2,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Persen	55,50	56,50	56,88	57,36	57,74	58,02	59,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
i	Perhubungan										
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	Persen	33,33	40,00	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90	Dinas Perhubungan	
2	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	0	0	9,09	18,18	27,27	36,36	45,45	Dinas Perhubungan	
j	Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	28,89	46,67	64,44	68,89	71,11	73,33	75,56	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat	Persen	28,89	46,67	64,44	68,89	71,11	73,33	75,56	Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah										
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	0	2,22	4,44	6,67	8,89	11,11	13,33	Dinas Komunikasi dan Informatika	
k	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	25,00	25,10	25,60	26,10	26,50	27,00	27,30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
l	Penanaman Modal										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	Persen	3,34	6,05	6,13	6,34	6,54	6,64	6,73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
m	Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat	Persen	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/ kota	Persen	3,70	4,00	4,22	4,44	4,63	5,05	5,20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	yang masuk Pelatda Provinsi										
n	Statistik										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,8	2,8	3	3	3,2	3,2	3,5	Dinas Komunikasi dan Informatika	
o	Persandian										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	13,51	13,62	16,34	19,06	21,79	24,51	27,23	Dinas Komunikasi dan Informatika	
p	Kebudayaan										
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	Persen	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,5	2,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
q	Perpustakaan										
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	68,55	69,35	70,10	70,80	71,45	72,15	73,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	38,01	42,01	46,21	50,61	55,21	60,01	65,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
r	Kearsipan										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Persen	25	30	40	50	60	65	70	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
3	Urusan Pilihan										
a	Kelautan dan Perikanan										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4084,18	3438,00	3224,59	3279,41	3335,16	3391,86	3449,52	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	46125,46	47800,51	28980,31	29281,71	29586,23	29893,93	30204,83	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	Angka Konsumsi ikan masyarakat	Kg/Kap/Th	40,10	41,00	41,71	42,54	43,40	44,50	45,10	Dinas Kelautan dan Perikanan	
b	Pariwisata										
1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	52,70	53,20	53,71	54,22	55,25	56,31	57,38	Dinas Pariwisata	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Persen	5,60	7,13	7,25	7,34	7,43	7,68	7,73	Dinas Pariwisata	
3	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23	Dinas Pariwisata	
c	Pertanian										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	3,00	3,05	3,07	3,09	3,10	3,12	3,15	Dinas Pertanian	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	5,00	5,02	5,05	5,07	5,09	5,10	5,12	Dinas Pertanian	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Persen	2	2,02	2,05	2,07	2,09	2,10	2,15	Dinas Pertanian	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian	
d	Perdagangan										
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan	Persen	80,00	81,00	82,00	85,00	87,00	90,00	91,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	perengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku										
e	Perindustrian										
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:										
	1.i Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten	Persen	4,00	4,08	4,08	4,18	4,28	4,38	4,48	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	1.ii Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten	Persen	5,00	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	1.iii Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten	Persen	0,5	0,50	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	1.iv Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten	Milyar Rupiah	0,000012500	0,000012500	0,000012500	0,000015625	0,000018750	0,000021875	0,000025000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	1.v Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Milyar Rupiah	0,10	0,10	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	Persen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor Industri yang telah dilakukan pengawasan										
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
a	Perencanaan										
1	Kesesuaian antara RKP dengan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
b	Keuangan										
1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	Persen	37,00	37,52	36,78	36,06	35,35	34,65	33,97	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12,13	15,60	15,63	15,76	15,87	16,11	16,41	Badan Pendapatan Daerah	
3	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	Persen	64,61	66,09	65,46	66,72	67,99	69,29	70,62	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	27,00	27,98	29,32	30,72	32,19	33,73	35,35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
c Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan											
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Poin	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
d Penelitian dan Pengembangan											
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Persen	50	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
e Pengawasan											
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Inspektorat	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Inspektorat	
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Inspektorat	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	91,77	91,92	92,06	92,21	92,36	92,50	92,65	Inspektorat	
f Pengadaan Barang											

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB DATA	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	3,04	3,10	3,50	3,70	3,80	4,00	4,50	Sekretariat Daerah	
2	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	3,113	3.118	3.120	3.125	3.130	3.140	3.150	Sekretariat Daerah	
3	Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	70,00	71,00	74,00	76,00	77,00	79,00	80,00	Sekretariat Daerah	
g	Hubungan dengan Perwakilan Daerah										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sekretariat DPRD	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Persen	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	Sekretariat DPRD	
h	Pelayanan Publik										
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Poin	91,96	91,98	92,00	92,05	92,08	92,10	92,10	Sekretariat Daerah	
5	Urusan Pemerintahan Umum										
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

4.2.3. Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan langkah strategis untuk memastikan terciptanya sinergi dan koherensi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Proses ini dilakukan dengan menyandingkan indikator-indikator makro dan sektoral guna menjamin bahwa target pembangunan di tingkat kabupaten berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian target regional maupun nasional dalam kerangka Transformasi Indonesia 2025-2029. Rincian penyelarasan indikator, baik dari sisi definisi maupun target capaian (baseline dan target akhir), disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJMN, RPJMD Provinsi NTB Dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

No.	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TRANSFORMASI SOSIAL									
KESEHATAN UNTUK SEMUA									
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	72,92	73,98	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	72,92	73,98	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	72,48	75,23
2	Kesehatan Ibu dan Anak:								
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	184	119	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	184	119	a. Jumlah Kematian Ibu (Orang)	23	16
	b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	21,7	16,9	b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	21,7	16,9	b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	20,00	11,00
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)								
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	85	85	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	85	85	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90,00	90,00
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	95	95	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	95	95	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90,00	90,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,03	99,13
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA									
5	Hasil Pembelajaran:								
	a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi			a. Persentase peserta didik kabupaten/ kota mencapai		

No.	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	~ Literasi membaca	10,00-10,00	30,00-40,00	~ Literasi membaca	10,00-10,00	30,00-40,00	~ Literasi membaca	49,79	59,03
	~ Numerasi	0,00-10,00	10,00-20,00	~ Numerasi	0,00-10,00	10,00-20,00	~ Numerasi	46,19	56,15
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	~ Literasi membaca	26,24-28,74	31,44-33,94	~ Literasi membaca	26,24-28,74	31,44-33,94	~ Literasi membaca	24,76	37,81
	~ Numerasi	22,68-25,18	26,68-29,18	~ Numerasi	22,68-25,18	26,68-29,18	~ Numerasi	21,64	35,31
	c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,6-8,63	9,03-9,04	c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,6-8,63	9,03-9,04	c. Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,78	7,31
	d. Harapan Lama Sekolah	14,1-14,13	14,35-14,37	d. Harapan Lama Sekolah	14,1-14,13	14,35-14,37	d. Harapan Lama Sekolah	14,00	14,29
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,02	10,02-10,47	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,02	10,02-10,47	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,16	7,87
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	74,63	78,78	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	74,63	78,78	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja (%)	95,71	96,48
PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF									
8	Tingkat Kemiskinan (%)	11,68-12,18	8,12-9,12	Tingkat Kemiskinan (%)	11,68-12,18	8,12-9,12	Tingkat Kemiskinan (%)	11,66	10,17
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	28,65	4,19	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	28,65	4,19	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	72,37	77,89
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,81	2,38
				a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari	0	6,7			

No.	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan					
				b. Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	3	11			
TRANSFORMASI EKONOMI									
PENGUASAAN IPTEK, PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI									
11	a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	7,66	7	a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	7,66	7	a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	4,86	5,56
	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,2	4,7	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,2	4,7			
12	Pengembangan Pariwisata								
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,03	2,5	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,03	2,5	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,47	1,86
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	211,6	303,1	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	211,6	303,1	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	216569	299695
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) *			Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	0,39	0,47	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rupiah)	801.247.938.300,00	1.337.065.691.014,00
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN								
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	2,15	2,39	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	12,77	13,11	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten	93,10	96,81
				b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	8,95	9	b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	0,83	0,93
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,37	2,5	c. Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,37	2,5	c. Rasio kewirausahaan daerah (%)	1,41	1,89
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,97	1,03	d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,97	1,03	d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,45	0,53
	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1,91	2,17	e. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1,91	2,17	e. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1	2
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik								
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,19-2,79	1,81-2,59	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,19-2,79	1,81-2,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,47	2,11

No.	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	29	35,2	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	29	35,2			
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,03-69,17	66,71-71,63	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,03-69,17	66,71-71,63	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	73,58	82,37
17	Tingkat Penguasaan IPTEK								
				Indeks Kapabilitas Inovasi	3,5	3,58	Indeks Kapabilitas Inovasi (Poin)	3,81	4,05
							Indeks Inovasi Daerah (Poin)	61,56	67,76
PENERAPAN EKONOMI HIJAU									
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau								
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,5	55,78	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,5	55,78	a. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	6,97	9,11
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	14,3	21,36	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	14,3	21,36	b. Proporsi Fasilitas Pemerintah Daerah yang Menggunakan EBT (%)	0,76	5,08
TRANSFORMASI DIGITAL									
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,8	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (Poin)	46,32	47,71
INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL									
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7,3	6,9	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7,3	6,9	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	1,00	0,55
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,9	37,15-37,74	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,9	37,15-37,74	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	51,78	53,30
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,53-24,55	26,12-26,95	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,53-24,55	26,12-26,95	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-32,64	-30,52
PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI									
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan								
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)			a. Indeks Kota Berkelanjutan	60	60,53	a. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	12,75	12,75
	b. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70,35	78,58	b. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70,35	78,58	b. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	60,30	64,25
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	41,14	48,97	c. Persentase Desa Mandiri (%)	41,14	48,97	c. Persentase Desa Mandiri (%)	61,97	63,83

No.	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TRANSFORMASI TATA KELOLA									
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF									
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	96,69	97,29
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,5	3,5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,5	3,5	Indeks Pemerintah Digital (PemDi)	1,00	1,70
26	Indeks Pelayanan Publik	4,03	4,17	Indeks Pelayanan Publik	4,03	4,17	Indeks Pelayanan Publik	3,76	3,84
27	Indeks Integritas Nasional	71,99	74,94	Indeks Integritas Nasional	71,99	74,94	Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten	73,56	75,57
MEWUJUDKAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH									
PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH YANG EFEKTIF									
28	Stabilitas Keamanan Daerah								
	a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	65	80	Indeks Kriminalitas	47,89	39,23
	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65	80	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	65	80			
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	72	75	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	72	75	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk	1 : 193	1 : 155
30	Indeks Demokrasi Indonesia	75,37-78,63	78,12-81,37	Indeks Demokrasi Indonesia	75,37-78,63	78,12-81,37	Tingkat Partisipasi Pemilu	0	85,18
STABILITAS EKONOMI MAKRO									
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)	1,44	1,47	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	0,81	0,97
32	Tingkat Inflasi (%)	3-3,7	1,4-3,3	Tingkat Inflasi (%)	3-3,7	1,4-3,3	Tingkat Inflasi (%)	2,00	2,00
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	24,62	26,15	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	24,62	26,15	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	7,83	8,18
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,15	0,16	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,15	0,16			
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	1.099.427,73	1.264.944,76	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	1.099.427,73	1.264.944,76	b. Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten/Kota Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan (Milyar Rupiah)	33999,45	37999,45
	d. Total Kredit/PDRB (%)	38	41,45	d. Total Kredit/PDRB (%)	38	41,45	c. Total Kredit/PDRB (%)	17,87	18,80

No.	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
34	Inklusi Keuangan (%)	88,7	91,46	Inklusi Keuangan (%)	88,7	91,46	Indeks Akses Keuangan daerah	3,32	3,49
PENINGKATAN KERJASAMA DAERAH DAN DAYA SAING DAERAH									
35	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (<i>Sister Province/Sister City</i>)			Jumlah Kerjasama Provinsi	10	13,5	Nilai Investasi Daerah (Triliyun Rupiah)	3.000	3.846
36	<i>Asia Power Indeks - Military Capability</i>			Indeks Ketahanan Nasional	3	3,07	Indeks Desa	0,805	0,780
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI									
BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU									
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,64-58,78	60,95-61,37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,64-58,78	60,95-61,37	a. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pendaftaran (%)	7,04	18,31
							b. Persentase Warisan Budaya Tak Benda Terhadap Total Pencatatan yang Telah Ditetapkan	3,60	8,61
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,68-71,7	73,07-73,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,68-71,7	73,07-73,2	Indeks Toleransi	3,73	3,81
KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF									
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,71	69,14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,71	69,14	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,23	77,15
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,517	0,472	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,517	0,472	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,485	0,249
LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS									
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,536	0,553	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,536	0,553	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun	0,01	6,13
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,19	77,03	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,19	77,03	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,90	72,74
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8	30	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8	30	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	3,50	7,38

No.	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah		
	~ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20	45	~ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20	45	~ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	25,00	37,00
	~ Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	64	100	~ Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	64	100	~ Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	9,17	13,31
BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN									
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan								
	a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi		
	~ Konsumsi listrik per kapita (kWh)	489	622	~ Konsumsi listrik per kapita (kWh)	489	622	~ Konsumsi listrik per kapita (kWh)	446	524
	~ Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	192.228	161.553	~ Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	192.228	161.553			
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1.978	1.601	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1.978	1.601	b. Indeks Ketahanan Pangan	80,00	82,00
	c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air		
	~ Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)			~ Kapasitas Air Baku	3,53	3,76	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	94,97	98,73
	~ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,83	49	~ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,83	49			
RESILIENSI TERHADAP DAN PERUBAHAN IKLIM									
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	135,41	131,13-126,95	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	135,41	131,13-126,95	Indeks Risiko Bencana (IRB)	126,36	123,97
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	3,28	5,02
	a. Kumulatif	11,53	15,09	a. Kumulatif	11,53	15,09			
	b. Tahunan	19,83	26,48	b. Tahunan	19,83	26,48			

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 5

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026-2030, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun program-program pembangunan Tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Lombok Tengah ini dan RKPD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku. Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik yang disertai dengan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dan peran serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah guna mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah **MASMIRAH**.

5.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan daerah. Dokumen ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga tahun 2030, yang memuat rencana kerja tahunan guna memastikan pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Setelah berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, diperlukan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2030-2034 sebagai panduan perencanaan pembangunan untuk lima tahun berikutnya. Dalam masa transisi menuju periode perencanaan baru, diperlukan pedoman khusus untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun 2030. Pedoman tersebut akan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045, serta memperhatikan arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah setelah berakhirnya periode RPJMD ini, serta sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- a. Permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga akhir periode RPJMD ini akan menjadi bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMD periode berikutnya. Hal ini bertujuan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang disusun dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.
- b. Program prioritas dan/atau proyek strategis daerah yang telah dijalankan dalam periode RPJMD ini, namun masih memiliki relevansi serta urgensi untuk dilanjutkan, direkomendasikan untuk tetap diakomodasi dalam RPJMD periode mendatang guna memastikan kelanjutan dan pencapaian hasil yang optimal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini, diperlukan konsistensi, kolaborasi, transparansi, inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Agar implementasi RPJMD dapat berjalan secara efektif dan terarah, maka pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- a. Bupati Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah mengenai RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan publik dalam pembangunan daerah.
- b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada RPJMD, sehingga setiap program kerja yang dijalankan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.
- c. Seluruh Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan wajib mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.
- d. Perangkat Daerah wajib mengimplementasikan program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme guna mencapai hasil yang optimal.
- e. Setiap Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan, sebagai pedoman pelaksanaan program kerja masing-masing perangkat daerah.
- f. Penyusunan RPJMD telah melalui tahapan konsultasi publik, sehingga program-program yang tercantum di dalamnya telah mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh Perangkat Daerah guna memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
- h. Bapperida Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat diukur efektivitas dan dampaknya secara berkala.
- i. DPRD Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewajiban untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan oleh Bupati dalam penyusunan RAPBD serta dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan anggaran dengan RPJMD, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD.
- j. Perubahan terhadap RPJMD yang tidak bersifat fundamental dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati, meliputi perubahan target kinerja, perubahan nomenklatur perangkat daerah, serta aspek lainnya yang tidak mengubah substansi utama dari rencana pembangunan daerah.
- k. Pemerintah Daerah akan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk pembangunan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan melalui peran multi-aktor berbasis model

pentahelix yang mencakup lima unsur utama pembangunan daerah, yaitu: Pemerintah (Government), Dunia Usaha (Business Sector), Masyarakat/Komunitas (Community), Akademisi (Academia) dan Media.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan arah pembangunan yang telah dirancang. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

5.3 Penutup

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga kerangka program dan pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Dengan semangat kolaborasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh agenda pembangunan dalam dokumen ini secara konsisten, adaptif, dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdayasaing, Sejahtera dan Harmonis.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 akan dijabarkan secara teknis dan operasional dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. RKPD mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan tahunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif, terukur, dan mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD, guna memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan terarah.

Dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi rujukan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, tetapi juga menjadi landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelaraskan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Konsistensi antara RPJMD dan RKPD menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, agar seluruh agenda pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi dapat direalisasikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

halaman ini sengaja dikosongkan

LOMBOK TENGAH



2025